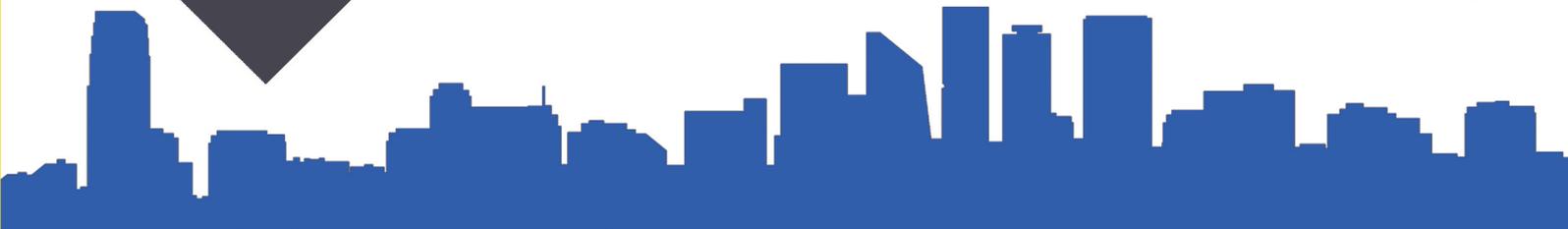




BUKU INDUK STATISTIK

2016

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (PUSDATIN)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Buku Induk Statistik ini dapat diselesaikan guna pengembalian tugas pembinaan, pengembangan, pengelolaan, penyediaan data dan teknologi informasi, serta penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung manajemen kementerian dan dalam menyelenggarakan fungsinya.

Adapun sumber data dalam penyusunan Buku Induk Statistik berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang penyajian datanya dalam satuan tingkat nasional dengan rincian agregat menurut provinsi, analisa dan korelasi data.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik data dan informasi maupun saran dan arahan yang positif dalam penyusunan buku ini. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya yang perlu dilengkapi maupun disempurnakan. Oleh karena itu kritik, saran dan usulan perbaikan dari semua pihak/pembaca senantiasa diharapkan untuk penyempurnaannya.

Jakarta, 7 Desember 2016

Kepala
Pusat Data dan Teknologi Informasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
BAB II GAMBARAN UMUM INDONESIA	4
A. Geografi Wilayah.....	4
B. Administrasi Wilayah	8
C. Demografi Wilayah	13
D. Ekonomi Wilayah.....	20
E. Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	31
BAB III STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	44
A. Sumber Air	44
A.1. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai.....	44
A.2. Danau/Situ	50
B. Bangunan Air.....	54
B.1. Bendungan/Waduk.....	54

	B.2. Bendung.....	58
	B.3. Embung dan Embung Potensi.....	60
	C. Daerah Irigasi.....	63
	D. Analisis Statistik Infrastruktur Sumber Daya Air.....	66
	E. Korelasi dan Indeks.....	74
BAB IV	STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA.....	77
	A. Jalan Nasional.....	79
	B. Jalan Tol.....	88
	C. Jembatan Nasional.....	93
	D. Jalan Daerah.....	103
	E. Analisis Statistik Infrastruktur Jalan.....	111
	F. Korelasi.....	128
BAB V	STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA.....	138
	A. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.....	138
	B. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).....	154
	C. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.....	158
	D. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.....	160
	E. Pos Lintas Batas Negara (PLBN).....	163
	F. Analisis Statistik Infrastruktur Cipta Karya.....	165
	G. Korelasi dan Indeks.....	171
BAB VI	STATISTIK INFRASTRUKTUR PERUMAHAN.....	174
	A. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).....	175

B. Rumah Khusus.....	183
C. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	188
D. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).....	192
E. Fasilitas Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP).....	199
F. Korelasi	211
BAB VII STATISTIK SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PUPR DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	217
A. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PUPR	217
B. Pengarusutamaan Gender	225
BAB VIII PENUTUP.....	232

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2014.....	5
Tabel 2.2.	Jumlah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2011-2013.....	9
Tabel 2.3.	Jumlah Kecamatan dan Desa di Indonesia Tahun 2011-2013.....	10
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 dan 2015	14
Tabel 2.5.	Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia menurut Provinsi	15
Tabel 2.6.	Persentase dan Kepadatan Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi	19
Tabel 2.7.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014-2016	21
Tabel 2.8.	PDB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014-2016	23
Tabel 2.9.	Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014-2016	24
Tabel 2.10.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Provinsi Tahun 2012-2015	26
Tabel 2.11.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Provinsi Tahun 2012-2015	28
Tabel 2.12.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Provinsi Tahun 2012-2015.....	29
Tabel 2.13.	APBN Kementerian PUPR Tahun 2011-2015.....	31
Tabel 2.14.	APBN Kementerian PUPR Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015.....	32

Tabel 2.15. Alokasi APBN-P Kementerian PUPR Berdasarkan Unit Organisasi Tahun 2015	33
Tabel 2.16. Alokasi APBN Kementerian PUPR Berdasarkan Provinsi Tahun 2015	35
Tabel 2.17. Alokasi APBN Kementerian PUPR Bidang Sumber Daya Air menurut Provinsi Tahun 2015.....	36
Tabel 2.18. Alokasi APBN Kementerian PUPR Bidang Bina Marga menurut Provinsi Tahun 2015.....	38
Tabel 2.19. Alokasi APBN Kementerian PUPR Bidang Cipta Karya menurut Provinsi Tahun 2015.....	39
Tabel 2.20. Alokasi APBN Kementerian PUPR Bidang Perumahan menurut Provinsi Tahun 2015.....	41
Tabel 2.21. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman menurut Provinsi Tahun 2015	42
Tabel 3.1. Wilayah Sungai Lintas Negara	45
Tabel 3.2. Wilayah Sungai Lintas Provinsi	45
Tabel 3.3. Wilayah Sungai Strategis Nasional.....	46
Tabel 3.4. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota.....	48
Tabel 3.5. Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota	49
Tabel 3.6. Danau/Situ di Indonesia menurut Provinsi	51
Tabel 3.7. Bendungan di Indonesia menurut Provinsi	56
Tabel 3.8. Jumlah Bendung di Indonesia menurut Provinsi	58
Tabel 3.9. Jumlah Embung di Indonesia menurut Provinsi	60
Tabel 3.10. Jumlah Embung Potensi di Indonesia menurut Provinsi	61

Tabel 3.11. Luas Daerah Irigasi dan Produksi Padi menurut Pulau Besar Tahun 2014	67
Tabel 3.12. Luas Daerah Irigasi menurut Kewenangannya dan menurut Provinsi... 68	
Tabel 3.13. Luas Daerah Irigasi dan Produksi Padi menurut Provinsi Tahun 2014 . 69	
Tabel 4.1. Panjang Jalan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Status Februari 2016.....	80
Tabel 4.2. Persentase Jalan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Status Februari 2016.....	81
Tabel 4.3. Panjang dan Persentase Jalan Nasional menurut Provinsi dan Kemantapan Jalan Status Februari 2016.....	84
Tabel 4.4. Capaian Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2011-2015.....	86
Tabel 4.5. Progres Pembangunan Jalan Tol di Indonesia	89
Tabel 4.6. Jalan Tol Beroperasi di Indonesia.....	89
Tabel 4.7. Jalan Tol Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).....	91
Tabel 4.8. Jalan Tol dalam Proses Tender	93
Tabel 4.9. Jalan Tol dalam Persiapan Tender	93
Tabel 4.10. Jumlah Jembatan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Tahun 2015	94
Tabel 4.11. Persentase Jumlah Jembatan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Tahun 2015.....	95
Tabel 4.12. Panjang Jembatan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Tahun 2015	97
Tabel 4.13. Persentase Panjang Jembatan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Tahun 2015.....	98

Tabel 4.14.	Jumlah dan Panjang Jembatan Nasional menurut Provinsi dan Kemantapan Tahun 2015	102
Tabel 4.15.	Jalan Provinsi Tahun 2014	104
Tabel 4.16.	Jalan Kabupaten Tahun 2014.....	107
Tabel 4.17.	Jalan Kota Tahun 2014	109
Tabel 4.18.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Pulau Besar di Indonesia.....	111
Tabel 4.19.	Panjang Jalan menurut Pulau Besar dan Kewenangannya Tahun 2014	114
Tabel 4.20.	Persentase Luas Wilayah, Penduduk, Kendaraan Bermotor dan Panjang Jalan menurut Pulau Besar	114
Tabel 4.21.	Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor.....	116
Tabel 4.22.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Provinsi Tahun 2013.....	118
Tabel 4.23.	Panjang Jalan menurut Provinsi dan Kewenangannya Tahun 2014 ...	119
Tabel 4.24.	Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor.....	120
Tabel 4.25.	Panjang Jalan Nasional dalam Kondisi Mantap dan PDRB Tahun 2015	125
Tabel 4.26.	Korelasi Antara Panjang Jalan Mantap dengan PDRB Tahun 2015 ...	127
Tabel 5.1.	Data Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Perkotaan.....	139
Tabel 5.2.	Data Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Perkotaan.....	140

Tabel 5.3.	Data Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Perdesaan	143
Tabel 5.4.	Jumlah KK Penerima Manfaat SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.....	146
Tabel 5.5.	Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2010-2014	149
Tabel 5.6.	Kinerja PDAM di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2014.....	150
Tabel 5.7.	Kapasitas dan Layanan PDAM di Indonesia menurut Provinsi	152
Tabel 5.8.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat di Indonesia menurut Provinsi	155
Tabel 5.9.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kawasan di Indonesia menurut Provinsi	155
Tabel 5.10.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terpusat di Indonesia menurut Provinsi	157
Tabel 5.11.	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Indonesia menurut Provinsi....	159
Tabel 5.12.	Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2015.....	162
Tabel 5.13.	Lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Tahun 2015	165
Tabel 5.14.	Layanan PDAM di Indonesia	166
Tabel 6.1.	Jumlah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun Tahun 2010-2014	176
Tabel 6.2.	Jumlah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun menurut Kelompok Penerima Tahun 2010-2014 ..	179
Tabel 6.3.	Jumlah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun menurut Provinsi Tahun 2010-2014.....	181
Tabel 6.4.	Jumlah Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2010-2014.....	183
Tabel 6.5.	Jumlah Pembangunan Rumah Khusus menurut Peruntukannya Tahun 2010-2013 (unit).....	184

Tabel 6.6.	Jumlah Pembangunan Rumah Khusus menurut Peruntukannya Tahun 2014 (unit)	185
Tabel 6.7.	Jumlah Pembangunan Rumah Khusus menurut Provinsi Tahun 2010-2014 (unit)	186
Tabel 6.8.	Indeks Pembangunan Rumah Khusus menurut Provinsi Tahun 2014	187
Tabel 6.9.	Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan menurut Provinsi Tahun 2010-2014 (unit)	188
Tabel 6.10.	Indeks Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan menurut Provinsi Tahun 2014.....	190
Tabel 6.11.	Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2010-2013	193
Tabel 6.12.	Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Provinsi Tahun 2010-2013 (unit).....	194
Tabel 6.13.	Indeks Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Provinsi Tahun 2013.....	196
Tabel 6.14.	Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Pulau Besar Tahun 2010-2013	198
Tabel 6.15.	Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) menurut Provinsi (unit) Tahun 2010-2014	201
Tabel 6.16.	Indeks Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) menurut Provinsi Tahun 2014	202
Tabel 6.17.	Jumlah Rumah Tangga dan Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan menurut Provinsi Tahun 2014	204
Tabel 6.18.	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan menurut Provinsi Tahun 2014.....	206

Tabel 6.19.	Indeks Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan menurut Provinsi Tahun 2014.....	208
Tabel 6.20.	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah menurut Pulau Besar Tahun 2014.....	209
Tabel 6.21.	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan Penyaluran FLPP menurut Pulau Besar Tahun 2013.....	210
Tabel 7.1.	Perkembangan Jumlah dan Persentase SDM Kementerian PUPR Tahun 2010-2015	218
Tabel 7.2.	Jumlah SDM Kementerian PUPR Tahun 2015	219
Tabel 7.3.	Persentase SDM Kementerian PUPR Tahun 2015.....	220
Tabel 7.4.	Jumlah SDM Kementerian PUPR menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015	222
Tabel 7.5.	Persentase SDM Kementerian PUPR menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015	224
Tabel 7.6.	Jumlah Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	225

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Luas Wilayah 5 Pulau Terbesar di Indoensia	4
Gambar 2.2. Luas Wilayah Berdasarkan Kepulauan Terbesar Tahun 2014.....	7
Gambar 2.3. Jumlah Kota di Indonesia Tahun 2011-2014	12
Gambar 2.4. Jumlah Kabupaten di Indonesia Tahun 2011-2014	12
Gambar 2.5. Jumlah Kecamatan di Indonesia Tahun 2011-2014.....	12
Gambar 2.6. Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2011-2014	12
Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Berdasarkan Kepulauan Terbesar Pada Tahun 2010-2014.....	17
Gambar 2.8. Persentase Sebaran Penduduk Indonesia Berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2013.....	18
Gambar 2.9. Persentase PDB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016.....	22
Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2016 (Setiap Triwulan)	25
Gambar 2.11. Presentase Alokasi APBN-P Kementerian PUPR Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015.....	33
Gambar 2.12. Presentase Alokasi APBN-P Kementerian PUPR Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015.....	34
Gambar 3.1. Jumlah Danau/Situ di Indonesia menurut Provinsi	52
Gambar 3.2. Presentase Luas Danau di Indonesia menurut Provinsi	53
Gambar 3.3. Presentase Volume Tampung Danau/Situ di Indonesia menurut provinsi	53
Gambar 3.4. Jumlah Embung Potensi di Indonesia menurut Provinsi	63

Gambar 3.5. Persentase Luas Daerah Irigasi di Indonesia menurut Kewenangan..	66
Gambar 3.6. Luas Daerah Irigasi (ha).....	71
Gambar 3.7. Produksi Padi Tahun 2014 (ton).....	72
Gambar 3.8. Rasio Luas Daerah Irigasi dengan Produksi Padi Tahun 2014 (ton/ha).....	73
Gambar 3.9. Hubungan antara Manfaat Irigasi dengan PDRB tahun 2015	74
Gambar 3.10. Hubungan antara Manfaat Irigasi dengan Volume Danau/Situ di Indonesia setiap provinsi	75
Gambar 4.1. Panjang Jalan Nasional menurut Kondisi Umum Jalan Status Februari 2016.....	83
Gambar 4.2. Persentase Jalan Nasional menurut Kondisi Umum Jalan Status Februari 2016.....	83
Gambar 4.3. Capaian Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2011-2015.....	87
Gambar 4.4. Persentase Panjang Jalan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2011-2015.....	87
Gambar 4.5. Jumlah Jembatan Nasional menurut Kondisi Tahun 2015.....	100
Gambar 4.6. PersentaseJumlah Jembatan Nasional menurut Kondisi Tahun 2015.....	100
Gambar 4.7. Panjang Jembatan Nasional menurut Kondisi Tahun 2015	101
Gambar 4.8. PersentasePanjang Jembatan Nasional menurut Kondisi Tahun 2015.....	101
Gambar 4.9. Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2014	106
Gambar 4.10. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Tahun 2014....	108
Gambar 4.11. Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap Tahun 2014.....	110

Gambar 4.12. Sebaran Penduduk dan Luas Wilayah Indonesia menurut Pulau Besar (%)	112
Gambar 4.13. Persentase Luas Wilayah, Penduduk, Kendaraan Bermotor dan Panjang Jalan menurut Pulau Besar	115
Gambar 4.14. Rasio Panjang Jalan Dengan Luas Wilayah menurut Pulau Besar ...	116
Gambar 4.15. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk menurut Pulau Besar	117
Gambar 4.16. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Pulau Besar.....	117
Gambar 4.17. Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah.....	122
Gambar 4.18. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk.....	123
Gambar 4.19. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor.....	124
Gambar 4.20. Hubungan antara Rasio Penduduk dengan Data Kemiskinan	128
Gambar 4.21. Hubungan antara Rasio Luas Wilayah dengan Data Kemiskinan	129
Gambar 4.22. Hubungan antara Kendaraan Bermotor dengan Data Kemiskinan ...	129
Gambar 4.23. Hubungan antara Luas Wilayah dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12.....	130
Gambar 4.24. Hubungan antara Penduduk dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12.....	131
Gambar 4.25. Hubungan antara Kendaraan Bermotor dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12.....	131
Gambar 4.26. Hubungan antara Luas Wilayah dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15.....	132
Gambar 4.27. Hubungan antara Penduduk dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15.....	133

Gambar 4.28. Hubungan antara Kendaraan Bermotor dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15.....	133
Gambar 4.29. Hubungan antara Luas Wilayah dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18.....	134
Gambar 4.30. Hubungan antara Penduduk dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18.....	135
Gambar 4.31. Hubungan antara Kendaraan Bermotor dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18.....	135
Gambar 4.32. Hubungan antara Luas Wilayah dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 19-24.....	136
Gambar 4.33. Hubungan antara Penduduk dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 19-24.....	137
Gambar 4.34. Hubungan antara Kendaraan Bermotor dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 19-24.....	137
Gambar 5.1. Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2010-2014.....	149
Gambar 5.2. Persentase PDAM Dalam Kondisi Sehat Tahun 2010-2014.....	150
Gambar 5.3. Persentase Evaluasi Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2014.....	152
Gambar 5.4. Cakupan Pelayanan PDAM menurut Provinsi di Indonesia (%).....	168
Gambar 5.5. Rata-Rata Tingkat Kehilangan Air PDAM menurut Provinsi di Indonesia (%).....	169
Gambar 5.6. Rasio Kapasitas Produksi terhadap Jumlah Penduduk Terlayani (ltr/dtk per 1000 pelanggan).....	170
Gambar 5.7. Hubungan antara kapasitas dan layanan PDAM di Indonesia dengan angka harapan hidup.....	171

Gambar 5.8. Hubungan antara kapasitas dan layanan PDAM di Indonesia dengan Tingkat Gizi Buruk pada Balita	172
Gambar 6.1. Jumlah Tower Block Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun Tahun 2010-2014.....	177
Gambar 6.2. Jumlah Unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun Tahun 2010-2014.....	177
Gambar 6.3. Persentase Unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun Tahun 2010-2014.....	180
Gambar 6.4. Jumlah Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2010-2014 (unit)	184
Gambar 6.5. Persentase Unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun menurut Peruntukannya Tahun 2010-2014.....	185
Gambar 6.6. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan (unit) Tahun 2010-2014	190
Gambar 6.7. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2010-2013 (unit).....	193
Gambar 6.8. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Pulau Besar Tahun 2010-2013.....	198
Gambar 6.9. Persentase Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Pulau Besar Tahun 2010-2013.....	199
Gambar 6.10. Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) (unit) Tahun 2010-2014	200
Gambar 6.11. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Tahun 2014.....	206
Gambar 6.12. Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah menurut Pulau Besar Tahun 2014.....	210

Gambar 6.13. Persentase Penyaluran FLPP menurut Pulau Besar Tahun 2013	211
Gambar 6.14. Hubungan Penyaluran FLPP (unit) dan Jumlah Desa atau Kelurahan yang Tidak Terdapat Pemukiman Kumuh (Desa/Kelurahan) Tahun 2014	212
Gambar 6.15. Hubungan Penyaluran FLPP (unit) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2013.....	212
Gambar 6.16. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Rumah Sendiri (Ribuan RT) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2013.....	213
Gambar 6.17. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Rumah Sendiri (Ribuan RT) dan Jumlah Desa atau Kelurahan yang Tidak Terdapat Pemukiman Kumuh (Desa/Kelurahan) Tahun 2014	213
Gambar 6.18. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Kontrak atau Sewa (Ribuan RT) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2013.....	214
Gambar 6.19. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Kontrak atau Sewa (Ribuan RT) dan Jumlah Desa atau Kelurahan yang Tidak Terdapat Pemukiman Kumuh (Desa/Kelurahan) Tahun 2014	215
Gambar 6.20. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Lainnya (Ribuan RT) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2013.....	216
Gambar 6.21. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Lainnya (Ribuan RT) dan Jumlah Desa atau Kelurahan yang Tidak Terdapat Pemukiman Kumuh (Desa/Kelurahan) Tahun 2014	216

Gambar 7.1. Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PUPR Tahun 2010-2015.....	218
Gambar 7.2. Jumlah SDM Unit Organisasi Kementerian PUPR Tahun 2015.....	220
Gambar 7.3. Persentase SDM Kementerian PUPR Tahun 2015	221
Gambar 7.4. Jumlah SDM Kementerian PUPR menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015	223
Gambar 7.5. Persentase SDM Kementerian PUPR menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015	225
Gambar 7.6. Jumlah Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	226
Gambar 7.7. Persentase Penduduk Indonesia menurut Jenis Kelamin Tahun 2015.....	227
Gambar 7.8. Persentase SDM Kementerian PUPR Tahun 2010-2015	229
Gambar 7.9. Jumlah SDM Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2015.....	230
Gambar 7.10. Persentase SDM Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2015.....	230
Gambar 7.11. Jumlah SDM Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Golongan Kepangkatan Tahun 2015.....	231
Gambar 7.12. Persentase SDM Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Golongan Kepangkatan Tahun 2015.....	231

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berwawasan lingkungan demi peningkatan kesejahteraan rakyat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, serta memberikan dukungan pada sektor-sektor lain secara maksimal. Aktivitas pembangunan yang ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah bagian dari pendukung program sektor lain. Dalam proses pembangunan bidang PUPR tersebut perlu adanya informasi literal dan kestatistikan untuk mendukung perencanaan umum program, desain, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, serta pemanfaatan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) yang salah satunya sebagai unit pengelola serta penyedia data, baik literal maupun spasial, maka Unit Kerja Eselon III di Pusdatin yaitu Balai Informasi Literal mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan informasi literal dan kestatistikan di bidang PUPR menyediakan data infrastruktur bidang PUPR beserta pendukungnya yang dituangkan dalam Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR). BIS-PUPR diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan pembangunan ke-PUPR-an secara menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik dan program kegiatan yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana yang telah ada dapat dilaksanakan. Dengan adanya dukungan data terpilah, pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana/infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan per wilayah dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh masyarakat secara merata dan adil.

Sebagai salah satu instansi yang menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana

sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakaryaan, serta permukiman. Keberadaan infrastruktur tersebut telah dirasakan manfaatnya dalam melayani kebutuhan masyarakat, meskipun masih ada beberapa infrastruktur yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan kapasitas, dan ada pula yang masih dalam tahap pelaksanaan pembangunan.

Infrastruktur yang dibangun sangat beragam dari skala besar, menengah hingga kecil, dan keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu inventarisasi data infrastruktur PUPR menjadi suatu hal yang amat penting. Dari data tersebut akan dapat diperoleh suatu informasi dan gambaran mengenai karakteristik dan keberadaan infrastruktur PUPR.

Keberadaan infrastruktur mutlak diperlukan oleh setiap negara. Infrastruktur juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan indeks persaingan global suatu negara. Pemerintah menyadari pentingnya penyediaan infrastruktur yang baik karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan mendorong berkembangnya sektor ekonomi lain seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, pertambangan, industri, dan lain-lain. Melalui penyediaan infrastruktur yang handal dan memadai diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

B. Tujuan

Penyusunan Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR) ini bertujuan untuk menyajikan data dan informasi statistik bidang PUPR serta informasi sektor-sektor terkait lainnya. Selain itu, BIS-PUPR juga untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pimpinan dari unit-unit organisasi dan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR dan instansi lainnya, serta untuk masyarakat umum pengguna informasi.

BIS-PUPR secara garis besar memberikan gambaran umum tentang hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang dilihat melalui data agregat menurut provinsi.

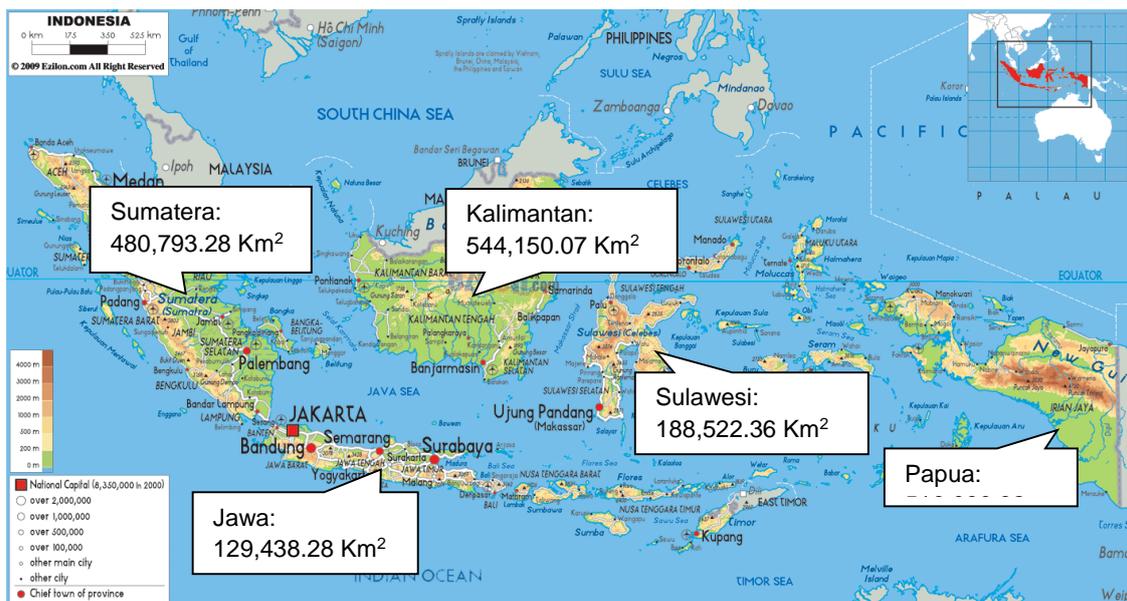
Data tersebut terdiri dari data bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan data bidang/sektor terkait lainnya, serta pada beberapa data yang sesuai sedapat mungkin terpilah menurut gender. Selain itu di dalam BIS-PUPR disajikan analisis statistik sederhana bidang PUPR yang dihubungkan dengan data bidang/sektor terkait.

BAB II

GAMBARAN UMUM INDONESIA

A. Geografi Wilayah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak diantara benua Asia dan Australia. Republik Indonesia atau Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia ini memiliki pulau sebanyak 17.504 baik bernama maupun yang belum bernama. Indonesia yang memiliki luas wilayah 1.9 juta km² terdiri dari 5 pulau besar dengan masing-masing luas wilayah tiap pulau dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Luas Wilayah 5 Pulau Terbesar di Indoensia

Indonesia yang memiliki letak geografis berada di antara 6° Lintang Utara-11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur-141° Bujur Timur, membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki letak geografis yang startegis dan hal ini berpengaruh besar terhadap kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakatnya. Begitu pula dengan

sejarah bangsa Indonesia di masa lalu yang banyak dipengaruhi oleh bangsa lain, hal itu dikarenakan Indonesia sering disinggahi oleh penjelajah asing.

Jika dibentangkan wilayah Indonesia dari Samudera Hindia hingga Samudera Pasifik, Indonesia berada di sepanjang 3.977 mil antara kedua samudera. Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan terluar dengan menggunakan teritorial laut 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif 200 mil laut. Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik dan Sirkum Lingkaran Australia merupakan 3 sirkum gunung api yang terletak di Indonesia. Karena faktor geografisnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki hasil alam yang sangat besar dan hal itu juga membuat Indonesia menjadi rawan akan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan lain-lain.

Tabel 2.1. Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Ibu Kota	Luas (1)	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau (2)
Aceh	Banda Aceh	57.956,00	3,03	663
Sumatera Utara	Medan	72.981,23	3,82	419
Sumatera Barat	Padang	42.012,89	2,20	391
Riau	Pekanbaru	87.023,66	4,55	139
Kep. Riau	Tanjung Pinang	8.201,72	0,43	2,408
Jambi	Jambi	50.058,16	2,62	19
Sumatera Selatan	Palembang	91.592,43	4,79	53
Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.424,06	0,86	950
Bengkulu	Bengkulu	19.919,33	1,04	47
Lampung	Bandar Lampung	34.623,80	1,81	188
DKI Jakarta	Jakarta	664,01	0,03	218
Jawa Barat	Bandung	35.377,76	1,85	131
Banten	Serang	9.662,92	0,51	131

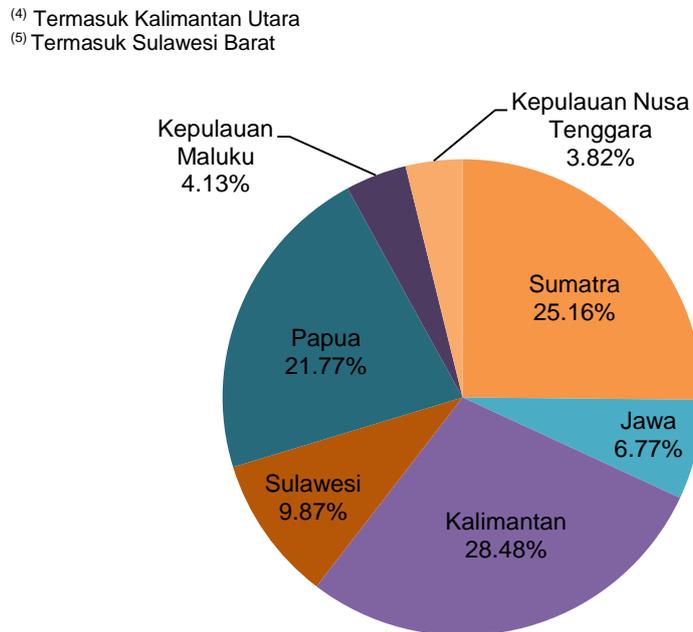
Provinsi	Ibu Kota	Luas (1)	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau (2)
Jawa Tengah	Semarang	32.800,69	1,72	296
DI Yogyakarta	Yogyakarta	3.133,15	0,16	23
Jawa Timur	Surabaya	47.799,75	2,50	287
Bali	Denpasar	5.780,06	0,30	85
Nusa Tenggara Barat	Mataram	18.572,32	0,97	864
Nusa Tenggara Timur	Kupang	48.718,10	2,55	1.192
Kalimantan Barat	Pontianak	147.307,00	7,71	339
Kalimantan Tengah	Palangkaraya	153.564.,50	8,04	32
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	38.744,23	2,03	320
Kalimantan Timur	Samarinda	129.066,64 ⁽³⁾	6,75	370 ⁽⁴⁾
Kalimantan Utara	Bulungan	75.467,70 ⁽³⁾	3,95	–
Sulawesi Utara	Manado	13.851,64	0,72	668
Gorontalo	Gorontalo	11.257,07	0,59	136
Sulawesi Tengah	Palu	61.841,29	3,24	750
Sulawesi Selatan	Makassar	46.717,48	2,44	295 ⁽⁵⁾
Sulawesi Barat	Mamuju	16.787,18	0,88	–
Sulawesi Tenggara	Kendari	38.067,70	1,99	651
Maluku	Ambon	46.914,03	2,46	1.422
Maluku Utara	Ternate	31.982,50	1,67	1.474
Papua	Jayapura	319.036,05	16,70	598
Papua Barat	Manokwari	97.024,27	5,08	1.945
Indonesia	Jakarta	1.910.931,32	100	17.504

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia

Catatan : ⁽¹⁾ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011

⁽²⁾ Berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2004

⁽³⁾ Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012



Gambar 2.2. Luas Wilayah Berdasarkan Kepulauan Terbesar Tahun 2014

Pada gambar 2.2 dapat dilihat bahwa Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar yang ada di Indonesia. Kalimantan yang memiliki presentase luas wilayah sebesar 28.48% atau 544,150.07 Km² merupakan pulau terbesar ketiga yang ada di dunia ini. Dimana, Greenland merupakan pulau terbesar pertama dan Nugini (Papua dan Papua Nugini) merupakan pulau terbesar kedua.

Selain dilihat berdasarkan kepulauan, dapat dilihat pula luas wilayah berdasarkan provinsi pada tahun 2014 pada tabel 2.1. Pada tabel terlihat bahwa Papua merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah provinsi terluas dari pada provinsi lainnya, dengan luas wilayah yaitu 16,7% atau 319.036,05 km². Pada tabel 2.1, dapat dilihat pula bahwa Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki jumlah pulau terbanyak dibanding provinsi lain dengan jumlah pulau yaitu 2.408 dan di urutan kedua ada Papua Barat yang memiliki jumlah pulau yaitu 1.945.

B. Administrasi Wilayah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau bisa disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia memiliki batas-batas NKRI untuk setiap arah penjuru mata angin yaitu sebagai berikut:

Utara : Negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan

Selatan : Negara Australia, Timor Leste dan Samudera Hindia

Barat : Samudera Hindia

Timur : Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik

Indonesia memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dipilih secara langsung melalui pemilihan umum (Pemilu). Setiap provinsi yang ada di Indonesia dipimpin oleh seorang Gubernur dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Sedangkan untuk kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati dan memiliki DPRD Kabupaten. Sementara kota dipimpin oleh seorang walikota dan memiliki DPRD Kota. Namun di DKI Jakarta tidak terdapat DPRD Kabupaten ataupun Kota. Hal itu dikarena kabupaten dan kota di DKI Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan daerah administratif yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat tersendiri.

Indonesia secara de facto terdiri dari 34 provinsi setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012. Hal ini juga menjadikan Kalimantan Utara sebagai provinsi yang termuda di Indonesia. Secara de facto, terdapat 5 provinsi yang memiliki status berbeda dibandingkan dengan provinsi yang lain. Provinsi tersebut yaitu Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua, dan DKI Jakarta. Kelima provinsi tersebut memiliki hak istimewa legislatur yang lebih tinggi dan tingkat otonominya lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Provinsi Aceh yang memiliki hak istimewa tersebut telah membentuk sistem legal sendiri pada tahun 2003 yaitu menetapkan hukum syariah. Selain Aceh, Yogyakarta

mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama revolusi. Provinsi Papua yang sebelumnya disebut Irian Jaya mendapatkan status otonomi khusus pada tahun 2001.

Pada tahun 2014, Indonesia yang memiliki 34 provinsi ini terdiri atas 416 kabupaten dan 98 kota. Pada kabupaten dan kota tersebut, tercatat bahwa terdapat 7.204 kecamatan dan desa yang merupakan satuan administrasi terkecil yaitu sebanyak 81.626 desa. Hal itu dapat dilihat pada tabel 2.2. dan 2.3. berikut:

Tabel 2.2. Jumlah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2011-2013

Provinsi	Jumlah Kota				Jumlah Kabupaten			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Aceh	5	5	5	5	18	18	18	18
Sumatera Utara	8	8	8	8	25	25	25	25
Sumatera Barat	7	7	7	7	12	12	12	12
Riau	2	2	2	2	10	10	10	10
Jambi	2	2	2	2	9	9	9	9
Suamtera Selatan	4	4	4	4	11	11	13	13
Bengkulu	1	1	1	1	9	9	9	9
Lampung	2	2	2	2	12	12	13	13
Kep. Bangka	1	1	1	1	6	6	6	6
Kep. Riau	2	2	2	2	5	5	5	5
DKI Jakarta	5	5	5	5	1	1	1	1
Jawa Barat	9	9	9	9	17	17	18	18
Jawa Tengah	6	6	6	6	29	29	29	29
DI Yogyakarta	1	1	1	1	4	4	4	4
Jawa Timur	9	9	9	9	29	29	29	29
Banten	4	4	4	4	4	4	4	4
Bali	1	1	1	1	8	8	8	8
Nusa Tenggara Timur	2	2	2	2	8	8	8	8
Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	20	20	21	21

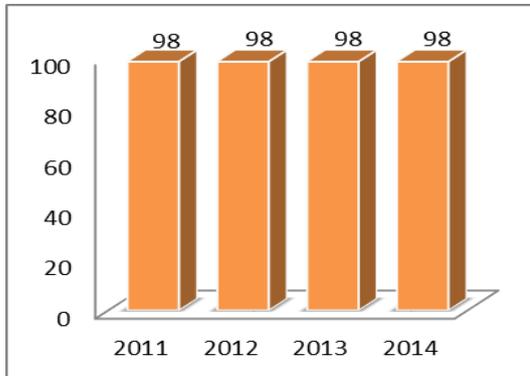
Provinsi	Jumlah Kota				Jumlah Kabupaten			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Kalimantan Barat	2	2	2	2	12	12	12	12
Kalimantan Tengah	1	1	1	1	13	13	13	13
Kalimantan Selatan	2	2	2	2	11	11	11	11
Kalimantan Timur	4	4	3	3	10	10	7	7
Kalimantan Utara	-	-	1	1	-	-	4	4
Sulawesi Utara	4	4	4	4	11	11	11	11
Sulawesi Tengah	1	1	1	1	10	10	12	12
Sulawesi Selatan	3	3	3	3	21	21	21	21
Sulawesi Tenggara	2	2	2	2	10	10	12	15
Gorontalo	1	1	1	1	5	5	5	5
Sulawesi Barat	-	-	-	-	5	5	6	6
Maluku	2	2	2	2	9	9	9	9
Maluku Utara	2	2	2	2	7	7	8	8
Papua Barat	1	1	1	1	10	10	12	12
Papua	1	1	1	1	28	28	28	28
Indonesia	98	98	98	98	399	399	413	416

Tabel 2.3. Jumlah Kecamatan dan Desa di Indonesia Tahun 2011-2013

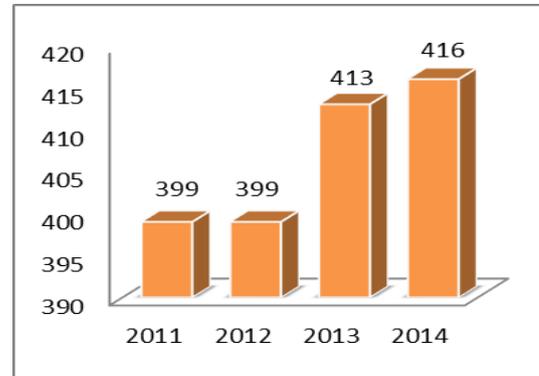
Provinsi	Jumlah Kecamatan				Jumlah Desa			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Aceh	287	289	289	289	6.491	6.493	6.514	6.513
Sumatera Utara	421	422	440	440	5.872	5.876	6.008	6.015
Sumatera Barat	176	176	179	179	1.032	1.140	1.140	1.145
Riau	157	163	163	164	1.664	1.759	1.775	1.835
Jambi	131	138	138	138	1.480	1.506	1.550	1.551
Sumatera Selatan	223	230	231	231	3.186	3.205	3.225	3.257
Bengkulu	124	127	127	127	1.508	1.517	1.517	1.524
Lampung	214	225	225	227	2.463	2.576	2.585	2.631
Kep. Bangka	46	47	47	47	373	381	381	381

Provinsi	Jumlah Kecamatan				Jumlah Desa			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Kep. Riau	59	63	66	66	371	383	415	416
DKI Jakarta	44	44	44	44	267	267	267	267
Jawa Barat	626	626	626	626	5.918	5.962	5.962	5.962
Jawa Tengah	573	573	573	573	8.578	8.578	8.578	8.578
DI Yogyakarta	78	78	78	78	438	438	438	438
Jawa Timur	662	664	664	664	8.503	8.505	8.505	8.499
Banten	154	155	155	155	1.535	1.551	1.551	1.551
Bali	57	57	57	57	716	716	716	716
Nusa Tenggara Timur	116	116	116	116	1.117	1.146	1.146	1.141
Nusa Tenggara Barat	293	306	306	306	2.918	3.213	3.259	3.270
Kalimantan Barat	176	176	176	174	1.967	1.982	1.987	2.005
Kalimantan Tengah	130	136	136	136	1.528	1.559	1.569	1.569
Kalimantan Selatan	151	152	152	152	2.000	2.007	2.008	2.009
Kalimantan Timur	146	150	103	103	1.465	1.486	1.026	1.026
Kalimantan Utara	-	-	50	50	-	-	479	479
Sulawesi Utara	159	164	167	167	1.691	1.738	1.764	1.830
Sulawesi Tengah	161	170	172	172	1.848	1.922	1.964	1.985
Sulawesi Selatan	304	306	306	306	2.982	3.025	3.030	3.030
Sulawesi Tenggara	204	209	209	213	2.156	2.215	2.248	2.268
Gorontalo	70	77	77	77	723	732	731	735
Sulawesi Barat	69	69	69	69	641	645	649	649
Maluku	86	95	113	118	999	1.041	1.083	1.190
Maluku Utara	112	112	113	115	1.071	1.077	1.194	1.196
Papua Barat	175	175	175	175	1.438	1.442	1.447	1.590
Papua	389	389	440	470	3.619	3.619	4.003	4.375
Indonesia	6.773	6.879	6.982	7.024	78.558	79.702	80.714	81.626

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015.

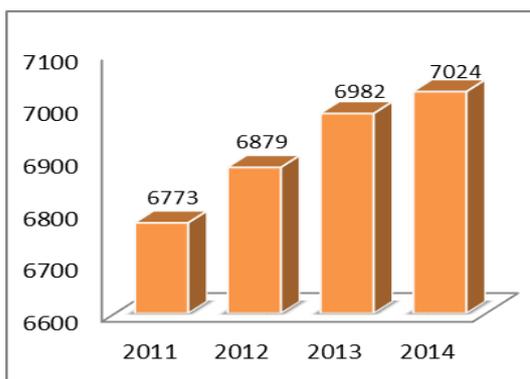


Gambar 2.3. Jumlah Kota di Indonesia Tahun 2011-2014

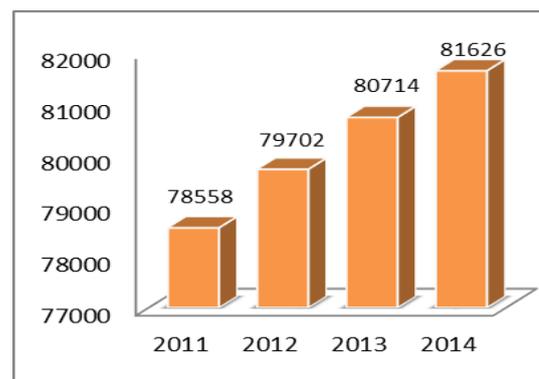


Gambar 2.4. Jumlah Kabupaten di Indonesia Tahun 2011-2014

Pada gambar 2.3 merupakan jumlah kota di Indonesia pada tahun 2011-2014. Terlihat pada diagram diatas, tidak terjadi perubahan jumlah kota di Indonesia dari tahun 2011-2014 yang artinya jumlah kota dari tahun 2011-2014 memiliki jumlah yang konstan yaitu 98 kota. Sedangkan pada gambar 2.4. menjelaskan jumlah kabupaten di Indonesia pada tahun 2011-2014 mengalami perubahan jumlah kabupaten. Perubahan jumlah kabupaten itu terjadi pada tahun 2013, dimana pada tahun 2012 jumlah kabupaten yaitu 399 kabupaten menjadi 413 kabupaten pada tahun 2013. Dan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi 416 kabupaten.



Gambar 2.5. Jumlah Kecamatan di Indonesia Tahun 2011-2014



Gambar 2.6. Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2011-2014

Berdasarkan gambar 2.5. jumlah kecamatan di Indonesia terus mengalami perubahan yang terus meningkat dari tahun 2011-2014. Dimana pada tahun 2011 jumlah kecamatan di Indonesia yaitu 6.773 kecamatan mengalami peningkatan jumlah kecamatan secara terus menerus sehingga pada tahun 2014 jumlah kecamatan di Indonesia menjadi 7.024 kecamatan. Tidak jauh berbeda dengan jumlah kecamatan di Indonesia tahun 2011-2014, jumlah desa di Indonesia tahun 2011-2014 juga mengalami perubahan yang terus meningkat. Terlihat pada gambar 2.6 bahwa, pada tahun 2011 jumlah desa di Indonesia yaitu 78.558 desa mengalami peningkatan jumlah desa untuk setiap tahunnya sehingga pada tahun 2014 jumlah desa di Indonesia menjadi 81.626 desa.

C. Demografi Wilayah

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri akan beragam suku, bahasa, budaya, dan agama. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah bangsa Melayu yang menempati hampir seluruh wilayah Indonesia di bagian barat dan tengah. Terdapat juga kelompok suku-suku Melanesia, Polinesia dan Mikronesia terutama di Indonesia bagian timur. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Selain itu ada pula penduduk pendatang, seperti Tionghoa, India, dan Arab. Penduduk pendatang sebagian besar masuk ke wilayah nusantara melalui jalur perdagangan, kemudian menetap dan menjadi bagian dari penduduk Indonesia. Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak didunia. Sisanya beragama Kristen Protestan (8,9%), Kristen Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakui Konghucu.

Berdasarkan data BPS pertengahan tahun 2010 (bulan Juni) pada tabel 2.3, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.330 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,4% per tahunnya pada tahun 2010-2014, sehingga diproyeksikan pada tahun 2015 jumlah

penduduk Indonesia mencapai 255.461.700 juta jiwa. Jika dilihat pada tabel 2.3, dapat dilihat bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi pada pertengahan tahun 2010 (bulan Juni) dengan jumlah penduduk yaitu 43.227.100 juta jiwa. Dengan tingkat laju pertumbuhan 1,4% per tahunnya, Provinsi Jawa Barat masih merupakan provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu 46,079,600 juta jiwa.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 dan 2015

Provinsi	Penduduk (Ribuan)		
	2010 ⁽¹⁾	2010 ⁽²⁾	2015 ⁽³⁾
Aceh	4.494,41	4.523,1	5.002
Sumatera Utara	12.982,204	13.028,7	13.937,8
Sumatera Barat	4.846,909	4.865,3	5.196,3
Riau	5.538,367	5.574,9	6.344,4
Jambi	3.092,265	3.107,6	3.402,1
Sumatera Selatan	7.450,394	7.481,6	8.052,3
Bengkulu	1.715,518	1.722,1	1.874,9
Lampung	7.608,405	7.634	8.117,3
Kepulauan Bangka Belitung	1.223,296	1.230,2	1.372,8
Kepulauan Riau	1.679,163	1.692,8	1.973
DKI Jakarta	9.607,787	9.640,4	10.17,9
Jawa Barat	43.053,732	43.227,1	46.709,6
Jawa Tengah	32.382,657	32.443,9	33.774,1
DI Yogyakarta	3.457,491	3.467,5	3.679,2
Jawa Timur	37.476,757	37.565,8	38.847,6
Banten	10.632,166	10.688,6	11.955,2
Bali	3.890,757	3.907,4	4.152,8
Nusa Tenggara Barat	4.500,212	4.516,1	4.835,6
Nusa Tenggara Timur	4.683.827	4.706,2	5.120,1
Kalimantan Barat	4.395,983	4.411,1	4.789,6
Kalimantan Tengah	2.212,089	2.220,8	2.495
Kalimantan Selatan	3.626,616	3.642,6	3.989,8
Kalimantan Timur	3.553,143	3.576,1	4.068,6
Sulawesi Utara	2.270,596	2.277,7	2.412,1

Provinsi	Penduduk (Ribuan)		
	2010 ⁽¹⁾	2010 ⁽²⁾	2015 ⁽³⁾
Sulawesi Tengah	2.635,009	2.646	2.876,7
Sulawesi Selatan	8.034,776	8.060,4	8.520,3
Sulawesi Tenggara	2.232,586	2.243,6	2.499,5
Gorontalo	1.040,164	1.044,8	1.133,2
Sulawesi Barat	1.158,651	1.164,6	1.282,2
Maluku	1.533,506	1.541,9	1.686,5
Maluku Utara	1.038,087	1.043,3	1.162,3
Papua Barat	760,422	765,3	871,5
Papua	2.833,381	2.857	3.149,4
Indonesia	237.641,33	238.518,5	255.462

Sumber : Statistika Indoensia 2014, BPS RI

Catatan : (1) Hasil Sensus Penduduk 2010 (Mei)

(2) Jumlah Penduduk Indonesia Pertengahan Tahun 2010 (Juni)

(3) Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Pertengahan tahun/Juni)

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia menurut Provinsi

Provinsi	Laju Pertumbuhan Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	
	2000-2010	2010-2014 ⁽²⁾	2010	2014 ⁽²⁾
Aceh	2.36 ⁽¹⁾	2.06	100.2	99.7
Sumatera Utara	1.10	1.39	99.8	99.6
Sumatera Barat	1.34	1.34	98.4	98.8
Riau	3.58	2.64	106.3	105.6
Jambi	2.56	1.85	105.5	104.2
Sumatera Selatan	1.85	1.50	103.7	103.3
Bengkulu	1.67	1.74	104.6	104.1
Lampung	1.24	1.26	106.1	105.3
Kep.Bangka Belitung	3.14	2.23	108	108
Kep. Riau	4.95	3.16	105.5	104.6
DKI Jakarta	1.41	1.11	102.8	101.3
Jawa Barat	1.90	1.58	103.6	102.9
Jawa Tengah	0.37	0.82	98.8	98.4

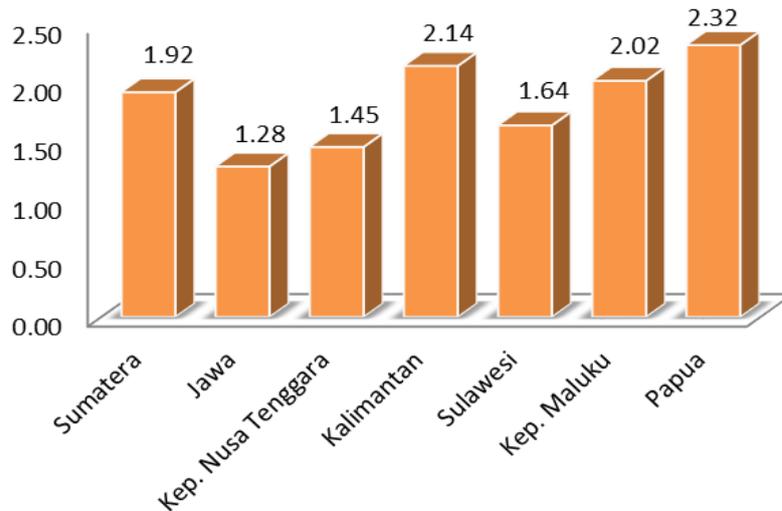
Provinsi	Laju Pertumbuhan Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	
	2000-2010	2010-2014 ⁽²⁾	2010	2014 ⁽²⁾
DI Yogyakarta	1.04	1.20	97.7	97.7
Jawa Timur	0.76	0.69	97.5	97.4
Banten	2.78	2.30	104.7	104.1
Bali	2.15	1.24	101.7	101.4
Nusa Tenggara Barat	1.17	1.40	94.3	94.2
Nusa Tenggara Timur	2.07	1.71	98.7	98.2
Kalimantan Barat	0.91	1.68	104.6	103.9
Kalimantan Tengah	1.79	2.38	109	109.2
Kalimantan Selatan	1.99	1.87	102.6	102.7
Kalimantan Timur	3.81	2.64 ⁽³⁾	111.3	110.3
Sulawesi Utara	1.28	1.17	104.4	104.2
Sulawesi Tengah	1.95	1.71	105.2	104.5
Sulawesi Selatan	1.17	1.13	95.5	95.4
Sulawesi Tenggara	2.08	2.20	101	100.9
Gorontalo	2.26	1.65	100.7	100.4
Sulawesi Barat	2.68	1.95	100.8	100.6
Maluku	2.80	1.82	102.3	101.8
Maluku Utara	2.47	2.21	104.9	104.3
Papua Barat	3.71	2.65	112.4	111.5
Papua	5.39	1.99	113.4	111.9
Indonesia	1.49	1.40	101.4	101

Sumber : Data dikutip dari publikasi Statistika Indonesia, Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995

Catatan : (1) Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2000–2010 untuk Aceh dihitung dengan menggunakan data Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) 2005 dan SP2010
 (2) Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Pertengahan tahun/Juni)
 (3) Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2010–2014 untuk Kalimantan Timur merupakan gabungan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Pada tabel 2.4. jika dilihat berdasarkan provinsi, maka laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2014 yang paling tinggi adalah Kepulauan Riau dengan laju pertumbuhan penduduk yaitu 3.16% per tahun dan yang paling rendah adalah Jawa Timur dengan laju pertumbuhan penduduk yaitu 0.69% per tahun. Jika dilihat berdasarkan kepulauan terbesar, pada gambar 2.7 terlihat bahwa Papua merupakan kepulauan terbesar yang

memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi yaitu 2.32%, sedangkan Jawa merupakan kepulauan terbesar yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah yaitu 1.28%.

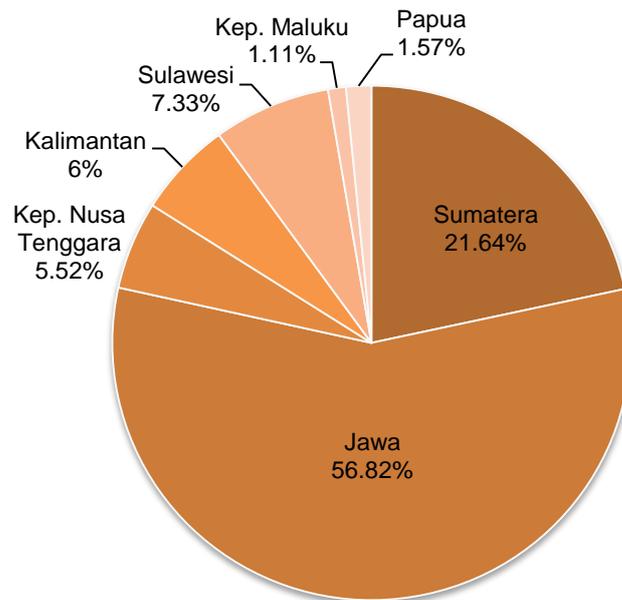


Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Berdasarkan Kepulauan Terbesar Pada Tahun 2010-2014

Pada tabel 2.4. dapat dilihat pula rasio jenis kelamin di Indonesia pada tahun 2014. Terlihat bahwa Papua merupakan provinsi yang memiliki rasio jenis kelamin paling tinggi sedangkan NTB merupakan provinsi yang memiliki rasio jenis kelamin paling rendah. Provinsi Papua yang memiliki rasio jenis kelamin yaitu 111.9 memiliki arti bahwa setiap terdapat 100 penduduk perempuan maka akan terdapat pula 112 penduduk laki-laki. Sedangkan Provinsi NTB yang memiliki rasio jenis kelamin yaitu 94.2 memiliki arti bahwa setiap terdapat 100 penduduk perempuan maka akan terdapat pula 94 penduduk laki-laki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Provinsi Papua merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya berjenis kelamin laki-laki dan Provinsi NTB merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya berjenis kelamin Perempuan.

Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah sebaran jumlah penduduknya yang tidak merata antar pulau dan provinsi. Hal itu dapat dilihat pada gambar 2.8, Sebagian besar

penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56.82%. Pulau Jawa menjadi salah satu daerah terpadat di dunia dengan jumlah penduduk 145,143,600 juta jiwa. Sedangkan untuk persentase jumlah penduduk di pulau terbesar lainnya dapat dilihat pada gambar 2.8.



Gambar 2.8. Persentase Sebaran Penduduk Indonesia Berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2013

Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah sebaran jumlah penduduknya yang tidak merata antar pulau dan provinsi. Hal itu dapat dilihat pada gambar 2.8, Sebagian besar penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56.82%. Pulau Jawa menjadi salah satu daerah terpadat di dunia dengan jumlah penduduk 145,143,600 juta jiwa. Sedangkan untuk persentase jumlah penduduk di pulau terbesar lainnya dapat dilihat pada gambar 2.8.

Pulau Jawa merupakan pulau besar di Indonesia yang menjadi salah satu daerah terpadat di dunia. Hal itu dapat dibuktikan pada tabel 2.5, dimana DKI Jakarta yang merupakan salah satu provinsi di Jawa memiliki persentase jumlah penduduk hanya 4.04% dari total penduduk di Indonesia, namun DKI Jakarta memiliki tingkat kepadatan

penduduk paling tinggi diantara seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu 15,518 penduduk per km².

Tabel 2.6. Persentase dan Kepadatan Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Persentase Jumlah Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		
	2010	2015	2010	2013	2014
Aceh	1.90	1.96	78	83	85
Sumatera Utara	5.46	5.46	179	186	189
Sumatera Barat	2.04	2.03	116	121	122
Riau	2.34	2.48	64	69	71
Jambi	1.30	1.33	62	66	67
Sumatera Selatan	3.14	3.15	82	85	87
Bengkulu	0.72	0.73	86	91	93
Lampung	3.20	3.18	220	229	232
Kep. Bangka Belitung	0.52	0.54	75	80	82
Kep. Riau	0.71	0.77	206	227	234
DKI Jakarta	4.04	3.98	14518	15015	15173
Jawa Barat	18.12	18.28	1222	1282	1301
Jawa Tengah	13.60	13.22	989	1014	1022
DI Yogyakarta	1.45	1.44	1107	1147	1161
Jawa Timur	15.75	15.21	786	803	808
Banten	4.48	4.68	1106	1185	1211
Bali	1.64	1.63	676	702	710
Nusa Tenggara Barat	1.89	1.89	243	254	257
Nusa Tenggara Timur	1.97	2.00	97	102	103
Kalimantan Barat	1.85	1.87	30	32	32
Kalimantan Tengah	0.93	0.98	14	16	16
Kalimantan Selatan	1.53	1.56	94	99	101
Kalimantan Timur	1.50	1.59	17	19	26
Sulawesi Utara	0.95	0.94	164	170	172
Sulawesi Tengah	1.11	1.13	43	45	46
Sulawesi Selatan	3.38	3.34	173	179	180
Sulawesi Tenggara	0.94	0.98	59	63	64
Gorontalo	0.44	0.44	93	98	99
Sulawesi Barat	0.49	0.50	69	74	75
Maluku	0.65	0.66	33	35	35

Provinsi	Persentase Jumlah Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		
	2010	2015	2010	2013	2014
Maluku Utara	0.44	0.45	33	35	36
Papua Barat	0.32	0.34	8	9	9
Papua	1.20	1.23	9	10	10
Indonesia	100.00	100.00	124	130	132

Sumber : Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia dan data tahun 2013-2015 diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, BPS

D. Ekonomi Wilayah

Dalam menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu, dapat dilihat berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional (provinsi). PDB merupakan nilai akhir dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut.

Penghitungan nilai PDB dilakukan atas dua dasar harga, yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara. PDB atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dapat digunakan untuk melihat perkembangan struktur ekonomi pada tahun tersebut. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun.

Berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku, kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi masyarakat Indonesia di tahun 2014-2016 berasal dari Sektor Industri Pengolahan, yaitu sebesar 21.01% atau senilai 2,219,441 milyar rupiah (tahun 2014), 20.84% atau senilai 2,405,409 milyar rupiah (tahun 2015) dan 20.66% atau senilai 1,245,375 milyar rupiah (tahun 2016). Kemudian Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor tertinggi kedua dalam memberikan kontribusi terhadap struktur ekonomi masyarakat di Indonesia pada tahun 2014-2016.

Dari nilai PDB atas dasar harga berlaku tersebut, terlihat bahwa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Indonesia tidak lagi didominasi oleh sektor agraris, melainkan dari sektor industri. Meskipun demikian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap menghasilkan output yang besar dan perlu ditingkatkan mengingat sektor ini berkaitan sangat erat dengan kemandirian bangsa terutama dalam hal ketahanan pangan. Nilai PDB atas dasar harga berlaku menurut Sektor Lapangan Usaha dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.7. PDB Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2014-2016

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah)		
	2014*	2015**	2016***(1)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.409.656	1560399	839576.6
Pertambangan dan Penggalian	1.042.901	879399.6	412066.1
Industri Pengolahan	2219441	2405409	1245375
Pengadaan Listrik dan Gas	114617.9	131264.2	69901.7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7887.1	8606	4410.6
Konstruksi	1041950	1193346	637841.3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1420054	1534067	803233.1
Transportasi dan Pergudangan	466968.9	578963.9	303322.4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	321062.1	341790.2	178121.3
Informasi dan Komunikasi	369415	406887.6	217143.9
Keuangan dan Asuransi	408438.8	464734.6	253460.3
Real Estate	294573.4	329796.9	173292.1
Jasa Lainnya	1185379	1343673	706710.7
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	10302344	11178338	5844455
Pajak Dikurangi Subsidi Atas Produk	263472.9	362451.8	184055.4
Produk Domestik Bruto	10565817	11540790	6953263

Sumber : BPS RI, 5 Agustus 2016

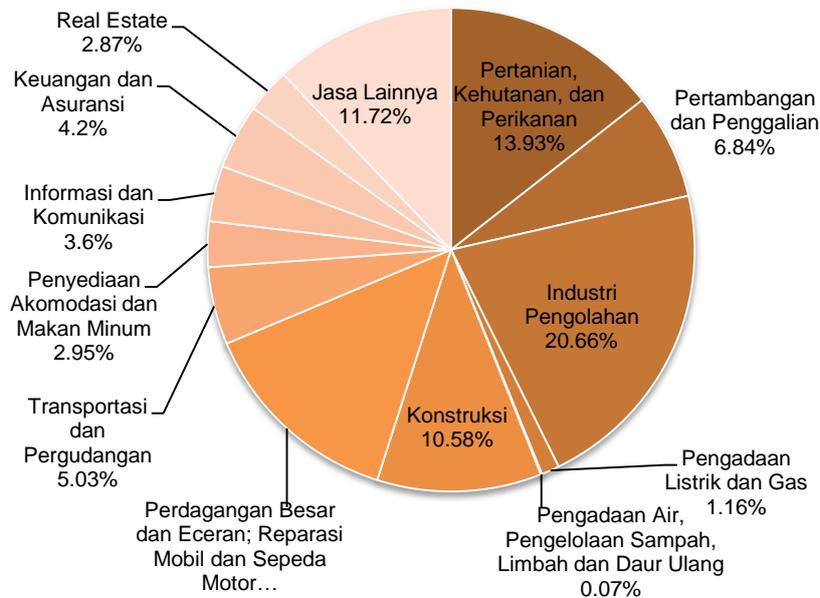
Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

(1) Jumlah PDB berdasarkan 2 triwulan pertama pada tahun 2016

Jika difokuskan pada tahun 2016, dapat dilihat pada gambar 2.9. bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki persentase PDB atas dasar harga berlaku yang paling tinggi yaitu 20.66%. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Industri Pengolahan sangat berperan penting dalam meningkatkan struktur ekonomi di Indonesia. Selain Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terhadap struktur ekonomi di Indonesia sebesar 13.93. Dan diikuti oleh sektor lainnya yang memiliki kontribusi yang lebih rendah dibandingkan kedua sektor dan dapat dilihat pada gambar 2.9. persentase PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016.



Gambar 2.9. Persentase PDB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016

Selain melihat dari nilai PDB atas dasar harga berlaku, dapat pula dilihat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun berdasarkan PDB atas dasar harga konstan. Jika dilihat pada tabel 2.7. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2014-2016. Selain Sektor Industri Pengolahan, pada tahun 2014 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar

kedua terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, pada tahun 2015-2016 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2.8. PDB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014-2016

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah)		
	2014*	2015**	2016***(1)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1129053	1174457	609683.5
Pertambangan dan Penggalian	796711.6	756239.2	373009.9
Industri Pengolahan	1853688	1932457	997215.9
Pengadaan Listrik dan Gas	93755.9	94894.8	49633.8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6923.5	7420.2	3786.7
Konstruksi	826615.6	881583.9	449515.8
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1177049	1206075	618396.1
Transportasi dan Pergudangan	326933	348775.6	181158
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	257815.5	269054.5	139147.2
Informasi dan Komunikasi	384407.4	423063.5	223483.1
Keuangan dan Asuransi	319825.5	347095.7	185846
Real Estate	256440.2	268811.4	139196
Jasa Lainnya	923441.8	985072.6	504538.6
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	8352660	8695000	4474611
Pajak Dikurangi Subsidi Atas Produk	213611.7	281931.2	140876.4
Produk Domestik Bruto	8566271	8976932	4615487

Sumber : BPS RI, 5 Agustus 2016

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

(1) Jumlah PDB berdasarkan 2 triwulan pertama pada tahun 2016

Namun, jika dilihat pada tabel 2.8 tentang laju pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan terlihat bahwa Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor yang memberikan kontribusi dalam peningkatan laju pertumbuhan PDB yang paling tinggi

pada tahun 2014-2015. Dan pada tahun 2016, Sektor Keuangan dan Asuransi merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan laju pertumbuhan PDB. Apabila tabel 2.7 dan 2.8 disandingkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sektor Industri Pengolah yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia bukan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam laju pertumbuhan PDB di Indonesia melainkan Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor yang lebih memberikan kontribusi dalam meningkatkan laju pertumbuhan PDB di Indonesia.

Pada tabel 2.9. terlihat juga laju pertumbuhan PDB di Indonesia dari tahun 2014-2016. Terlihat bahwa terjadi penurunan laju pertumbuhan PDB di Indonesia dari tahun 2014 dengan nilai laju pertumbuhan PDB 5.02% menjadi 4.79% pada tahun 2015 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 4.98%.

Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014-2016

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Laju Pertumbuhan Kumulatif (%)		
	2014*	2015**	2016*** ⁽¹⁾
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.24	4.02	2.16
Pertambangan dan Penggalian	0.72	-5.08	-1.15
Industri Pengolahan	4.61	4.25	4.66
Pengadaan Listrik dan Gas	5.57	1.21	7.18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.87	7.17	4.45
Konstruksi	6.97	6.65	7.45
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.16	2.47	4.04
Transportasi dan Pergudangan	7.36	6.68	7.63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.77	4.36	5.45
Informasi dan Komunikasi	10.1	10.06	8.35
Keuangan dan Asuransi	4.68	8.53	10.32
Real Estate	5	4.82	4.77

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Laju Pertumbuhan Kumulatif (%)		
	2014*	2015**	2016***(1)
Jasa Lainnya	6.43	6.75	6.71
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	5.02	4.1	4.76
Pajak Dikurangi Subsidi Atas Produk	5.13	31.98	12.77
Produk Domestik Bruto	5.02	4.79	4.98

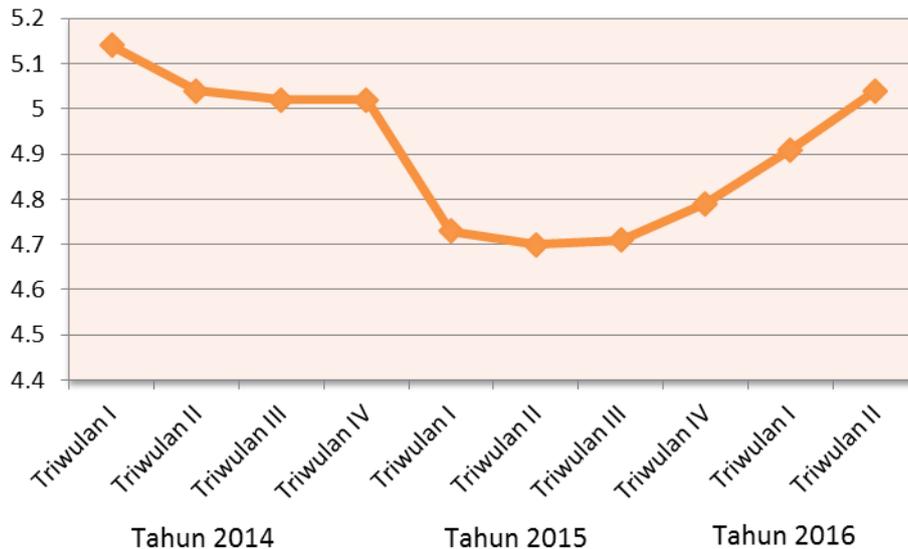
Sumber : BPS RI, 5 Agustus 2016

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

(1) Jumlah PDB berdasarkan 2 triwulan pertama pada tahun 2016



Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2016 (Setiap Triwulan)

Pada tabel 2.9 terlihat bahwa terjadi penurunan laju pertumbuhan PDB di Indonesia dari tahun 2014-2015 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2016. Hal itu dapat dilihat pada gambar 2.10, terjadinya penurunan laju pertumbuhan PDB dari Triwulan I tahun 2014-Triwulan III tahun 2015 dan mulai meningkat kembali dari Triwulan IV tahun 2015-Triwulan II tahun 2016. Sehingga dengan terjadinya penurunan laju pertumbuhan PDB pada Triwulan I tahun 2014-Triwulan III tahun 2015 mengakibatkan akan

terjadinya penurunan laju pertumbuhan PDB di Indonesia tahun 2014-2015 seperti yang dijelaskan pada tabel 2.9.

Dalam mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dalam lingkup provinsi, PDRB provinsi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang bisa digunakan. Melalui pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi diantara 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.10, pada tahun 2015 DKI Jakarta memiliki PDRB dengan nilai 1,983,420.5 milyar rupiah. Begitu pula untuk PDRB DKI Jakarta atas dasar harga konstan yang sebesar 1,454,102.1 milyar rupiah hal ini dapat dilihat pada tabel 2.11. Sementara PDRB Maluku Utara atas dasar harga berlaku dan harga konstan merupakan yang paling kecil diantara provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.10. dan tabel 2.11, dimana nilai PDRB Maluku Utara atas dasar harga berlaku yaitu 26,631.78 milyar rupiah dan PDRB atas dasar harga konstan yaitu 20,377.47 milyar rupiah.

Tabel 2.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Provinsi Tahun 2012-2015

Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah) Harga Berlaku			
	2012	2013	2014*	2015**
Aceh	114552.08	121331.13	128026.4	129200.56
Sumatera Utara	417120.44	469464.02	521954.95	571722.01
Sumatera Barat	131435.65	146899.83	164898.84	178810.46
Riau	558492.72	607498.45	679387.74	652386.42
Jambi	115070.4	129976.04	144807.64	155110.35
Sumatera Selatan	253265.12	280348.46	306120.76	332726.58
Bengkulu	36207.68	40565.49	45392.76	50341.72
Lampung	187348.82	204402.64	230968.63	253162.54
Kep. Bangka Belitung	45400.23	50388.36	56373.62	60992.09
Kep. Riau	144840.79	163261.57	181640.48	203281.4
DKI Jakarta	1369432.6	1546876.5	1760217.3	1983420.5

Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah) Harga Berlaku			
	2012	2013	2014*	2015**
Jawa Barat	1128245.7	1258989.3	1386333.9	1525149.2
Jawa Tengah	754529.44	830016.02	925194.73	1014074.2
DI Yogyakarta	77247.86	84924.54	92829.33	101396.12
Jawa Timur	1248767.3	1382501.5	1539794.7	1689882.4
Banten	338224.93	377836.08	428473.6	477936.52
Bali	117987.4	134407.53	156382.08	177173.02
Nusa Tenggara Barat	69022.23	73618.88	81671.42	102791.56
Nusa Tenggara Timur	54893.15	61325.26	68598.5	76432.48
Kalimantan Barat	106958.8	118640.96	132367.21	146885.97
Kalimantan Tengah	73425.38	81956.92	89887.45	100148.2
Kalimantan Selatan	106725.43	115858.2	127898.02	137518.03
Kalimantan Timur	550735.76	519131.87	526896.79	501867.8
Kalimantan Utara	-	52604.7	59572.51	62818.84
Sulawesi Utara	63875.31	71097.46	80610.58	91275.26
Sulawesi Tengah	69637.92	79842.22	90263.81	107596.44
Sulawesi Selatan	228285.47	258836.42	299628.21	341745.27
Sulawesi Tenggara	64693.98	71041.25	78611.51	87740.81
Gorontalo	19669.72	22129.28	25193.65	28538.48
Sulawesi Barat	22626.21	25249.49	29463.35	33016.03
Maluku	24661.75	27834.44	31653.09	34344.59
Maluku Utara	19340.46	21439.49	24046.56	26631.78
Papua Barat	47421.09	52997.66	58210.9	62882.02
Papua	112812.56	122857.17	133539.41	152125.95

Sumber : BPS RI, 10 Oktober 2016

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2.11. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Provinsi
Tahun 2012-2015

Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah) Harga Konstan			
	2012	2013	2014*	2015**
Aceh	108914.9	111755.83	113487.8	112672.44
Sumatera Utara	375924.14	398727.14	419573.31	440955.85
Sumatera Barat	118724.42	125940.63	133316.07	140529.15
Riau	425626	436187.51	447951.61	448936.6
Jambi	104615.08	111766.13	119984.72	125038.71
Sumatera Selatan	220459.2	232175.05	243093.77	254022.86
Bengkulu	32363.04	34326.37	36206.68	38067.5
Lampung	170769.21	180620.01	189790	199525.42
Kep. Bangka Belitung	40104.91	42190.86	44159.44	45961.46
Kep. Riau	128034.97	137263.85	146355.62	155162.64
DKI Jakarta	1222527.9	1296694.6	1373389.6	1454102.1
Jawa Barat	1028409.7	1093543.6	1149231.4	1207001.5
Jawa Tengah	691343.12	726655.12	764992.65	806609.02
DI Yogyakarta	71702.45	75627.45	79532.28	83461.57
Jawa Timur	1124464.6	1192789.8	1262697.1	1331418.2
Banten	310385.59	331099.11	349205.7	367959.22
Bali	106951.46	114103.58	121779.13	129137.91
Nusa Tenggara Barat	66340.81	69766.71	73298.11	88866.75
Nusa Tenggara Timur	48863.19	51505.19	54106.27	56820.1
Kalimantan Barat	96161.93	101980.34	107113.79	112261.17
Kalimantan Tengah	64649.17	69410.99	73724.87	78890
Kalimantan Selatan	96697.84	101850.54	106791.34	110890.73
Kalimantan Timur	469646.25	438532.91	445418.64	439716.08
Kalimantan Utara	-	44091.7	47696.81	49188.68
Sulawesi Utara	58677.59	62422.5	66359.42	70418.81
Sulawesi Tengah	62249.53	68219.32	71676.11	82829.23
Sulawesi Selatan	202184.59	217589.13	233998.74	250729.56
Sulawesi Tenggara	59785.4	64268.71	68290.56	72988.3
Gorontalo	17987.07	19367.57	20775.7	22070.45
Sulawesi Barat	20786.89	22227.39	24200.11	25983.38

Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah) Harga Konstan			
	2012	2013	2014*	2015**
Maluku	21000.08	22100.94	23562.82	24843.65
Maluku Utara	17120.07	18208.74	19206.33	20377.47
Papua Barat	44423.34	47694.23	50287.04	52347.42
Papua	107890.94	117118.82	121580.12	131270.88

Sumber : BPS RI, 10 Oktober 2016

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, terlihat pada tabel 2.12. bahwa hanya terdapat 6 provinsi yang memiliki peningkatan laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2014-2015 dengan provinsinya yaitu Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Dimana, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki peningkatan laju pertumbuhan paling pesat dibandingkan provinsi yang lain sedangkan Kalimantan Utara yang merupakan provinsi yang baru terbentuk tahun 2012 merupakan salah satu dari 28 provinsi yang memiliki penurunan PDRB dari tahun 2014-2015 dan Kalimantan Utara merupakan provinsi yang memiliki penurunan laju pertumbuhan PDRB tertinggi.

Tabel 2.12. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Provinsi Tahun 2012-2015

Provinsi	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah) Harga Konstan			
	2012	2013	2014*	2015**
Aceh	3.85	2.61	1.55	-0.72
Sumatera Utara	6.45	6.07	5.23	5.1
Sumatera Barat	6.31	6.08	5.86	5.41
Riau	3.76	2.48	2.7	0.22
Jambi	7.03	6.84	7.35	4.21
Sumatera Selatan	6.83	5.31	4.7	4.5
Bengkulu	6.83	6.07	5.48	5.14
Lampung	6.44	5.77	5.08	5.13

Provinsi	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah) Harga Konstan			
	2012	2013	2014*	2015**
Kep. Bangka Belitung	5.5	5.2	4.67	4.08
Kep. Riau	7.63	7.21	6.62	6.02
DKI Jakarta	6.53	6.07	5.91	5.88
Jawa Barat	6.5	6.33	5.09	5.03
Jawa Tengah	5.34	5.11	5.28	5.44
DI Yogyakarta	5.37	5.47	5.16	4.94
Jawa Timur	6.64	6.08	5.86	5.44
Banten	6.83	6.67	5.47	5.37
Bali	6.96	6.69	6.73	6.04
Nusa Tenggara Barat	-1.54	5.16	5.06	21.24
Nusa Tenggara Timur	5.46	5.41	5.05	5.02
Kalimantan Barat	5.91	6.05	5.03	4.81
Kalimantan Tengah	6.87	7.37	6.21	7.01
Kalimantan Selatan	5.97	5.33	4.85	3.84
Kalimantan Timur	5.48	2.76	1.57	-1.28
Kalimantan Utara	-	-	8.18	3.13
Sulawesi Utara	6.86	6.38	6.31	6.12
Sulawesi Tengah	9.53	9.59	5.07	15.56
Sulawesi Selatan	8.87	7.62	7.54	7.15
Sulawesi Tenggara	11.65	7.5	6.26	6.88
Gorontalo	7.91	7.67	7.27	6.23
Sulawesi Barat	9.25	6.93	8.88	7.37
Maluku	7.16	5.24	6.61	5.44
Maluku Utara	6.98	6.36	5.48	6.1
Papua Barat	3.63	7.36	5.44	4.1
Papua	1.72	8.55	3.81	7.97

Sumber : BPS RI, 10 Oktober 2016

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

E. Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan suatu bangsa baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, sosial, budaya, keamanan, dan sektor-sektor lainnya serta penyediaan kebutuhan dasar bagi kehidupan masyarakat. Peran aktif pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat amat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Salah satu peran pemerintah dalam memfasilitasi pertumbuhan infrastruktur adalah dengan mengalokasikan anggaran belanja untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kementerian PUPR menjadi salah satu kementerian/lembaga yang mendapat alokasi APBN terbesar. Di tahun 2015, Kementerian PUPR bahkan merupakan yang terbesar dengan jumlah anggaran mencapai 118.546,1 milyar rupiah. Pada tabel 2.12, terlihat bahwa APBN Kementerian PUPR mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Dengan selalu adanya peningkatan APBN dan besarnya anggaran ini tentunya diiringi dengan tanggung jawab penyediaan infrastruktur bagi masyarakat yang juga semakin tinggi. Di antaranya adalah dengan menjalankan program-program penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta pengembangan perumahan. Pada Tabel 2.13. di bawah ini ditampilkan perkembangan alokasi dana Kementerian Pekerjaan Umum dalam APBN Nasional sejak tahun 2011 hingga 2015.

Tabel 2.13. APBN Kementerian PUPR Tahun 2011-2015

Tahun	APBN Nasional Kementerian Pekerjaan Umum (milyar)
2011	57.961
2012	62.563
2013	77.978
2014	84.148
2015	118.546

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PUPR

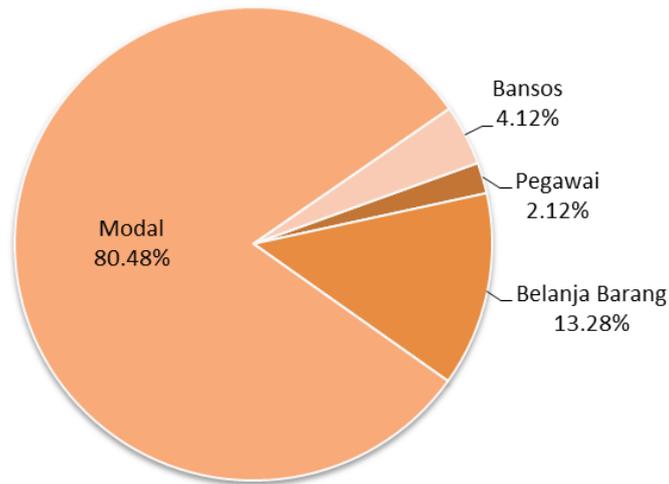
Kementerian PUPR yang merupakan salah satu kementerian yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia juga merupakan salah satu kementerian dengan belanja modal yang besar. Hal itu dapat dilihat pada tabel 2.14, dimana pada tahun 2015 Kementerian PUPR mengalokasikan APBN untuk jenis belanja modal sebesar 95.4 triliun rupiah atau 80.48% dari total anggaran keseluruhan. Selain itu, ada pula dana bansos yang di dalamnya juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, yaitu sebesar 4,12% atau senilai 4,9 triliun rupiah.

Tabel 2.14. APBN Kementerian PUPR Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (milyar)
Pegawai	2.507.467
Belanja Barang	15.744.712
Modal	95.407.730
Bansos	4.886.170
Jumlah	118.546.079

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PUPR

Jika dilihat dari presentase alokasi APBN-P Kementerian PUPR pada tahun 2015, dapat dilihat pada gambar 2.11 bahwa alokasi APBN-P Kementerian PUPR dipusatkan terhadap jenis belanja modal dengan presentase yaitu 80,48%. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kementerian PUPR yang bergerak dibidang pembangunan infrastruktur negara harus memprioritaskan alokasi APBN-P terhadap jenis belanja modal dikarenakan dengan mengalokasikan APBN-P terhadap jenis belanja modal dapat mempercepat program prioritas. Selain jenis belanja modal, jenis belanja barang merupakan prioritas kedua Kementerian PUPR dalam pengalokasian APBN-P yaitu dengan presentase 13,28%. Dan selanjutnya diikuti oleh jenis belanja Bansos dan Pegawai dengan presentase yaitu 4,12% dan 2,12%.



Gambar 2.11. Presentase Alokasi APBN-P Kementerian PUPR
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015

Selain dilihat dari pengalokasian APBN-P berdasarkan jenis belanja, dapat pula dilihat pengalokasian APBN-P berdasarkan unit organisasi pada tahun 2015. Pada tabel 2.15 terlihat bahwa Unit Organisasi Ditjen Bina Marga merupakan unit organisasi yang memiliki alokasi APBN-P paling besar yaitu 56.974.815.858 milyar rupiah yang dialokasikan untuk RPM sebesar 53.593.207.258 milyar rupiah dan untuk PLN sebesar 3.381.608.600 milyar rupiah. Sedangkan Unit Organisasi Ditjen Pembiayaan Perumahan merupakan unit organisasi yang memiliki alokasi APBN-P yang paling kecil dibandingkan dengan Unit organisasi yang lainnya. Pada Unit Organisasi Lainnya terdiri atas Unit Organisasi Inspektorat Jendral, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tabel 2.15. Alokasi APBN-P Kementerian PUPR Berdasarkan Unit Organisasi
Tahun 2015

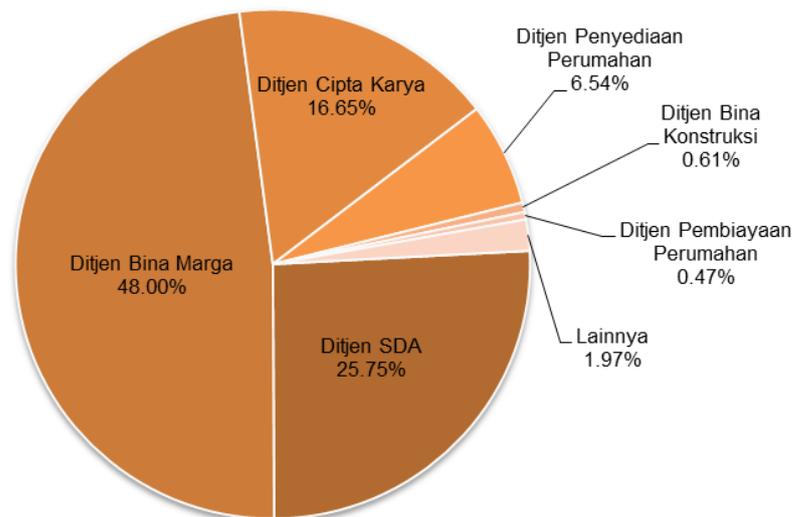
Unit Organisasi	RPM	PLN	Total
Ditjen SDA	28.810.776.054	1.751.726.200	30.562.502.254
Ditjen Bina Marga	53.593.207.258	3.381.608.600	56.974.815.858
Ditjen Cipta Karya	17.224.870.921	2.532.716.362	19.757.587.283

Unit Organisasi	RPM	PLN	Total
Ditjen Penyediaan Perumahan	7.768.028.035	0	7.768.028.035
Ditjen Bina Konstruksi	722.899.986	0	722.899.986
Ditjen Pembiayaan Perumahan	561.517.329	0	561.517.329
Lainnya	2.343.798.033	0	2.343.798.033
Jumlah	111.025.097.616	7.666.051.162	118.691.148.778

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PUPR

Catatan : Data September 2015

Ditjen Bina Marga yang merupakan unit organisasi yang memiliki alokasi APBN-P tertinggi memiliki persentase sebesar 48% dan diikuti unit organisasi lainnya seperti Ditjen Sumber Daya Air (SDA) 25,75%, Ditjen Cipta Karya 16,65%, Ditjen Penyediaan Perumahan 6,54%, lainnya 1,97%, Ditjen Bina Konstruksi 0,61%, dan Ditjen Pembiayaan Perumahan 0,47%. Persentase alokasi APBN-P Kementerian PUPR Tahun 2015 berdasarkan unit organisasi dapat dilihat pada gambar 2.12. Rincian lengkap untuk jumlah APBN Berdasarkan provinsi dapat dilihat pada tabel 2.15. Dan untuk alokasi APBN berdasarkan 4 bidang pembangunan utama (SDA, Bina Marga, Cipta Karya serta Perumahan) dan provinsi dapat dilihat pada tabel 2.16. – 2.19.



Gambar 2.12. Presentase Alokasi APBN-P Kementerian PUPR Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tabel 2.16. merupakan tabel yang berisikan tentang alokasi APBN Kementerian PUPR berdasarkan provinsi tahun 2015. Terlihat pada tabel 2.16. bahwa Provinsi Papua merupakan provinsi yang mendapatkan alokasi APBN tertinggi dibandingkan provinsi yang lainnya dengan total alokasi APBN yaitu 5.755,63 milyar rupiah. Sedangkan Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang mendapatkan alokasi APBN yang paling rendah dengan total alokasi APBN yaitu 783,6 milyar rupiah.

Pada tabel 2.17. Provinsi Papua bukan merupakan provinsi yang mendapatkan alokasi APBN tertinggi berdasarkan Bidang Sumber Daya Air melainkan Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan alokasi APBN tertinggi dengan total APBN yaitu 3.893,96 milyar rupiah. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang mendapatkan alokasi APBN terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya berdasarkan Bidang Sumber Daya Air dengan total APBN yaitu 230.06 milyar rupiah.

Tabel 2.16. Alokasi APBN Kementerian PUPR Berdasarkan Provinsi Tahun 2015

Provinsi	Alokasi APBN Kementerian PUPR (Milyar)		
	RPM	PLN	Total
Aceh	1.918,26	407,11	2.325,37
Sumatera Utara	2.925,94	571,01	3.496,95
Sumatera Barat	1.865,11	730,10	2.595,21
Riau	1.443,81	14,69	1.458,50
Jambi	1.719,18	33,13	1.752,30
Sumatera Selatan	2.179,39	248,96	2.428,35
Bengkulu	962,45	278,93	1.241,38
Lampung	2.155,42	198,60	2.354,02
Kep. Bangka Belitung	756,86	26,74	783,60
Kep. Riau	945,53	7,76	953,28
DKI Jakarta	2.513,85	595,97	3.109,82
Jawa Barat	6.188,90	936,07	7.124,97
Jawa Tengah	6.650,37	477,02	7.127,39
DI Yogyakarta	1.191,72	111,46	1.303,18
Jawa Timur	3.468,40	169,10	3.637,50

Provinsi	Alokasi APBN Kementerian PUPR (Milyar)		
	RPM	PLN	Total
Banten	1.601,95	223,72	1.825,67
Bali	1.803,14	4,10	1.807,23
Nusa Tenggara Barat	2.727,03	45,44	2.772,47
Nusa Tenggara Timur	3.143,56	71,38	3.214,94
Kalimantan Barat	3.177,81	435,50	3.613,30
Kalimantan Tengah	1.976,86	12,54	1.989,39
Kalimantan Selatan	1.896,49	41,44	1.937,93
Kalimantan Timur	2.542,61	22,05	2.564,67
Kalimantan Utara	1.539,42	176,85	1.716,27
Sulawesi Utara	3.502,68	65,93	3.568,61
Sulawesi Tengah	2.898,59	7,36	2.905,94
Sulawesi Selatan	4.085,25	205,54	4.290,79
Sulawesi Tenggara	2.588,01	17,06	2.605,07
Gorontalo	2.093,90	27,77	2.121,67
Sulawesi Barat	1.441,14	34,73	1.475,87
Maluku	3.386,65	23,16	3.409,80
Maluku Utara	2.309,73	8,91	2.318,65
Papua Barat	3.856,97	3,25	3.860,22
Papua	5.752,89	2,74	5.755,63
Pusat	21.815,26	1.284,87	23.100,13

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PUPR. Juni 2015

Tabel 2.17. Alokasi APBN Kementerian PUPR Bidang Sumber Daya Air menurut Provinsi Tahun 2015

Provinsi	Alokasi APBN Bidang Sumber Daya Air (Milyar)		
	RPM	PLN	Total
Aceh	590,41	-	590,41
Sumatera Utara	829,10	1,51	830,61
Sumatera Barat	617,86	47,80	665,66
Riau	401,05	-	401,05
Jambi	769,79	9,97	779,75
Sumatera Selatan	742,78	197,00	939,78

Provinsi	Alokasi APBN Bidang Sumber Daya Air (Milyar)		
	RPM	PLN	Total
Bengkulu	325,50	-	325,50
Lampung	935,94	84,28	1.020,21
Kep. Bangka Belitung	255,25	-	255,25
Kep. Riau	230,06	-	230,06
DKI Jakarta	1.440,85	90,08	1.530,93
Jawa Barat	3.427,79	466,17	3.893,96
Jawa Tengah	2.483,45	197,65	2.681,10
DI Yogyakarta	599,67	90,20	689,87
Jawa Timur	1.199,14	25,94	1.225,08
Banten	334,57	173,38	507,95
Bali	588,41	0,42	588,82
Nusa Tenggara Barat	801,00	3,21	804,22
Nusa Tenggara Timur	793,48	9,20	802,68
Kalimantan Barat	485,23	-	485,23
Kalimantan Tengah	382,89	-	382,89
Kalimantan Selatan	645,09	0,75	645,84
Kalimantan Timur	437,28	2,42	439,70
Kalimantan Utara	166,58	-	166,58
Sulawesi Utara	689,69	43,29	732,98
Sulawesi Tengah	744,27	0,79	745,05
Sulawesi Selatan	1.703,92	47,78	1.751,70
Sulawesi Tenggara	463,72	1,21	464,93
Gorontalo	727,73	24,82	752,55
Sulawesi Barat	596,07	24,04	620,11
Maluku	620,53	13,68	634,21
Maluku Utara	547,51	-	547,51
Papua Barat	846,84	-	846,84
Papua	647,77	-	647,77
Pusat	1.739,59	196,14	1.935,73

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PUPR. Juni 2015

Selain dilihat berdasarkan Bidang Sumber Daya Air, dapat pula dilihat pengalokasian APBN Kementerian PUPR berdasarkan Bidang Bina Marga. Pada tabel 2.18, dapat

dilihat total alokasi APBM untuk setiap provinsi berdasarkan Bidang Bina Marga. Provinsi Papua merupakan provinsi yang mendapatkan alokasi APBN tertinggi berdasarkan Bidang Bina Marga dengan total APBN yaitu 4.729,05 milyar rupiah. Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang mendapatkan alokasi APBN terendah berdasarkan Bidang Bina Marga dengan total APBN yaitu 840 juta rupiah.

Alokasi APBN Kementerian PUPR berdasarkan Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan tertinggi dialokasikan terhadap Provinsi Jawa Tengah. Terlihat pada tabel 2.19 dan tabel 2.20, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi APBN sebesar 956.43 milyar rupiah dan 690,79 milyar rupiah. Sedangkan alokasi APBN terendah berdasarkan Bidang Cipta Karya yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan total alokasi APBN sebesar 13,12 milyar rupiah dan alokasi APBN terendah berdasarkan Bidang Perumahan yaitu Provinsi Maluku dengan total alokasi APBN sebesar 38,05 milyar rupiah.

Tabel 2.18. Alokasi APBN Kementerian PUPR Bidang Bina Marga menurut Provinsi Tahun 2015

Provinsi	Alokasi APBN Bidang Bina Marga (Milyar)		
	RPM	PLN	Total
Aceh	762,50	290,72	1.053,22
Sumatera Utara	1.572,47	425,11	1.997,58
Sumatera Barat	811,39	589,85	1.401,24
Riau	754,24	-	754,24
Jambi	686,93	-	686,93
Sumatera Selatan	0,84	-	0,84
Bengkulu	382,05	224,18	606,22
Lampung	896,46	80,24	976,70
Kep. Bangka Belitung	265,77	-	265,77
Kep. Riau	459,39	-	459,39
DKI Jakarta	888,36	498,07	1.386,43
Jawa Barat	1.494,88	321,50	1.816,38
Jawa Tengah	3.306,78	133,44	3.440,22

Provinsi	Alokasi APBN Bidang Bina Marga (Milyar)		
	RPM	PLN	Total
DI Yogyakarta	282,89	-	282,89
Jawa Timur	1.415,90	36,56	1.452,46
Banten	1.027,50	-	1.027,50
Bali	813,90	-	813,90
Nusa Tenggara Barat	1.559,03	0,03	1.559,05
Nusa Tenggara Timur	1.914,69	47,20	1.961,89
Kalimantan Barat	2.407,16	390,93	2.798,09
Kalimantan Tengah	1.283,27	-	1.283,27
Kalimantan Selatan	943,07	6,58	949,65
Kalimantan Timur	1.866,74	5,00	1.871,74
Kalimantan Utara	1.216,42	176,85	1.393,27
Sulawesi Utara	2.456,15	5,05	2.461,20
Sulawesi Tengah	1.816,65	-	1.816,65
Sulawesi Selatan	1.728,79	97,34	1.826,13
Sulawesi Tenggara	1.569,46	-	1.569,46
Gorontalo	1.154,07	-	1.154,07
Sulawesi Barat	586,50	-	586,50
Maluku	2.332,43	-	2.332,43
Maluku Utara	1.276,32	-	1.276,32
Papua Barat	2.664,19	-	2.664,19
Papua	4.729,05	-	4.729,05
Pusat	5.233,89	52,98	5.286,87

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PUPR. Juni 2015

Tabel 2.19. Alokasi APBN Kementerian PUPR Bidang Cipta Karya menurut Provinsi Tahun 2015

Provinsi	Alokasi APBN Bidang Cipta Karya (Milyar)		
	RPM	PLN	Total
Aceh	532,37	116,39	648,76
Sumatera Utara	497,99	144,39	642,37
Sumatera Barat	435,86	92,45	528,31
Riau	288,53	14,69	303,22

Provinsi	Alokasi APBN Bidang Cipta Karya (Milyar)		
	RPM	PLN	Total
Jambi	262,46	23,16	285,62
Sumatera Selatan	373,86	51,96	425,82
Bengkulu	254,90	54,75	309,66
Lampung	323,03	34,08	357,11
Kep. Bangka Belitung	235,83	26,74	262,57
Kep. Riau	256,08	7,76	263,83
DKI Jakarta	5,30	7,82	13,12
Jawa Barat	694,50	148,39	842,90
Jawa Tengah	810,50	145,93	956,43
DI Yogyakarta	263,68	21,26	284,94
Jawa Timur	770,40	106,61	877,00
Banten	239,88	50,34	290,22
Bali	378,36	3,68	382,04
Nusa Tenggara Barat	367,00	42,20	409,20
Nusa Tenggara Timur	435,39	14,98	450,37
Kalimantan Barat	285,41	44,57	329,99
Kalimantan Tengah	310,70	12,54	323,23
Kalimantan Selatan	256,52	34,11	290,63
Kalimantan Timur	235,41	14,63	250,04
Kalimantan Utara	156,41		156,41
Sulawesi Utara	356,85	17,59	374,43
Sulawesi Tengah	337,67	6,57	344,24
Sulawesi Selatan	611,90	60,42	672,33
Sulawesi Tenggara	554,83	15,86	570,68
Gorontalo	212,11	2,95	215,06
Sulawesi Barat	258,57	10,69	269,26
Maluku	433,68	9,48	443,16
Maluku Utara	485,91	8,91	494,82
Papua Barat	345,94	3,25	349,19
Papua	337,40	2,74	340,14
Pusat	4.619,67	1.035,75	5.655,43

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PUPR. Juni 2015

Tabel 2.20. Alokasi APBN Kementerian PUPR Bidang Perumahan menurut Provinsi Tahun 2015

Provinsi	Alokasi APBN Bidang Perumahan (Milyar)
Aceh	164,77
Sumatera Utara	97,22
Sumatera Barat	152,64
Riau	50,73
Jambi	106,48
Sumatera Selatan	173,63
Bengkulu	14,81
Lampung	169,99
Kep. Bangka Belitung	62,43
Kep. Riau	111,96
DKI Jakarta	600,03
Jawa Barat	576,86
Jawa Tengah	690,79
DI Yogyakarta	61,17
Jawa Timur	524,81
Banten	164,87
Bali	116,01
Nusa Tenggara Barat	160,41
Nusa Tenggara Timur	95,91
Kalimantan Barat	166,17
Kalimantan Tengah	41,67
Kalimantan Selatan	49,50
Kalimantan Timur	70,12
Kalimantan Utara	110,01
Sulawesi Utara	112,56
Sulawesi Tengah	236,29
Sulawesi Selatan	261,95
Sulawesi Tenggara	150,67
Gorontalo	105,19
Sulawesi Barat	151,75
Maluku	38,05
Maluku Utara	82,64

Provinsi	Alokasi APBN Bidang Perumahan (Milyar)
Papua Barat	119,23
Papua	349,59

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PUPR. Juni 2015

Selain pengalokasian APBN berdasarkan 4 bidang pembangunan utama dan hanya berdasarkan provinsi, infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman di daerah juga berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang merupakan alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk dana perimbangan di samping DAU (Dana Alokasi Umum). Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan berdasarkan kriteria umum, khusus serta teknis dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berikut ini adalah besaran DAK masing-masing provinsi untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terdiri dari infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi dan perumahan. Data DAK yang ditampilkan terdiri dari DAK Reguler yang ditetapkan melalui Perpres No. 162 Tahun 2014 dan DAK Tambahan yang ditetapkan melalui Perpres No. 36 Tahun 2015.

Tabel 2.21. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman menurut Provinsi Tahun 2015

Provinsi	Dana Alokasi Khusus (milyar)					
	Jalan	Irigasi	Air Minum	Sanitasi	Perumahan	Total
Aceh	1.153,47	426,49	63,42	63,57	21,82	1.728,76
Sumatera Utara	752,75	311,68	67,91	49,81	18,34	1.200,49
Sumatera Barat	338,71	138,27	46,02	53,88	14,79	591,66
Riau	431,62	78,16	20,87	8,43	6,35	545,43
Jambi	344,05	34,24	15,74	16,18	7,66	417,86
Sumatera Selatan	359,17	61,95	39,50	34,24	2,78	497,63
Bengkulu	239,61	71,86	27,68	31,50	3,35	374,00

Provinsi	Dana Alokasi Khusus (milyar)					
	Jalan	Irigasi	Air Minum	Sanitasi	Perumahan	Total
Lampung	572,88	130,28	46,29	30,97	3,32	783,74
Kep. Bangka Belitung	192,64	81,07	14,06	16,15	7,57	311,50
Kepulauan Riau	171,32	16,22	21,71	13,87	8,41	231,53
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	690,21	245,28	114,00	26,25	11,73	1.087,47
Jawa Tengah	540,76	182,67	91,23	49,20	11,63	875,50
DI Yogyakarta	38,91	25,36	11,45	5,37	-	81,09
Jawa Timur	712,92	437,27	116,75	56,95	23,36	1.347,23
Banten	34,27	38,34	27,06	10,89	6,18	116,74
Bali	170,94	25,87	10,50	9,93	-	217,24
NTB	416,19	74,00	34,66	32,17	5,93	562,95
NTT	782,14	203,49	70,65	74,21	-	1.130,49
Kalimantan Barat	731,49	207,21	41,05	48,49	10,20	1.038,44
Kalimantan Tengah	666,64	93,99	15,59	19,34	3,01	798,57
Kalimantan Selatan	824,38	125,95	16,90	27,82	12,82	1.007,87
Kalimantan Timur	456,22	4,44	2,00	4,26	4,55	471,47
Kalimantan Utara	101,05	20,10	3,35	7,40	3,39	135,29
Sulawesi Utara	674,65	85,65	31,74	34,02	8,09	834,15
Sulawesi Tengah	787,10	270,34	37,08	29,95	13,67	1.138,14
Sulawesi Selatan	1.565,41	394,71	47,37	45,45	12,30	2.065,22
Sulawesi Tenggara	1.000,11	284,41	44,06	44,96	10,86	1.384,40
Gorontalo	235,86	64,77	14,83	15,54	4,07	335,08
Sulawesi Barat	236,22	192,69	16,65	21,38	3,79	470,73
Maluku	639,68	147,36	32,30	35,90	-	855,24
Maluku Utara	543,63	121,84	24,86	30,72	-	721,05
Papua Barat	759,48	127,55	34,33	30,48	4,04	955,88
Papua	1.931,54	780,34	153,44	131,81	9,47	3.006,60

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PUPR. Juni 2015

Catatan : Data merupakan jumlah DAK Reguler (Perpres 162 Tahun 2014) dan DAK Tambahan (Perpres 36 Tahun 2015)

BAB III

STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

A. Sumber Air

A.1. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan pemerintah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi. Salah satu yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya air adalah isu yang berkaitan dengan sungai. Sejak dulu keberadaan sungai sangat penting perannya bagi manusia. Terlihat dari berkembangnya peradaban manusia di muka bumi, sebagian besar terjadi di sekitar wilayah sungai. Dalam kehidupan yang semakin maju saat ini, manusia tetap harus memelihara serta mengelola sungai sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjelaskan bahwa **Wilayah Sungai (WS)** adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa **Daerah Aliran Sungai (DAS)** adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Berdasarkan lokasinya, Wilayah Sungai yang terdiri dari satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil meliputi :

1. Wilayah Sungai Lintas Negara;
2. Wilayah Sungai Lintas Provinsi;
3. Wilayah Sungai Strategis Nasional;

4. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; dan
5. Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota.

Pada Tabel 3.1. sampai dengan Tabel 3.5. di bawah ini ditampilkan daftar wilayah sungai di Indonesia menurut statusnya beserta jumlah daerah aliran sungai yang terdapat pada wilayah sungai tersebut. Jumlah daerah aliran sungai pada wilayah sungai direkap dari Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.

Tabel 3.1. Wilayah Sungai Lintas Negara

Nama Wilayah Sungai	Jumlah Daerah Aliran Sungai	Lokasi
Benanain	45	NTT - Timor Leste
Noelmina	186	NTT - Timor Leste
Sesayap	19	Kalimantan Timur - Serawak (Malaysia)
Mamberamo - Tami - Apauvar	25	Papua - Papua Nugini
Einlanden - Digul - Bikuma	29	Papua - Papua Nugini

Sumber : Lampiran I.1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Tabel 3.2. Wilayah Sungai Lintas Provinsi

Nama Wilayah Sungai	Jumlah Daerah Aliran Sungai	Provinsi
Alas - Singkil	8	Aceh - Sumatera Utara
Batang Natal - Batang Batahan	40	Sumatera Utara - Sumatera Barat
Rokan	15	Sumatera Utara - Riau - Sumatera Barat
Kampar	7	Riau - Sumatera Barat
Indragiri - Akuaman	24	Riau - Sumatera Barat
Batanghari	2	Jambi - Sumatera Barat
Teramang - Muar	15	Bengkulu - Jambi
Nasal - Padang Guci	19	Bengkulu - Sumatera Selatan - Lampung
Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau	28	Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Lampung

Nama Wilayah Sungai	Jumlah Daerah Aliran Sungai	Provinsi
Mesuji - Tulang Bawang	2	Lampung - Sumatera Selatan
Cidanau - Ciujung - Cidurian *	34	Banten - Jawa Barat
Kepulauan Seribu	40	DKI Jakarta - Banten
Ciliwung - Cisadane *	15	DKI Jakarta - Banten - Jawa Barat
Cimanuk - Cisanggarung	25	Jawa Barat - Jawa Tengah
Citanduy	24	Jawa Barat - Jawa Tengah
Progo - Opak - Serang	3	DI Yogyakarta - Jawa Tengah
Bengawan Solo	96	Jawa Timur - Jawa Tengah
Jelai - Kendawangan	11	Kalimantan Tengah - Kalimantan Barat
Barito	4	Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan
Dumoga - Sangkub	55	Sulawesi Utara - Gorontalo
Limboto - Bolango – Bone	75	Gorontalo - Sulawesi Utara
Randangan	14	Gorontalo - Sulawesi Tengah
Palu - Lariang	52	Sulawesi Tengah - Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan
Kalukku - Karama	74	Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan - Sulawesi Tengah
Pompengan - Larona	27	Sulawesi Selatan - Sulawesi Utara
Saddang	24	Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat
Towari - Lasusua	28	Sulawesi Utara - Sulawesi Selatan
Lasolo - Konaweha	25	Sulawesi Utara - Sulawesi Tengah
Omba	73	Papua Barat – Papua

Sumber : Lampiran I.3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Catatan : * Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan RI

Tabel 3.3. Wilayah Sungai Strategis Nasional

Nama Wilayah Sungai	Jumlah Daerah Aliran Sungai	Provinsi
Aceh - Meureudu	30	Aceh
Woyla - Bateue	13	Aceh
Jambo Aye	13	Aceh
Belawan - Ular - Padang	11	Sumatera Utara
Toba - Asahan	1	Sumatera Utara

Nama Wilayah Sungai	Jumlah Daerah Aliran Sungai	Provinsi
Siak	2	Riau
Kepulauan Batam - Bintan	31	Kepulauan Riau
Bangka	63	Kepulauan Bangka Belitung
Seputih - Sekampung	42	Lampung
Citarum *	19	Jawa Barat
Serayu - Bogowonto	15	Jawa Tengah
Jratunseluna	69	Jawa Tengah
Brantas	220	Jawa Timur
Bali - Penida	391	Bali
Lombok	197	Nusa Tenggara Barat
Sumbawa	555	Nusa Tenggara Barat
Flores	472	Nusa Tenggara Timur
Kapuas	9	Kalimantan Barat
Mentaya - Katingan	2	Kalimantan Tengah
Mahakam	12	Kalimantan Timur
Tondano - Sangihe - Talaud - Miangas	89	Sulawesi Utara
Paguyaman	20	Gorontalo
Parigi - Poso	50	Sulawesi Tengah
Walanae - Cenranae	39	Sulawesi Selatan
Jeneberang	58	Sulawesi Selatan
Halmahera Utara	130	Maluku Utara
Halmahera Selatan	265	Maluku Utara
Ambon - Seram	166	Maluku
Kepulauan Yamdena - Wetar	153	Maluku

Sumber : Lampiran I.3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Catatan : * Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan RI

Tabel 3.4. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

Nama Wilayah Sungai	Jumlah Daerah Aliran Sungai	Provinsi
Teunom - Lambeuso	14	Aceh
Pase - Peusangan	10	Aceh
Tamiang - Langsa	17	Aceh
Baru - Kluet	21	Aceh
Wampu - Besitang	13	Sumatera Utara
Bah Bolon	5	Sumatera Utara
Nias	43	Sumatera Utara
Sibundong - Batang Toru	16	Sumatera Utara
Barumun - Kualuh	2	Sumatera Utara
Batang Angkola - Batang Gadis	5	Sumatera Utara
Reteh	3	Riau
Bengkalis - Meranti	37	Riau
Masang - Pasaman	8	Sumatera Barat
Silaut - Tarusan	17	Sumatera Barat
Pengabuan - Lagan	5	Jambi
Sebelat - Ketahun - Lais	19	Bengkulu
Bengkulu - Alas - Talo	9	Bengkulu
Belitung	91	Kepulauan Bangka Belitung
Semangka	116	Lampung
Cibaliung - Cisawarna	75	Banten
Ciliman - Cibungur	27	Banten
Cisadea - Cibareno	74	Jawa Barat
Ciwulan - Cilaki	72	Jawa Barat
Pemali - Comal	32	Jawa Tengah
Bodri - Kuto	12	Jawa Tengah
Madura - Bawean	173	Jawa Timur
Welang - Rejoso	36	Jawa Timur
Bondoyudo - Bedadung	47	Jawa Timur
Pekalen - Sampean	56	Jawa Timur
Baru - Bajulmati	60	Jawa Timur
Sumba	130	Nusa Tenggara Timur
Flotim Kepulauan - Lembata - Alor	439	Nusa Tenggara Timur

Nama Wilayah Sungai	Jumlah Daerah Aliran Sungai	Provinsi
Sambas	4	Kalimantan Barat
Mempawah	5	Kalimantan Barat
Seruyan	3	Kalimantan Tengah
Kahayan	2	Kalimantan Tengah
Cengal - Batulicin	62	Kalimantan Selatan
Kendilo	9	Kalimantan Timur
Karangan	43	Kalimantan Timur
Berau - Kelai	15	Kalimantan Timur
Kayan	9	Kalimantan Timur
Poigar - Ranoyapo	24	Sulawesi Utara
Lambunu - Buol	99	Sulawesi Tengah
Bongka - Mentawa	109	Sulawesi Tengah
Laa - Tambalako	89	Sulawesi Tengah
Poleang - Roraya	174	Sulawesi Tenggara
Muna	106	Sulawesi Tenggara
Buton	95	Sulawesi Tenggara
Kepulauan Sula - Obi	184	Maluku Utara
Buru	53	Maluku
Kepulauan Kei - Aru	211	Maluku
Kamundan - Sebyar	91	Papua Barat
Wapoga - Mimika	97	Papua

Sumber : Lampiran I.4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Tabel 3.5. Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota

Nama Wilayah Sungai	Jumlah Daerah Aliran Sungai	Provinsi	Kabupaten /Kota
Simeulue	26	Aceh	Simeuleu
Kubu	8	Riau	Rokan Hilir
Bukit Batu	2	Riau	Bengkalis
Rawa	6	Riau	Siak
Guntung - Kateman	4	Riau	Indragiri Hilir
Kepulauan Karimun	22	Kepulauan Riau	Karimun
Kep. Lingga - Singkep	35	Kepulauan Riau	Lingga

Nama Wilayah Sungai	Jumlah Daerah Aliran Sungai	Provinsi	Kabupaten /Kota
Kep. Natuna - Anambas	29	Kepulauan Riau	Natuna
Siberut - Pagai - Sipora	86	Sumatera Barat	Mentawai
Enggano	10	Bengkulu	Bengkulu Utara
Kepulauan Karimunjawa	20	Jawa Tengah	Jejara
Wiso - Gelis	27	Jawa Tengah	Jejara
Pawan	6	Kalimantan Barat	Ketapang
Pulau Laut	41	Kalimantan Selatan	Kota Baru
Kepulauan Banggai	185	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan

Sumber : Lampiran I.4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

A.2. Danau/Situ

Danau merupakan cekungan pada permukaan bumi yang berisi air serta ekosistem yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Situ atau danau yang merupakan salah satu *reservoir* alami berfungsi sebagai penampungan atau resapan air, pemasok cadangan air tanah, pendingin suhu udara kota, pengendalian banjir, wisata olahraga air (perahu dayung, kano, memancing), habitat satwa liar, media budidaya ikan dan penambah keindahan kota. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan situ atau danau karena memiliki nilai ekologi, ekonomi, edukatif, serta estetika sekaligus.

Selain bangunan penampung air buatan, *reservoir-reservoir* alami sangat dibutuhkan dalam mengendalikan dan mengoptimalkan sumber daya air. Termasuk dalam menghadapi perubahan pola musim serta mengurangi tingkat resiko bencana kekeringan di musim kemarau maupun banjir di musim penghujan. Oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi pada *reservoir-reservoir* alami termasuk situ atau danau. Untuk beberapa danau yang mengalami kerusakan dan penurunan daya tampung akibat tingginya sedimentasi mendapatkan prioritas penanganan.

Pada Tabel 3.6. berikut ini disajikan data jumlah danau menurut provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki begitu banyak danau yang menunjukkan besarnya potensi yang

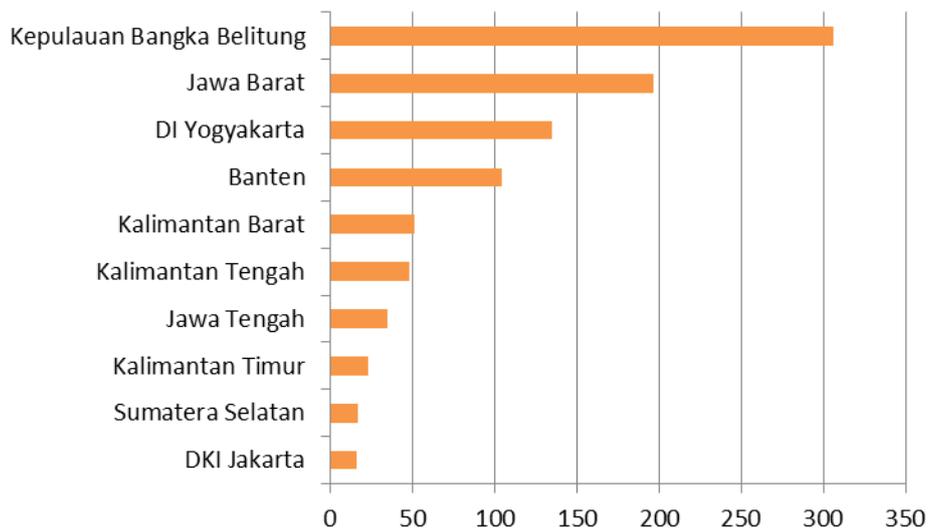
dimiliki dalam bidang sumber daya air. Dibutuhkan kesadaran untuk melestarikan danau dan lingkungan hidup dalam pengelolaan danau yang berkelanjutan untuk menghindari bencana yang tidak diinginkan akibat rusaknya ekosistem danau.

Tabel 3.6. Danau/Situ di Indonesia menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Danau/Situ	Luas Danau (km ²)	Volume Tampung (juta m ³)
Aceh	7	971,50	315.500,00
Sumatera Utara	3	1.187,15	1.260.000,00
Sumatera Barat	6	275,11	1.721,00
Riau	7	24,37	
Jambi	11	5.000,00	
Sumatera Selatan	17	21.420,00	262,00
Bengkulu	11	2.174,21	4.228,43
Lampung			
Kepulauan Bangka Belitung	306	21,06	31,87
Kepulauan Riau			
DKI Jakarta	16	31,90	729.000,00
Jawa Barat	197	1.595,30	59.828.590,00
Jawa Tengah	35	2.770,00	65.000.001,67
DI Yogyakarta	135	1,20	7,05
Jawa Timur			
Banten	104	17.973,90	31.553.004,45
Bali	5	24,72	1.024,35
Nusa Tenggara Barat	4	30,65	25,00
Nusa Tenggara Timur			
Kalimantan Barat	51	305,80	
Kalimantan Tengah	48	195,43	
Kalimantan Selatan	2		
Kalimantan Timur	23	59.250,00	1.300,00
Kalimantan Utara			
Sulawesi Utara	1		
Sulawesi Tengah	10	418,87	2.877,91
Sulawesi Selatan	15	860,71	39.269,90
Sulawesi Tenggara			

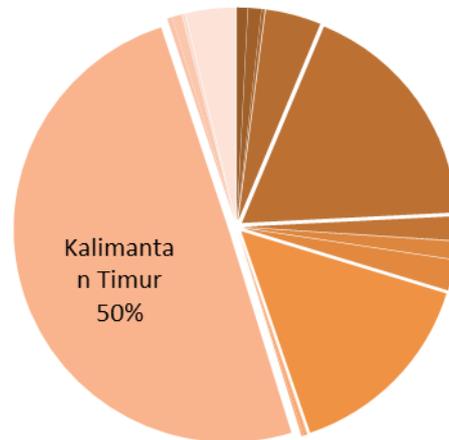
Provinsi	Jumlah Danau/Situ	Luas Danau (km ²)	Volume Tampung (juta m ³)
Gorontalo	2		
Sulawesi Barat	1	56,00	
Maluku	3		
Maluku Utara	1	250,00	
Papua Barat			
Papua	14	4.481,58	

Sumber : Unit Data Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (November 2015)



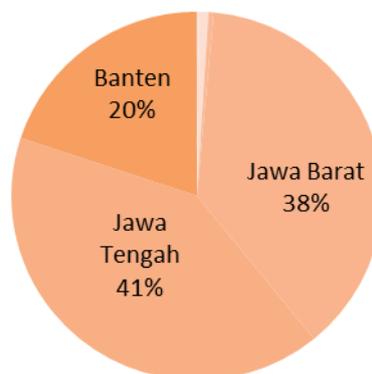
Gambar 3.1. Jumlah Danau/Situ di Indonesia menurut Provinsi

Pada Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki jumlah Danau/Situ yang paling banyak jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Berarti, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi lebih dalam pemanfaatan danau/situ.



Gambar 3.2. Presentase Luas Danau di Indonesia menurut Provinsi

Berdasarkan gambar 3.2 dapat dilihat bahwa Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki danau yang paling luas di Indonesia. Terlihat bahwa presentase luas danau yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur adalah 50% dari seluruh luas danau yang ada di Indonesia. Meskipun Kalimantan Timur tidak memiliki jumlah danau/situ paling banyak di Indonesia, namun luas danau yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Timur adalah danau yang paling luas diantara danau di provinsi lainnya.



Gambar 3.3. Presentase Volume Tampung Danau/Situ di Indonesia menurut provinsi

Berdasarkan gambar 3.3 dapat dilihat bahwa presentase volume tampung danau/situ di Indonesia menurut provinsi tertinggi diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah dengan

presentase bernilai 40%. Kemudian, presentase volume tampung danau/situ di Indonesia tertinggi kedua diperoleh oleh provinsi Jawa Barat. Dan tertinggi ketiga oleh Provinsi Banten senilai 20%. Hal yang menarik adalah, ketiga provinsi tersebut berasal dari Pulau Jawa. Jika dibandingkan dengan banyak danau/situ dan luasnya danau di Indonesia menurut provinsi. Ternyata Pulau Jawa lah yang mempunyai Volume Tampung Danau/Situ di Indonesia paling banyak menurut provinsi.

B. Bangunan Air

B.1. Bendungan/Waduk

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan dijelaskan bahwa **bendungan** adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*) atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sementara **waduk** adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

Tujuan dibangunnya bendungan antara lain untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendali daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (*tailing*) atau tampungan lumpur dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup. Secara umum, ada dua manfaat dibangunnya bendungan, yaitu *single purpose dam* dan *multi purpose dam*. *Single purpose dam* adalah ketika bendungan dibuat hanya untuk satu tujuan khusus seperti penyediaan air irigasi atau untuk pengendalian banjir. Sedangkan *multi purpose dam* seperti salah satunya adalah bendungan Jatiluhur, dibangun dengan desain untuk berbagai keperluan seperti irigasi, air baku atau air minum dan juga untuk pembangkit listrik serta pengembangan lokasi kawasan wisata. Ketersediaan air pada suatu bendungan merupakan faktor penentu yang manfaatnya sangat vital bagi masyarakat, terutama sebagai penyedia air irigasi di masa musim tanam ketika tidak sedang musim hujan serta penjamin ketersediaan air baku.

Yang menjadi pemilik bendungan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Jumlah bendungan di Indonesia yang tercatat di Balai Bendungan adalah 209 dengan 178 di antaranya dimiliki oleh PU, sementara 31 lainnya adalah non PU. Pada Tabel 3.7a. dan Tabel 3.7b. dibawah ini disajikan data rekapitulasi jumlah bendungan yang terregistrasi di Balai Bendungan Kementerian PUPR baik yang dimiliki oleh PU maupun non PU.

Tabel 3.7. Bendungan di Indonesia menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Bendungan	Volume Bendungan (1000 m ³)	Kapasitas Waduk (1000 m ³)	Luas Genangan (1000 m ²)	Manfaat Irigasi (ha)	Manfaat PLTA (MW)	Manfaat Air Baku (m ³ /det)	Daerah Tangkapan Air (km ²)
Aceh	4	1.143,00	20.264,45	2.855,00	8.984,00		100,05	5,38
Sumatera Utara	5	226,10	2.934.040,00	12.585,00		636,00		11.437,50
Sumatera Barat								
Riau	1	301,30	1.545.000,00	124.000,00		114,00		333,70
Jambi								
Sumatera Selatan								
Bengkulu	1		2.200,00	1.140,00				587,00
Lampung	4	11.031,60	797.650,00	28.285,50	103.767,00	28,00		882,00
Kepulauan Bangka Belitung								
Kepulauan Riau	5	1.635,00	140.500,00	23.685,72	176,00		21,00	124,48
DKI Jakarta								
Jawa Barat	15	206.760,00	5.711.188,87	201.914,50	266.935,00	4.015,90	50,29	11.071,59
Jawa Tengah	38	27.197,76	1.523.890,99	220.661,73	215.359,00	235,40	0,90	3.880,36
DI Yogyakarta	1	568,00	25.000,00	1.570,00	3.384,00			21,50
Jawa Timur	32	989.338,14	844.326,60	72.581,92	130.475,00	190,25	0,29	7.471,81
Banten	2		972,85	262,50				13,30
Bali	4	1.638,00	14.368,00	3.930,00	1.250,00			64,00

Provinsi	Jumlah Bendungan	Volume Bendungan (1000 m ³)	Kapasitas Waduk (1000 m ³)	Luas Genangan (1000 m ²)	Manfaat Irigasi (ha)	Manfaat PLTA (MW)	Manfaat Air Baku (m ³ /det)	Daerah Tangkapan Air (km ²)
Nusa Tenggara Barat	62	125.542,06	270.148,76	37.814,05	51.229,00	0,48	0,47	2.636,44
Nusa Tenggara Timur	15	1.099,24	35.525,31	2.447,30	4.926,00			62,90
Kalimantan Barat								
Kalimantan Tengah								
Kalimantan Selatan	1	670,00	1.200.000,00	92.000,00		30,00		1.043,00
Kalimantan Timur	7	2.847,00	48.898,00	22.027,20	5.119,90	0,40	1.520,01	3.757,39
Kalimantan Utara	1	30,37	715,50	265,97	184,00		0,20	1,50
Sulawesi Utara								
Sulawesi Tengah								
Sulawesi Selatan	9	4.945,00	506.055,00	188.702,00	36.117,00	583,00		5.810,40
Sulawesi Tenggara								
Gorontalo								
Sulawesi Barat								
Maluku	1		275,00	42,00				
Maluku Utara	1		4.969,70					0,63
Papua Barat								
Papua								

Sumber : Balai Bendungan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Juni 2015

B.2. Bendung

Bendung adalah suatu bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke tempat tertentu yang membutuhkannya dan/atau untuk mengendalikan dasar sungai, debit dan angkutan sedimen (SNI 03-2401-1991).

Fungsi utama dari bendung adalah untuk meninggikan elevasi muka air dari sungai yang dibendung sehingga air bisa disadap dan dialirkan ke saluran lewat bangunan pengambilan (*intake structure*). Bendung juga berfungsi sebagai alat pengendali dan pemonitor seluruh tata pengaturan air dan sebagai antisipasi bencana banjir.

Berdasarkan konstruksinya, terdapat dua tipe bendung, yaitu bendung sederhana dan bendung permanen. Terdapat dua jenis bendung permanen, yaitu bendung tetap dan bendung gerak. Bendung tetap adalah bendung yang terdiri dari ambang tetap, sehingga muka air banjir tak dapat diatur elevasinya. Bendung gerak adalah bendung yang terdiri dari ambang tetap dilengkapi pintu bendung yang dapat digerakkan untuk mengatur muka air di bagian hulu, sehingga air sungai dapat disadap sesuai dengan kebutuhan dan muka air banjir dapat diatur. Kemudian berdasarkan bentuk alat pengaturnya, bendung gerak terbagi menjadi *sluice gate*, *radial gate*, dan bendung karet. Alat pengatur dari bendung karet dapat dikembang-kempiskan sesuai kebutuhan dengan menambah atau mengurangi isinya. Pada Tabel 3.8. di bawah ini adalah jumlah bendung di Indonesia, namun belum semua bendung disertai dengan jenis bendungnya, sehingga hanya ditampilkan jumlahnya menurut provinsi.

Tabel 3.8. Jumlah Bendung di Indonesia menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Bendung
Aceh	27
Sumatera Utara	8
Sumatera Barat	13
Riau	3

Provinsi	Jumlah Bendung
Jambi	
Sumatera Selatan	7
Bengkulu	6
Lampung	10
Kepulauan Bangka Belitung	
Kepulauan Riau	3
DKI Jakarta	
Jawa Barat	37
Jawa Tengah	127
DI Yogyakarta	1.729
Jawa Timur	16
Banten	240
Bali	
Nusa Tenggara Barat	593
Nusa Tenggara Timur	
Kalimantan Barat	17
Kalimantan Tengah	10
Kalimantan Selatan	
Kalimantan Timur	31
Kalimantan Utara	
Sulawesi Utara	3
Sulawesi Tengah	137
Sulawesi Selatan	11
Sulawesi Tenggara	34
Gorontalo	
Sulawesi Barat	
Maluku	2
Maluku Utara	
Papua Barat	
Papua	4

Sumber : Unit Data Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (November 2015)

B.3. Embung dan Embung Potensi

Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan air ketika musim kemarau adalah memanfaatkan limpahan air hujan dengan membangun embung (*onfarm reservoir*). **Embung** merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpahan atau air rembesan. Embung akan menyimpan air di musim hujan, kemudian airnya dapat dimanfaatkan pada musim kemarau atau saat kekurangan air. Sementara embung potensi adalah titik-titik yang memungkinkan bagi pembangunan embung atau bangunan konservasi air buatan.

Selain berfungsi sebagai media konservasi air, embung juga bisa menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, kemudian sebagai pengatur fungsi hidrolis, dan menjaga sistem serta proses-proses alami karena secara tidak langsung berperan sebagai penghasil oksigen melalui proses fotosintesa oleh berbagai jenis fitoplankton yang hidup di dalamnya.

Pada Tabel 3.9. dan 3.10. berikut ini ditampilkan jumlah embung dan embung potensi di Indonesia menurut provinsi. Tidak menutup kemungkinan jika kedepannya embung serta embung potensi dikembangkan menjadi media konservasi air layaknya bendungan atau waduk.

Tabel 3.9. Jumlah Embung di Indonesia menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Embung	Kapasitas (m ³)
Aceh	86	1.802.682
Sumatera Utara	5	728.900
Sumatera Barat	287	10.361.810
Riau	0	0
Jambi	0	0
Sumatera Selatan	13	0
Bengkulu	0	0
Lampung	108	93.247.066
Kepulauan Bangka Belitung	1	724.500
Kepulauan Riau	5	0

Provinsi	Jumlah Embung	Kapasitas (m ³)
DKI Jakarta	0	0
Jawa Barat	49	188.000
Jawa Tengah	382	4.600
DI Yogyakarta	13	564.448
Jawa Timur	73	2.508
Banten	37	4.188.300
Bali	1	0
Nusa Tenggara Barat	90	0
Nusa Tenggara Timur	626	499.471
Kalimantan Barat	0	0
Kalimantan Tengah	0	0
Kalimantan Selatan	0	0
Kalimantan Timur	2	400
Kalimantan Utara	0	0
Sulawesi Utara	0	0
Sulawesi Tengah	0	0
Sulawesi Selatan	125	7.463.604
Sulawesi Tenggara	28	96.000
Gorontalo	0	0
Sulawesi Barat	51	6.815.339
Maluku	38	219.611.295
Maluku Utara	1	0
Papua Barat	13	876.066
Papua	8	0

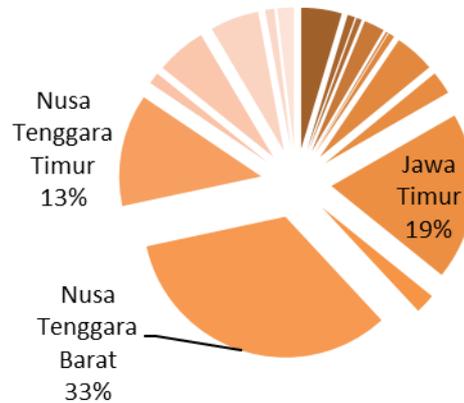
Sumber : PDSDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Oktober 2015

Tabel 3.10. Jumlah Embung Potensi di Indonesia menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Embung Potensi
Aceh	0
Sumatera Utara	59
Sumatera Barat	11
Riau	8
Jambi	0
Sumatera Selatan	0

Provinsi	Jumlah Embung Potensi
Bengkulu	0
Lampung	30
Kepulauan Bangka Belitung	0
Kepulauan Riau	3
DKI Jakarta	0
Jawa Barat	9
Jawa Tengah	59
DI Yogyakarta	34
Jawa Timur	246
Banten	0
Bali	29
Nusa Tenggara Barat	428
Nusa Tenggara Timur	165
Kalimantan Barat	0
Kalimantan Tengah	0
Kalimantan Selatan	0
Kalimantan Timur	0
Kalimantan Utara	0
Sulawesi Utara	0
Sulawesi Tengah	17
Sulawesi Selatan	73
Sulawesi Tenggara	0
Gorontalo	0
Sulawesi Barat	71
Maluku	13
Maluku Utara	0
Papua Barat	0
Papua	24

Sumber : PDSDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Oktober 2015



Gambar 3.4. Jumlah Embung Potensi di Indonesia menurut Provinsi

Pada gambar 3.4 dapat dilihat bahwa jumlah embung potensi di Indonesia menurut provinsi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai presentase yang dimiliki dari banyaknya jumlah embung potensi senilai 33%. Hal ini menandakan, bahwa sebenarnya Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang besar sekali dalam pemanfaatan ataupun pengolahan embung yang ada di provinsi tersebut. Jawa Timur merupakan provinsi kedua setelah Nusa Tenggara Barat yang memiliki jumlah embung potensi yang paling banyak, yaitu dengan nilai presentase senilai 19%. Provinsi ketiga yang memiliki jumlah embung potensi terbanyak berada pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan presentase senilai 13%.

C. Daerah Irigasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi menjelaskan bahwa **irigasi** adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari saluran, bangunan, dan bangunan

pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Dengan adanya alih fungsi lahan irigasi, pemekaran wilayah, dan pengembangan jaringan irigasi, perlu dilakukan penetapan kembali status daerah irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Penetapan status daerah irigasi dimaksudkan untuk menegaskan daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Pembagian wewenang pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi didasarkan pada letak daerah irigasi terhadap wilayah administrasi dan luasan daerah irigasi tersebut. Berdasarkan letaknya, daerah irigasi terdiri dari :

1. Daerah irigasi strategis nasional, yaitu daerah irigasi yang luasnya lebih dari 10.000 ha dengan fungsi dan manfaat penting bagi pemenuhan.
2. Daerah irigasi lintas negara, yaitu daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu negara.
3. Daerah irigasi lintas provinsi, yaitu daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara.
4. Daerah irigasi lintas kabupaten/kota, yaitu daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi.
5. Daerah irigasi utuh pada satu kabupaten/kota, yaitu daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Sementara berdasarkan luasannya, daerah irigasi meliputi :

1. Daerah irigasi dengan luas lebih dari 3.000 ha.

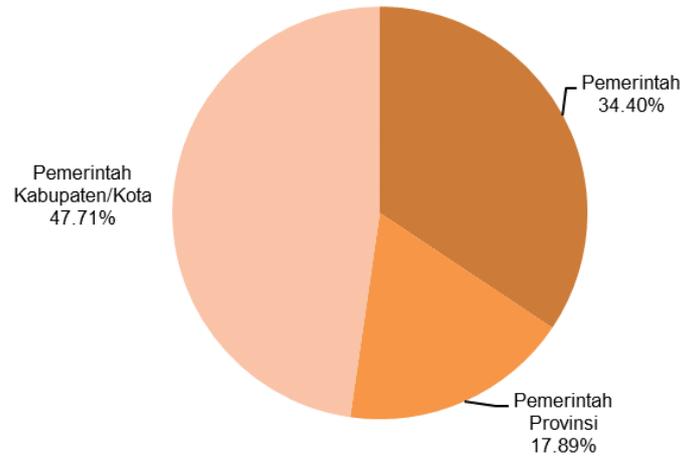
2. Daerah irigasi dengan luas 1.000-3.000 ha.
3. Daerah irigasi dengan kurang dari 1.000 ha.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, maka daerah irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat adalah pada daerah irigasi dengan luas lebih dari 3.000 ha, daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara dan daerah irigasi strategis nasional. Kemudian daerah irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000-3.000 ha, serta daerah irigasi lintas kabupaten/kota. Dan daerah irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi daerah irigasi dengan luas kurang dari 1.000 ha juga daerah irigasi utuh kabupaten/kota.

Daerah Irigasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri adalah daerah irigasi yang sudah dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang jenisnya meliputi :

1. irigasi permukaan;
2. irigasi rawa;
3. irigasi air bawah tanah;
4. irigasi pompa; dan
5. irigasi tambak.

Di bawah ini ditampilkan luasan daerah irigasi berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang dihitung berdasarkan nilai presentase. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah ada sebanyak 406 DI dengan luas 3.142.532 ha atau 34,40% dari luas DI seluruh kewenangan; kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 1.296 DI dengan luas 1.634.467 ha atau 17,89%; dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 54.589 DI dengan luas 4.359.028 ha atau 47,71%.



Gambar 3.5. Persentase Luas Daerah Irigasi di Indonesia menurut Kewenangan

D. Analisis Statistik Infrastruktur Sumber Daya Air

Air merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan. Maka karena itu kualitas air tentulah harus dijaga dari sekarang, karena air akan dibutuhkan pula pada generasi selanjutnya. Namun di samping banyaknya manfaat yang didapat dari air, air juga dapat mendatangkan bencana jika daya rusaknya tidak dikendalikan.

Untuk meminimalisir dampak krisis sumber daya air yang telah atau mungkin akan terjadi, dilakukan upaya penanganan baik secara fisik maupun non fisik. Upaya-upaya yang dilakukan di antaranya ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional, pengentasan kemiskinan dengan memperluas akses terhadap air bersih, penyediaan air baku, pengamanan pantai, dan sebagainya. Salah satu infrastruktur SDA yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional adalah irigasi.

Sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam meningkatkan kinerja pelayanan irigasi, yaitu belum optimalnya dukungan daerah dalam operasional jaringan irigasi, kurangnya kualitas konstruksi bangunan sumber daya air dan kondisi alam yang harus

diantisipasi (seperti debit air yang fluktuatif, serta masalah kualitas dan kuantitas air). Sebagian besar pasokan air untuk daerah irigasi sangat berhubungan dengan daerah aliran sungai musiman. Sampai saat ini, hanya sekitar 800.000 ha daerah irigasi yang pasokan airnya terjamin oleh waduk. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menambah jumlah waduk atau meningkatkan kapasitas waduk yang sudah ada sehingga dapat menjaga suplai air untuk daerah irigasi.

Produksi padi di Indonesia didukung oleh keberadaan daerah irigasi yang mampu melayani seluas 3,1 juta ha lahan di Pulau Jawa serta 2,6 juta ha di Pulau Sumatera. Daerah irigasi yang dimaksud adalah yang diupayakan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, terdiri dari daerah irigasi kewenangan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Namun jika dilihat nilai rasio hasil produksi padi dengan luas daerah irigasi, maka selain Pulau Jawa dengan produktivitasnya sebesar 11,69 ton/ha, Pulau Sulawesi juga memiliki produktivitas yang tinggi, yaitu 6,81 ton/ha di tahun 2014. Yang diharapkan adalah daerah irigasi yang ada dapat dioptimalkan daya gunanya sehingga dapat mendorong produksi padi di setiap daerah. Nilai rasio produksi padi dengan luas daerah irigasi per pulau besar dapat dilihat pada Tabel 3.11. di bawah ini.

Tabel 3.11. Luas Daerah Irigasi dan Produksi Padi menurut Pulau Besar Tahun 2014

Pulau Besar	Jumlah		Produksi Padi Tahun 2014 (ton)	Presentase Produksi Padi (%)	Rasio Produksi Padi dengan Luas Daerah Irigasi (ton/ha)
	DI	Luas (ha)			
Sumatera	10.799	2.660.863	16.628.893	23,47	6,25
Jawa	30.983	3.135.123	36.663.049	51,75	11,69
Bali dan Nusa Tenggara	4.950	704.841	3.800.309	5,36	5,39
Kalimantan	3.216	1.157.760	4.847.679	6,84	4,19
Sulawesi	5.803	1.249.450	8.508.020	12,01	6,81
Maluku dan Papua	540	227.994	398.515	0,56	1,75
Indonesia	56.291	9.136.027	70.846.465	100,00	7,75

Sumber : Luas Daerah Irigasi : Lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Tanggal 21 April 2015
Produksi Padi : BPS RI

Luasan daerah irigasi dan produksi padi juga dapat dilihat pada tingkat provinsi seperti dalam Tabel 3.13. dan Gambar 3.6. - 3.7. Secara kuantitas, produksi padi di tahun 2014 paling tinggi berasal dari Jawa Timur dan Jawa Barat dengan masing-masing mencapai 17,50% dan 16,44% dari produksi padi nasional. Sementara dari nilai rasio produksi padi terhadap daerah irigasi secara nasional tahun 2014 adalah 7,75 ton/ha. Rasio paling kecil adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 0,51 ton/ha dan yang paling tinggi adalah Jawa Barat dan DI Yogyakarta dengan masing-masing 13,36 dan 12,95 ton/ha.

Tabel 3.12. Luas Daerah Irigasi menurut Kewenangannya dan menurut Provinsi

Provinsi	Pemerintah		Provinsi		Kabupaten/Kota	
	DI	Luas (ha)	DI	Luas (ha)	DI	Luas (ha)
Aceh	13	108.622	47	78.468	1.439	203.428
Sumatera Utara	17	101.822	90	113.845	2.040	284.748
Sumatera Barat	13	84.971	68	70.707	3.196	229.342
Riau	14	47.952	58	116.971	188	48.717
Jambi	5	17.971	14	19.068	591	63.068
Sumatera Selatan	29	326.578	55	91.050	815	106.097
Bengkulu	6	33.649	13	16.283	775	61.063
Lampung	18	233.705	20	23.623	1.199	131.303
Kepulauan Bangka Belitung	7	23.341	10	15.494	51	7.251
Kepulauan Riau	-	-	-	-	8	1.726
DKI Jakarta						
Jawa Barat	20	405.510	103	100.600	5.166	365.577
Jawa Tengah	33	347.674	108	86.865	12.174	543.988
DI Yogyakarta	3	12.460	41	13.987	1.389	44.581
Jawa Timur	33	292.830	183	174.087	10.311	533.034
Banten	5	62.209	22	30.856	1.392	120.865
Bali	9	42.589	14	9.271	814	58.486
Nusa Tenggara Barat	16	70.874	35	58.105	925	109.547
Nusa Tenggara Timur	26	106.689	42	60.328	3.069	188.952
Kalimantan Barat	17	68.483	48	62.636	1.127	141.725
Kalimantan Tengah	20	147.782	22	35.753	502	175.328

Provinsi	Pemerintah		Provinsi		Kabupaten/Kota	
	DI	Luas (ha)	DI	Luas (ha)	DI	Luas (ha)
Kalimantan Selatan	23	102.598	40	57.003	932	199.989
Kalimantan Timur	-	-	22	35.060	387	84.462
Kalimantan Utara	3	15.616	6	9.786	67	21.539
Sulawesi Utara	4	20.602	12	18.302	472	46.304
Sulawesi Tengah	8	41.809	30	47.640	623	82.008
Sulawesi Selatan	25	243.315	67	105.666	2.793	298.514
Sulawesi Tenggara	14	66.223	30	48.859	855	97.679
Gorontalo	3	13.188	7	9.868	243	21.168
Sulawesi Barat	2	13.251	23	36.614	592	38.440
Maluku	7	27.483	18	22.570	146	18.727
Maluku Utara	2	7.730	29	37.209	28	9.487
Papua Barat	3	9.666	11	15.010	18	6.171
Papua	8	45.340	8	12.885	262	15.716
Indonesia	406	3.142.532	1.296	1.634.467	54.589	4.359.028

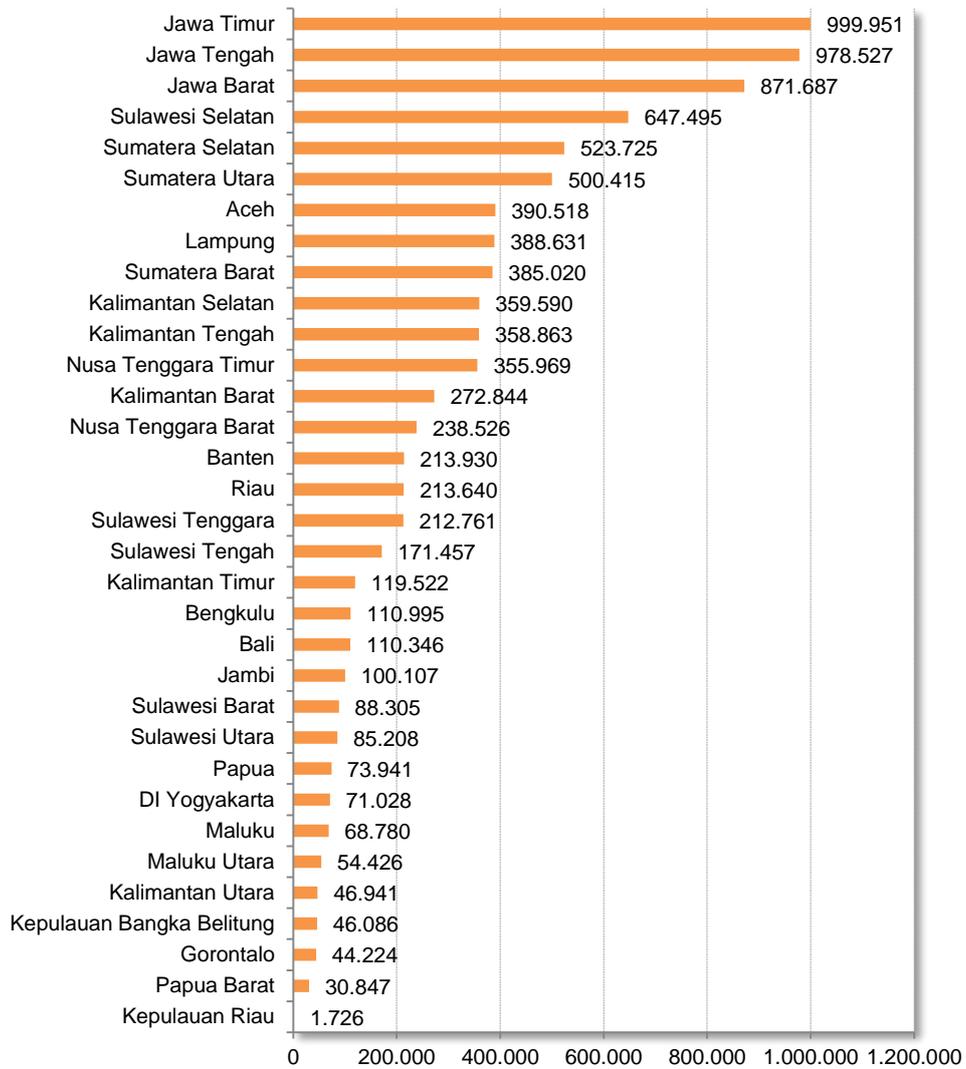
Sumber : Lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Tanggal 21 April 2015

Tabel 3.13. Luas Daerah Irigasi dan Produksi Padi menurut Provinsi Tahun 2014

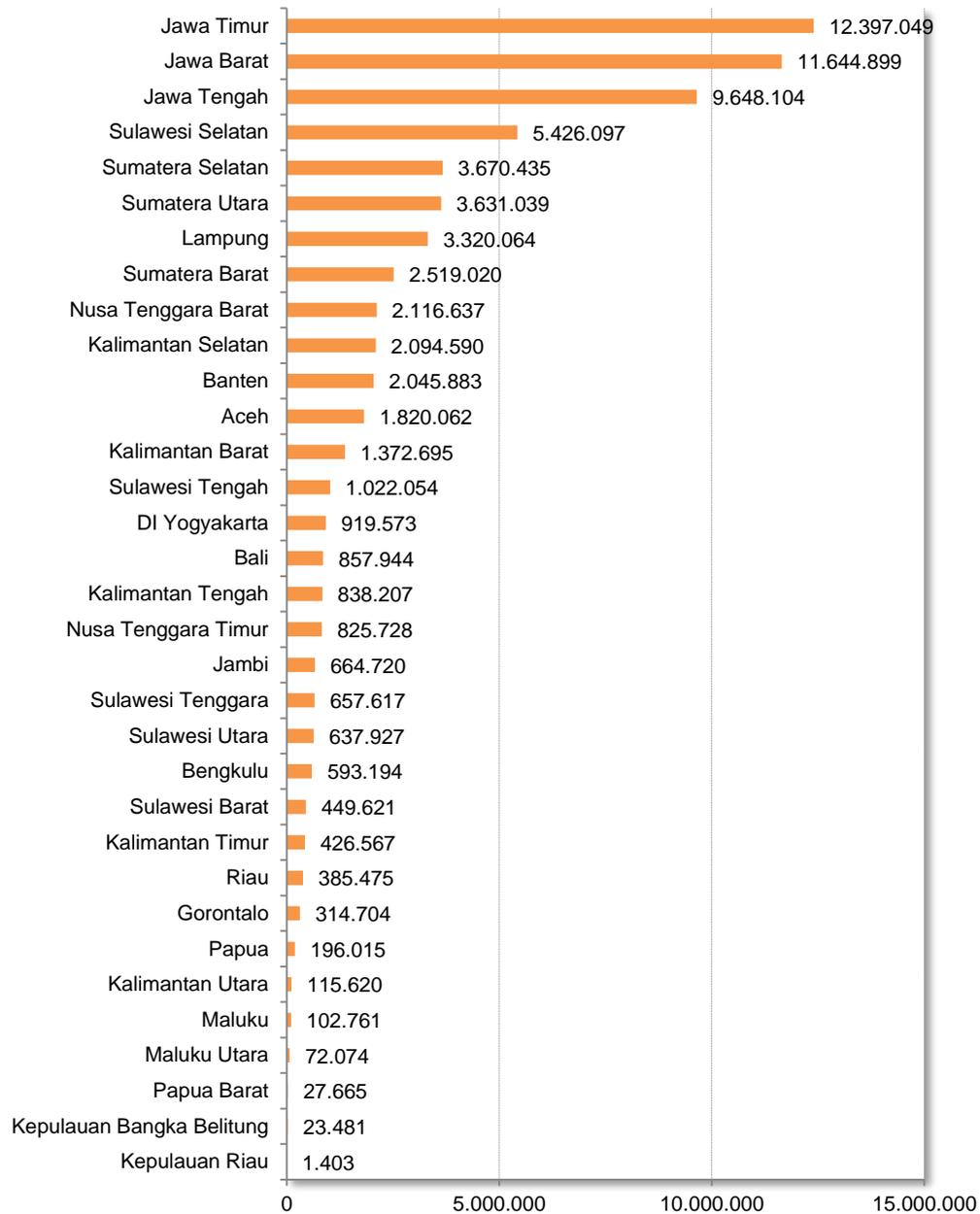
Provinsi	Daerah Irigasi		Produksi Padi Tahun 2014 (ton)	Persentase Produksi Padi (%)	Rasio Produksi Padi dengan Luas Daerah Irigasi (ton/ha)
	DI	Luas (ha)			
Aceh	1.499	390.518	1.820.062	2,57	4,66
Sumatera Utara	2.147	500.415	3.631.039	5,13	7,26
Sumatera Barat	3.277	385.020	2.519.020	3,56	6,54
Riau	260	213.640	385.475	0,54	1,80
Jambi	610	100.107	664.720	0,94	6,64
Sumatera Selatan	899	523.725	3.670.435	5,18	7,01
Bengkulu	794	110.995	593.194	0,84	5,34
Lampung	1.237	388.631	3.320.064	4,69	8,54
Kepulauan Bangka Belitung	68	46.086	23.481	0,03	0,51
Kepulauan Riau	8	1.726	1.403	0,00	0,81
DKI Jakarta	0	0	7.541	0,01	-
Jawa Barat	5.289	871.687	11.644.899	16,44	13,36

Provinsi	Daerah Irigasi		Produksi Padi Tahun 2014 (ton)	Persentase Produksi Padi (%)	Rasio Produksi Padi dengan Luas Daerah Irigasi (ton/ha)
	DI	Luas (ha)			
Jawa Tengah	12.315	978.527	9.648.104	13,62	9,86
DI Yogyakarta	1.433	71.028	919.573	1,30	12,95
Jawa Timur	10.527	999.951	12.397.049	17,50	12,40
Banten	1.419	213.930	2.045.883	2,89	9,56
Bali	837	110.346	857.944	1,21	7,78
Nusa Tenggara Barat	976	238.526	2.116.637	2,99	8,87
Nusa Tenggara Timur	3.137	355.969	825.728	1,17	2,32
Kalimantan Barat	1.192	272.844	1.372.695	1,94	5,03
Kalimantan Tengah	544	358.863	838.207	1,18	2,34
Kalimantan Selatan	995	359.590	2.094.590	2,96	5,82
Kalimantan Timur	409	119.522	426.567	0,60	3,57
Kalimantan Utara	76	46.941	115.620	0,16	2,46
Sulawesi Utara	488	85.208	637.927	0,90	7,49
Sulawesi Tengah	661	171.457	1.022.054	1,44	5,96
Sulawesi Selatan	2.885	647.495	5.426.097	7,66	8,38
Sulawesi Tenggara	899	212.761	657.617	0,93	3,09
Gorontalo	253	44.224	314.704	0,44	7,12
Sulawesi Barat	617	88.305	449.621	0,63	5,09
Maluku	171	68.780	102.761	0,15	1,49
Maluku Utara	59	54.426	72.074	0,10	1,32
Papua Barat	32	30.847	27.665	0,04	0,90
Papua	278	73.941	196.015	0,28	2,65
Indonesia	56.291	9.136.027	70.846.465	100,00	7,75

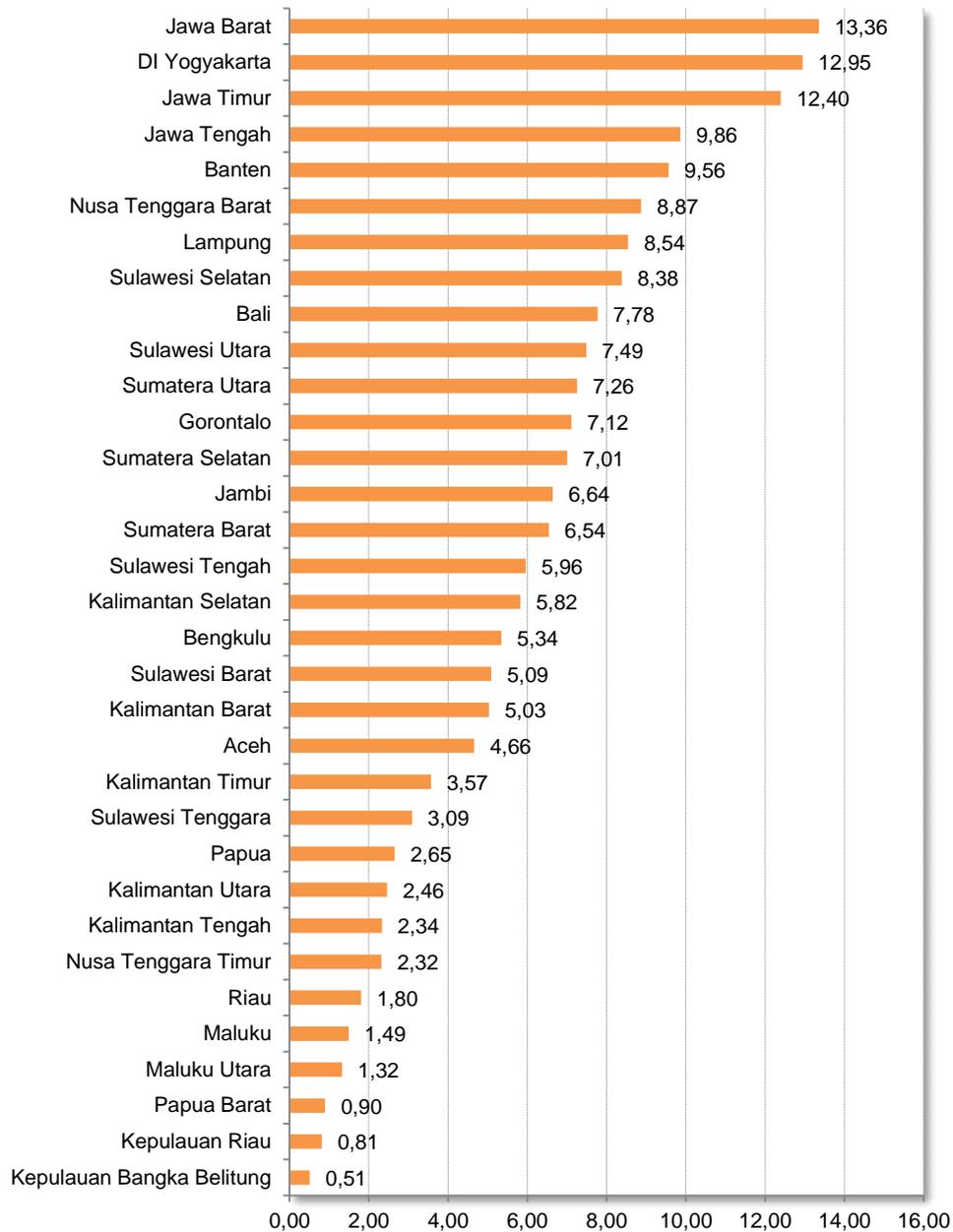
Sumber : Produksi Padi : BPS RI



Gambar 3.6. Luas Daerah Irigasi (ha)



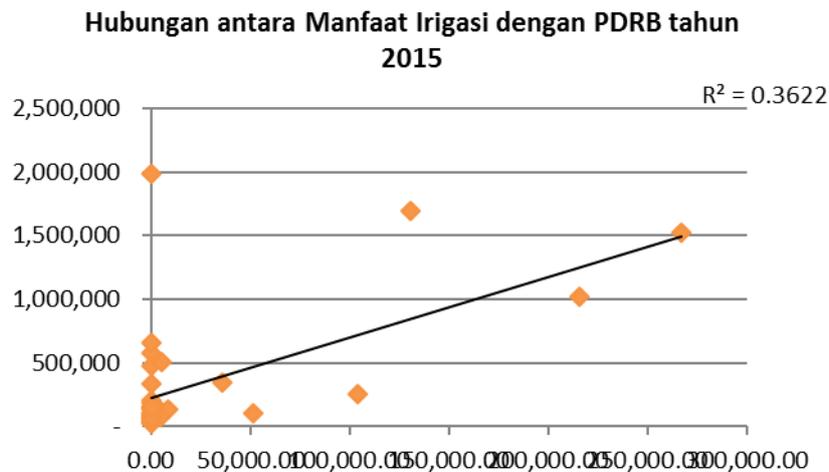
Gambar 3.7. Produksi Padi Tahun 2014 (ton)



Gambar 3.8. Rasio Luas Daerah Irigasi dengan Produksi Padi Tahun 2014 (ton/ha)

E. Korelasi dan Indeks

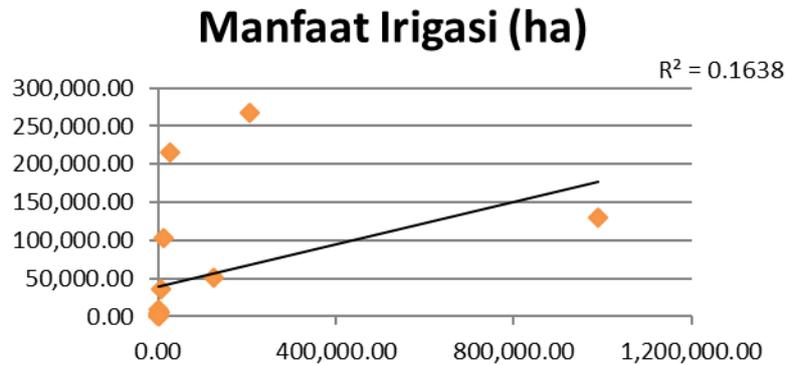
Seperti yang telah diketahui bahwa irigasi mempunyai peranan dalam produksi padi di Indonesia. Berangkat dari peranan yang dimiliki oleh irigasi memungkinkan muncul indikasi bahwa ternyata irigasi juga mempunyai hubungan terhadap harga PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).



Gambar 3.9. Hubungan antara Manfaat Irigasi dengan PDRB tahun 2015

Dari gambar 3.9. dapat dilihat bahwa hubungan antara manfaat irigasi dengan PDRB tahun 2015 berhubungan positif, atau semakin besar nilai manfaat irigasi, maka akan semakin meningkat pula harga PDRB yang didapat. Nilai hubungan antara manfaat irigasi dengan PDRB tahun 2015 senilai 0,362.

Irigasi yang memiliki hubungan dengan PDRB tahun 2015 pun memiliki hubungan dengan volume danau yang ada di setiap provinsi. Hal ini menandakan bahwa besarnya volume pun mempunyai hubungan terhadap manfaat irigasi yang ada di setiap provinsi. Hal ini dapat dilihat dari gambar 3.10.



Gambar 3.10. Hubungan antara Manfaat Irigasi dengan Volume Danau/Situ di Indonesia setiap provinsi

Dari gambar 3.10. dapat dilihat bahwa hubungan antara manfaat irigasi dengan Volume Danau/Situ di Indonesia setiap provinsi berhubungan positif, atau semakin besar volume Danau/Situ di Indonesia setiap provinsi maka akan semakin meningkat pula harga PDRB yang didapat. Namun, hubungan ini tergolong rendah dengan nilai hubungan hanya 0,163.

Nilai Index

Provinsi	Index
Aceh	0,115532
Sumatera Utara	0,022854
Sumatera Barat	0
Riau	0,030455
Jambi	0
Sumatera Selatan	0
Bengkulu	0
Lampung	1,115048
Kepulauan Bangka Belitung	0
Kepulauan Riau	0,165262
DKI Jakarta	0
Jawa Barat	20,89882
Jawa Tengah	2,749086
DI Yogyakarta	0,057412

Provinsi	Index
Jawa Timur	100
Banten	0
Bali	0,165565
Nusa Tenggara Barat	12,6895
Nusa Tenggara Timur	0,111109
Kalimantan Barat	0
Kalimantan Tengah	0
Kalimantan Selatan	0,067722
Kalimantan Timur	0,287768
Kalimantan Utara	0,00307
Sulawesi Utara	0
Sulawesi Tengah	0
Sulawesi Selatan	0,499829
Sulawesi Tenggara	0
Gorontalo	0
Sulawesi Barat	0
Maluku	0
Maluku Utara	0
Papua Barat	0
Papua	0

Tabel diatas merupakan tabel nilai indeks dari volume bendungan yang ada di Indonesia. Didapat, bahwa Jawa Timur lah yang memiliki nilai indeks paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dan tertinggi kedua diperoleh oleh provinsi Jawa Barat.

BAB IV

STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA

Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan sistem transportasi di Indonesia. Wilayah yang memiliki jaringan transportasi yang baik akan memberi dampak kepada perkembangan wilayah dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Seiring dengan bertambahnya populasi penduduk dan jumlah kepemilikan kendaraan membuat infrastruktur jalan dan jembatan memiliki perhatian prioritas.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 menegaskan tiga peran jalan, yaitu :

1. Sebagai bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan dan lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat bangsa dan negara.
3. Sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat dua jenis jalan, yaitu Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan status jalannya. Sementara Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Sistem jaringan jalan terdiri atas Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sekunder. Sistem Jaringan Jalan Primer berperan untuk melayani distribusi barang dan jasa dalam rangka pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, serta menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem Jaringan

Jalan Sekunder berfungsi untuk melayani distribusi barang dan jasa bagi masyarakat di kawasan perkotaan.

Pada setiap kelompok jaringan jalan primer dan sekunder, jalan dibagi menurut fungsinya, yaitu :

1. Jalan Arteri, jalan yang digunakan untuk melayani angkutan utama jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi. Jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan Kolektor, jalan yang digunakan untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal, jalan yang digunakan untuk melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4. Jalan Lingkungan, jalan yang digunakan untuk melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Sementara menurut statusnya, jalan dibagi berdasarkan pembinaannya, yaitu :

1. Jalan Nasional, merupakan jalan Arteri dan Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. Jalan ini menghubungkan ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Tanggung jawab pembinaannya berada pada Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
2. Jalan Provinsi, merupakan Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. Jalan ini menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Gubernur/Pemerintah Provinsi.
3. Jalan Kabupaten, adalah jalan yang merupakan Jalan Lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi. Jalan ini menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota

kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder di wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten juga termasuk dalam Jalan Kabupaten. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Bupati/Pemerintah Kabupaten.

4. Jalan Kota, adalah jalan yang merupakan Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder. Jalan ini menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil, antar persil, serta antar pusat permukiman di dalam kota. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Walikota/Pemerintah Kota.
5. Jalan Desa, adalah Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta Jalan Lingkungan. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Bupati/Pemerintah Kabupaten.

A. Jalan Nasional

Dalam Buku Statistik Jalan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Marga menjelaskan bahwa untuk mengetahui kondisi suatu ruas jalan dapat dilihat berdasarkan nilai IRI (*International Roughness Index*). IRI merupakan besaran nilai ketidakrataan permukaan jalan, yang diperoleh dari panjang kumulatif turun naiknya permukaan per satuan panjang. Secara matematis, IRI adalah perbandingan antara kumulatif panjang jalan rusak/berlubang (dalam satuan m) terhadap panjang jalan total (dalam satuan km). Sehingga semakin besar nilai IRI (dalam satuan m/km), maka semakin buruk keadaan permukaan jalannya. Nilai IRI diperoleh dengan melakukan survai menggunakan suatu alat dan kendaraan khusus.

Pada Tabel 4.1 - 4.3 ditampilkan data mengenai kondisi jalan yang diperoleh dari *Interurban Road Management System* (IRMS). Data dalam IRMS diperoleh melalui survai yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga khususnya Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) di setiap provinsi. Satker P2JN melaksanakan survai kondisi jalan sebanyak dua kali dan survai lalu lintas serta data jalan lainnya sebanyak satu kali dalam setahun.

Sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum No.630/KPTS/M/2009, jalan nasional di Indonesia sepanjang 47.535,22 km. Pada survai Semester 2 tahun 2015, diketahui bahwa jalan nasional dalam kondisi baik sepanjang 27.476,68km atau 57,8%; dalam kondisi sedang 14.563,6 km atau 30,58%; kondisi rusak ringan 3.050,32 km atau 6,42%; dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 1.953,59 km atau 4,11%.

Tabel 4.1. Panjang Jalan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Status Februari 2016

Provinsi	Kondisi Permukaan Jalan (km)				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Aceh	1.334,07	621,46	80,93	65,61	2.102,07
Sumatera Utara	572,08	1.665,71	202,00	192,44	2.632,22
Sumatera Barat	283,40	940,68	116,13	108,60	1.448,81
Riau	972,30	280,86	31,66	51,80	1.336,61
Kepulauan Riau	445,70	63,42	77,60	0,10	586,83
Jambi	978,88	188,02	79,88	71,15	1.317,93
Bengkulu	545,51	217,43	19,30	10,37	792,61
Sumatera Selatan	1.184,59	221,47	189,90	4,20	1.600,16
Bangka Belitung	568,57	31,53	0,30	0,00	600,40
Lampung	621,08	518,14	75,48	77,52	1.292,21
DKI Jakarta	13,60	39,21	0,50	0,00	53,31
Banten	249,11	270,65	31,60	13,54	564,88
Jawa Barat	847,73	826,59	47,68	67,20	1.789,20
Jawa Tengah	753,81	613,58	126,73	23,97	1.518,09
DI Yogyakarta	220,70	25,84	1,27	0,10	247,91
Jawa Timur	1.647,44	614,27	91,32	8,20	2.361,23
Kalimantan Barat	1.736,45	204,04	85,19	91,89	2.117,57
Kalimantan Tengah	1.079,20	727,25	133,13	62,50	2.002,08
Kalimantan Timur	768,73	833,76	65,80	42,61	1.710,90
Kalimantan Utara	309,19	169,44	44,97	61,56	585,16

Provinsi	Kondisi Permukaan Jalan (km)				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Kalimantan Selatan	808,67	330,15	40,91	24,57	1.204,30
Bali	460,94	156,25	11,80	0,40	629,40
Nusa Tenggara Barat	735,65	187,52	6,94	4,45	934,55
Nusa Tenggara Timur	1.184,89	452,50	107,87	112,65	1.857,91
Sulawesi Utara	813,23	653,70	118,17	78,81	2.181,95
Gorontalo	499,94	147,41	64,51	36,73	748,60
Sulawesi Tengah	1.292,52	934,45	107,44	39,00	2.373,40
Sulawesi Barat	455,09	201,26	104,79	2,02	763,17
Sulawesi Selatan	849,44	778,23	81,18	37,06	1.745,92
Sulawesi Tenggara	767,64	555,12	108,32	66,74	1.497,81
Maluku	1.276,74	136,50	288,81	69,62	1.771,67
Maluku Utara	868,87	103,52	70,50	160,46	1.203,34
Papua	1.564,00	623,16	213,56	235,92	2.636,65
Papua Barat	766,91	203,49	224,16	131,81	1.326,38
Indonesia	27.476,68	14.536,60	3.050,32	1.953,59	47.535,22

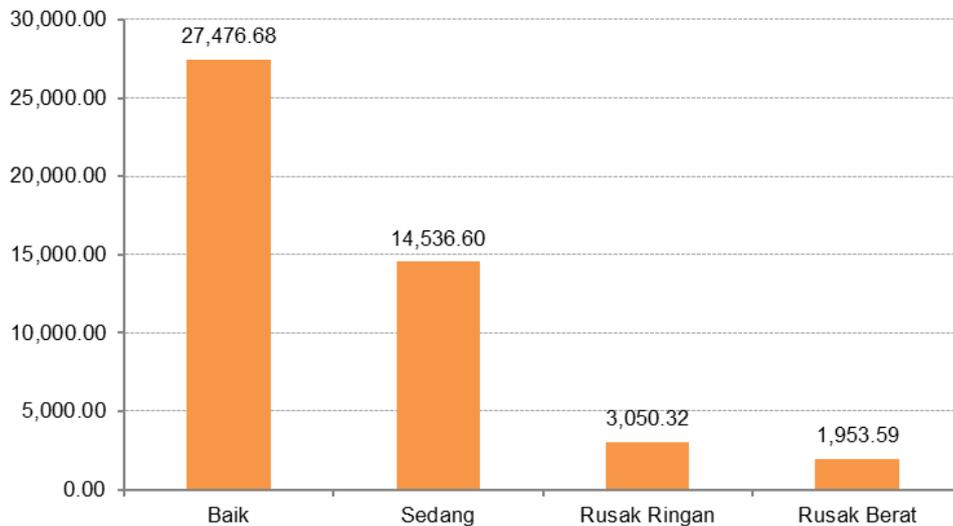
Sumber : Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program
Direktorat Jenderal Bina Marga

Tabel 4.2. Persentase Jalan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan
Status Februari 2016

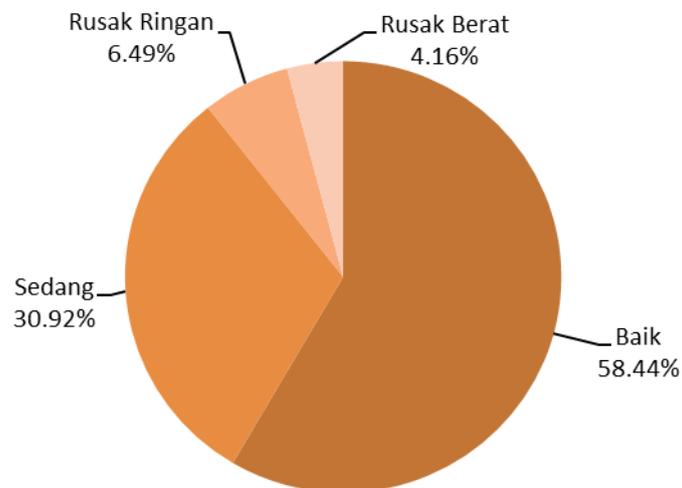
Provinsi	Kondisi Permukaan Jalan (%)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Aceh	63,46	29,56	3,85	3,12
Sumatera Utara	21,73	63,28	7,67	7,31
Sumatera Barat	19,56	64,93	8,02	7,50
Riau	72,74	21,01	2,37	3,88
Kepulauan Riau	75,95	10,81	13,22	0,02
Jambi	74,27	14,27	6,06	5,40
Bengkulu	68,82	27,43	2,43	1,31
Sumatera Selatan	74,03	13,84	11,87	0,26

Provinsi	Kondisi Permukaan Jalan (%)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Bangka Belitung	94,70	5,25	0,05	0,00
Lampung	48,06	40,10	5,84	6,00
DKI Jakarta	25,51	73,55	0,94	0,00
Banten	44,10	47,91	5,59	2,40
Jawa Barat	47,38	46,20	2,67	3,76
Jawa Tengah	49,65	40,42	8,35	1,58
DI Yogyakarta	89,02	10,42	0,51	0,04
Jawa Timur	69,77	26,01	3,87	0,35
Kalimantan Barat	82,00	9,64	4,02	4,34
Kalimantan Tengah	53,90	36,32	6,65	3,12
Kalimantan Timur	44,93	48,73	3,85	2,49
Kalimantan Utara	52,84	28,96	7,68	10,52
Kalimantan Selatan	67,15	27,41	3,40	2,04
Bali	73,24	24,83	1,87	0,06
Nusa Tenggara Barat	78,72	20,06	0,74	0,48
Nusa Tenggara Timur	63,78	24,36	5,81	6,06
Sulawesi Utara	37,27	29,96	5,42	3,61
Gorontalo	66,78	19,69	8,62	4,91
Sulawesi Tengah	54,46	39,37	4,53	1,64
Sulawesi Barat	59,63	26,37	13,73	0,26
Sulawesi Selatan	48,65	44,57	4,65	2,12
Sulawesi Tenggara	51,25	37,06	7,23	4,46
Maluku	72,06	7,70	16,30	3,93
Maluku Utara	72,20	8,60	5,86	13,33
Papua	59,32	23,63	8,10	8,95
Papua Barat	57,82	15,34	16,90	9,94
Indonesia	57,80	30,58	6,42	4,11

Sumber : Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program
Direktorat Jenderal Bina Marga



Gambar 4.1. Panjang Jalan Nasional menurut Kondisi Umum Jalan Status Februari 2016



Gambar 4.2. Persentase Jalan Nasional menurut Kondisi Umum Jalan Status Februari 2016

Berikut akan ditampilkan kondisi jalan berdasarkan kemantapannya. Jalan yang dikatakan dalam kondisi mantap adalah jalan yang dalam kondisi baik dan sedang. Sementara jalan dikatakan tidak mantap jika jalan berada dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Jalan nasional dalam kondisi mantap berdasarkan hasil survei

Semester 2 Tahun 2015 sepanjang 42.013,28 km atau 89,36% dan dalam kondisi tidak mantap sepanjang 5.003,91 km atau 10,64%.

Tabel 4.3. Panjang dan Persentase Jalan Nasional menurut Provinsi dan Kemantapan Jalan Status Februari 2016

Provinsi	Kemantapan Jalan			
	Mantap		Tidak Mantap	
	Panjang (km)	Persen (%)	Panjang (km)	Persen (%)
Aceh	1.955,53	93,03	146,54	6,97
Sumatera Utara	2.237,78	85,01	394,44	14,99
Sumatera Barat	1.224,08	84,49	224,73	15,51
Riau	1.253,16	93,76	83,46	6,24
Kepulauan Riau	509,12	86,76	77,70	13,24
Jambi	1.166,91	88,54	151,02	11,46
Bengkulu	762,94	96,26	29,67	3,74
Sumatera Selatan	1.406,06	87,87	194,10	12,13
Bangka Belitung	600,10	99,95	0,30	0,05
Lampung	1.139,22	88,16	153,00	11,84
DKI Jakarta	52,81	99,06	0,50	0,94
Banten	519,75	92,01	45,13	7,99
Jawa Barat	1.674,32	93,58	114,88	6,42
Jawa Tengah	1.367,39	90,07	150,70	9,93
DI Yogyakarta	246,55	99,45	1,37	0,55
Jawa Timur	2.261,71	95,79	99,52	4,21
Kalimantan Barat	1.940,49	91,64	177,08	8,36
Kalimantan Tengah	1.806,45	90,23	195,64	9,77
Kalimantan Timur	1.602,49	93,66	108,41	6,34
Kalimantan Utara	478,63	81,79	106,53	18,21
Kalimantan Selatan	1.138,82	94,56	65,48	5,44
Bali	617,20	98,06	12,20	1,94
Nusa Tenggara Barat	923,16	98,78	11,39	1,22
Nusa Tenggara Timur	1.637,39	88,13	220,52	11,87
Sulawesi Utara	1.466,93	88,16	196,98	11,84
Gorontalo	647,36	86,48	101,24	13,52

Provinsi	Kemantapan Jalan			
	Mantap		Tidak Mantap	
	Panjang (km)	Persen (%)	Panjang (km)	Persen (%)
Sulawesi Tengah	2.226,96	93,83	146,44	6,17
Sulawesi Barat	656,36	86,00	106,81	14,00
Sulawesi Selatan	1.627,68	93,23	118,24	6,77
Sulawesi Tenggara	1.322,76	88,31	175,06	11,69
Maluku	1.413,24	79,77	358,43	20,23
Maluku Utara	972,38	80,81	230,96	19,19
Papua Barat	970,41	73,16	355,97	26,84
Papua	2.187,16	82,95	449,48	17,05
Indonesia	42.013,28	89,36	5.003,91	10,64

Sumber : Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga

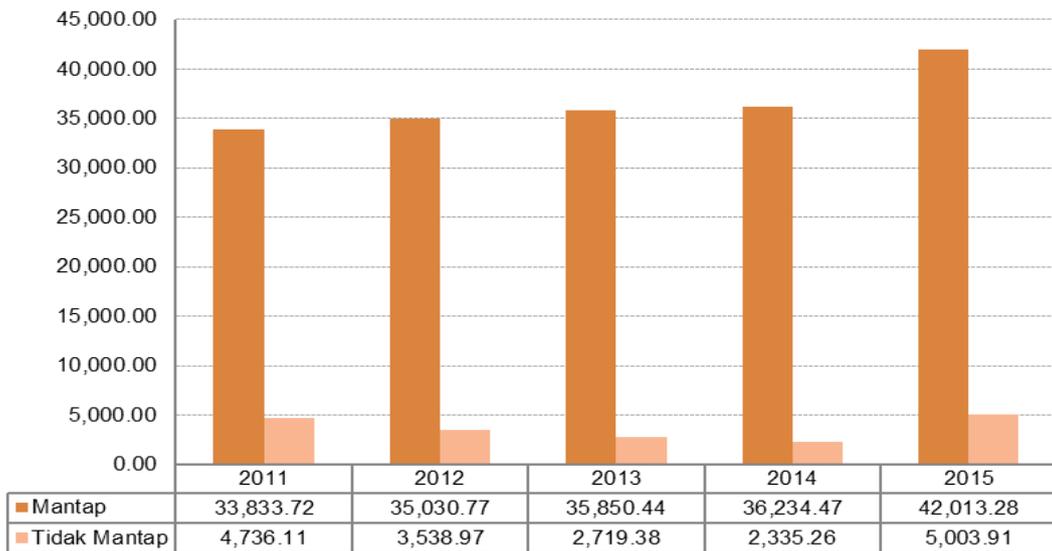
Secara umum perkembangan jalan nasional pada tahun 2015 mengalami kemunduran. Dapat dilihat pada Tabel 4.4. panjang jalan dalam kondisi baik terus bertambah dari tahun 2011 yang sepanjang 21.685,22 menjadi 27.476,68, begitupun untuk kondisi sedang dari 12.148,50 menjadi 15.563,60. Namun panjang jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat pun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Persentase kemantapan jalan nasional dari tahun 2011 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.4, Gambar 4.3, dan Gambar 4.4. Persentase kemantapan jalan yang semula sebesar 93,95% pada tahun 2014 menjadi 89,36% di tahun 2015. Sedangkan persentase jalan dengan kondisi tidak mantap sebesar 10,64%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,05%.

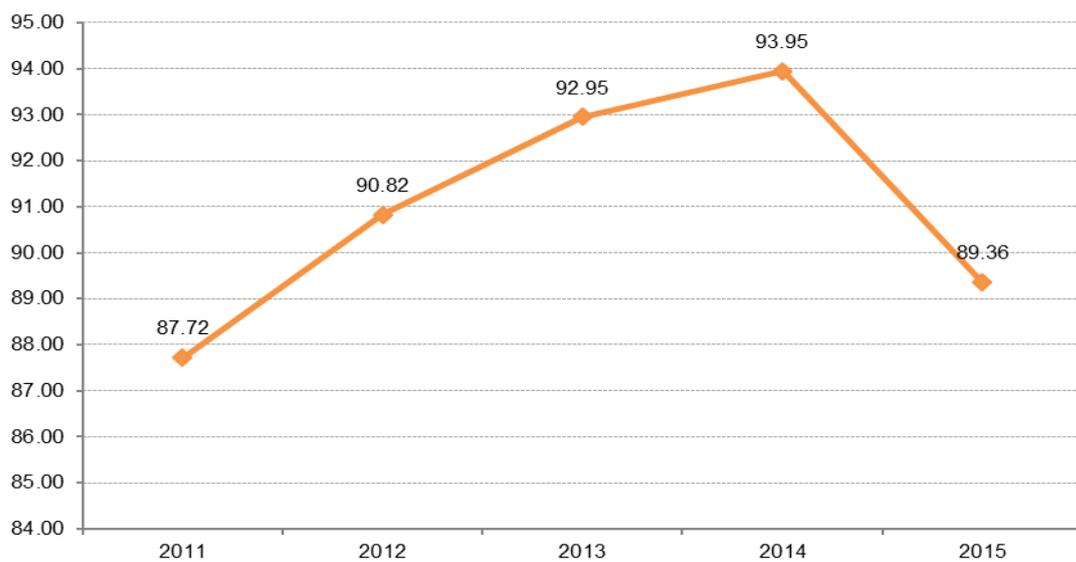
Tabel 4.4. Capaian Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
	Panjang (km)	Persen (%)										
2011	21.685,22	56,22	12.148,50	31,50	2.869,09	7,44	1.867,02	4,84	33.833,72	87,72	4.736,11	12,28
2012	22.369,21	58,00	12.661,56	32,83	2.174,34	5,64	1.364,63	3,54	35.030,77	90,82	3.538,97	9,18
2013	24.545,12	63,64	11.305,33	29,31	1.516,45	3,93	1.202,93	3,12	35.850,44	92,95	2.719,38	7,05
2014	23.913,59	62,00	12.320,96	31,94	1.204,36	3,12	1.130,90	2,93	36.234,47	93,95	2.335,26	6,05
2015	27.476,68	58,44	14.536,60	30,92	3.050,32	6,49	1.953,59	4,16	42.013,28	89,36	5.003,91	10,64

Sumber : Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga



Gambar 4.3. Capaian Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2011-2015



Gambar 4.4. Persentase Panjang Jalan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2011-2015

B. Jalan Tol

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertekad terus melakukan pengembangan infrastruktur jalan untuk mendorong terciptanya pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi, salah satunya adalah melalui pembangunan jalan tol. Jalan tol atau disebut jalan bebas hambatan adalah jalan yang masuknya dikendalikan secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan dan median, serta paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur setiap arah dengan lebar lajur minimal 3,5 m. Jalan tol merupakan jalan umum yang menjadi bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Jalan Tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta, Bogor dan Ciawi merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang diresmikan penggunaannya pada tahun 1978. Upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan jalan tol sempat terhenti pada tahun 1997 dikarenakan terjadinya krisis moneter. Pada tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian di tahun 2002 pemerintah meneruskan proyek-proyek infrastruktur dan melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek jalan tol yang tertunda.

Percepatan pembangunan jalan tol kembali dilakukan mulai tahun 2005 dengan dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator jalan tol yang selama ini dipegang oleh PT Jasa Marga. Ke depannya, pemerintah akan melakukan pembangunan jalan tol dengan tiga metode pendanaan, yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, pembiayaan oleh pemerintah dan swasta, dan pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dengan operasional oleh swasta.

Dengan terbukanya peluang investasi bagi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan tol dapat mengisi keterbatasan dana pemerintah di satu sisi dan membawa manfaat untuk berinvestasi dari pendapatan tol. Selain itu, manfaat yang dirasakan masyarakat selaku pengguna jalan berupa penghematan biaya operasi

kendaraan pengguna jalan tol, penghematan waktu tempuh dan peningkatan kenyamanan bagi pengguna jalan tol maupun non tol karena perpindahan sebagian kendaraan ke jalan tol. Manfaat lain bagi pemerintah adalah pengembangan wilayah serta peningkatan ekonomi sebagai hasil dari pengalihan alokasi dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari kota besar, pada umumnya, ke daerah yang belum berkembang.

Dengan diresmikannya penggunaan beberapa ruas tol baru, salah satunya adalah Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia, maka sampai tahun 2015 jalan tol yang beroperasi di Indonesia ada sebanyak 33 ruas dengan panjang 949 km. Jalan tol tersebut berada di empat pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi. Dari jumlah tersebut, sepanjang 550,33 km dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan 398,67 km lainnya oleh perusahaan swasta lain.

Tabel 4.5. Progres Pembangunan Jalan Tol di Indonesia

Status	Banyaknya Ruas	Panjang (km)	Nilai Investasi (milyar rupiah)
Beroperasi	33	949,00	
Penandatanganan Perjanjian Konsensi (PPJT)	25	905,15	146.636,09
Dalam Proses Tender	2	40,57	1.886,00
Persiapan Tender	4	233,84	31.884,00

Sumber : Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Juni 2015

Tabel 4.6. Jalan Tol Beroperasi di Indonesia

Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		Investor	Mulai Beroperasi
	Jalan Utama	Akses		
Jakarta-Bogor-Ciawi	50,00	9,00	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1978
Jakarta - Tangerang	27,00	6,00	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1983 - 1998
Surabaya - Gempol	43,00	6,00	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1984
Jakarta - Cikampek	72,00	11,00	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1985
Padalarang - Cileunyi	35,64	28,77	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1986

Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		Investor	Mulai Beroperasi
	Jalan Utama	Akses		
Prof DR. Soedyatmo	14,30		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1986
Lingkar Dalam Kota Jakarta	23,55		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1988
Belmera	33,70	9,00	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1989 & 1996
Semarang Seksi A, B, C	24,75		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1987, 1983 & 1998
Ulujami - Pondok Aren	5,55		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2001
Palimanan - Kanci	26,30		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1998
JORR Selatan (Pondok Pinang - Taman Mini)	14,25		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1995 - 1996
JORR W2 Selatan (Pondok Pinang - Veteran)	6,20		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1991
JORR E1 Selatan (Taman Mini - Hankam Raya)	4,00		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1998
JORR E1 Utara (Hankam Raya - Cikunir)	8,10		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2005
JORR E2 (Cikunir - Cakung)	9,07		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2001 - 2003
JORR E3 (Cakung-Cilincing)	3,75		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2005
Cikampek - Padalarang	58,50		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2005
Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu)	20,90		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2009
Tangerang-Merak	73,00		PT Marga Mandala Sakti	1987 - 1996
Ir. Wiyoto Wiyono, MSc.	15,50		PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	1990
Harbour Road	11,50		PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	1995 - 1996
Surabaya - Gresik	20,70		PT Margabumi Matraraya	1993 - 1996
Ujung Pandang Tahap I	6,05		PT Bosawa Marga Nusantara	1998
Serpong - Pondok Aren	7,25		PT Bintaro Serpong Damai	1999
SS Waru - Bandara Juanda	12,80		PT Citra Margatama Surabaya	2008
Makassar Seksi IV	11,60		PT Jalan Tol Seksi Empat	2008
Bogor Ring Road Seksi I dan IIA	5,80		PT Marga Sarana Jabar	2009 - 2014
Kanci - Pejagan	35,00		PT Semesta Marga Raya	2010
JORR W1	9,85		PT Jakarta Lingkar Baratsatu	2010
Surabaya - Mojokerto Seksi IA	1,89		PT Marga Nujyasumo Agung	2011
Semarang - Solo Seksi I dan II	22,95		PT Trans Marga Jateng	2011

Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		Investor	Mulai Beroperasi
	Jalan Utama	Akses		
Cinere - Jagorawi Seksi I	3,70		PT Translingkar Kita Jaya	2012
Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara)	10,00		PT Jasa Marga Bali Tol	2013
JORR W2 Utara	7,87		PT Marga Lingkar Jakarta	2013-2014
Kertosono - Mojokerto Seksi I	14,41		PT Marga Harjaya Infrastruktur	2014
Gempol - Pandaan	12,05		PT Jasa Marga Pandaan Tol	2015
Cikopo - Palimanan	116,75		PT Lintas Marga Sedaya	2015
Jumlah Dioperasikan Oleh PT Jasa Marga	480,56	69,77		
Jumlah Dioperasikan Oleh Investor Swasta	398,67	0,00		
Jumlah Jalan Utama & Jalan Akses	949,00			

Sumber : Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Juni 2015

Ada pula ruas-ruas jalan tol dimana Pemerintah telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Jalan tol PPJT tersebut ada dalam tahap desain dan/atau pengadaan tanah dan/atau konstruksi. Jalan tol yang dalam tahap penandatanganan PPJT tersebut ada sebanyak 25 ruas dengan panjang 905,15 km. Progres pembangunan serta jumlah dan panjang jalan tol di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7. Jalan Tol Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Nilai Investasi (milyar rupiah)	Investor	Penandatanganan PPJT
Surabaya - Mojokerto	36,27	3.379,00	PT Marga Nujujasumo Agung	04 Juni 2006
Bogor Ring Road Section II & III	7,15	983,00	PT Marga Sarana Jabar	29 Mei 2006
Cinere - Jagorawi (Cimanggis)	14,64	2.621,00	PT Translingkar Kita Jaya	30 Juni 2006
Kertosono - Mojokerto	40,50	3.480,00	PT Marga Harjaya Infrastruktur	29 Mei 2006
Semarang - Solo*)	72,64	8.144,00	PT Trans Marga Jateng	15 Desember 2006

Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Nilai Investasi (milyar rupiah)	Investor	Penandatanganan PPJT
Gempol - Pasuruan	34,15	2.769,00	PT Trans Marga Jatim Pasuruan	29 Mei 2006
Gempol - Pandaan	13,61	1.167,00	PT Margabumi Adhikaraya	19 Desember 2006
Depok - Antasari	21,54	3.000,00	PT Citra Wasphtowa	29 Mei 2006
Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	21,04	7.581,00	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	22 Februari 2007
Cibitung - Cilincing	34,02	4.220,00	MTD-CTP Expressways	29 Januari 2007
Pejagan - Pemalang	57,05	5.518,00	PT Pejagan Pemalang Tol Road	21 Juli 2006
Pemalang - Batang	39,20	4.077,00	PT Pemalang Batang Tol Road	21 Juli 2006
Semarang - Batang	75,00	7.214,00	PT Marga Setiapuritama	21 Juli 2006
Ciawi - Sukabumi	54,00	7.775,00	PT Trans Jabar Tol	27 Juli 2007
Waru (Aloha) Wonokromo - Tanjung Perak	18,20	11.110,00	PT Margaraya Jawa Tol	19 Juli 2007
Pasuruan - Probolinggo	31,30	3.551,00	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	25 Juni 2007
Kunciran - Serpong	11,19	2.623,00	PT Marga Trans Nusantara	22 September 2008
Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	14,19	3.507,00	PT Marga Kunciran Cengkareng	27 Juli 2007
Cimanggis - Cibitung	25,39	4.524,00	PT Cimanggis Cibitung Tollways	03 Februari 2009
Serpong - Cinere	10,14	2.219,00	PT Cinere Serpong Jaya	28 Juni 2011
Solo - Ngawi	69,20	5.138,00	PT Solo Ngawi Jaya	28 Juni 2011
Ngawi - Kertosono	49,50	3.832,00	PT Ngawi Kertosono Jaya	28 Juni 2011
6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta	69,77	40.310,09	PT Jakarta Toll Road Development	27 Juli 2014
Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi	60,00	6.290,00	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	05 Januari 2015
Medan - Binjai	25,46	1.604,00	PT Utama Karya	27 Maret 2015
Total	905,15	146.636,09		

Sumber : Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Juni 2015

Tabel 4.8. Jalan Tol dalam Proses Tender

Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Nilai Investasi (milyar rupiah)
Serpong - Balaraja	30,00	5.177,00
Pasirkoja - Soreang	10,57	1.886,00
Total	40,57	7.063,00

Sumber : Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Juni 2015

Tabel 4.9. Jalan Tol dalam Persiapan Tender

Jalan Tol	Panjang	Harga Tanah (milyar rupiah)	Nilai Investasi (milyar rupiah)
Cileunyi - Sumedang - Dawuan	58,50	1.295,00	12.331
Manado - Bitung	38,70	365,00	4.163
Pandaan - Malang	37,62	294,00	3.990
Balikpapan - Samarinda	99,02	1.266,64	11.400
Total	233,84	3.220,64	31.884,00

Sumber : Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Juni 2015

C. Jembatan Nasional

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak sungai dan juga lembah. Oleh karena itu, keberadaan jembatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus oleh sungai, saluran, lembah, selat, laut, jalan raya dan jalan kereta api. Teknologi pembangunan jembatan juga telah berkembang dengan pesat, mulai dari perencanaan, teknologi bahan (beton, baja, kabel), teknologi perencanaan dan pelaksanaan serta teknologi rehabilitasi dan perkuatan.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menggunakan suatu sistem pengelolaan jembatan yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Jembatan (*Bridge Management System/BMS*) untuk pemantauan dan membuat perencanaan jembatan secara sistematis. Peran dari sistem ini terutama untuk penyimpanan data atau inventarisasi pekerjaan konstruksi, rehabilitasi, serta *monitoring* kondisi jembatan.

Data yang terdapat dalam BMS adalah hasil dari survai jembatan yang dilaksanakan satu kali setiap tahunnya oleh Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) di setiap provinsi.

Berdasarkan data BMS tahun 2015, terdapat sebanyak 33.356 unit jembatan pada ruas jalan nasional dengan kategori panjang lebih atau sama dengan 6 meter. Jumlah tersebut sama dengan total panjang jembatan 481.911 m.

Tabel 4.10. Jumlah Jembatan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Tahun 2015

Provinsi	Jumlah Jembatan (unit)						Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus	
Aceh	771	126	61	958	74	55	2.045
Sumatera Utara	157	227	372	756	133	16	1.661
Sumatera Barat	137	141	187	465	108	13	1.051
Riau	46	100	179	325	85	4	739
Kepulauan Riau	35	53	32	120	12	0	252
Jambi	98	113	78	289	18	2	598
Bengkulu	56	56	60	172	69	46	459
Sumatera Selatan	18	173	130	321	122	0	764
Bangka Belitung	45	31	23	99	4	0	202
Lampung	187	174	48	409	17	19	854
DKI Jakarta	32	4	9	45	6	2	98
Banten	85	35	51	171	26	2	370
Jawa Barat	198	239	271	708	131	10	1.557
Jawa Tengah	334	182	206	722	109	1	1.554
DI Yogyakarta	108	10	5	123	3	0	249
Jawa Timur	413	319	103	835	41	3	1.714
Kalimantan Barat	221	118	334	673	214	13	1.573
Kalimantan Tengah	370	37	63	470	21	89	1.050
Kalimantan Timur	181	73	40	294	0	0	588
Kalimantan Utara	14	143	30	187	6	3	383
Kalimantan Selatan	348	94	76	518	33	8	1.077
Bali	231	48	12	291	6	0	588

Provinsi	Jumlah Jembatan (unit)						Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus	
Nusa Tenggara Barat	104	151	133	388	43	4	823
Nusa Tenggara Timur	78	198	101	377	64	3	821
Sulawesi Utara	69	281	382	732	25	4	1.493
Gorontalo	124	26	80	230	43	0	503
Sulawesi Tengah	532	142	316	990	35	0	2.015
Sulawesi Barat	189	47	21	257	11	1	526
Sulawesi Selatan	288	126	174	588	68	5	1.249
Sulawesi Tenggara	279	219	214	712	21	6	1.451
Maluku	278	346	85	709	46	5	1.469
Maluku Utara	235	81	223	539	137	109	1.324
Papua Barat	259	69	26	354	14	12	734
Papua	260	166	197	623	179	97	1.522
Indonesia	6.780	4.348	4.322	15.450	1.924	532	33.356

Sumber : Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Tabel 4.11. Persentase Jumlah Jembatan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Tahun 2015

Provinsi	Jumlah Jembatan (%)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus
Aceh	70,8	11,57	5,6	6,8	5,05	0,18
Sumatera Utara	17,35	25,08	41,1	14,7	1,77	0
Sumatera Barat	23,38	24,06	31,91	18,43	2,22	0
Riau	11,11	24,15	43,24	20,53	0,97	0
Kepulauan Riau	26,52	40,15	24,24	9,09	0	0
Jambi	31,61	36,45	25,16	5,81	0,65	0,32
Bengkulu	19,51	19,51	20,91	24,04	16,03	0
Sumatera Selatan	4,06	39,05	29,35	27,54	0	0
Bangka Belitung	43,69	30,1	22,33	3,88	0	0
Lampung	42,02	39,1	10,79	3,82	4,27	0
DKI Jakarta	60,38	7,55	16,98	11,32	3,77	0
Banten	42,5	17,5	25,5	13	1	0,5

Provinsi	Jumlah Jembatan (%)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus
Jawa Barat	23,32	28,15	31,92	15,43	1,18	0
Jawa Tengah	40,1	21,85	24,73	13,09	0,12	0,12
DI Yogyakarta	85,71	7,94	3,97	2,38	0	0
Jawa Timur	46,93	36,25	11,7	4,66	0,34	0,11
Kalimantan Barat	24,56	13,11	37,11	23,78	1,44	0
Kalimantan Tengah	63,79	6,38	10,86	3,62	15,34	0
Kalimantan Timur	61,56	24,83	13,61	0	0	0
Kalimantan Utara	7,14	72,96	15,31	3,06	1,53	0
Kalimantan Selatan	62,03	16,76	13,55	5,88	1,43	0,36
Bali	77,78	16,16	4,04	2,02	0	0
Nusa Tenggara Barat	23,91	34,71	30,57	9,89	0,92	0
Nusa Tenggara Timur	17,57	44,59	22,75	14,41	0,68	0
Sulawesi Utara	9,01	36,68	49,87	3,26	0,52	0,65
Gorontalo	45,42	9,52	29,3	15,75	0	0
Sulawesi Tengah	51,85	13,84	30,8	3,41	0	0,1
Sulawesi Barat	70,26	17,47	7,81	4,09	0,37	0
Sulawesi Selatan	43,57	19,06	26,32	10,29	0,76	0
Sulawesi Tenggara	37,75	29,63	28,96	2,84	0,81	0
Maluku	33,21	41,34	10,16	5,5	0,6	9,2
Maluku Utara	29,9	10,31	28,37	17,43	13,87	0,13
Papua Barat	66,24	17,65	6,65	3,58	3,07	2,81
Papua	28,45	18,16	21,55	19,58	10,61	1,64
Indonesia	20,33	13,04	12,96	46,32	5,77	1,59

Sumber : Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Kondisi jembatan berdasarkan monitoring diklasifikasikan menjadi 6 kondisi, yaitu baik, sedang, rusak ringan, rusak berat, kritis dan putus atau tidak ada jembatan. Berdasarkan tabel 4.10 dan 4.11, jumlah jembatan nasional di Indonesia didominasi oleh kondisi rusak berat sebanyak 15.450 unit atau 46,32%. Sedangkan untuk kondisi jembatan dengan kondisi baik sebanyak 6.780 unit dengan persentase 20,33%, 8.670 unit lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi jembatan yang rusak berat. Kondisi jembatan dengan kondisi sedang yaitu sebanyak 4.348 unit dengan

persentase 13,04%, 11.102 unit lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi jembatan yang rusak berat.

Tabel 4.12. Panjang Jembatan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Tahun 2015

Provinsi	Panjang Jembatan (m)						Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus	
Aceh	16106,8	3340,5	2.927,40	2.006,40	888,8	56	25.326
Sumatera Utara	6198,3	4375,6	10.102,00	2.690,60	598,1	0	23.965
Sumatera Barat	4636,9	3527,3	4.428,70	3.234,60	270,8	0	16.098
Riau	498,7	2064,8	7.778,50	4.541,70	168,6	0	15.052
Kepulauan Riau	3191,8	2046,4	705,9	1.085,50	0	0	7.030
Jambi	2393	5170,6	2.243,50	369,8	97,4	31	10.305
Bengkulu	1542,3	1138,6	2.306,80	2.943,70	1.182,10	0	9.114
Sumatera Selatan	1085,6	4239,9	5.357,20	5.657,60	0	0	16.340
Bangka Belitung	968,2	695,8	625,6	298,4	0	0	2.588
Lampung	5234,8	3520,2	1.311,10	557,2	188,6	0	10.812
DKI Jakarta	5135,3	104,2	350,9	146,8	211,2	0	5.948
Banten	2009,6	626,6	1.536,90	451,5	119	46	4.790
Jawa Barat	6343,3	11858,2	8.739,00	4.258,40	226	0	31.425
Jawa Tengah	10339,2	4784,7	8.553,70	4.039,10	54	66	27.837
DI Yogyakarta	4613,8	557,8	332,2	323,7	0	0	5.828
Jawa Timur	8817,3	7441,4	3.149,00	1.066,50	38,5	38,8	20.552
Kalimantan Barat	4350,5	2305,2	8.355,40	4.724,40	343,7	0	20.079
Kalimantan Tengah	17768,1	4449,7	4.750,50	1.041,20	931,3	0	28.941
Kalimantan Timur	5105	1329,9	1.491,30	0	0	0	7.926
Kalimantan Utara	481,3	4375,2	873,2	67,3	36	0	5.833
Kalimantan Selatan	9952,3	2185,9	1.634,30	872,1	148,9	26,3	14.820
Bali	7376,4	1496	261,2	145	0	0	9.279
Nusa Tenggara Barat	1922,1	2669,2	2.155,00	557	91,1	0	7.394
Nusa Tenggara Timur	1979,6	4789,1	1.463,50	597,1	31,2	0	8.861
Sulawesi Utara	2107,9	4764,7	6.668,50	281,7	58	140,4	14.021
Gorontalo	2360,7	432,1	1.564,60	1.059,40	0	0	5.417
Sulawesi Tengah	11035,2	3491,5	6.870,70	508,8	0	46	21.952

Provinsi	Panjang Jembatan (m)						Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/Putus	
Sulawesi Barat	5397,2	830,2	416,5	245,8	23	0	6.913
Sulawesi Selatan	5833,1	2564,2	4.621,50	1.506,40	349,1	0	14.874
Sulawesi Tenggara	4347,2	3495,7	3.151,00	523,9	82,3	0	11.600
Maluku	9348,1	7767,8	1.697,20	878	622,5	4.403,00	24.717
Maluku Utara	4252,8	1937,7	3.193,80	2.035,60	1.587,80	41	13.049
Papua Barat	7234,6	1306,1	683,3	463,5	151,7	690	10.529
Papua	7017,7	5118,7	4.975,70	3.940,70	1.366,00	280	22.699
Indonesia	186.985	110.802	115.276	53.119	9.866	5.865	481.911

Sumber : Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

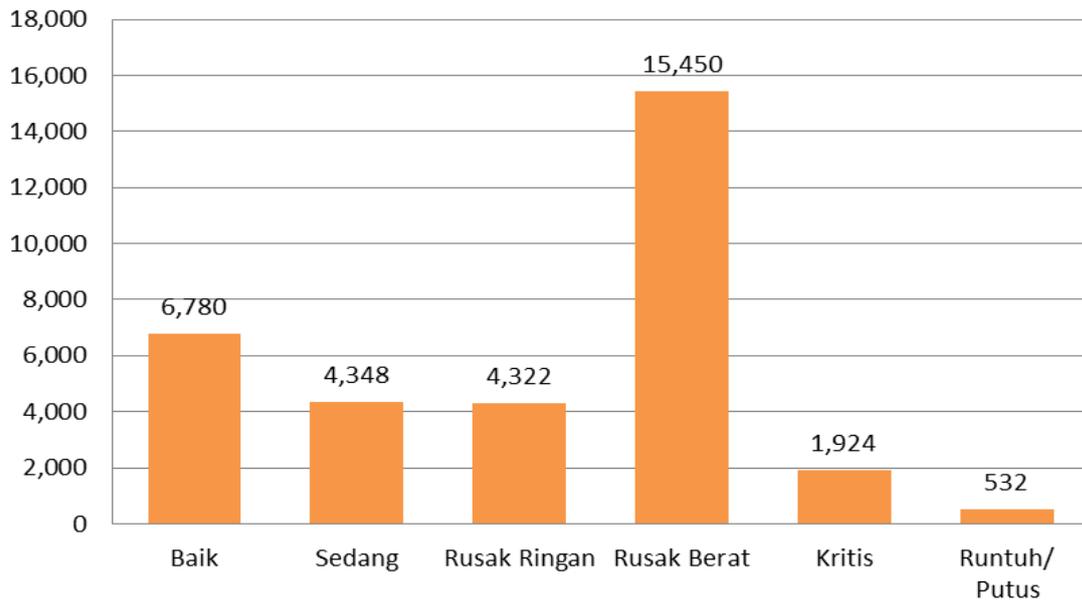
Tabel 4.13. Persentase Panjang Jembatan Nasional menurut Provinsi dan Kondisi Tahun 2015

Provinsi	Panjang Jembatan (%)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/Putus
Aceh	63,6	13,19	11,56	7,92	3,51	0,22
Sumatera Utara	25,86	18,26	42,15	11,23	2,5	0
Sumatera Barat	28,8	21,91	27,51	20,09	1,68	0
Riau	3,31	13,72	51,68	30,17	1,12	0
Kepulauan Riau	45,41	29,11	10,04	15,44	0	0
Jambi	23,22	50,17	21,77	3,59	0,95	0,3
Bengkulu	16,92	12,49	25,31	32,3	12,97	0
Sumatera Selatan	6,64	25,95	32,79	34,62	0	0
Bangka Belitung	37,41	26,89	24,17	11,53	0	0
Lampung	48,42	32,56	12,13	5,15	1,74	0
DKI Jakarta	86,33	1,75	5,9	2,47	3,55	0
Banten	41,96	13,08	32,09	9,43	2,48	0,96
Jawa Barat	20,19	37,74	27,81	13,55	0,72	0
Jawa Tengah	37,14	17,19	30,73	14,51	0,19	0,24
DI Yogyakarta	79,17	9,57	5,7	5,55	0	0
Jawa Timur	42,9	36,21	15,32	5,19	0,19	0,19
Kalimantan Barat	21,67	11,48	41,61	23,53	1,71	0

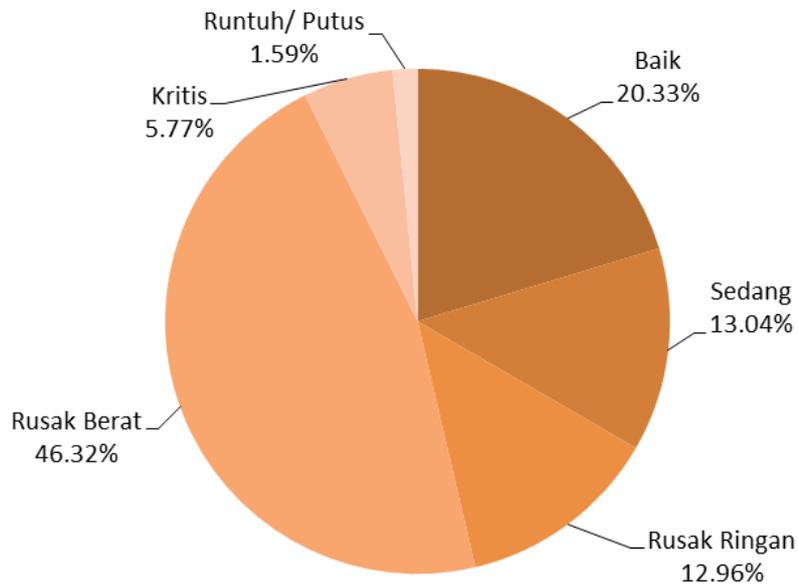
Provinsi	Panjang Jembatan (%)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/Putus
Kalimantan Tengah	61,39	15,38	16,41	3,6	3,22	0
Kalimantan Timur	64,41	16,78	18,81	0	0	0
Kalimantan Utara	8,25	75,01	14,97	1,15	0,62	0
Kalimantan Selatan	67,16	14,75	11,03	5,88	1	0,18
Bali	79,5	16,12	2,82	1,56	0	0
Nusa Tenggara Barat	25,99	36,1	29,14	7,53	1,23	0
Nusa Tenggara Timur	22,34	54,05	16,52	6,74	0,35	0
Sulawesi Utara	15,03	33,98	47,56	2,01	0,41	1
Gorontalo	43,58	7,98	28,88	19,56	0	0
Sulawesi Tengah	50,27	15,91	31,3	2,32	0	0,21
Sulawesi Barat	78,08	12,01	6,03	3,56	0,33	0
Sulawesi Selatan	39,22	17,24	31,07	10,13	2,35	0
Sulawesi Tenggara	37,48	30,14	27,16	4,52	0,71	0
Maluku	37,82	31,43	6,87	3,55	2,52	17,81
Maluku Utara	32,59	14,85	24,48	15,6	12,17	0,31
Papua Barat	68,71	12,4	6,49	4,4	1,44	6,55
Papua	30,92	22,55	21,92	17,36	6,02	1,23
Indonesia	38,80	22,99	23,92	11,02	2,05	1,22

Sumber : Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

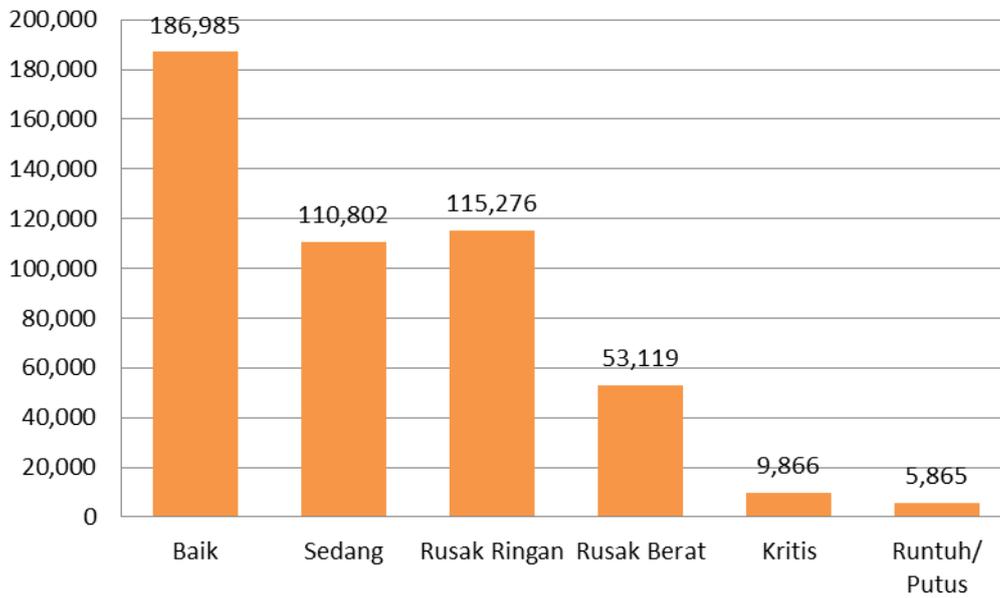
Hasil monitoring di tahun 2015 terhadap panjang jembatan nasional berdasarkan kondisi pada Tabel 4.12 dan 4.13 didapatkan hasil 186.985 m atau sebesar 38.80% jembatan berada pada kondisi baik, 110.802 m sedang atau 22,99% berada pada kondisi, 115.276 m yaitu sebesar 23,92% berada pada kondisi rusak ringan, 53.119 m rusak berat atau 11,02%, 9.866 m berada pada kondisi kritis yaitu sebesar 11,02% dan 5.865 m atau 2,05% jembatan runtuh/putus.



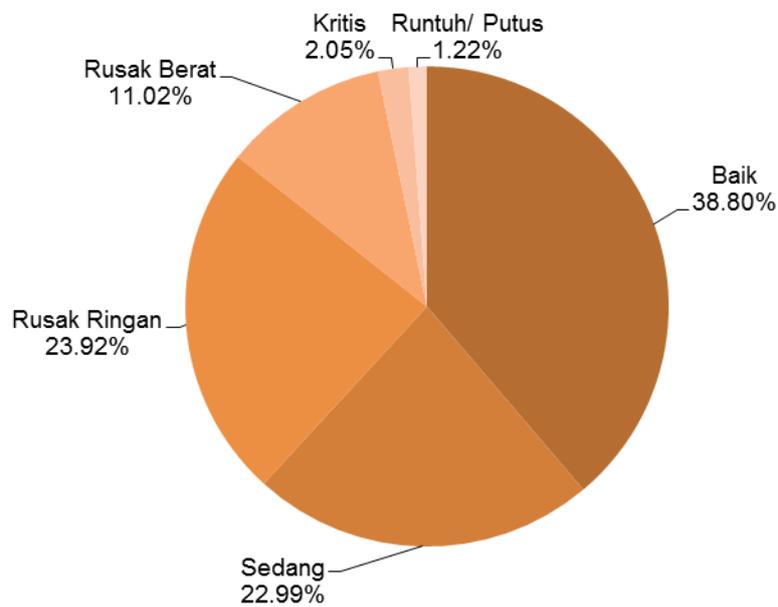
Gambar 4.5. Jumlah Jembatan Nasional menurut Kondisi Tahun 2015



Gambar 4.6. Persentase Jumlah Jembatan Nasional menurut Kondisi Tahun 2015



Gambar 4.7. Panjang Jembatan Nasional menurut Kondisi Tahun 2015



Gambar 4.8. Persentase Panjang Jembatan Nasional menurut Kondisi Tahun 2015

Sementara dari kemantapannya, yang termasuk mantap adalah jembatan dengan kondisi baik, sedang dan rusak ringan. Sedangkan tidak mantap adalah jembatan

dengan kondisi rusak berat, kritis dan runtuh/putus. Dilihat dari kemantapannya, ada sebanyak 12.999 unit atau 327.909,8 m jembatan pada ruas jalan nasional termasuk mantap dan 1.711 unit atau 47.360,8 m jembatan tidak mantap.

Tabel 4.14. Jumlah dan Panjang Jembatan Nasional menurut Provinsi dan
Kemantapan Tahun 2015

Provinsi	Mantap				Tidak Mantap			
	Jumlah		Panjang		Jumlah		Panjang	
	unit	%	m	%	unit	%	m	%
Aceh	958	87,97	22.374,70	88,35	131	12,03	2.951,20	11,65
Sumatera Utara	756	83,54	20.675,90	86,28	149	16,46	3.288,70	13,72
Sumatera Barat	465	79,35	12.592,90	78,23	121	20,65	3.505,40	21,77
Riau	325	78,5	10.342,00	68,71	89	21,5	4.710,30	31,29
Kepulauan Riau	120	90,91	5.944,10	84,56	12	9,09	1.085,50	15,44
Jambi	289	93,23	9.807,10	95,17	21	6,77	498,2	4,83
Bengkulu	172	59,93	4.987,70	54,73	115	40,07	4.125,80	45,27
Sumatera Selatan	321	72,46	10.682,70	65,38	122	27,54	5.657,60	34,62
Bangka Belitung	99	96,12	2.289,60	88,47	4	3,88	298,4	11,53
Lampung	409	91,91	10.066,10	93,1	36	8,09	745,8	6,9
DKI Jakarta	45	84,91	5.590,40	93,98	8	15,09	358	6,02
Banten	171	85,5	4.173,10	87,13	29	14,5	616,5	12,87
Jawa Barat	708	83,39	26.940,50	85,73	141	16,61	4.484,40	14,27
Jawa Tengah	722	86,67	23.677,60	85,06	111	13,33	4.159,10	14,94
DI Yogyakarta	123	97,62	5.503,80	94,45	3	2,38	323,7	5,55
Jawa Timur	835	94,89	19.407,70	94,43	45	5,11	1.143,80	5,57
Kalimantan Barat	673	74,78	15.011,10	74,76	227	25,22	5.068,10	25,24
Kalimantan Tengah	470	81,03	26.968,30	93,18	110	18,97	1.972,50	6,82
Kalimantan Timur	294	100	7.926,20	100	0	0	0	0
Kalimantan Utara	187	95,41	5.729,70	98,23	9	4,59	103,3	1,77
Kalimantan Selatan	518	92,34	13.772,50	92,93	43	7,66	1.047,30	7,07
Bali	291	97,98	9.133,60	98,44	6	2,02	145	1,56

Provinsi	Mantap				Tidak Mantap			
	Jumlah		Panjang		Jumlah		Panjang	
	unit	%	m	%	unit	%	m	%
Nusa Tenggara Barat	388	89,2	6.746,30	91,24	47	10,8	648,1	8,76
Nusa Tenggara Timur	377	84,91	8.232,20	92,91	67	15,09	628,3	7,09
Sulawesi Utara	732	95,56	13.541,10	96,58	34	4,44	480,1	3,42
Gorontalo	230	84,25	4.357,40	80,44	43	15,75	1.059,40	19,56
Sulawesi Tengah	990	96,49	21.397,40	97,47	36	3,51	554,8	2,53
Sulawesi Barat	257	95,54	6.643,90	96,11	12	4,46	268,8	3,89
Sulawesi Selatan	588	88,96	13.018,80	87,53	73	11,04	1.855,50	12,47
Sulawesi Tenggara	712	96,35	10.993,90	94,77	27	3,65	606,2	5,23
Maluku	709	84,71	18.813,10	76,12	128	15,29	5.903,50	23,88
Maluku Utara	539	68,58	9.384,30	71,92	247	31,42	3.664,40	28,08
Papua	623	68,16	17.112,10	75,39	291	31,84	5.586,70	24,61
Papua Barat	354	90,54	9.224,00	87,6	37	9,46	1.305,20	12,4
Indonesia	15.450	85,72	413.062	85,71	2.574	14,28	68.850	14,29

Sumber : Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

D. Jalan Daerah

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa pembinaan jalan umum dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai dengan status kewenangannya. Yang dimaksud jalan daerah di sini adalah jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah.

Salah satu yang menjadi tugas Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai penyelenggara jalan adalah memberikan fasilitas kepada penyelenggara jalan daerah dalam bentuk pembinaan, sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan agar kapasitas penyelenggaraan jalan daerah dapat semakin baik.

Panjang jalan daerah sering terjadi penyesuaian atau perubahan disebabkan antara lain karena pembangunan jalan baru, perubahan status kewenangan serta ada pula beberapa provinsi, kabupaten maupun kota yang belum menetapkan kewenangan jalannya melalui surat keputusan kepala daerah. Berikut ini akan ditampilkan data panjang jalan daerah di tahun 2014 yang beserta persentase kondisi kemantapannya yang diperoleh dari Statistik Jalan Daerah 2014.

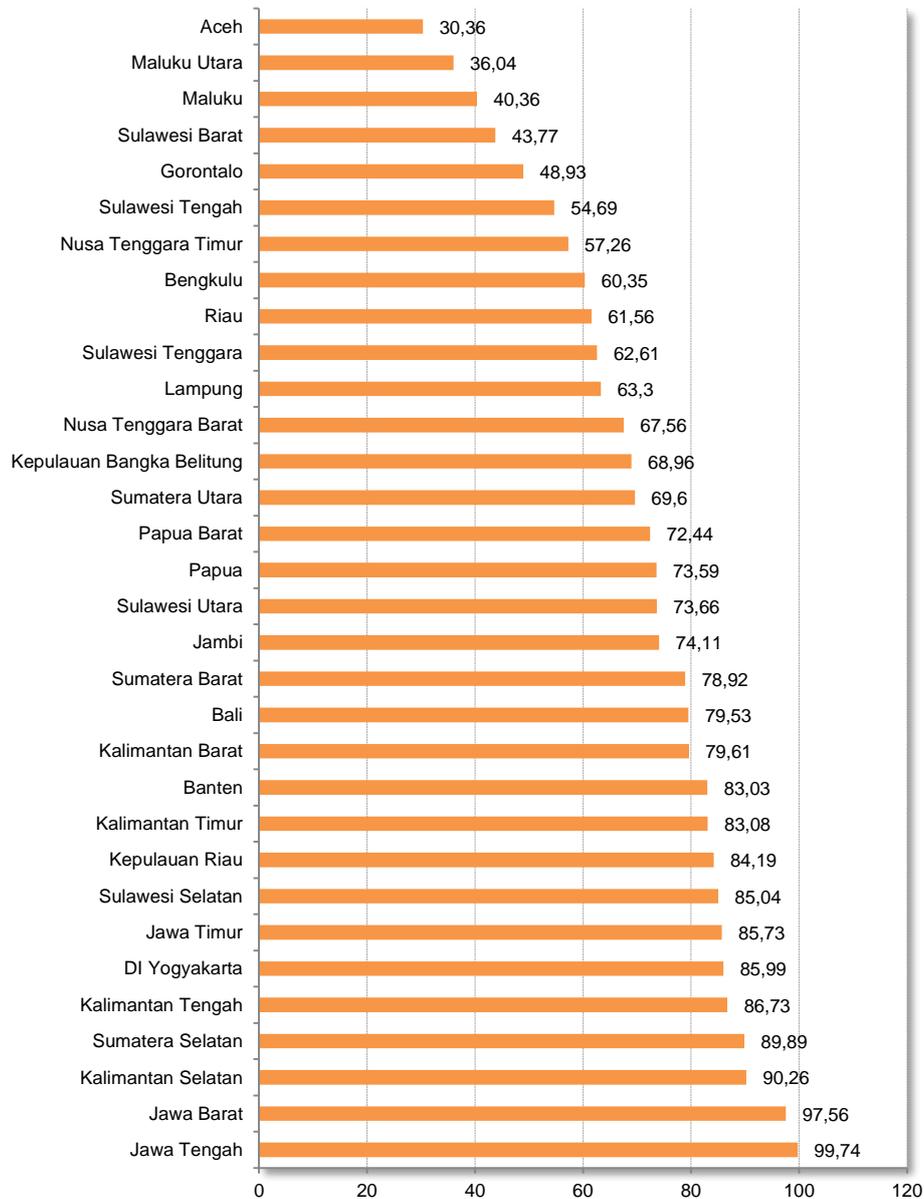
Panjang jalan provinsi di tahun 2014 adalah 46.486 km dengan rata-rata kondisi jalan mantap adalah 70,99%. Meskipun demikian, masih ada beberapa provinsi yang tingkat kemantapan jalannya di bawah 60%, salah satunya adalah Provinsi Aceh yang kemantapan jalan provinsinya paling kecil, yaitu 30,36%. Sementara yang paling tinggi persentase jalan mantapnya adalah Jawa Tengah. Persentase tingkat kemantapan jalan provinsi ini seperti terlihat pada Gambar 4.9.

Tabel 4.15. Jalan Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Panjang Jalan (km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
Aceh	1.702	30,36	69,64
Sumatera Utara	3.049	69,60	30,40
Sumatera Barat	1.231	78,92	21,08
Riau	3.033	61,56	38,44
Jambi	1.505	74,11	25,89
Sumatera Selatan	1.466	89,89	10,11
Bengkulu	1.563	60,35	39,65
Lampung	1.703	63,30	36,70
Kepulauan Bangka Belitung	899	68,96	31,04
Kepulauan Riau	895	84,19	15,81
Jawa Barat	2.191	97,56	2,44
Jawa Tengah	2.566	99,74	0,26
DI Yogyakarta	690	85,99	14,01
Jawa Timur	1.761	85,73	14,27

Provinsi	Panjang Jalan (km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
Banten	853	83,03	16,97
Bali	861	79,53	20,47
Nusa Tenggara Barat	1.772	67,56	32,44
Nusa Tenggara Timur	1.737	57,26	42,74
Kalimantan Barat	1.562	79,61	20,39
Kalimantan Tengah	1.100	86,73	13,27
Kalimantan Selatan	852	90,26	9,74
Kalimantan Timur	1.640	83,08	16,92
Sulawesi Utara	940	73,66	26,34
Sulawesi Tengah	1.619	54,69	45,31
Sulawesi Selatan	1.148	85,04	14,96
Sulawesi Tenggara	906	62,61	37,39
Gorontalo	433	48,93	51,07
Sulawesi Barat	722	43,77	56,23
Maluku	1.297	40,36	59,64
Maluku Utara	1.867	36,04	63,96
Papua Barat	1.425	72,44	27,56
Papua	1.499	73,59	26,41

Sumber : Statistik Jalan Daerah 2014
Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga



Gambar 4.9. Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2014

Panjang jalan kabupaten di tahun 2014 adalah 346.299 km dengan rata-rata kondisi jalan mantap adalah 57%. Provinsi dengan jalan kabupaten terpanjang adalah Jawa Timur, yaitu 28.946 km. Sementara presentase jalan kabupaten kondisi mantap yang

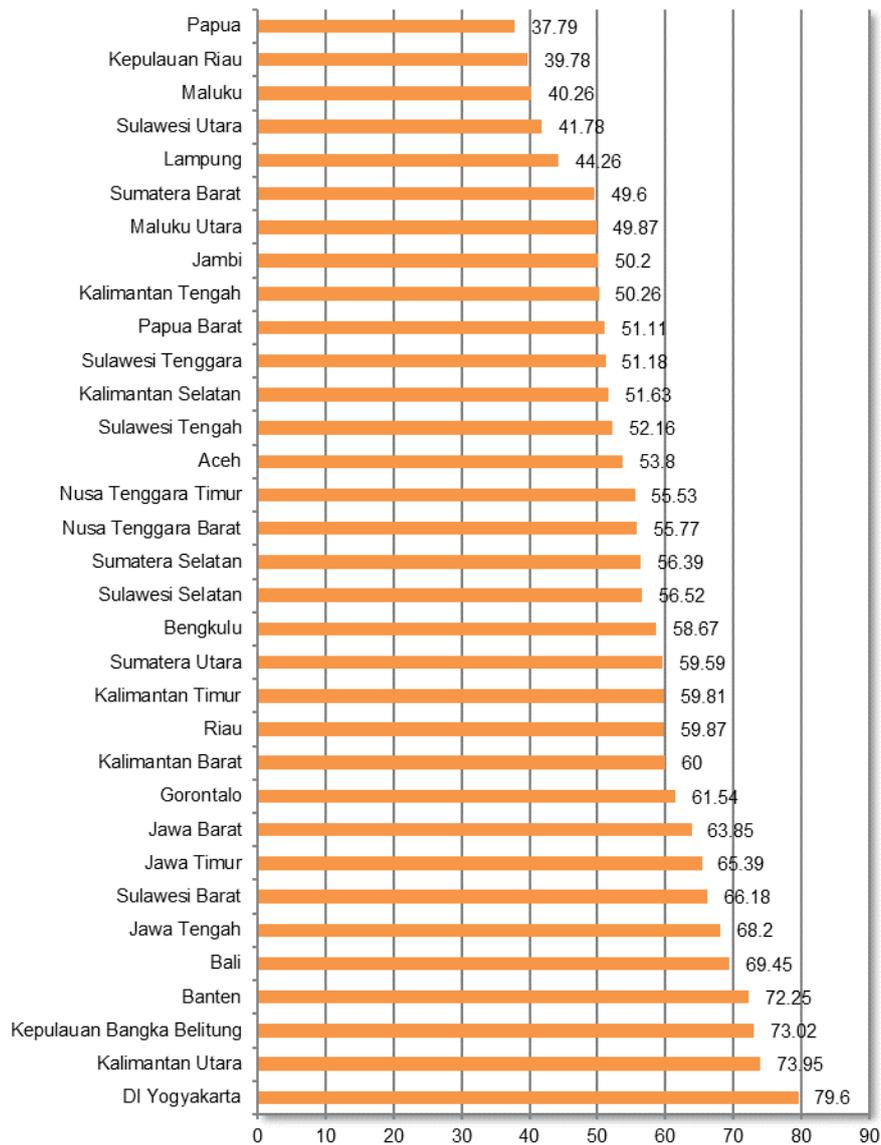
paling tinggi adalah DI Yogyakarta dengan 79,60%, dan yang paling rendah adalah Papua dengan 37,79%. Hal ini seperti terdapat pada Tabel 4.16. dan Gambar 4.10.

Tabel 4.16. Jalan Kabupaten Tahun 2014

Provinsi	Panjang Jalan (km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
Aceh	18.310	53,80	46,20
Sumatera Utara	27.436	59,59	40,41
Sumatera Barat	16.628	49,60	50,40
Riau	17.528	59,87	40,13
Jambi	8.888	50,20	49,80
Sumatera Selatan	12.268	56,39	43,61
Bengkulu	5.325	58,67	41,33
Lampung	13.638	44,26	55,74
Kepulauan Bangka Belitung	3.342	73,02	26,98
Kepulauan Riau	2.904	39,78	60,22
Jawa Barat	16.266	63,85	36,15
Jawa Tengah	22.560	68,20	31,80
DI Yogyakarta	3.021	79,60	20,40
Jawa Timur	28.946	65,39	34,61
Banten	3.124	72,25	27,75
Bali	5.826	69,45	30,55
Nusa Tenggara Barat	5.084	55,77	44,23
Nusa Tenggara Timur	15.040	55,53	44,47
Kalimantan Barat	12.052	60,00	40,00
Kalimantan Tengah	10.670	50,26	49,74
Kalimantan Selatan	9.614	51,63	48,37
Kalimantan Timur	5.837	59,81	40,19
Kalimantan Utara	2.891	73,95	26,05
Sulawesi Utara	4.624	41,78	58,22
Sulawesi Tengah	9.734	52,16	47,84
Sulawesi Selatan	25.256	56,52	43,48
Sulawesi Tenggara	6.566	51,18	48,82
Gorontalo	3.576	61,54	38,46
Sulawesi Barat	5.218	66,18	33,82
Maluku	5.026	40,26	59,74

Provinsi	Panjang Jalan (km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
Maluku Utara	3.922	49,87	50,13
Papua Barat	4.036	51,11	48,89
Papua	11.139	37,79	62,21

Sumber : Statistik Jalan Daerah 2014. Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Ditjen Bina Marga



Gambar 4.10. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Tahun 2014

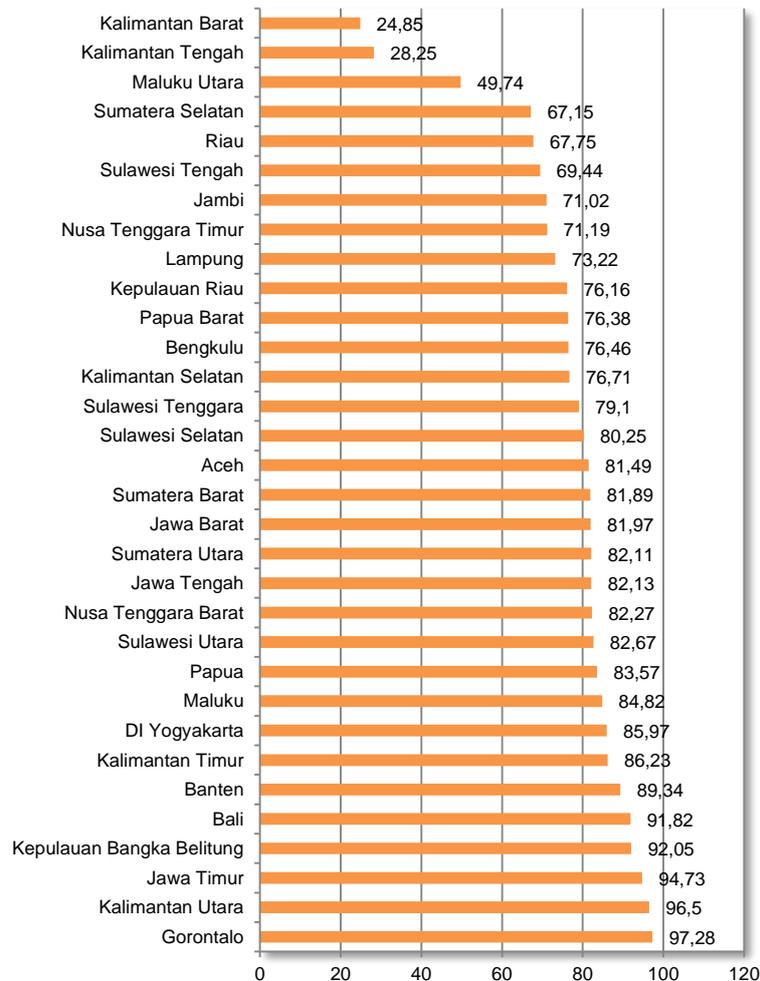
Panjang jalan kota di tahun 2014 adalah 42.916 km dengan rata-rata kondisi jalan mantap adalah 77%. Provinsi dengan jalan kota terpanjang adalah Sumatera Utara dengan 5.089 km. Beberapa provinsi persentase kemandapan jalan kotanya masih di bawah 60%. Sementara provinsi dengan presentase jalan kota mantap paling tinggi adalah Gorontalo (97,28%) dan paling rendah adalah Kalimantan Barat (24,85%).

Tabel 4.17. Jalan Kota Tahun 2014

Provinsi	Panjang Jalan (km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
Aceh	1.954	81,49	18,51
Sumatera Utara	5.089	82,11	17,89
Sumatera Barat	3.867	81,89	18,11
Riau	3.165	67,75	32,25
Jambi	699	71,02	28,98
Sumatera Selatan	2.290	67,15	32,85
Bengkulu	949	76,46	23,54
Lampung	1.303	73,22	26,78
Kepulauan Bangka Belitung	293	92,05	7,95
Kepulauan Riau	1.192	76,16	23,84
Jawa Barat	3.388	81,97	18,03
Jawa Tengah	2.021	82,13	17,87
DI Yogyakarta	708	85,97	14,03
Jawa Timur	2.436	94,73	5,27
Banten	1.326	89,34	10,66
Bali	648	91,82	8,18
Nusa Tenggara Barat	538	82,27	17,73
Nusa Tenggara Timur	698	71,19	28,81
Kalimantan Barat	701	24,85	75,15
Kalimantan Tengah	912	28,25	71,75
Kalimantan Selatan	1.234	76,71	23,29
Kalimantan Timur	1.307	86,23	13,77
Kalimantan Utara	227	96,50	3,50
Sulawesi Utara	1.589	82,67	17,33
Sulawesi Tengah	828	69,44	30,56
Sulawesi Selatan	1.378	80,25	19,75

Provinsi	Panjang Jalan (km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
Sulawesi Tenggara	585	79,10	20,90
Gorontalo	224	97,28	2,72
Sulawesi Barat			
Maluku	416	84,82	15,18
Maluku Utara	562	49,74	50,26
Papua Barat	200	76,38	23,62
Papua	187	83,57	16,43

Sumber : Statistik Jalan Daerah 2014
Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga



Gambar 4.11. Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap Tahun 2014

E. Analisis Statistik Infrastruktur Jalan

Jaringan jalan menjadi bagian penting dalam sistem transportasi nasional. Pemeliharaan dan pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan jaringan jalan. Jaringan jalan juga merupakan penunjang utama dalam melakukan kegiatan perekonomian serta dapat menjadi media untuk menjalin komunikasi dan interaksi antar masyarakat agar terjaga kesatuan dan dapat berkembang secara lebih merata.

Indonesia dengan luas wilayah 1,9 juta km² diproyeksikan jumlah penduduknya di tahun 2013 berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik adalah 248,818 juta jiwa. Penyebaran penduduk berdasarkan pulau besar adalah: Pulau Sumatera dengan luas wilayahnya 25,16% dihuni oleh 21,52% penduduk, Pulau Jawa dengan luas 6,77% dihuni oleh 57,06% penduduk, Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan luas 3,82% dihuni oleh 5,51%, Pulau Kalimantan dengan luas 28,48% dihuni oleh 5,93%, Pulau Sulawesi dengan luas 9,87% dihuni oleh 7,32% penduduk, Pulau Maluku dan Maluku Utara dengan luas 4,13% dihuni oleh 1,10%, serta Papua dan Papua Barat dengan luas 21,77% dihuni oleh 1,55% penduduk.

Sementara penyebaran kendaraan bermotor secara umum urutannya mengikuti penyebaran penduduk karena berkaitan dengan alat transportasi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan. Persentase sebaran penduduk dan kendaraan bermotor dapat dilihat pada Gambar 4.12.

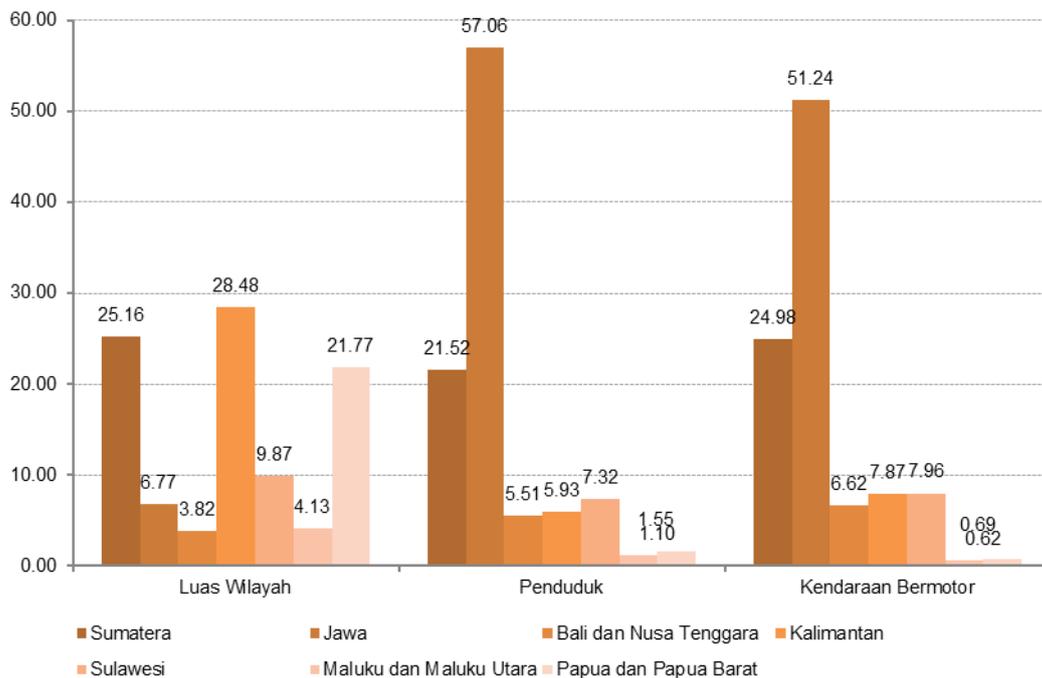
Tabel 4.18. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Pulau Besar di Indonesia

Provinsi	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)
Sumatera	480.793,28	53.539,00	26.012.352,00
Jawa	129.438,28	141.985,60	53.353.720,00
Bali dan Nusa Tenggara	73.070,48	13.721,10	6.895.138,00
Kalimantan	544.150,07	14.751,40	8.194.335,00
Sulawesi	188.522,36	18.216,90	8.292.170,00

Provinsi	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)
Maluku dan Maluku Utara	78.896,53	2.743,30	649.966,00
Papua dan Papua Barat	416.060,32	3.860,80	721.288,00
Indonesia	1.910.931,32	248.818,10	104.118.969

Sumber : Statistik Indonesia 2014, BPS RI

Catatan : Jumlah Kendaraan Bermotor terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor



Gambar 4.12. Sebaran Penduduk dan Luas Wilayah Indonesia menurut Pulau Besar (%)

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai salah satu infrastruktur utama harus memperhatikan tiga aspek yang amat penting secara bersamaan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan, jaringan jalan juga berperan untuk menyeimbangkan pengembangan kawasan, mengamankan teritorial dan mempersatu keutuhan NKRI. Melihat kondisi serta tingkat perkembangan yang belum merata, pembangunan jalan dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan tingkat perkembangan masing-masing wilayah dan pembangunan berkelanjutan.

Pada bagian ini dilakukan perhitungan rasio atau perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan di Indonesia baik menurut pulau besar maupun provinsi. Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota.

Rasio panjang jalan dengan luas wilayah diperoleh dengan membagi panjang jalan (km) dengan luas wilayah daerah terkait (km^2). Nilai rasio ini memiliki arti panjang jalan yang terdapat di suatu daerah dalam 1 km^2 luas wilayah. Rasio ini juga dapat dijadikan sebagai informasi tingkat aksesibilitas suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio panjang jalan dengan luas wilayah, maka aksesibilitasnya semakin baik, sehingga konektivitas jalan di daerah tersebut juga semakin baik dilihat dari ketersediaan jaringan jalannya.

Sementara rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk (ribu jiwa) suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah ribu jiwa penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Kemudian rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan yang diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 4.19. Panjang Jalan menurut Pulau Besar dan Kewenangannya Tahun 2014

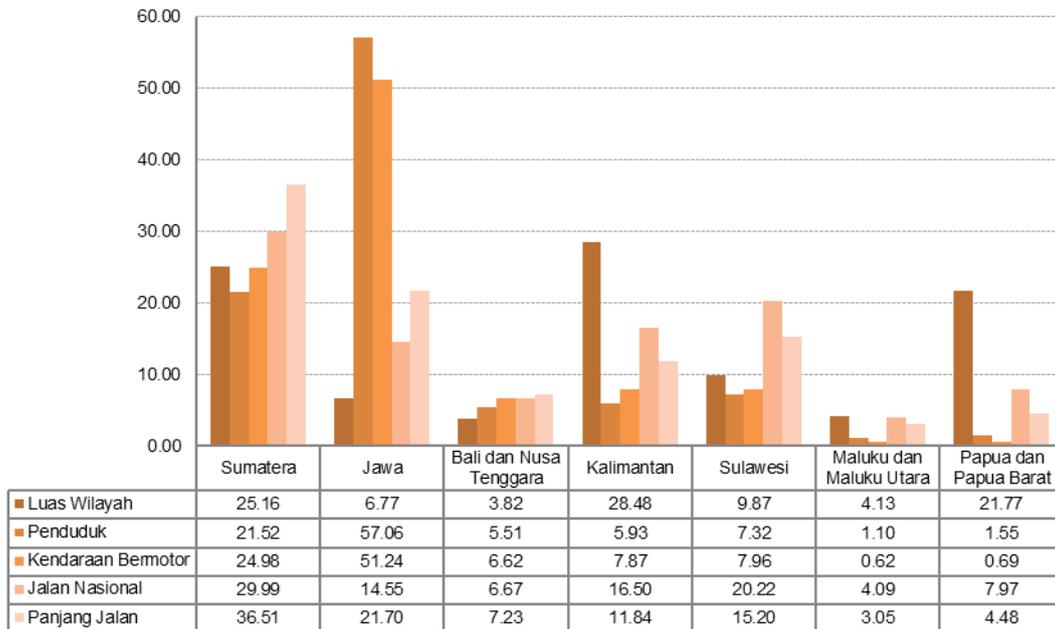
Provinsi	Jalan Nasional (km)	Jalan Provinsi (km)	Jalan Kabupaten (km)	Jalan Kota (km)	Jumlah Panjang Jalan (km)
Sumatera	11.568,12	17.046,00	126.267,00	20.801,00	175.682,12
Jawa	5.611,01	15.012,00	73.917,00	9.879,00	104.419,01
Bali dan Nusa Tenggara	2.574,09	4.370,00	25.950,00	1.884,00	34.778,09
Kalimantan	6.363,64	5.154,00	41.064,00	4.381,00	56.962,64
Sulawesi	7.799,76	5.768,00	54.974,00	4.604,00	73.145,76
Maluku dan Maluku Utara	1.578,54	3.164,00	8.948,00	978,00	14.668,54
Papua dan Papua Barat	3.074,68	2.924,00	15.175,00	387,00	21.560,68
Indonesia	38.569,82	53.438	346.295	42.914	481.216,82

Sumber : Statistik Jalan Daerah 2014, Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Catatan : Panjang Jalan Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari Statistik Indonesia 2014

Tabel 4.20. Persentase Luas Wilayah, Penduduk, Kendaraan Bermotor dan Panjang Jalan menurut Pulau Besar

Provinsi	Persentase				
	Luas Wilayah	Penduduk	Kendaraan Bermotor	Jalan Nasional	Panjang Jalan
Sumatera	25,16	21,52	24,98	29,99	36,51
Jawa	6,77	57,06	51,24	14,55	21,70
Bali dan Nusa Tenggara	3,82	5,51	6,62	6,67	7,23
Kalimantan	28,48	5,93	7,87	16,50	11,84
Sulawesi	9,87	7,32	7,96	20,22	15,20
Maluku dan Maluku Utara	4,13	1,10	0,62	4,09	3,05
Papua dan Papua Barat	21,77	1,55	0,69	7,97	4,48
Indonesia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



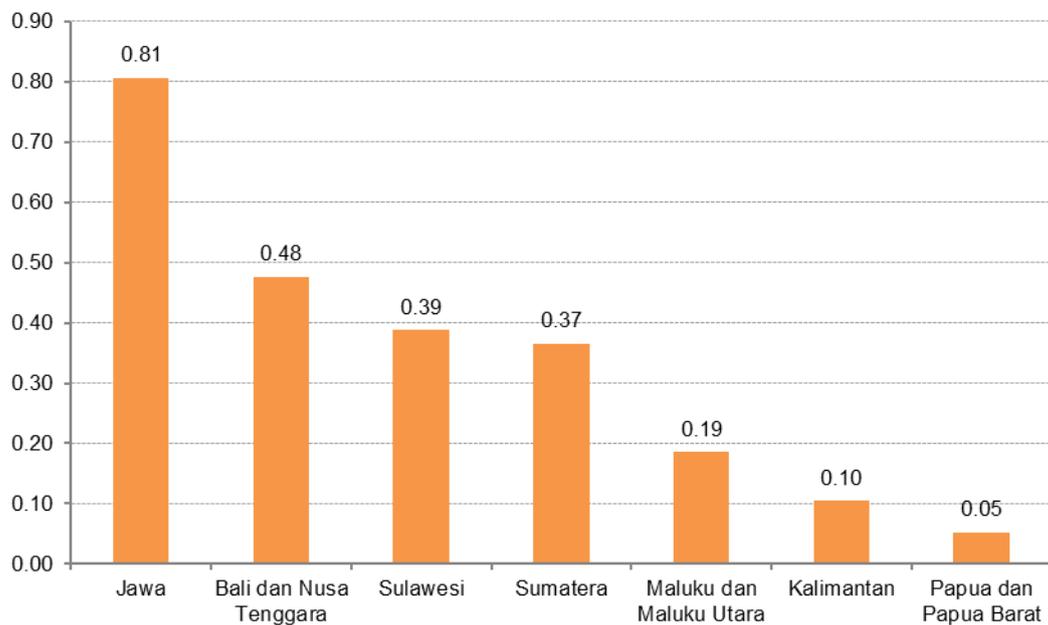
Gambar 4.13. Persentase Luas Wilayah, Penduduk, Kendaraan Bermotor dan Panjang Jalan menurut Pulau Besar

Dari nilai rasio panjang jalan dengan luas wilayah menurut pulau besar seperti yang terlihat pada Gambar 4.14., terlihat bahwa perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah yang tinggi ada di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Sulawesi dengan nilai berurutan adalah 0,81; 0,48; dan 0,39. Hal ini berarti dalam 1 km² luas wilayah masing-masing pulau terdapat 0,81 km; 0,48 km; dan 0,39 km jalan. Sementara yang masih rendah adalah Papua dan Papua Barat dengan panjang jalannya 50 m di setiap 1 km² wilayahnya.

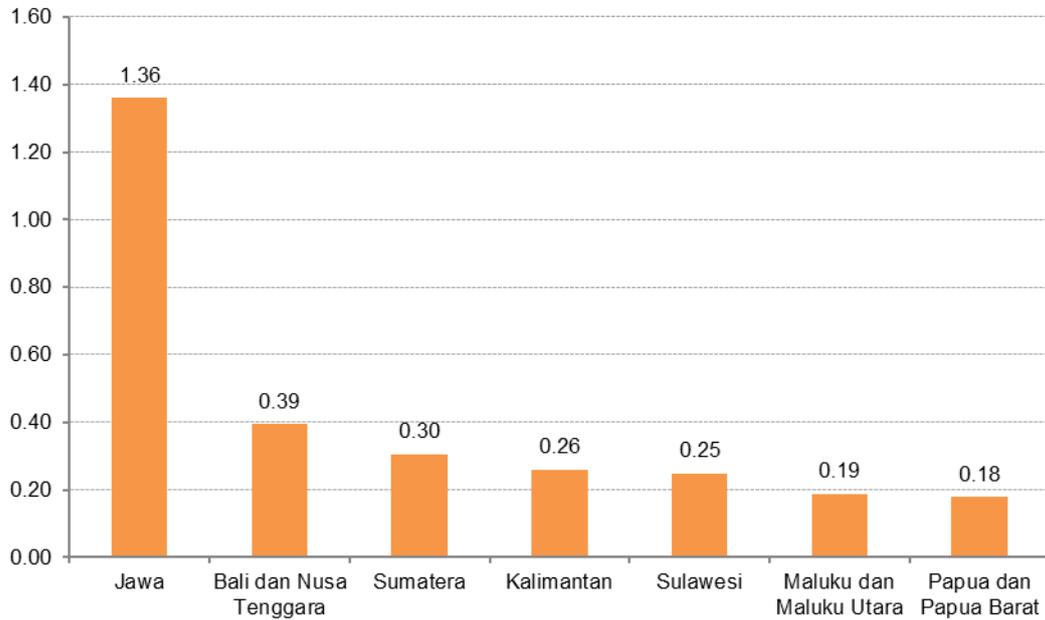
Untuk perbandingan panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan paling tinggi adalah Jawa serta Bali dan Nusa Tenggara. Hal ini menunjukkan penggunaan jalan di wilayah ini dilihat dari jumlah penggunaannya sangat padat dibandingkan dengan pulau lainnya. Di Pulau Jawa, setiap 1 km jalan berbanding untuk melayani 1,36 ribu jiwa penduduk dan 510 kendaraan.

Tabel 4.21. Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor

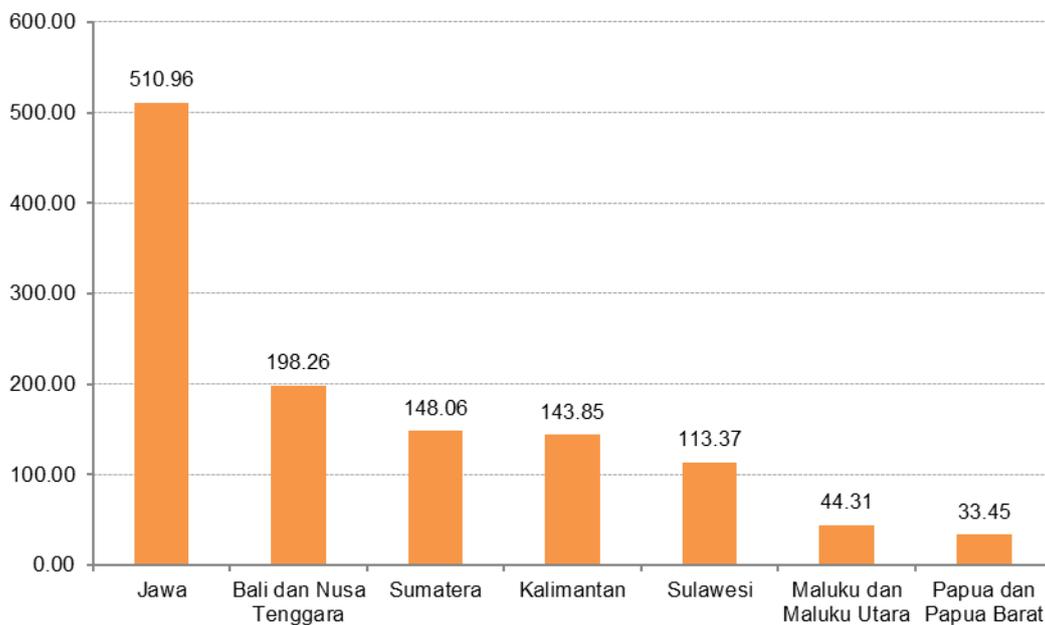
Provinsi	Rasio		
	Luas Wilayah	Penduduk	Kendaraan Bermotor
Sumatera	0,37	0,30	148,06
Jawa	0,81	1,36	510,96
Bali dan Nusa Tenggara	0,48	0,39	198,26
Kalimantan	0,10	0,26	143,85
Sulawesi	0,39	0,25	113,37
Maluku dan Maluku Utara	0,19	0,19	44,31
Papua dan Papua Barat	0,05	0,18	33,45
Indonesia	0,25	0,52	216,37



Gambar 4.14. Rasio Panjang Jalan Dengan Luas Wilayah menurut Pulau Besar



Gambar 4.15. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk menurut Pulau Besar



Gambar 4.16. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Pulau Besar

Rasio panjang jalan juga dapat dilihat pada tingkat provinsi seperti ditampilkan pada Tabel 4.24. dan Gambar 4.17. – 4.19. di bawah ini.

Tabel 4.22. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Provinsi Tahun 2013

Provinsi	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)
Aceh	57.956,00	4.811,10	2.611.860
Sumatera Utara	72.981,23	13.590,30	5.665.438
Sumatera Barat	42.012,89	5.066,50	1.933.560
Riau	87.023,66	6.033,30	2.533.654
Jambi	50.058,16	3.286,10	3.643.088
Sumatera Selatan	91.592,43	7.828,70	4.172.168
Bengkulu	19.919,33	1.814,40	938.474
Lampung	34.623,80	7.932,10	2.577.853
Kepulauan Bangka Belitung	16.424,06	1.315,10	867.893
Kepulauan Riau	8.201,72	1.861,40	1.068.364
DKI Jakarta	664,01	9.969,90	14.734.601
Jawa Barat	35.377,76	45.340,80	7.993.846
Jawa Tengah	32.800,69	33.264,30	12.309.278
DI Yogyakarta	3.133,15	3.594,90	3.643.412
Jawa Timur	47.799,75	38.363,20	13.199.239
Banten	9.662,92	11.452,50	1.473.344
Bali	5.780,06	4.056,30	3.961.644
Nusa Tenggara Barat	18.572,32	4.710,80	1.783.741
Nusa Tenggara Timur	48.718,10	4.954,00	1.149.753
Kalimantan Barat	147.307,00	4.641,40	2.267.762
Kalimantan Tengah	153.564,50	2.384,70	1.264.844
Kalimantan Selatan	38.744,23	3.854,50	2.143.380
Kalimantan Timur	129.066,64	3.870,80	2.518.349
Sulawesi Utara	13.851,64	2.360,40	1.201.652
Sulawesi Tengah	61.841,29	2.785,50	2.117.502
Sulawesi Selatan	46.717,48	8.342,00	3.314.753
Sulawesi Tenggara	38.067,70	2.396,70	1.264.661
Gorontalo	11.257,07	1.098,00	393.602

Provinsi	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)
Maluku	46.914,03	1.628,40	574.201
Maluku Utara	31.982,50	1.114,90	75.765
Papua	319.036,05	3.032,50	721.288
Indonesia	1.910.931,32	248.818,10	104.118.969

Sumber : Statistik Indonesia 2014, BPS RI

Catatan : Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Sulawesi Barat, dan Papua termasuk Papua Barat
Jumlah Kendaraan Bermotor terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor

Tabel 4.23. Panjang Jalan menurut Provinsi dan Kewenangannya Tahun 2014

Provinsi	Jalan Nasional (km) ¹⁾	Jalan Provinsi (km)	Jalan Kabupaten (km)	Jalan Kota (km)	Jumlah Panjang Jalan (km)
Aceh	1.803,35	1.702	18.310	1.954	23.769,35
Sumatera Utara	2.249,64	3.049	27.436	5.089	37.823,64
Sumatera Barat	1.212,89	1.231	16.628	3.867	22.938,89
Riau	1.134,47	3.033	17.528	3.165	24.860,47
Jambi	936,48	1.505	8.888	699	12.028,48
Sumatera Selatan	1.444,26	1.466	12.268	2.290	17.468,26
Bengkulu	783,87	1.563	5.325	949	8.620,87
Lampung	1.159,57	1.703	13.638	1.303	17.803,57
Kepulauan Bangka Belitung	509,59	899	3.342	293	5.043,59
Kepulauan Riau	334,00	895	2.904	1.192	5.325,00
DKI Jakarta ²⁾	142,65	6.951	-	-	7.093,65
Jawa Barat	1.351,13	2.191	16.266	3.388	23.196,13
Jawa Tengah	1.390,57	2.566	22.560	2.021	28.537,57
DI Yogyakarta	223,16	690	3.021	708	4.642,16
Jawa Timur	2.027,01	1.761	28.946	2.436	35.170,01
Banten	476,49	853	3.124	1.326	5.779,49
Bali	535,23	861	5.826	648	7.870,23
Nusa Tenggara Barat	632,17	1.772	5.084	538	8.026,17
Nusa Tenggara Timur	1.406,68	1.737	15.040	698	18.881,68
Kalimantan Barat	1.664,55	1.562	12.052	701	15.979,55
Kalimantan Tengah	1.714,83	1.100	10.670	912	14.396,83
Kalimantan Selatan	866,09	852	9.614	1.234	12.566,09

Provinsi	Jalan Nasional (km) ¹⁾	Jalan Provinsi (km)	Jalan Kabupaten (km)	Jalan Kota (km)	Jumlah Panjang Jalan (km)
Kalimantan Timur	2.118,17	1.640	5.837	1.307	10.902,17
Sulawesi Utara	1.319,23	940	4.624	1.589	8.472,23
Sulawesi Tengah	2.181,95	1.619	9.734	828	14.362,95
Sulawesi Selatan	1.722,86	1.148	25.256	1.378	29.504,86
Sulawesi Tenggara	1.397,05	906	6.566	585	9.454,05
Gorontalo	606,70	433	3.576	224	4.839,70
Maluku	1.066,65	1.297	5.026	416	7.805,65
Maluku Utara	511,89	1.867	3.922	562	6.862,89
Papua	2.111,44	1.499	11.139	187	14.936,44
Indonesia	38.569,82	53.438	346.295	42.914	481.216,82

Sumber : Statistik Jalan Daerah 2014, Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

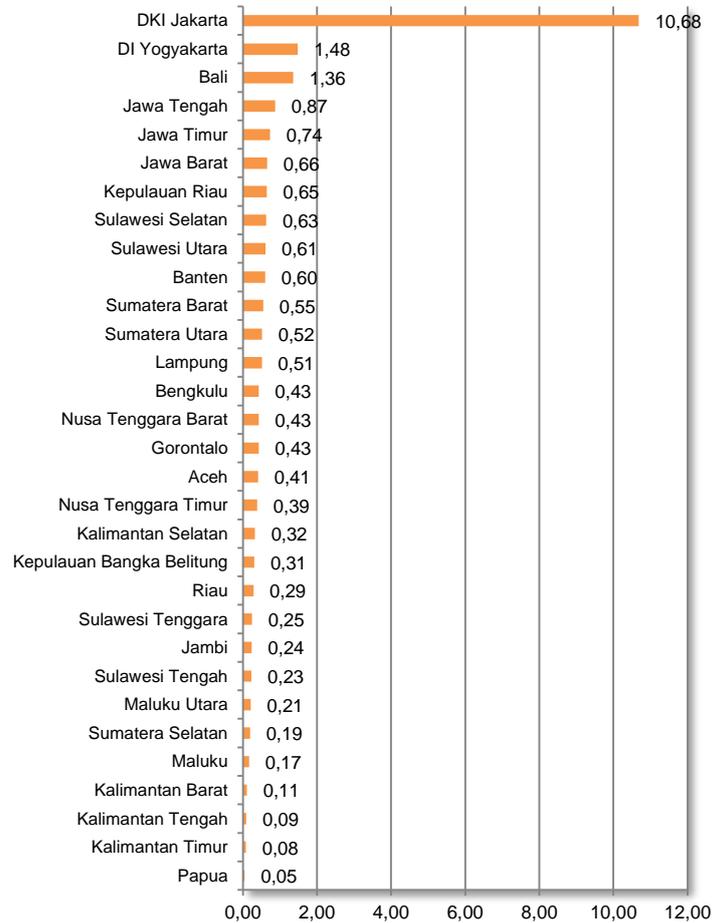
Catatan : 1) Tidak termasuk jalan tol
2) Panjang Jalan Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari Statistik Indonesia 2014

Tabel 4.24. Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor

Provinsi	Luas Wilayah	Penduduk	Kendaraan Bermotor
Aceh	0,41	0,20	109,88
Sumatera Utara	0,52	0,36	149,79
Sumatera Barat	0,55	0,22	84,29
Riau	0,29	0,24	101,91
Jambi	0,24	0,27	302,87
Sumatera Selatan	0,19	0,45	238,84
Bengkulu	0,43	0,21	108,86
Lampung	0,51	0,45	144,79
Kepulauan Bangka Belitung	0,31	0,26	172,08
Kepulauan Riau	0,65	0,35	200,63
DKI Jakarta	10,68	1,41	2.077,15
Jawa Barat	0,66	1,95	344,62
Jawa Tengah	0,87	1,17	431,34
DI Yogyakarta	1,48	0,77	784,85
Jawa Timur	0,74	1,09	375,30

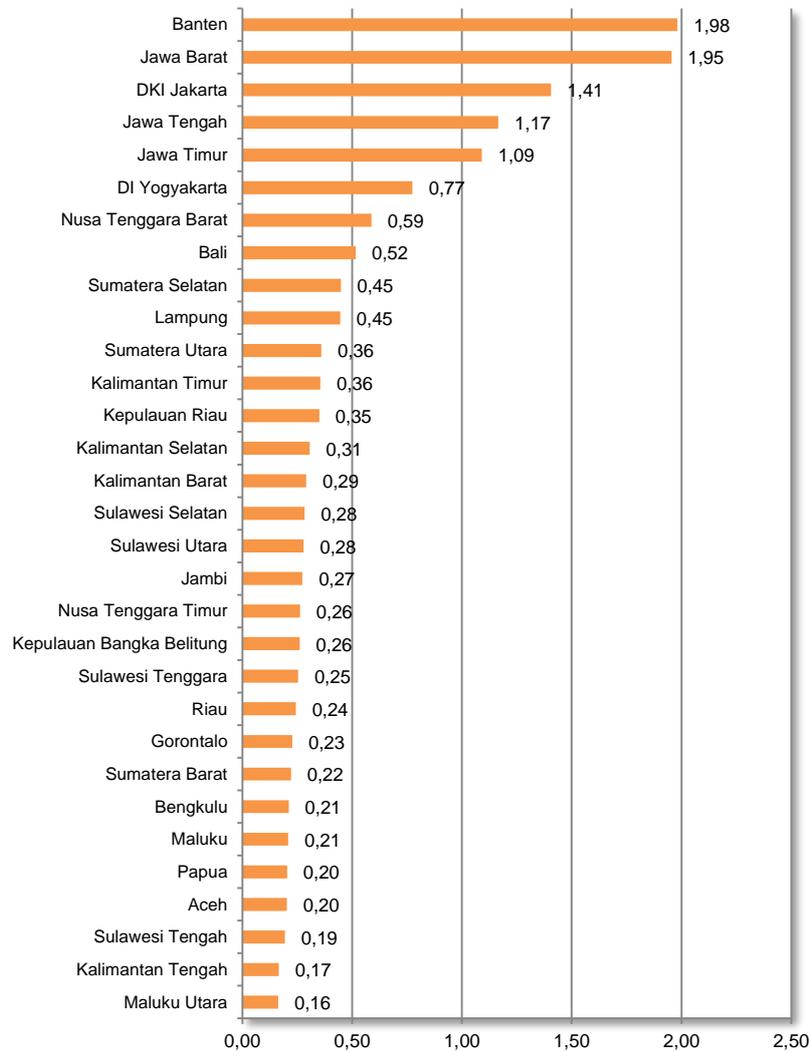
Provinsi	Luas Wilayah	Penduduk	Kendaraan Bermotor
Banten	0,60	1,98	254,93
Bali	1,36	0,52	503,37
Nusa Tenggara Barat	0,43	0,59	222,24
Nusa Tenggara Timur	0,39	0,26	60,89
Kalimantan Barat	0,11	0,29	141,92
Kalimantan Tengah	0,09	0,17	87,86
Kalimantan Selatan	0,32	0,31	170,57
Kalimantan Timur	0,08	0,36	231,00
Sulawesi Utara	0,61	0,28	141,83
Sulawesi Tengah	0,23	0,19	147,43
Sulawesi Selatan	0,63	0,28	112,35
Sulawesi Tenggara	0,25	0,25	133,77
Gorontalo	0,43	0,23	81,33
Maluku	0,17	0,21	73,56
Maluku Utara	0,21	0,16	11,04
Papua	0,05	0,20	48,29
Indonesia	0,25	0,52	216,37

Pada nilai rasio panjang jalan dengan luas wilayah terlihat beberapa daerah yang aksesibilitasnya tinggi, pada umumnya adalah provinsi di Jawa dan Bali seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali. Sementara beberapa provinsi yang perbandingan panjang jalan dengan luas wilayahnya masih rendah adalah Papua dan provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Selatan. Untuk wilayah yang perbandingan rasio panjang jalan dengan luas wilayahnya masih rendah diharapkan mendapat perhatian lebih agar dapat meningkat aksesibilitas wilayahnya.



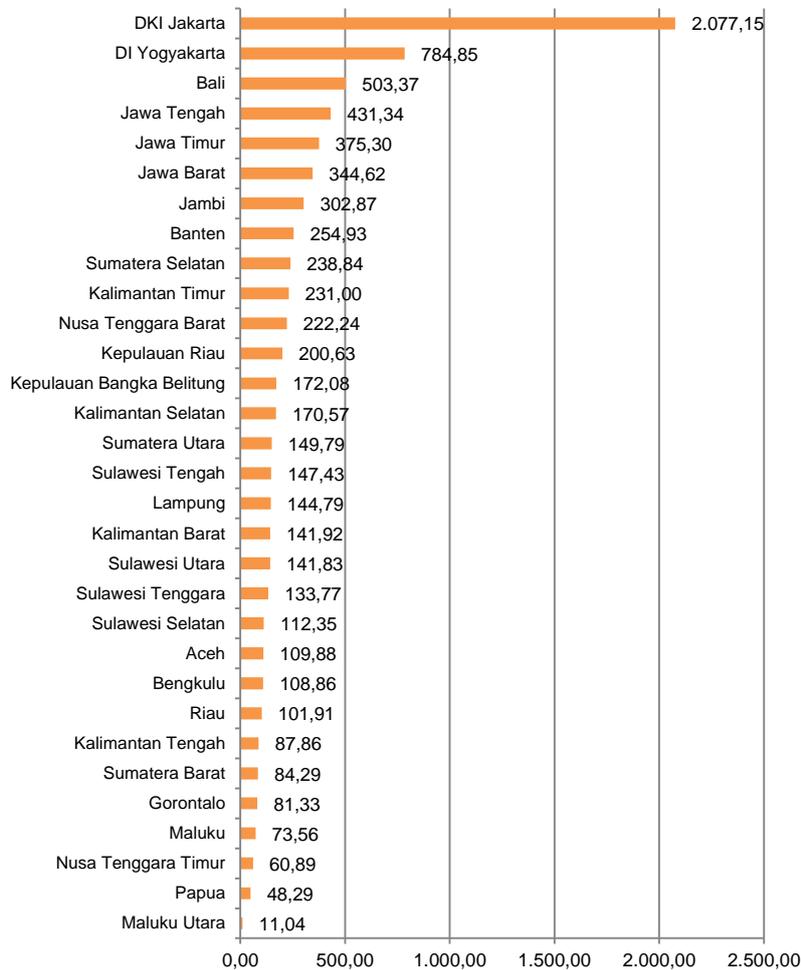
Gambar 4.17. Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah

Kemudian untuk rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, ada lima provinsi yang memiliki nilai lebih dari 1, di antaranya adalah Banten dan Jawa Barat. Hal ini berarti 1 km jalan di provinsi-provinsi tersebut melayani lebih dari 1000 ribu penduduk. Namun selain provinsi di Pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara Barat juga menunjukkan nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dibandingkan provinsi lain. Sementara beberapa provinsi yang masih rendah perbandingan panjang jalan dengan jumlah penduduknya adalah seperti Kalimantan Tengah dan Maluku Utara.



Gambar 4.18. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Sementara pada nilai rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan yang tinggi sebagian besar adalah provinsi di Jawa dan Bali seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali yang nilainya lebih dari 500. Hal ini berarti 1 km jalan melayani lebih dari 500 kendaraan, bahkan di DKI Jakarta mencapai lebih dari 2000 kendaraan. Dampak dari tingginya rasio ini tentunya adalah kemacetan yang sudah umum terjadi di daerah-daerah tersebut. Sementara beberapa provinsi yang rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraannya rendah adalah Nusa Tenggara Timur, Papua dan Maluku Utara.



Gambar 4.19. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor

Secara umum, sebaran jalan di Indonesia berada di daerah padat penduduk dan padat kendaraan seperti Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Di daerah ini kegiatan ekonominya relatif sudah maju dan mobilitas penduduknya pun juga tinggi. Ada pula daerah antara yang perbandingan jalan dengan wilayah, penduduk dan kendaraan tidak terlalu tinggi dan tidak pula rendah seperti Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Barat. Dan daerah yang rasio panjang jalannya masih rendah pada umumnya adalah Kepulauan Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di daerah-daerah ini perlu ditingkatkan keberadaan jalannya agar konektivitasnya meningkat dan serta menjadi identitas bangsa yang kuat.

Selain perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, dapat pula dilihat hubungan kondisi jalan dengan tingkat perekonomian suatu wilayah. Seperti yang menjadi visi dari Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, maka diharapkan keberadaan jaringan jalan yang mantap akan diikuti pula oleh perekonomian yang baik.

Untuk melihat hal tersebut, maka dilakukan analisis dengan menggunakan data jalan nasional dalam kondisi mantap Tahun 2015 dan data PDRB Tahun 2015 yang diasumsikan sebagai representasi global dari perekonomian suatu wilayah, dalam hal ini adalah provinsi. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasi atau hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25. Panjang Jalan Nasional dalam Kondisi Mantap dan PDRB Tahun 2015

Provinsi	Panjang Jalan Nasional Kondisi Mantap (km)	PDRB Tahun 2015	
		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Aceh	1.955,53	129.200.559,72	112.672.440,90
Sumatera Utara	2.237,78	571.722.008,76	440.955.852,47
Sumatera Barat	1.224,08	178.810.456,68	140.529.151,11
Riau	1.253,16	652.386.422,52	448.936.595,38
Kepulauan Riau	509,12	203.281.401,84	155.162.638,85
Jambi	1.166,91	155.110.347,65	125.038.712,63
Bengkulu	762,94	50.341.717,69	38.067.501,98
Sumatera Selatan	1.406,06	332.726.575,53	254.022.862,43
Bangka Belitung	600,10	60.992.088,32	45.961.462,46
Lampung	1.139,22	253.162.538,32	199.525.419,79
Banten	519,75	477.936.518,75	367.959.215,65
Jawa Barat	1.674,32	1.525.166.536,80	1.207.001.487,11
Jawa Tengah	1.367,39	1.014.074.206,45	806.609.023,50
DI Yogyakarta	246,55	101.396.117,27	83.461.574,49
Jawa Timur	2.261,71	1.689.882.400,67	1.331.418.241,92
Kalimantan Barat	1.940,49	81.297.196,90	112.261.168,31

Provinsi	Panjang Jalan Nasional Kondisi Mantap (km)	PDRB Tahun 2015	
		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kalimantan Tengah	1.806,45	42.418.257,95	78.889.998,35
Kalimantan Timur	1.602,49	98.582.698,48	488.904.757,95
Kalimantan Utara	478,63		
Kalimantan Selatan	1.138,82	64.528.591,32	110.890.731,42
Bali	617,20	86.362.020,92	129.137.912,34
Nusa Tenggara Barat	923,16	65.929.907,90	88.866.746,56
Nusa Tenggara Timur	1.637,39	56.027.892,30	56.820.098,00
Sulawesi Utara	1.466,93	41.806.112,12	70.418.811,20
Gorontalo	647,36	17.483.651,73	22.070.445,91
Sulawesi Tengah	2.226,96	55.694.098,44	82.829.231,00
Sulawesi Barat	656,36	17.233.927,25	25.983.381,85
Sulawesi Selatan	1.627,68	186.515.099,65	250.729.557,17
Sulawesi Tenggara	1.322,76	87.740.818,55	72.988.298,96
Maluku	1.413,24	24.048.412,34	24.843.650,18
Maluku Utara	972,38	15.463.058,84	20.377.474,21
Papua	2.187,16	71.892.559,58	131.270.876,27
Papua Barat	970,41	16.575.451,27	52.347.420,68

Sumber : Data Jalan Nasional : Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga
Data PDRB : BPS RI

Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai +1. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penafsiran nilai korelasi, yaitu :

1. Berkaitan dengan besaran angka, nilai korelasi dikatakan sempurna jika sama dengan -1 atau +1, dan tidak ada korelasi (hubungan) jika bernilai 0. Maka semakin mendekati -1 atau +1 maka dikatakan korelasi kuat, dan semakin mendekati 0 maka korelasi lemah. Tidak ada ketentuan tepat mengenai angka korelasi tertentu menunjukkan tingkat korelasi yang kuat atau lemah. Namun dapat dijadikan pedoman sederhana bahwa angka korelasi $> 0,5$ korelasi kuat; dan $< 0,3$ lemah.
2. Berkaitan dengan tanda, nilai + (positif) atau - (negatif) tidak menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan, melainkan hanya menunjukkan arah dari hubungan tersebut.

Tanda + (positif) menunjukkan korelasi yang searah, yaitu apabila semakin besar nilai variabel A, diikuti pula semakin besarnya nilai variabel B. Sebaliknya, tanda - (negatif) menunjukkan korelasi yang berlawanan arah, yaitu apabila semakin besar nilai variabel A maka diikuti dengan semakin kecil nilai variabel B.

Dari data pada Tabel 4.26, diperoleh nilai korelasi antara panjang jalan dalam kondisi mantap dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 0,318 dan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 0,368 seperti terlihat pada Tabel 4.26. Kedua nilai korelasi tersebut menunjukkan nilai yang cukup dan positif atau searah antara panjang jalan dalam kondisi mantap dengan PDRB. Signifikansi antara panjang jalan nasional kondisi mantap dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (0,076) menunjukkan korelasinya tidak bermakna secara statistik. Namun, signifikansi antara panjang jalan nasional kondisi mantap dan PDRB atas Dasar Harga Konstan (0,038) menunjukkan korelasi bermakna secara statistik. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dari data yang ada, provinsi dengan panjang jalan dalam kondisi mantap tinggi diikuti pula dengan PDRB atas harga konstan yang tinggi pula.

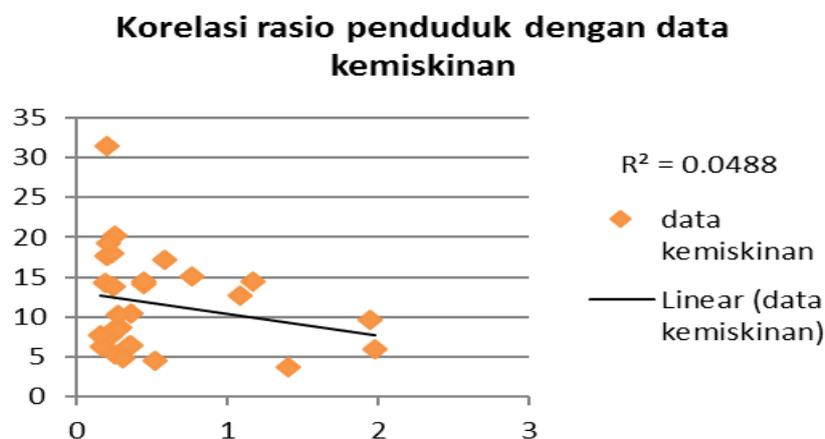
Tabel 4.26. Korelasi Antara Panjang Jalan Mantap dengan PDRB Tahun 2015

		Panjang Jalan Nasional Kondisi Mantap (km)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2015	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2015
Panjang Jalan Nasional Kondisi Mantap (km)	Pearson Correlation	1	,318	,368*
	Sig. (2-tailed)		,076	,038
	N	32	32	32
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2014	Pearson Correlation	,318	1	,973**
	Sig. (2-tailed)	,076		,000
	N	32	32	32
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2014	Pearson Correlation	,368*	,973**	1
	Sig. (2-tailed)	,038	,000	
	N	32	32	32

Masih terdapat banyak faktor lain yang bisa menjadi parameter keadaan ekonomi dan keberhasilan pembangunan infrastruktur suatu provinsi, namun karena data yang tersedia pada saat ini baru memungkinkan untuk dilakukan analisa sederhana di atas, maka hal ini menguatkan pentingnya keberadaan infrastruktur yang baik untuk mendukung perekonomian rakyat dan mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih baik. Selain itu, analisis ini akan semakin lengkap apabila data yang dilibatkan tidak hanya data jalan nasional, namun juga jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota berdasarkan kondisi. Sehingga hasilnya akan lebih mendekati kondisi sebenarnya.

F. Korelasi

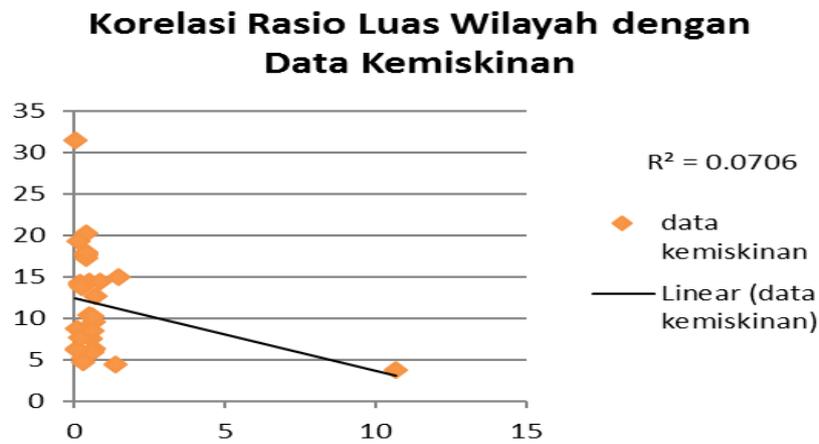
Rasio penduduk Indonesia memiliki peranan dalam menentukan data kemiskinan. Oleh karena itu, muncul indikasi bahwa terdapat hubungan antara rasio penduduk dengan data kemiskinan di Indonesia menurut Provinsi.



Gambar 4.20. Hubungan antara Rasio Penduduk dengan Data Kemiskinan

Dapat dilihat bahwa ada hubungan negatif antara rasio penduduk dan data kemiskinan, yang berarti semakin tinggi rasio penduduk maka semakin rendah data kemiskinan. Hubungan yang terdapat di antara kedua hal ini tergolong kecil yaitu sebesar 0,0488.

Rasio Luas Wilayah juga mempengaruhi data kemiskinan di Indonesia. Seperti yang terlihat pada gambar berikut.

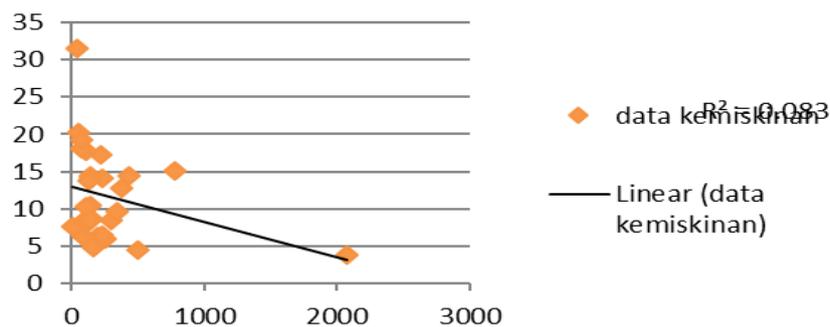


Gambar 4.21. Hubungan antara Rasio Luas Wilayah dengan Data Kemiskinan

Hubungan yang terjadi adalah hubungan negatif, yang berarti semakin tinggi rasio luas wilayah maka semakin rendah data kemiskinan nya. Hubungan ini juga tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,0706.

Faktor ketiga yang terindikasi mempengaruhi data kemiskinan adalah kendaraan bermotor.

Korelasi Kendaraan Bermotor dengan Data Kemiskinan



Gambar 4.22. Hubungan antara Kendaraan Bermotor dengan Data Kemiskinan

Ternyata, hubungan yang terjadi adalah hubungan negative pula, yang berarti semakin tinggi angka kendaraan bermotor maka semakin rendah data kemiskinan. Hubungan ini juga tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,083.

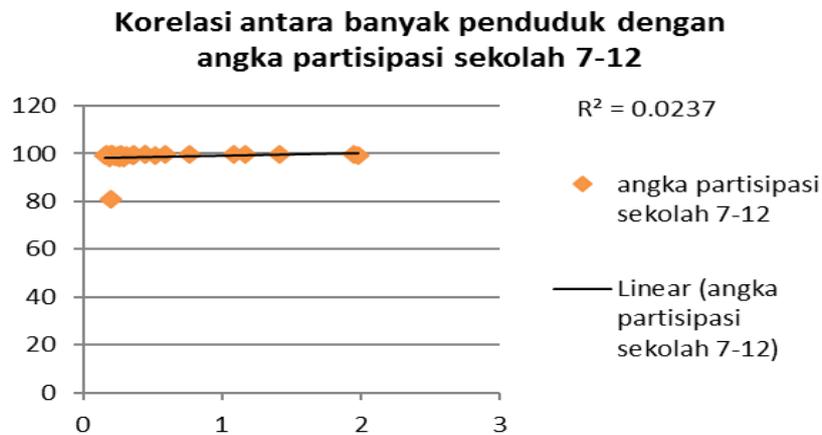
Yang selanjutnya akan dilihat adalah angka partisipasi sekolah usia 7-12 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang akan dilihat hubungannya adalah luas wilayah.



Gambar 4.23. Hubungan antara Luas Wilayah dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12

Ternyata, hubungan yang terjadi adalah hubungan positif, dimana semakin tinggi luas wilayah maka semakin tinggi angka partisipasi sekolah usia 7-12. Hubungan ini tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,0092.

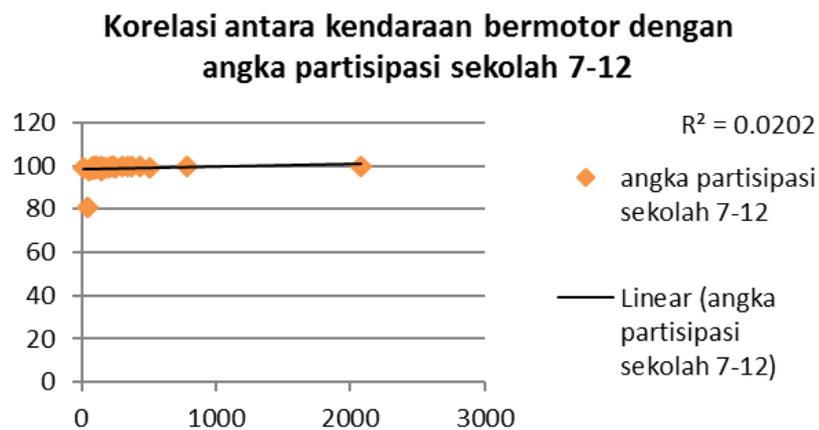
Faktor selanjutnya yang akan dilihat adalah banyak penduduk dan hubungannya terhadap angka partisipasi sekolah usia 7-12.



Gambar 4.24. Hubungan antara Penduduk dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12

Ternyata, hubungan yang terjadi adalah hubungan positif, dimana semakin tinggi banyak penduduk maka semakin tinggi angka partisipasi sekolah usia 7-12. Hubungan ini tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,0237.

Faktor selanjutnya yang akan dilihat adalah kendaraan bermotor dan hubungannya dengan partisipasi sekolah usia 7-12.

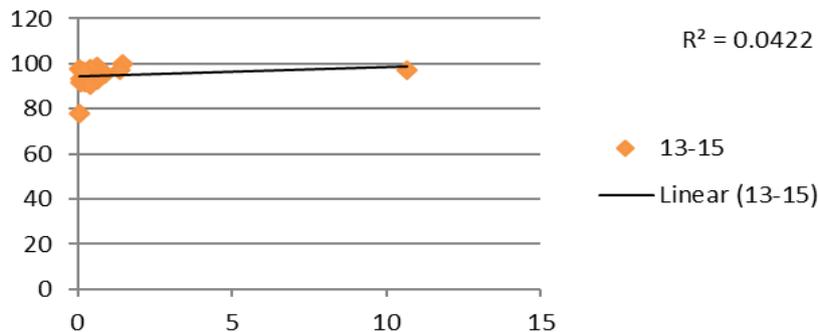


Gambar 4.25. Hubungan antara Kendaraan Bermotor dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12

Ternyata, hubungan yang terjadi adalah hubungan positif, dimana semakin tinggi angka kendaraan bermotor maka semakin tinggi angka partisipasi sekolah usia 7-12. Hubungan ini tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,0202.

Yang selanjutnya akan dilihat adalah partisipasi sekolah usia 13-15 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang akan diteliti adalah luas wilayah.

Korelasi antara luas wilayah dengan angka partisipasi sekolah 13-15

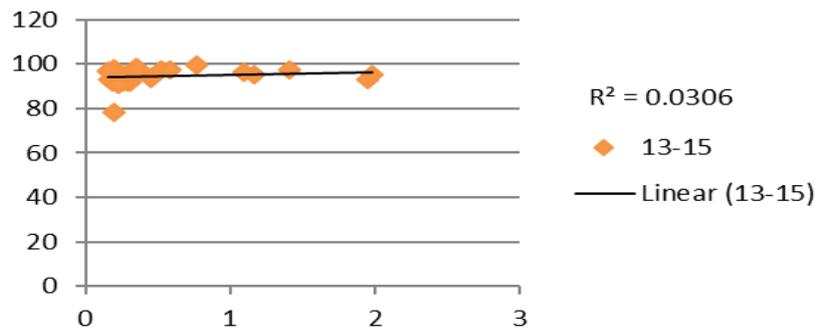


Gambar 4.26. Hubungan antara Luas Wilayah dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15

Ternyata, hubungan yang terjadi adalah hubungan positif, dimana semakin tinggi luas wilayah maka semakin tinggi angka partisipasi sekolah usia 13-15. Hubungan ini tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,0422.

Faktor kedua yang akan dilihat adalah jumlah penduduk.

Korelasi antara jumlah penduduk dengan angka partisipasi sekolah 13-15

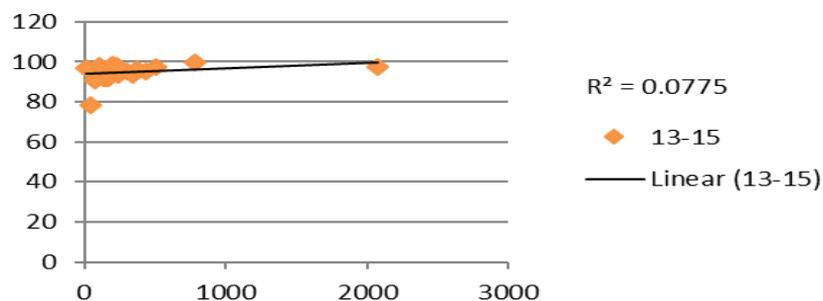


Gambar 4.27. Hubungan antara Penduduk dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15

Ternyata, hubungan yang terjadi adalah hubungan positif, dimana semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi angka partisipasi sekolah usia 13-15. Hubungan ini tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,0306.

Faktor selanjutnya yang akan dilihat adalah kendaraan bermotor.

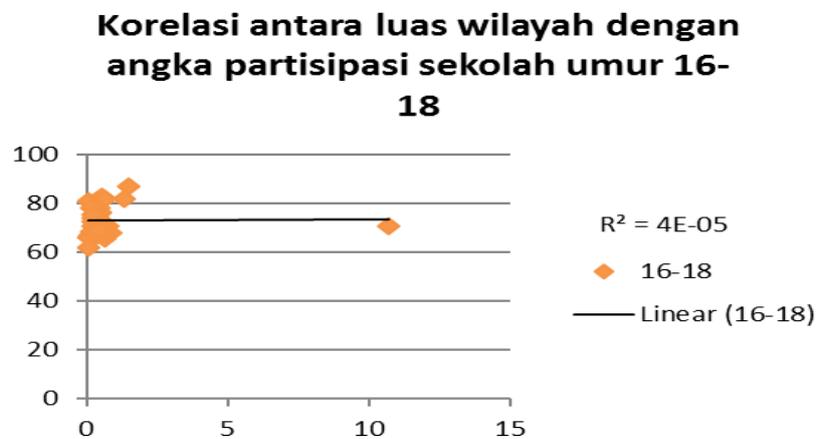
Korelasi antara kendaraan bermotor dengan angka partisipasi sekolah 13-15



Gambar 4.28. Hubungan antara Kendaraan Bermotor dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15

Ternyata, hubungan yang terjadi adalah hubungan positif, dimana semakin tinggi angka kendaraan bermotor maka semakin tinggi angka partisipasi sekolah usia 13-15. Hubungan ini tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,0755.

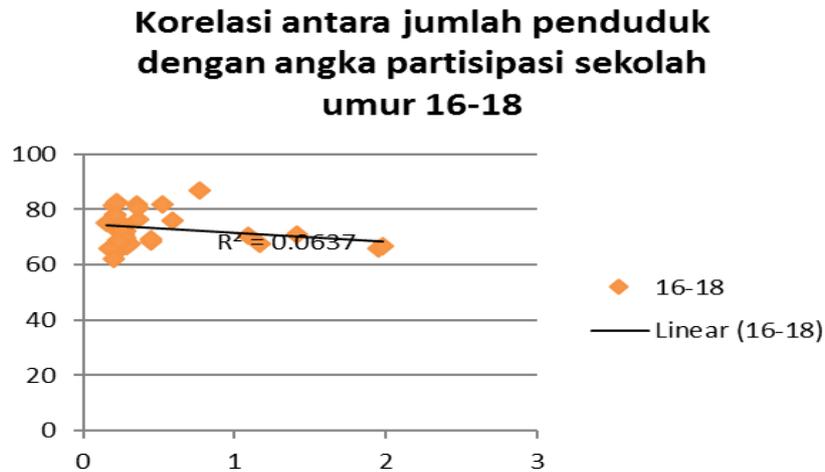
Yang selanjutnya akan dilihat adalah angka partisipasi sekolah usia 16-18 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang akan dilihat hubungannya adalah luas wilayah.



Gambar 4.29. Hubungan antara Luas Wilayah dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18

Ternyata, hubungan yang terjadi adalah hubungan positif, dimana semakin tinggi luas wilayah maka semakin tinggi angka partisipasi sekolah usia 16-18. Hubungan ini tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,00004.

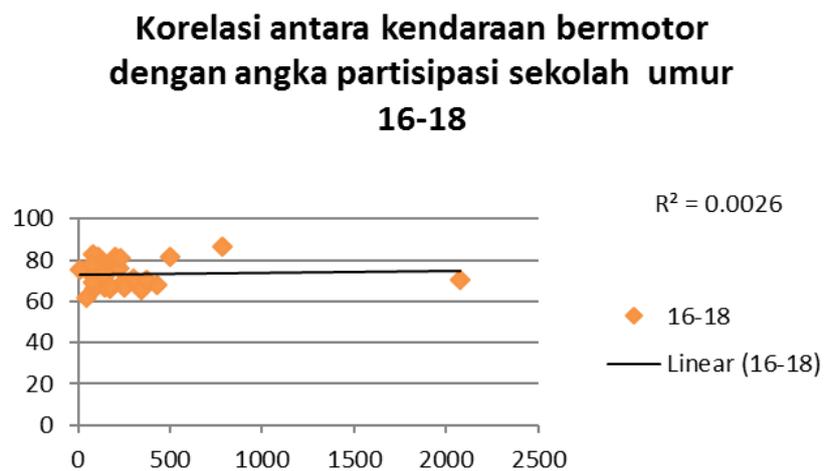
Faktor selanjutnya yang akan dilihat adalah jumlah penduduk.



Gambar 4.30. Hubungan antara Penduduk dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18

Ternyata, hubungan yang terjadi adalah hubungan negatif, dimana semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin rendah angka partisipasi sekolah usia 16-18. Hubungan ini tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,0637.

Faktor selanjutnya yang akan dilihat adalah kendaraan bermotor.

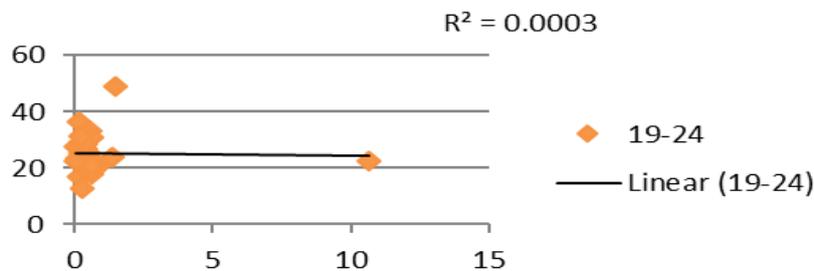


Gambar 4.31. Hubungan antara Kendaraan Bermotor dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18

Ternyata, hubungan yang terjadi adalah hubungan positif, dimana semakin tinggi angka kendaraan bermotor maka semakin tinggi angka partisipasi sekolah usia 16-18. Hubungan ini tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,0026.

Yang selanjutnya akan dilihat adalah partisipasi sekolah usia 19-24 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang akan diteliti adalah luas wilayah.

Korelasi antara luas wilayah dengan angka partisipasi sekolah umur 19-24

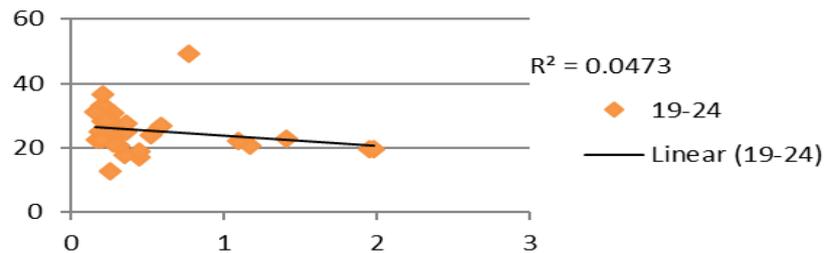


Gambar 4.32. Hubungan antara Luas Wilayah dengan Angka Partisipasi Sekolah Usia 19-24

Ternyata, hubungan yang terjadi adalah hubungan negatif, dimana semakin tinggi luas wilayah maka semakin rendah angka partisipasi sekolah usia 19-24. Hubungan ini tergolong tidak besar, yaitu sebesar 0,0003.

Faktor selanjutnya yang akan diteliti adalah jumlah penduduk.

Korelasi antara jumlah penduduk dengan angka partisipasi sekolah umur 19-24



BAB V

STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

A. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didefinisikan sebagai satu kesatuan fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Pengembangan sarana dan prasarana SPAM bertujuan untuk membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. SPAM Jaringan perpipaan di antaranya adalah unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan. Sementara SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan atau bangunan perlindungan mata air. Kedua SPAM tersebut perlu dikelola secara baik dan berkelanjutan agar ketersediaan air minum dapat senantiasa ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Pengembangan SPAM dijalankan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan strategi membaginya menjadi SPAM di Perkotaan dan SPAM di Perdesaan, baik untuk SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Pengembangan SPAM perkotaan antara lain melalui program Dukungan Air Baku Melalui Pembangunan

Intake dan Transmisi Air Baku;Peningkatan SPAM Skala Regional/Kota/IKK; Pembangunan SPAM IKK Baru; Peningkatan Kualitas Air Minum Melalui Capacity Building, Pengembangan NSPK, Advokasi, Sosialisasi, Pembinaan Teknik, Monev, dan Penyehatan PDAM; serta Mendorong Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dengan Pembangunan SPAM non Jaringan Perpipaan Individual/Komunal di Perkotaan.

Untuk SPAM jaringan perpipaan perkotaan di Indonesia tercatat kapasitas terpasangnya 163.658 liter/detik dengan kapasitas terbesar berada di Jawa Timur yaitu sebesar 27.170 liter/detik dan kapasitas produksinya 124.861 liter/detik dengan kapasitas terbesar berada di Jawa Timur yaitu sebesar 19.899 liter/detik. Sedangkan persentase kehilangan air nya adalah sebesar 36% dengan persentase terbesar berada di Bengkulu dan Lampung yaitu sebesar 65%. Cakupan pelayanannya di seluruh provinsi adalah 18,31% dari jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk terlayani 41,86 juta jiwa, dengan cakupan pelayanan terbesar berada di Bali yaitu sebesar 35,47%. Yang menjadi pelanggan atau pengguna dari SPAM jaringan perpipaan perkotaan ini adalah sambungan rumah sebanyak 8.797.694 unit, hidran umum 96.888 unit, dan sambungan komersial non domestik sebanyak 1.565.249 unit.

Tabel 5.1. Data Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Perkotaan

Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Unit	Kapasitas Terpasang (liter/detik)	Kapasitas Produksi (liter/detik)	Kehilangan Air (%)
Aceh	23	106	3.812	2.366	47
Sumatera Utara	31	146	9.464	8.408	16
Sumatera Barat	19	111	4.243	2.848	43
Riau	12	104	2.930	1.467	53
Jambi	11	75	2.427	1.540	36
Sumatera Selatan	15	116	5.784	3.653	39
Bengkulu	10	46	2.123	1.716	65
Lampung	14	68	2.187	1.379	65
Kepulauan Bangka Belitung	7	25	705	337	36
Kepulauan Riau	7	18	3.339	2.851	32
DKI Jakarta	1	2	15.200	13.400	47
Jawa Barat	26	207	19.677	14.416	34

Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Unit	Kapasitas Terpasang (liter/detik)	Kapasitas Produksi (liter/detik)	Kehilangan Air (%)
Jawa Tengah	35	312	14.940	10.759	28
DI Yogyakarta	5	42	2.549	1.992	31
Jawa Timur	38	371	27.170	19.899	35
Banten	6	38	6.668	6.242	30
Bali	9	43	4.148	3.343	31
Nusa Tenggara Barat	10	52	2.724	2.305	39
Nusa Tenggara Timur	21	80	1.707	1.046	35
Kalimantan Barat	14	57	2.395	1.929	32
Kalimantan Tengah	14	87	1.501	1.064	28
Kalimantan Selatan	13	97	5.130	3.969	40
Kalimantan Timur	14	129	6.931	6.038	30
Sulawesi Utara	15	76	2.489	1.888	61
Sulawesi Tengah	11	62	1.391	949	34
Sulawesi Selatan	24	125	4.962	4.542	46
Sulawesi Tenggara	9	60	1.473	817	51
Gorontalo	6	38	697	521	42
Sulawesi Barat	5	29	483	294	43
Maluku	11	18	795	625	43
Maluku Utara	8	18	779	699	10
Papua Barat	11	35	577	420	75
Papua	28	70	2.259	1.141	47
Indonesia	483	2.863	163.659	124.861	36

Sumber : Sistem Informasi SPAM, Direktorat Jenderal Cipta Karya. September 2015

Tabel 5.2. Data Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Perkotaan

Provinsi	Sambungan Rumah (Unit)	Hidran Umum (Unit)	Sambungan Komersial Non Domestik (unit)	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Persentase/ Cakupan Pelayanan (%)
Aceh	212.081	1.134	50.166	983.196	22,96
Sumatera Utara	416.065	6.650	54.217	1.848.389	13,35
Sumatera Barat	215.254	1.312	8.661	1.049.429	20,4
Riau	93.342	80	884.232	383.799	7,02

Provinsi	Sumbangan Rumah (Unit)	Hidran Umum (Unit)	Sumbangan Komersial Non Domestik (unit)	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Persentase/ Cakupan Pelayanan (%)
Jambi	107.229	346	14.371	458.482	14,3
Sumatera Selatan	221.237	1.133	18.480	1.139.838	16,13
Bengkulu	60.644	747	1.626	319.342	18,64
Lampung	58.209	271	4.152	266.805	3,44
Kepulauan Bangka Belitung	20.206	187	7.251	98.008	8,01
Kepulauan Riau	182.209	111	23.955	684.666	40,88
DKI Jakarta	691.195	2.196	101.755	2.859.983	29,83
Jawa Barat	1.269.088	31.419	111.016	5.641.331	13,37
Jawa Tengah	1.266.276	13.447	55.991	6.930.479	21,02
DI Yogyakarta	129.526	773	4.265	508.512	14,73
Jawa Timur	1.434.722	18.658	79.067	6.877.128	23,41
Banten	212.389	281	855	894.228	10,2
Bali	264.221	3.667	19.280	1.380.303	35,47
Nusa Tenggara Barat	231.954	1.840	18.984	1.020.285	17,8
Nusa Tenggara Timur	72.968	1.260	4.030	459.763	9,82
Kalimantan Barat	133.472	727	20.154	654.364	14,89
Kalimantan Tengah	94.384	811	7.076	444.606	20,11
Kalimantan Selatan	298.721	3.427	27.757	1.459.512	40,26
Kalimantan Timur	390.677	240	12.826	1.736.888	49,54
Sulawesi Utara	75.098	598	10.360	353.803	15,69
Sulawesi Tengah	68.749	434	4.013	334.727	12,71
Sulawesi Selatan	310.499	2.797	7.519	1.638.122	20,38
Sulawesi Tenggara	60.518	592	4.467	315.263	16,94
Gorontalo	42.958	228	1.218	202.229	19,47
Sulawesi Barat	21.918	262	1.062	126.214	10,82
Maluku	28.359	576	2.043	194.626	12,75
Maluku Utara	44.130	416	141	259.598	31,88
Papua Barat	27.864	167	702	142.879	18,78
Papua	41.532	101	3.557	194.087	7,04
Indonesia	8.797.694	96.888	1.565.249	41.860.884	18,31

Sumber : Sistem Informasi SPAM, Direktorat Jenderal Cipta Karya, September 2015

Untuk SPAM perdesaan antara lain meliputi program Pembangunan SPAM untuk Desa Rawan Air/Terpencil/Tertinggal; Pembangunan SPAM Desa Berbasis Masyarakat (Pamsimas); serta Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dan Perubahan Perilaku Higienis Masyarakat. Lingkup kegiatan SPAM perdesaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi Pembangunan unit air baku (bangunan *intake*, bangunan penangkap mata air), Pembangunan unit produksi (Instalasi Pengolah Air, sumur bor), Pembangunan unit jaringan distribusi, Pembangunan unit pelayanan berupa Hidran Umum (HU).

Pada Tabel 5.3. di bawah ini ditampilkan data pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Perdesaan dengan dua programnya, yaitu PNPM Mandiri dan DAK DAU, serta Pamsimas. Tingkat pelayanan total dari SPAM Jaringan Perpipaan Perdesaan adalah 1,24% dari jumlah penduduk Indonesia.

Tabel 5.3. Data Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Perdesaan

Provinsi	Data PNPB Mandiri dan DAK DAU				Data Pamsimas			Tingkat Pelayanan Total (%)
	Penerima Manfaat	Ekivalen Penduduk	Tingkat Pelayanan (%)	Penerima Manfaat	Ekivalen Penduduk	Tingkat Pelayanan (%)		
Aceh	16.171	68.146	1,52	10.000	42.141	0,94	2,45	
Sumatera Utara	13.048	55.764	0,43	0	0	0,00	0,43	
Sumatera Barat	1.350	5.678	0,12	80.746	339.585	7,01	7,12	
Riau	2.503	10.434	0,19	12.095	50.418	0,91	1,10	
Jambi	0	0	0,00	1.070	4.293	0,14	0,14	
Sumatera Selatan	0	0	0,00	17.682	72.640	0,97	0,97	
Bengkulu	0	0	0,00	6.544	25.933	1,51	1,51	
Lampung	8.719	34.290	0,45	250	983	0,01	0,46	
Kepulauan Bangka Belitung	1.208	4.749	0,39	0	0	0,00	0,39	
Kepulauan Riau	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
DKI Jakarta	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
Jawa Barat	12.914	48.374	0,11	19.677	73.707	0,17	0,28	
Jawa Tengah	65.669	244.304	0,75	303.661	1.129.688	3,49	4,24	
DI Yogyakarta	26.962	89.810	2,60	0	0	0,00	2,60	
Jawa Timur	21.367	77.137	0,21	0	0	0,00	0,21	
Banten	2.511	10.282	0,10	10.002	40.955	0,39	0,48	
Bali	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	

Provinsi	Data PNPB Mandiri dan DAK DAU			Data Pamsimas			Tingkat Pelayanan Total (%)
	Penerima Manfaat	Ekivalen Penduduk	Tingkat Pelayanan(%)	Penerima Manfaat	Ekivalen Penduduk	Tingkat Pelayanan (%)	
Nusa Tenggara Barat	12.473	44.781	1,00	0	0	0,00	1,00
Nusa Tenggara Timur	436	2.012	0,04	12.448	57.451	1,23	1,27
Kalimantan Barat	11.528	49.508	1,13	0	0	0,00	1,13
Kalimantan Tengah	80	308	0,01	0	0	0,00	0,01
Kalimantan Selatan	0	0	0,00	9.158	34.054	0,94	0,94
Kalimantan Timur	154	628	0,02	0	0	0,00	0,02
Sulawesi Utara	16.917	64.515	2,85	0	0	0,00	2,85
Sulawesi Tengah	577	2.449	0,09	8.032	34.093	1,29	1,39
Sulawesi Selatan	7.956	34.585	0,43	13.866	60.276	0,75	1,18
Sulawesi Tenggara	12.593	55.950	2,51	0	0	0,00	2,51
Gorontalo	100	414	0,04	2.780	11.519	1,11	1,15
Sulawesi Barat	6.171	27.646	2,39	3.920	17.561	1,52	3,90
Maluku	0	0	0,00	1.234	5.969	0,39	0,39
Maluku Utara	1.377	6.653	0,64	285	1.377	0,13	0,78
Papua Barat	648	2.933	0,39	303	1.372	0,18	0,57
Papua	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Indonesia	243.433		0,40	513.752		0,84	1,24

Sumber : Sistem Informasi SPAM, Direktorat Jenderal Cipta Karya. September 2015

Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa SPAM dapat dijalankan melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Bukan jaringan perpipaan di antaranya adalah melalui sumur galian/sumur dangkal (SGL), sumur pompa tangan (SPT), penampungan air hujan (PAH), dan perlindungan mata air (PMA). Tabel 5.4. di bawah ini menampilkan jumlah KK penerima manfaat dari SPAM bukan jaringan perpipaan menurut provinsi. Secara nasional, persentase pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan di Indonesia mencapai 23,6%, dengan persentase terbesar berada di Maluku Utara yaitu sebesar 54,75%.

Tabel 5.4. Jumlah KK Penerima Manfaat SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Provinsi	Bukan Jaringan Perpipaan (B.J.P)						Jumlah KK Penerima Manfaat	Jumlah Jiwa	Persentase Pelayanan
	SGL	SPT	PAH	Sumur Bor	PMA				
Aceh	177.962	11.449	13.650	3.613	43.819	250.493	1.055.577	22,96%	
Sumatera Utara	254.491	68.022	80.051	120.964	50.415	573.943	2.439.259	18,62%	
Sumatera Barat	207.340	18.886	35.965	0	92.448	354.639	1.531.682	30,23%	
Riau	134.958	11.241	103.849	0	1.534	251.582	1.096.312	18,94%	
Jambi	151.095	6.501	84.989	0	12.124	254.709	1.042.458	32,25%	
Sumatera Selatan	273.102	17.012	71.454	48.170	11.518	421.256	1.685.024	22,19%	
Bengkulu	62.069	1.904	1.064	35	16.919	81.991	327.963	18,83%	
Lampung	348.582	5.412	13.464	4.710	13.793	385.961	1.506.573	19,59%	
Kepulauan Bangka Belitung	96.566	1.559	1.510	2.387	5.265	107.287	440.884	34,48%	
Kepulauan Riau	48.389	1.557	4.650	0	15.021	69.617	278.468	15,78%	
Dki Jakarta	77.360	259.626	2.408	3.054	2.461	344.909	1.380.161	13,74%	
Jawa Barat	1.434.703	654.140	24.626	1.644.716	69.925	3.828.110	14.327.151	32,69%	
Jawa Tengah	1.076.053	136.640	22.743	0	172.723	1.408.159	5.157.090	15,80%	
DI Yogyakarta	497.960	1.988	190.776	2.346	40.319	733.389	2.553.762	70,66%	
Jawa Timur	1.370.724	407.450	62.356	642.273	35.313	2.518.116	8.813.406	23,27%	
Banten	61.795	167.554	13.632	698.381	80.788	1.022.150	4.233.208	38,09%	
Bali	73.525	568	19.106	1.455	12.501	107.155	420.217	11,53%	

Provinsi	Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)						Jumlah KK Penerima Manfaat	Jumlah Jiwa	Persentase Pelayanan
	SGL	SPT	PAH	Sumur Bor	PMA				
Nusa Tenggara Barat	231.761	15.911	2.213	28.662	74.636	353.183	1.312.240	27,91%	
Nusa Tenggara Timur	74.493	5.601	32.467	2.010	17.826	132.397	620.328	12,68%	
Kalimantan Barat	23.836	2.013	65.907	3.672	4.304	99.732	434.811	9,47%	
Kalimantan Tengah	37.878	9.218	4.600	12.729	1.614	66.039	252.945	11,20%	
Kalimantan Selatan	89.011	50.140	14.284	110.542	0	263.977	950.318	25,72%	
Kalimantan Timur	39.468	12.248	30.424	7.557	4.964	94.661	376.751	10,20%	
Sulawesi Utara	62.277	11.032	7.213	14.031	0	94.553	356.664	15,67%	
Sulawesi Tengah	22.302	9.332	22.535	78.640	100.960	233.769	988.334	36,83%	
Sulawesi Selatan	198.882	13.517	16.939	32.392	58.966	320.696	1.269.956	15,65%	
Sulawesi Tenggara	55.883	5.795	3.525	21.670	11.759	98.632	438.544	19,26%	
Gorontalo	23.409	452	203	0	903	24.967	94.363	8,69%	
Sulawesi Barat	26.780	1.710	928	0	0	29.418	131.777	11,08%	
Maluku	20.873	2.908	6.544	3.785	15.556	49.666	219.648	13,72%	
Maluku Utara	12.933	5.440	2.178	26.841	89.193	136.585	592.702	54,75%	
Papua Barat	2.660	2.075	4.891	21.227	32.621	63.474	272.665	34,28%	
Papua	2.755	4.252	103.919	57.021	52.803	220.750	970.481	32,55%	
Indonesia								23,60%	

Sumber : Sistem Informasi SPAM, Direktorat Jenderal Cipta Karya, September 2015

Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan air minum saat ini antara lain masih rendahnya cakupan pelayanan. Hal ini merupakan refleksi dari pengelolaan yang kurang efisien maupun kurangnya pendanaan untuk pengembangan sistem yang ada. Kondisi PDAM yang tidak sehat juga menjadi salah satu penyebab rendahnya akses masyarakat mendapatkan air minum layak.

Untuk dapat meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, kondisi PDAM harus sehat sehingga mampu mengoperasikan SPAM secara efektif dan efisien melalui manajemen internal PDAM yang kuat. Evaluasi kinerja penyelenggaraan SPAM PDAM setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat, dan sakit. Penilaian kinerja PDAM tersebut dilakukan dengan melibatkan empat aspek penilaian, yaitu keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan keanggotaan Perpamsi, jumlah penyelenggara SPAM yang berbentuk PDAM ada sebanyak 375 PDAM di Indonesia, sementara di tahun 2013 sebanyak 383. Dan di tahun 2014, jumlah penyelenggara SPAM tercatat sebanyak 423 yang terdiri dari 386 berbentuk PDAM dan 37 non PDAM. Dari 386 PDAM, 5 diantaranya berubah menjadi non PDAM dan ada 2 PDAM yang belum terdata, sehingga diperoleh penyelenggara SPAM berbentuk PDAM sebanyak 383.

Evaluasi terhadap kinerja PDAM di Indonesia yang dilakukan oleh BPPSPAM merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran aspek-aspek kinerja sehingga dapat diketahui kualitas dan capaian kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat di wilayahnya. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM yang bersangkutan.

Namun demikian, evaluasi yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia dikarenakan keterbatasan laporan audit yang diterima oleh BPPSPAM. Pada Tabel 5.1. ditampilkan perkembangan hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2010-2014 yang dilakukan oleh BPPSPAM. Terlihat jumlah PDAM yang dievaluasi mengalami peningkatan di tahun 2014 dengan jumlah PDAM dalam kondisi sehat

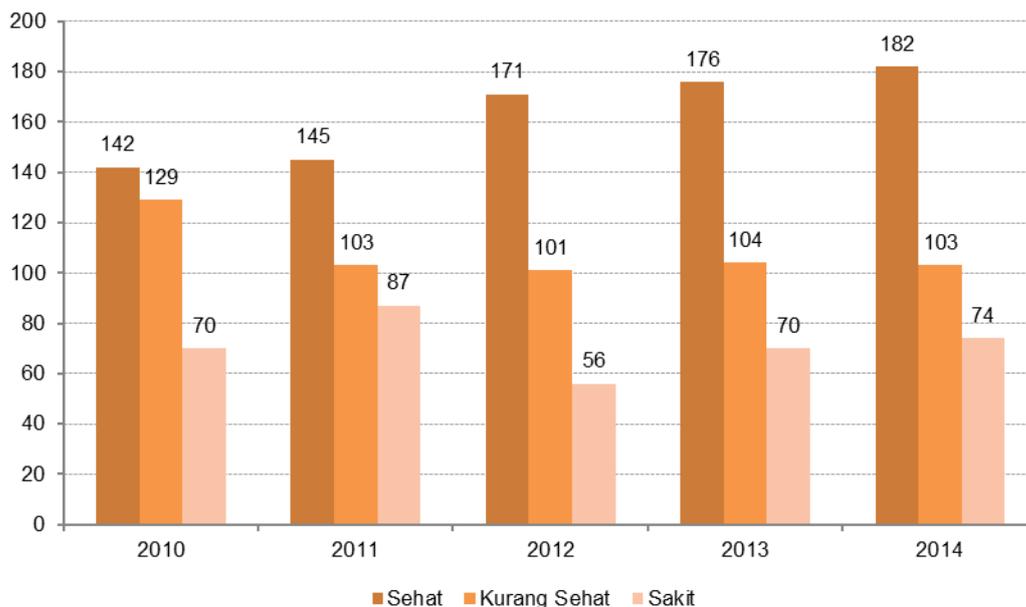
sebanyak 182 atau 50,70%, kurang sehat 103 atau 29,71% dan dalam kondisi sakit 74 PDAM atau 20,61%.

Persentase PDAM dalam kondisi, yaitu berkisar 50% sehat sedikit lebih baik selama 3 tahun terakhir jika dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2011. Hal ini diharapkan terus meningkat sehingga semakin banyak PDAM yang memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat.

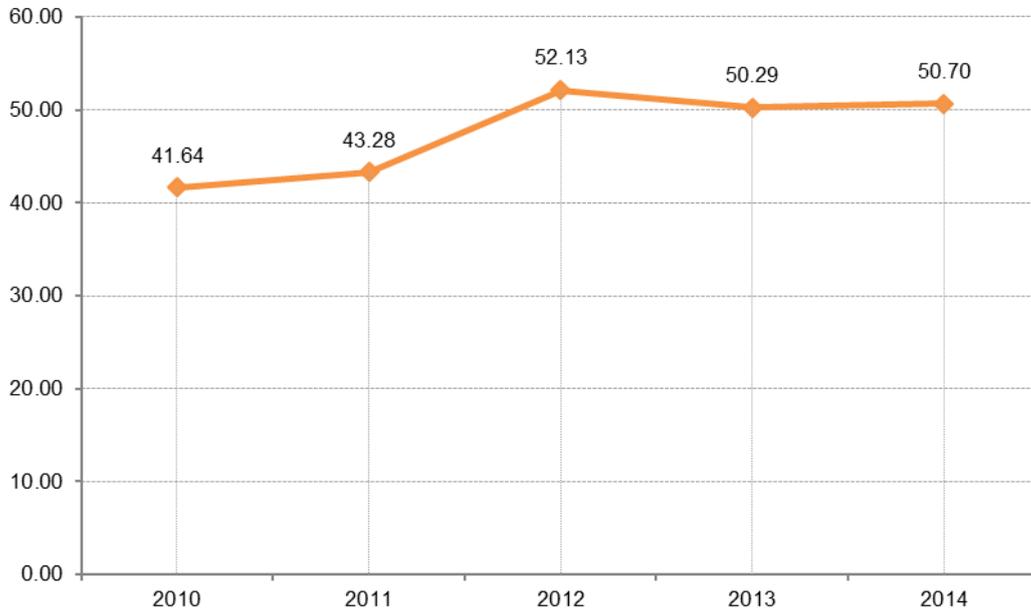
Tabel 5.5. Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2010-2014

Tahun	Kinerja PDAM				Persentase PDAM		
	Sehat	Kurang Sehat	Sakit	Jumlah	Sehat	Kurang Sehat	Sakit
2010	142	129	70	341	41,64	37,83	20,53
2011	145	103	87	335	43,28	30,75	25,97
2012	171	101	56	328	52,13	30,79	17,07
2013	176	104	70	350	50,29	29,71	20,00
2014	182	103	74	359	50,70	28,69	20,61

Sumber : Kinerja PDAM 2012, 2013, 2014
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



Gambar 5.1. Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2010-2014



Gambar 5.2. Persentase PDAM Dalam Kondisi Sehat Tahun 2010-2014

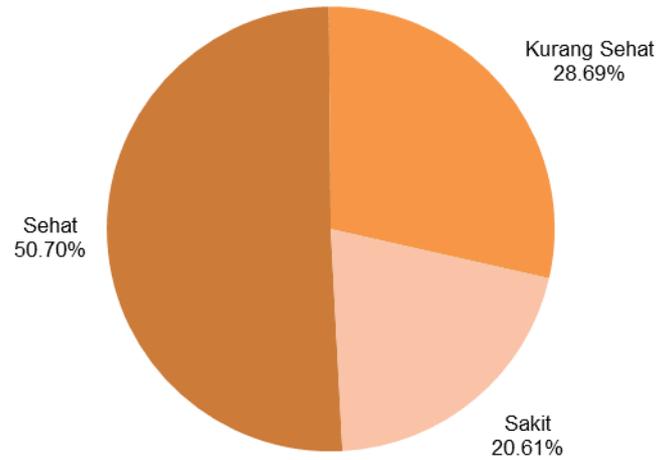
Pada Tabel 5.6. di bawah ini ditampilkan hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2014 menurut provinsi. Sementara pada Tabel 5.7. disajikan data hasil rekapitulasi kapasitas serta jumlah pelanggan dan penduduk terlayani PDAM di masing-masing provinsi di Indonesia.

Tabel 5.6. Kinerja PDAM di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Sehat	Kurang Sehat	Sakit	Jumlah
Aceh	2	5	7	14
Sumatera Utara	6	6	4	16
Sumatera Barat	7	6	3	16
Riau		3	2	5
Jambi	2	6	1	9
Sumatera Selatan	4	4	5	13
Bengkulu	1	3	2	6
Lampung	1	4	4	9
Kepulauan Bangka Belitung			6	6

Provinsi	Sehat	Kurang Sehat	Sakit	Jumlah
Kepulauan Riau	1	2		3
DKI Jakarta	1			1
Jawa Barat	21	1	1	23
Jawa Tengah	33	2		35
DI Yogyakarta	5			5
Jawa Timur	28	6	4	38
Banten	5	1		6
Bali	8	1		9
Nusa Tenggara Barat	3	3	1	7
Nusa Tenggara Timur	4	9	2	15
Kalimantan Barat	1	4	6	11
Kalimantan Tengah	7	4	3	14
Kalimantan Selatan	11	1		12
Kalimantan Timur	6	3		9
Kalimantan Utara	3	1		4
Sulawesi Utara		6	3	9
Sulawesi Tengah	3	5		8
Sulawesi Selatan	8	7	8	23
Sulawesi Tenggara		5	4	9
Gorontalo	1	2	2	5
Sulawesi Barat	1	2		3
Maluku	3		3	6
Maluku Utara	3	1		4
Papua Barat	1		1	2
Papua	2		2	4
Indonesia	182	103	74	359

Sumber : Kinerja PDAM 2014
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



Gambar 5.3. Persentase Evaluasi Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2014

Tabel 5.7. Kapasitas dan Layanan PDAM di Indonesia menurut Provinsi

Provinsi	Kapasitas Terpasang (ltr/dtk)	Volume Produksi Riil (ltr/dtk)	Jumlah Pelanggan (unit SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)
Aceh	3.519	2.106	150.454	2.495.186	921.858
Sumatera Utara	10.999	9.514	674.875	9.187.831	3.954.422
Sumatera Barat	4.721	2.831	227.187	3.573.763	1.487.501
Riau	1.476	662	50.966	2.427.430	411.634
Jambi	2.893	1.560	141.381	2.057.661	974.740
Sumatera Selatan	7.537	4.877	343.671	3.742.796	2.144.836
Bengkulu	1.575	1.044	62.711	803.494	345.511
Lampung	1.560	809	63.121	2.061.419	450.992
Kepulauan Bangka Belitung	876	234	16.625	664.651	104.068
Kepulauan Riau	524	348	22.236	281.739	130.870
DKI Jakarta	18.025	17.005	803.601	9.307.610	5.492.151
Jawa Barat	19.705	14.570	1.239.573	24.127.111	9.235.466
Jawa Tengah	16.277	13.558	1.216.836	22.233.246	7.956.511
DI Yogyakarta	2.521	1.350	129.178	2.979.274	972.411

Provinsi	Kapasitas Terpasang (ltr/dtk)	Volume Produksi Riil (ltr/dtk)	Jumlah Pelanggan (unit SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)
Jawa Timur	27.492	19.526	1.542.676	23.573.153	10.061.043
Banten	6.705	6.190	223.536	6.467.917	2.322.198
Bali	6.261	4.773	359.592	3.220.380	2.055.225
Nusa Tenggara Barat	2.946	2.224	177.334	2.907.367	1.032.581
Nusa Tenggara Timur	2.249	1.213	107.635	2.134.809	737.966
Kalimantan Barat	3.513	2.147	159.705	2.419.536	876.571
Kalimantan Tengah	1.725	1.137	110.001	1.303.202	668.484
Kalimantan Selatan	5.439	3.283	312.673	3.165.357	1.910.738
Kalimantan Timur	6.661	5.425	338.941	3.288.833	2.063.112
Kalimantan Utara	903	588	34.228	354.018	211.948
Sulawesi Utara	1.753	938	65.931	1.169.196	422.154
Sulawesi Tengah	1.545	881	78.124	1.542.533	502.768
Sulawesi Selatan	7.323	5.070	352.426	5.099.989	2.297.648
Sulawesi Tenggara	1.333	712	70.454	1.415.262	457.344
Gorontalo	1.194	519	50.240	898.063	421.046
Sulawesi Barat	420	197	23.817	425.455	174.114
Maluku	999	335	30.075	611.149	207.606
Maluku Utara	627	482	36.629	370.509	217.436
Papua Barat	149	122	9.729	139.333	58.374
Papua	1.038	843	34.296	509.580	207.838
Indonesia	172.483	127.073	9.260.457	146.958.852	61.489.165

Sumber : Direkap dari Kinerja PDAM 2014
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Catatan : SL = Sambungan Langsung

B. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah menyediakan sarana dan prasarana dasar kehidupan yang dibutuhkan masyarakat secara memadai. Tempat tinggal atau lingkungan yang sehat dapat diartikan sebagai lingkungan yang terbebas dari pencemaran air, udara, dan tanah. Untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, bebas air limbah, bersih dari sampah dan bebas genangan, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) bersama dengan pemerintah daerah melaksanakan kerjasama penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi (air limbah, sampah dan drainase).

Kondisi lingkungan yang sehat akan tercipta apabila limbah di lingkungan permukiman dapat dikelola dengan baik, termasuk limbah cair. Sebaliknya, air limbah yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan termasuk pada sumber air baku baik air permukaan maupun air tanah. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan dan strategi pelayanan pengelolaan air limbah yang tepat.

Pengelolaan air limbah memerlukan prasarana dan sarana penyaluran dan pengolahan. Pengolahan air limbah permukiman dapat ditangani melalui sistem setempat (*on site*) ataupun melalui sistem terpusat (*off site*). Di kota-kota besar atau kota metropolitan, dikembangkan sistem pengelolaan air limbah terpusat (*sewerage system*) yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran oleh air buangan/limbah rumah tangga dengan cara menyalurkannya melalui jaringan perpipaan untuk kemudian diolah ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun dikarenakan pembangunan IPAL terpusat membutuhkan investasi yang amat besar, dilakukan pula pengoptimalan serta penambahan jaringan perpipaan dan distribusi IPAL setempat yang dapat melayani masyarakat perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal.

Hingga saat ini, baru beberapa kota besar saja di Indonesia yang memiliki IPAL terpusat. Sementara daerah lain sistem pengolahan air limbahnya dilakukan dalam

lingkupkawasan. Seperti pada Tabel 5.8. dan 5.9. di bawah ini yang menampilkan jumlah serta layanan IPAL Terpusat dan IPAL Kawasan menurut provinsi.

Tabel 5.8. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat di Indonesia menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah IPAL Terpusat	Kapasitas Pengolahan	
		Terpasang (m ³ /hari)	Terpakai (m ³ /hari)
Sumatera Utara	2	12.000	10.115
Kepulauan Riau	1	2.852	75
DKI Jakarta	2	60.480	24.883
Jawa Barat	5	101.382	88.800
Jawa Tengah	3	11.960	5.930
DI Yogyakarta	1	15.500	12.500
Banten	1	2.852	150
Bali	1	51.000	31.185
Kalimantan Selatan	7	17.500	1.922
Kalimantan Timur	1	800	320
Sulawesi Utara	1	2.000	100

Sumber : Subdit Pengelolaan Air Limbah, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya. 2015

Tabel 5.9. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kawasan di Indonesia menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah IPAL Kawasan	Jumlah SR	Jumlah Jiwa
Aceh	4	450	441
Sumatera Utara	5	2.443	3.450
Sumatera Barat	8	1.007	4.430
Riau	4	683	2.740
Jambi	3	524	1.594
Sumatera Selatan	9	1.457	4.782
Bengkulu	1	109	200
Lampung	4	502	2.834
Kepulauan Bangka Belitung	4	260	1.540
Kepulauan Riau	2	0	0

Provinsi	Jumlah IPAL Kawasan	Jumlah SR	Jumlah Jiwa
DKI Jakarta	2	0	0
Jawa Barat	2	0	0
Jawa Tengah	9	432	1.300
DI Yogyakarta	2	0	0
Jawa Timur	15	4.813	8.966
Banten	6	1.112	5.005
Bali	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	9	1.070	3.837
Nusa Tenggara Timur	1	48	96
Kalimantan Barat	2	204	435
Kalimantan Tengah	8	957	3.983
Kalimantan Selatan	10	1.074	5.164
Kalimantan Timur	5	778	1.325
Kalimantan Utara	0	0	0
Sulawesi Utara	1	134	80
Sulawesi Tengah	0	0	0
Sulawesi Selatan	16	1.761	7.683
Sulawesi Tenggara	15	1.233	5.725
Gorontalo	7	225	1.680
Sulawesi Barat	12	223	1.551
Maluku	9	503	2.605
Maluku Utara	1	0	0
Papua Barat	4	68	240
Papua	0	0	0

Sumber : Subdit Pengelolaan Air Limbah, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya. 2015

Untuk mewujudkan akses sanitasi layak bagi masyarakat, prasarana dan sarana lain yang penting keberadaannya adalah prasarana dan sarana pengolahan lumpur tinja. Saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki tangki septik yang memenuhi syarat, salah satunya yaitu kedap air. Tangki septik yang dimiliki sebagian besar masyarakat Indonesia perlu dilakukan penyedotan setiap 2 - 3 tahun sekali agar tidak mencemari air tanah. Oleh karena itu dibutuhkan prasarana dan sarana pengelolaan lumpur tinja di setiap kabupaten dan kota.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lumpur tinja mencakup penyediaan truk tinja dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Namun prasarana dan sarana ini harus didukung dan dilindungi dengan adanya institusi pengelola dan peregulasi sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten dan kota. Saat ini ada sekitar 155 IPLT di Indonesia, namun masih banyak yang belum beroperasi secara optimal. Pada Tabel 5.10. di bawah ini ditampilkan data jumlah dan kapasitas IPLT yang ada di Indonesia menurut provinsi.

Tabel 5.10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terpusat di Indonesia menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah IPLT	Kapasitas IPLT (m ³)
Aceh	12	285,0
Sumatera Utara	6	235,0
Sumatera Barat	5	165,0
Riau	1	40,0
Jambi	3	
Sumatera Selatan	7	236,0
Bengkulu	5	230,0
Lampung	5	232,0
Kepulauan Bangka Belitung	1	30,0
Kepulauan Riau	3	132,0
DKI Jakarta	2	600,0
Jawa Barat	14	477,0
Jawa Tengah	17	778,5
DI Yogyakarta	1	
Jawa Timur	18	2.075,0
Banten	4	240,0
Bali	7	160,2
Nusa Tenggara Barat	4	92,0
Nusa Tenggara Timur	2	34,0
Kalimantan Barat	1	47,0
Kalimantan Tengah	4	158,0
Kalimantan Selatan	2	40,0
Kalimantan Timur	4	422,8

Provinsi	Jumlah IPLT	Kapasitas IPLT (m ³)
Sulawesi Utara	1	25,0
Sulawesi Tengah	3	203,0
Sulawesi Selatan	8	241,5
Sulawesi Tenggara	3	166,0
Gorontalo	1	33,0
Sulawesi Barat	2	
Maluku	1	60,0
Maluku Utara	2	
Papua Barat	2	71,0
Papua	4	46,0

Sumber : Subdit Pengelolaan Air Limbah, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya. 2015

C. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, didefinisikan bahwa sampah adalah barang sisa yang harus dibuang. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sementara sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya. Sampah yang merupakan barang sisa butuh untuk dikelola dengan tepat agar dapat menghasilkan keuntungan secara finansial, kesehatan sekaligus kelestarian lingkungan.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Di tempat tersebut sampah serta residu hasil pengolahannya dikembalikan ke media lingkungan secara aman yang didahului dengan dilakukan pengolahan untuk merubah karakteristik, komposisi dan jumlah/volume sampah.

Operasi TPA di Indonesia pada awalnya, dan sampai saat ini sebagian masih tergolong penimbunan terbuka atau *open dumping* yang berakibat pada tercemarnya lingkungan.

Hal ini menyebabkan turunnya kualitas lingkungan perkotaan termasuk air tanah. Namun sistem tersebut mulai dilarang seiring dengan terbitnya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Oleh karena itu, diperlukan rehabilitasi TPA agar lebih memadai. Keterbatasan lahan TPA di kota-kota besar juga mengakibatkan pengelolaan TPA bersama secara regional menjadi lebih dibutuhkan. Percontohan TPA *sanitary landfill* regional terdapat di beberapa daerah seperti di Yogyakarta (Kartamantul), Denpasar (Sarbagita) Kab. Bangli, dan Gorontalo. Berikut ini adalah jumlah TPA Sampah di Indonesia beserta luas serta daya tampungnya berdasarkan provinsi di Indonesia.

Tabel 5.11. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Indonesia menurut Provinsi

Propinsi	Jumlah TPA Sampah	Luas (ha)	Kapasitas (m ³)
Aceh	5	57,40	262,00
Sumatera Utara	3	20,30	371,00
Sumatera Barat	1	30,03	450,00
Riau	5	33,00	244,00
Jambi	1	10,20	0,00
Sumatera Selatan	3	62,14	245,00
Bengkulu	3	10,80	0,00
Lampung	3	19,00	0,00
Kepulauan Bangka Belitung	6	38,00	95,00
Kepulauan Riau	2	17,00	60,00
Jawa Barat	4	114,90	252,00
Jawa Tengah	3	15,50	175,00
DI Yogyakarta	1	3,25	80,00
Jawa Timur	2	8,90	135,00
Banten	2	14,60	428,32
Bali	8	60,17	6.317.850,00
Nusa Tenggara Barat	9	65,00	6.825.000,00
Nusa Tenggara Timur	16	65,40	6.867.000,00
Kalimantan Barat	6	40,90	4.294.500,00
Kalimantan Tengah	13	102,89	10.803.030,00
Kalimantan Selatan	14	172,50	18.112.500,00

Propinsi	Jumlah TPA Sampah	Luas (ha)	Kapasitas (m ³)
Kalimantan Timur	10	145,50	15.277.500,00
Kalimantan Utara	5	38,75	4.068.750,00
Sulawesi Utara	9	4,93	1.391.355,91
Sulawesi Tengah	3	2,08	653.671,20
Sulawesi Selatan	13	10,86	3.033.181,03
Sulawesi Tenggara	6	3,72	943.423,53
Gorontalo	4	3,83	1.154.190,59
Sulawesi Barat	5	3,80	1.131.563,51
Maluku	8	9,29	946.747,13
Maluku Utara	6	3,64	352.183,65
Papua Barat	6	4,29	367.272,50
Papua	4	3,19	277.879,00

Sumber : Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya. 2015

Dalam pelaksanaannya, hampir semua prasarana dan sarana yang terkait sanitasi (seperti IPAL, IPLT, TPA) sangat ditentukan kebermanfaatannya pada pemerintah daerah dalam hal ini adalah kabupaten dan kota. Di samping peran Pemerintah Pusat dan lembaga terkait dalam memberi dukungan melalui pengawasan dan pengembangan opsi-opsi pengelolaan sanitasi. Selain itu, masyarakat juga harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar prasarana dan sarana yang ada dapat berfungsi dengan optimal.

D. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan permukiman kumuh menjadi permukiman yang layak huni dan berkelanjutan merupakan amanat dari UU tersebut.

Dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dijelaskan yang dimaksud dengan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Penanganan permukiman kumuh terutama di perkotaan dilakukan dengan pola pencegahan dan peningkatan kualitas. Yang dimaksud dengan pencegahan adalah pengawasan, pengendalian atau kesesuaian dengan perizinan maupun standar teknis, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Dan yang dimaksud dengan peningkatan kualitas adalah pemugaran atau perbaikan kembali, peremajaan permukiman lama dengan lebih dulu menyediakan tempat tinggal baru bagi masyarakat, serta pemukiman kembali atau pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin, tidak sesuai untuk dibangun kembali, rawan bencana atau menimbulkan bahaya bagi penghuninya.

Penanganan permukiman kumuh agar dapat mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019 diutamakan pada program peningkatan kualitas di kawasan perkotaan dengan tetap mempertimbangkan adanya upaya pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh. Di tahun 2015, terdapat 56 kabupaten/kota yang menjadi program prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh. Kabupaten/kota mana saja yang menjadi prioritas di tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.12. di bawah ini.

Tabel 5.12. Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2015

Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterangan
Aceh	Kota Banda Aceh	
Aceh	Kota Langsa	
Aceh	Kota Lhokseumawe	
Sumatera Utara	Kota Medan	
Sumatera Barat	Kota Padang	
Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	
Sumatera Barat	Solok	
Riau	Kota Pekanbaru	
Jambi	Kota Sungai Penuh	
Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	
Bengkulu	Kota Bengkulu	
Lampung	Kota Bandar Lampung	
Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	
Kepulauan Riau	Kota Batam	
Jawa Barat	Kota Bandung	
Jawa Barat	Kota Bogor	
Jawa Barat	Kota Sukabumi	
Jawa Tengah	Banyumas	
Jawa Tengah	Kendal	
Jawa Tengah	Kota Pekalongan	
Jawa Tengah	Kota Surakarta	
Jawa Tengah	Semarang	
Jawa Tengah	Sukoharjo	
Jawa Tengah	Grobogan	Permukiman Strategis
DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	
Jawa Timur	Kota Malang	
Jawa Timur	Kota Pasuruan	
Jawa Timur	Kota Probolinggo	
Jawa Timur	Sidoarjo	Permukiman Strategis
Banten	Kota Serang	
Bali	Kota Denpasar	

Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterangan
Bali	Tabanan	
Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	
Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	
Nusa Tenggara Timur	Belu	
Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	
Kalimantan Barat	Kota Pontianak	
Kalimantan Tengah	Sukamara	
Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	
Kalimantan Timur	Kota Bontang	
Sulawesi Utara	Kota Bitung	
Sulawesi Tengah	Kota Palu	
Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	
Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	
Sulawesi Selatan	Takalar	
Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau	
Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	
Sulawesi Tenggara	Wakatobi	
Gorontalo	Kota Gorontalo	
Gorontalo	Pohuwato	
Sulawesi Barat	Mamuju	
Maluku Utara	Kota Ternate	
Papua Barat	Manokwari	
Papua Barat	Sorong	
Papua	Kota Jayapura	

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Desember 2015

E. Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera di berbagai kawasan merupakan salah satu tujuan yang diupayakan oleh Pemerintah. Tidak terkecuali dengan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia baik di daratan maupun di laut. Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang memiliki fungsi amat strategis karena selain sebagai pagar

masuk dan keluar dengan negara lain, kawasan perbatasan juga sebagai identitas kedaulatan negara yang harus dipertahankan dan tidak boleh diganggu oleh negara lain.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan perbatasan bersama dengan pulau kecil terdepan dan kawasan latihan militer menjadi kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu pengembangan kawasan perbatasan berpengaruh sangat penting secara nasional. Tujuan dari pembangunan kawasan perbatasan diantaranya adalah untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang negara yang dihargai negara lain; pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan lingkungan; perlindungan sumber daya alam; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; serta peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan keamanan dengan negara tetangga.

Di tahun 2015, ada tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tiga provinsi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Pembangunan kawasan perbatasan terdiri dari Pengembangan PLBN dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di wilayah perbatasan Negara. Pengembangan PLBN di antaranya meliputi pembangunan gedung PLBN, wisma negara, kantor pemerintahan, monumen Pancasila, area parkir, masjid atau sarana ibadah, peningkatan kapasitas jalan, dan lain-lain. Sementara Pengembangan Infrastruktur Permukiman di wilayah perbatasan negara mulai dari air minum, sanitasi, persampahan, drainase, aksesibilitas kawasan, hingga peningkatan kondisi bangunan.

Ketujuh lokasi PLBN yang dimulai pembangunannya tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.13. di bawah ini. Tiga PLBN dibangun di Kalimantan Barat, yaitu di Aruk, Kabupaten Sambas; Entikong, Kabupaten Sanggau; Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Tiga PLBN lainnya ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Motaain, Kabupaten

Belu; Motamasin, Kabupaten Malaka; dan di Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan satu PLBN dibangun di Papua, yaitu di Skouw, Kota Jayapura.

Tabel 5.13. Lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Tahun 2015

Lokasi	Kabupaten/Kota	Provinsi
Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
Nanga Badau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
Motaaain	Belu	Nusa Tenggara Timur
Motamasin	Malaka	Nusa Tenggara Timur
Wini	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
Skouw	Kota Jayapura	Papua

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Desember 2015

F. Analisis Statistik Infrastruktur Cipta Karya

Air sebagai kebutuhan dasar hidup manusia, menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan permukiman layak huni. Pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, yang salah satunya adalah PDAM berupaya untuk menyediakan air bersih untuk melayani kepentingan masyarakat. Data mengenai penyediaan air minum melalui Kinerja PDAM Tahun 2014 menginformasikan tentang kapasitas terpasang, kapasitas produksi, jumlah penduduk di wilayah pelayanan, dan jumlah penduduk terlayani.

Sebuah analisis dilakukan untuk melihat cakupan pelayanan, rata-rata tingkat kehilangan air dan rasio antara kapasitas produksi dengan jumlah penduduk terlayani menurut provinsi. Cakupan pelayanan merupakan persentase jumlah penduduk terlayani terhadap penduduk di wilayah pelayanan untuk mengetahui sejauh mana PDAM mampu memberikan pelayanan terhadap wilayah pelayanan teknisnya. Rata-rata tingkat kehilangan air untuk melihat efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air. Sementara rasio kapasitas produksi dengan jumlah penduduk terlayani sebagai

informasi untuk mengetahui kemampuan PDAM dalam memproduksi air (l/dt) per 1000 pelanggan. Semakin tinggi nilai rasio kapasitas produksi terhadap jumlah penduduk terlayani, maka kemampuan PDAM dalam memproduksi air untuk melayani pelanggannya semakin baik dari sisi kuantitas.

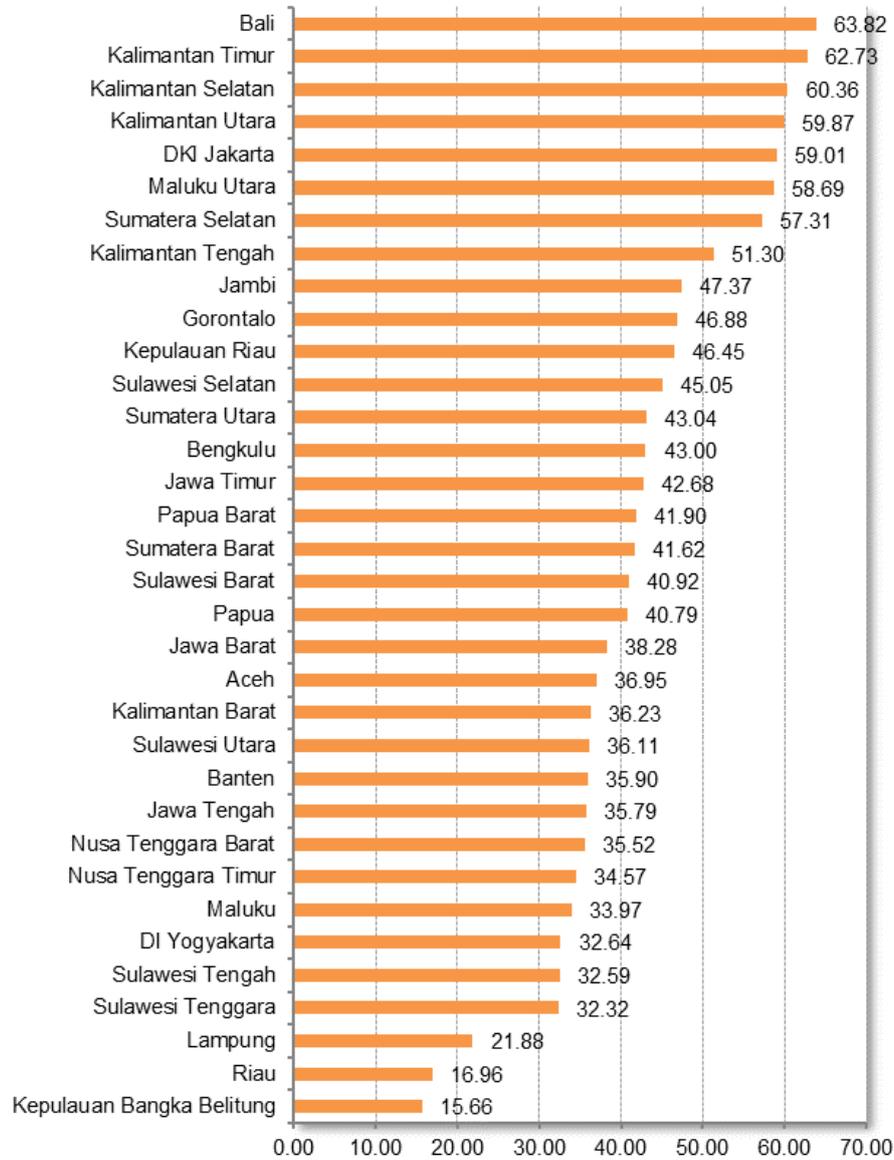
Jika diurutkan menurut provinsi, cakupan pelayanan PDAM di Indonesia paling tinggi adalah Bali yang mencapai 63,82% dari jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Untuk rata-rata tingkat kehilangan air, hanya satu provinsi yang mencatatkan angka di bawah 25%, yaitu Sulawesi Barat dengan nilai 19,73%. Kemudian untuk rasio kapasitas produksi terhadap jumlah penduduk terlayani yang paling tinggi adalah provinsi Papua dengan 4,06 ltr/dtk per 1000 pelanggan.

Tabel 5.14. Layanan PDAM di Indonesia

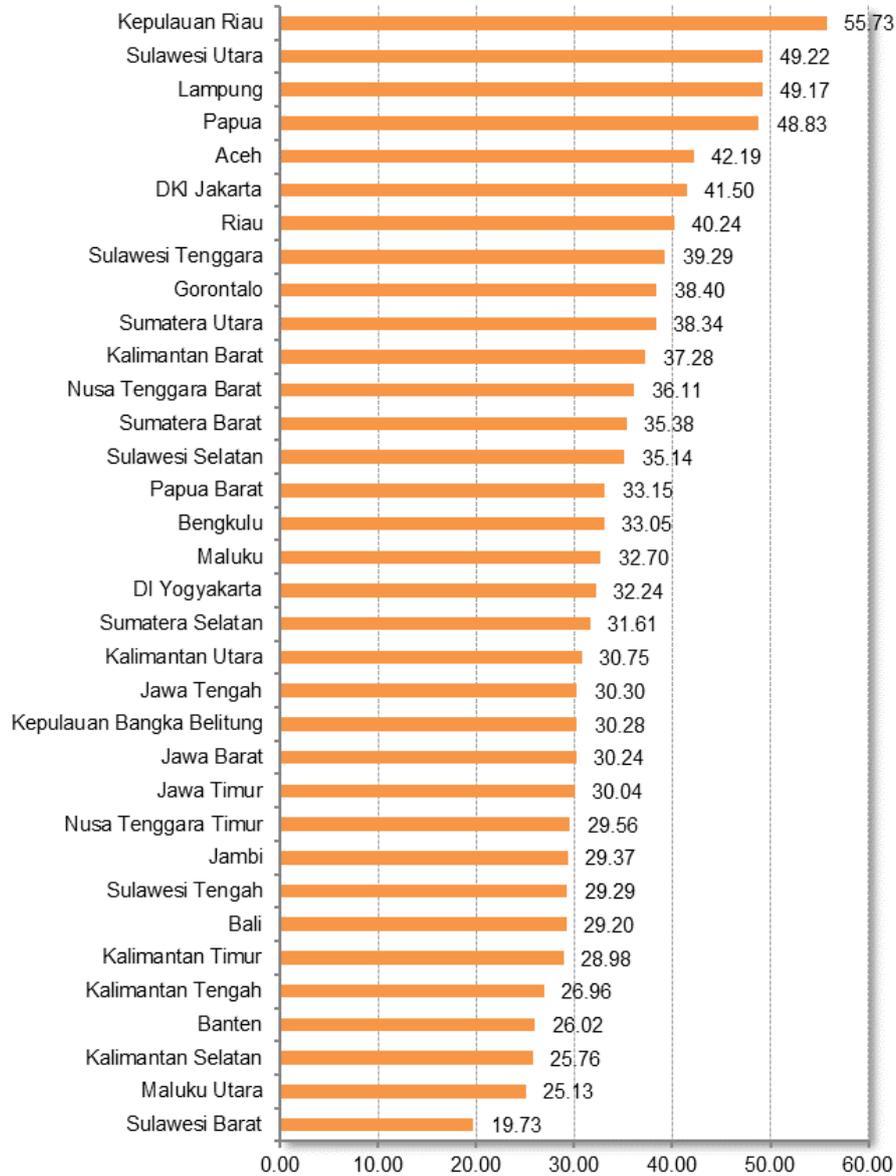
Provinsi	Cakupan Pelayanan (%)	Rata-Rata Tingkat Kehilangan Air (%)	Rasio Volume Produksi Riil terhadap Jumlah Penduduk Terlayani (ltr/dtk per 1000 pelanggan)
Aceh	36,95	42,19	2,28
Sumatera Utara	43,04	38,34	2,41
Sumatera Barat	41,62	35,38	1,90
Riau	16,96	40,24	1,61
Jambi	47,37	29,37	1,60
Sumatera Selatan	57,31	31,61	2,27
Bengkulu	43,00	33,05	3,02
Lampung	21,88	49,17	1,79
Kepulauan Bangka Belitung	15,66	30,28	2,25
Kepulauan Riau	46,45	55,73	2,66
DKI Jakarta	59,01	41,50	3,10
Jawa Barat	38,28	30,24	1,58
Jawa Tengah	35,79	30,30	1,70
DI Yogyakarta	32,64	32,24	1,39
Jawa Timur	42,68	30,04	1,94
Banten	35,90	26,02	2,67

Provinsi	Cakupan Pelayanan (%)	Rata-Rata Tingkat Kehilangan Air (%)	Rasio Volume Produksi Riil terhadap Jumlah Penduduk Terlayani (ltr/dtk per 1000 pelanggan)
Bali	63,82	29,20	2,32
Nusa Tenggara Barat	35,52	36,11	2,15
Nusa Tenggara Timur	34,57	29,56	1,64
Kalimantan Barat	36,23	37,28	2,45
Kalimantan Tengah	51,30	26,96	1,70
Kalimantan Selatan	60,36	25,76	1,72
Kalimantan Timur	62,73	28,98	2,63
Kalimantan Utara	59,87	30,75	2,77
Sulawesi Utara	36,11	49,22	2,22
Sulawesi Tengah	32,59	29,29	1,75
Sulawesi Selatan	45,05	35,14	2,21
Sulawesi Tenggara	32,32	39,29	1,56
Gorontalo	46,88	38,40	1,23
Sulawesi Barat	40,92	19,73	1,13
Maluku	33,97	32,70	1,61
Maluku Utara	58,69	25,13	2,22
Papua Barat	41,90	33,15	2,09
Papua	40,79	48,83	4,06

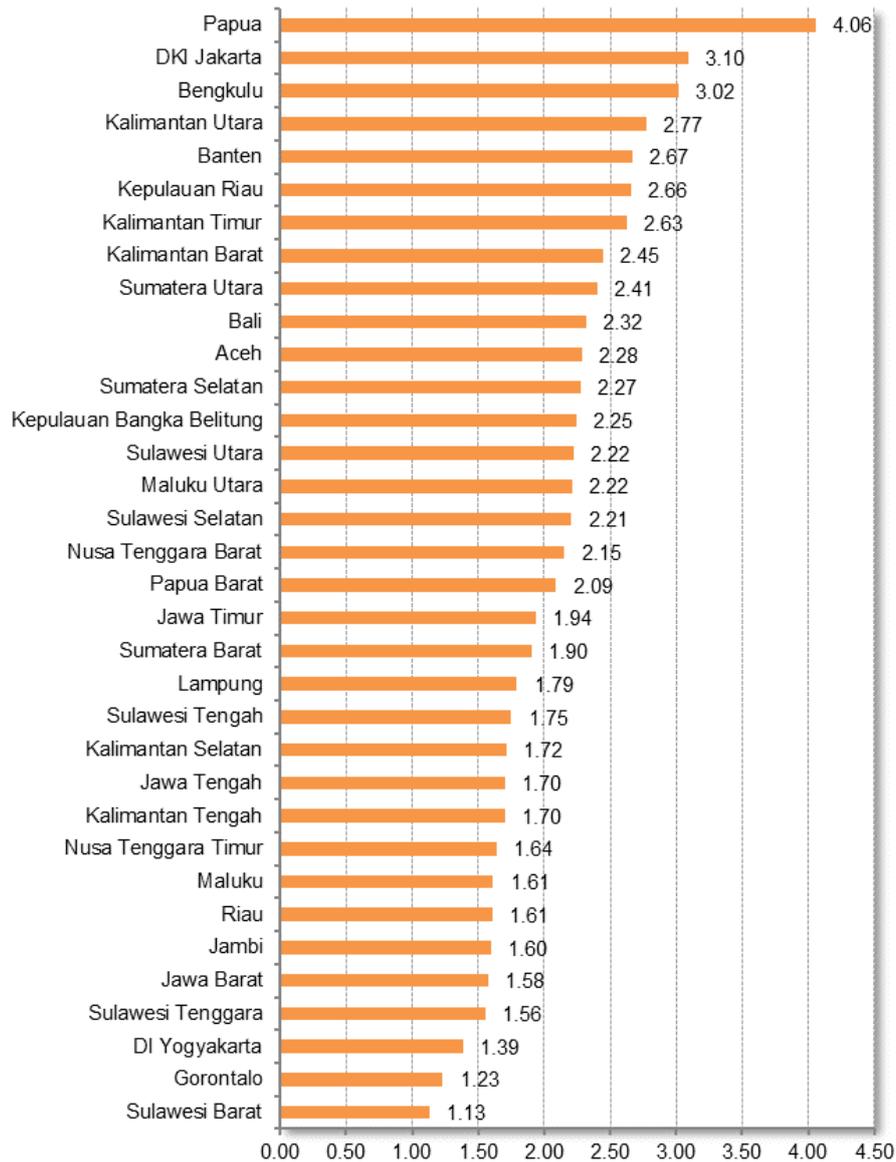
Sumber : Diolah dari : Kinerja PDAM 2014. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



Gambar 5.4. Cakupan Pelayanan PDAM menurut Provinsi di Indonesia (%)



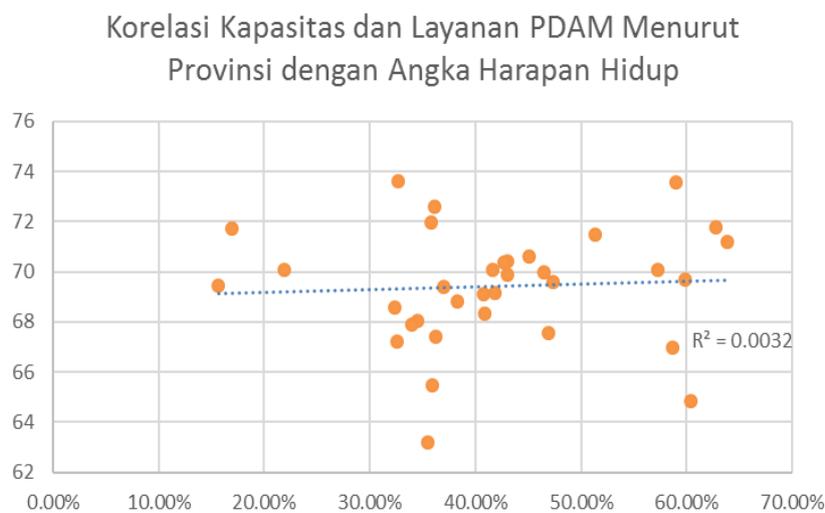
Gambar 5.5. Rata-Rata Tingkat Kehilangan Air PDAM menurut Provinsi di Indonesia (%)



Gambar 5.6. Rasio Kapasitas Produksi terhadap Jumlah Penduduk Terlayani (litr/dtk per 1000 pelanggan)

G. Korelasi dan Indeks

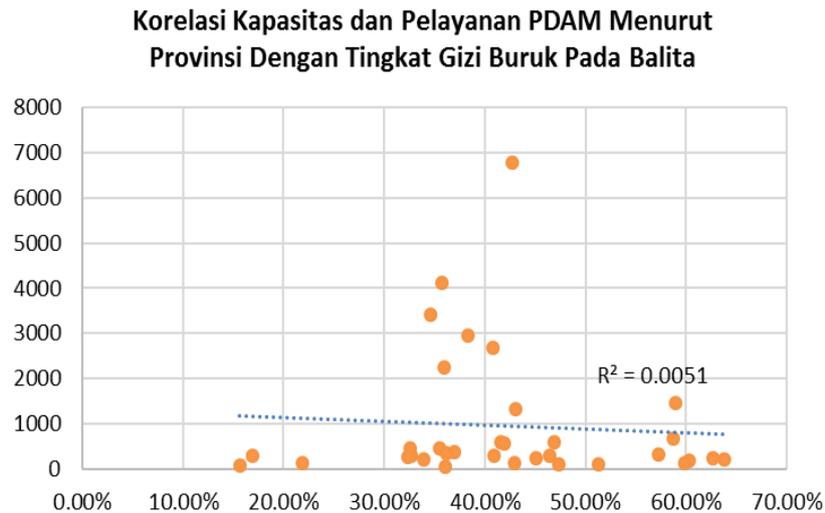
Kapasitas dan Layanan PDAM di Indonesia memiliki peranan dalam menentukan angka harapan hidup dan tingkat gizi buruk pada balita. Oleh karena itu, dapat kita lihat apakah ada indikasi bahwa kapasitas dan layanan PDAM di Indonesia (menurut Provinsi) memiliki hubungan dengan angka harapan hidup dan tingkat gizi buruk balita.



Gambar 5.7. Hubungan antara kapasitas dan layanan PDAM di Indonesia dengan angka harapan hidup.

Dari gambar 5.7. dapat dilihat bahwa hubungan antara kapasitas dan layanan PDAM di Indonesia tahun 2015 dengan angka harapan hidup berhubungan positif, atau semakin besar nilai kapasitas dan layanan PDAM, maka akan semakin meningkat pula angka harapan hidup. Nilai hubungan antara kapasitas dan layanan PDAM dengan angka harapan hidup tahun 2015 senilai 0,0032.

Kapasitas dan layanan PDAM di Indonesia juga memiliki hubungan dengan tingkat gizi buruk balita, atau dengan kata lain mempengaruhi tingkat gizi buruk pada balita, seperti yang terlihat pada gambar 5.8.



Gambar 5.8. Hubungan antara kapasitas dan layanan PDAM di Indonesia dengan Tingkat Gizi Buruk pada Balita

Dari gambar 5.8 dapat dilihat bahwa hubungan antara kapasitas dan layanan PDAM menurut Provinsi dengan tingkat gizi buruk pada balita berhubungan negatif, atau semakin besar kapasitas dan layanan PDAM maka akan semakin menurun tingkat gizi buruk pada balita. Nilai hubungannya adalah sebesar 0,0051.

Nilai Index

Provinsi	Indeks
Aceh	22,96
Sumatera Utara	13,35
Sumatera Barat	20,4
Riau	7,02
Jambi	14,3
Sumatera Selatan	16,13
Bengkulu	18,64
Lampung	3,44

Provinsi	Indeks
Kepulauan Bangka Belitung	8,01
Kepulauan Riau	40,88
DKI Jakarta	29,83
Jawa Barat	13,37
Jawa Tengah	21,02
DI Yogyakarta	14,73
Jawa Timur	23,41
Banten	10,2
Bali	35,47
Nusa Tenggara Barat	17,8
Nusa Tenggara Timur	9,82
Kalimantan Barat	14,89
Kalimantan Tengah	20,11
Kalimantan Selatan	40,26
Kalimantan Timur	49,54
Sulawesi Utara	15,69
Sulawesi Tengah	12,71
Sulawesi Selatan	20,38
Sulawesi Tenggara	16,94
Gorontalo	19,47
Sulawesi Barat	10,82
Maluku	12,75
Maluku Utara	31,88
Papua Barat	18,78
Papua	7,04
Indonesia (Jumlah)	18,31

Tabel diatas merupakan tabel nilai indeks dari cakupan pelayanan air minum jaringan perpipaan perkotaan di Indonesia menurut provinsi. Didapat, bahwa Kalimantan Timur lah yang memiliki nilai indeks paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Tertinggi kedua diperoleh oleh provinsi Kepulauan Riau. Terendah diperoleh oleh Provinsi Lampung.

BAB VI

STATISTIK INFRASTRUKTUR PERUMAHAN

Definisi rumah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebuah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Tempat tinggal (papan) bersama dengan pakaian (sandang) dan makanan (pangan) merupakan kebutuhan primer hidup manusia. Lebih dari itu, perumahan dan permukiman merupakan lingkungan terkecil dari ruang kehidupan manusia yang didalamnya setiap orang dapat membentuk karakter, dan jati diri yang kokoh sehingga peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan optimal. Oleh karena itu pemerintah perlu menaruh perhatian yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi rakyatnya terutama bagi yang belum memiliki kemampuan memiliki rumah yang layak huni.

Seiring dengan terjadinya reorganisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat di tahun 2015, terjadi pula restrukturisasi tugas dan pembagian kewenangan wilayah kerja dalam organisasi yang baru. Tugas yang dahulu terdapat pada Kementerian Perumahan Rakyat, kini menjadi kewenangan dari 2 unit organisasi, yaitu Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai hasil-hasil pekerjaan infrastruktur bidang perumahan pada periode sebelumnya.

Yang menjadi sasaran kinerja dari Kementerian Perumahan Rakyat selama Periode 2010 hingga 2014 dalam mewujudkan visinya, yaitu setiap keluarga Indonesia menempati rumah layak huni, adalah :

1. Meningkatnya pengembangan regulasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Terwujudnya rumah dan lingkungan yang layak huni.

Pada sasaran kinerja yang pertama, hasil yang diperoleh adalah berupa beberapa peraturan yang menjadi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan untuk terus mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sementara sasaran kinerja yang kedua terwujud menjadi beberapa program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni. Yang akan diuraikan lebih lanjut adalah sasaran kinerja yang kedua karena berkaitan dengan perwujudan infrastruktur permukiman.

A. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun didefinisikan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Salah satu upaya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum dapat memenuhi kebutuhan rumahnya adalah dengan menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pembangunan rusunawa yang dekat dengan tempat kerja atau tempat pendidikan selain dapat meningkatkan kualitas hidup diharapkan pula dapat meningkatkan produktivitas penghuninya karena dapat lebih mengefisienkan waktu, mengurangi kemacetan dan konsumsi BBM.

Sejak tahun 2012, Kementerian Perumahan Rakyat mendorong perubahan desain dalam pembangunan rusunawa, terutama dari jumlah lantai yang dibangun dalam satu gedung. Desain sebelumnya, rusunawa dibangun dengan 4 sampai 5 lantai dalam satu gedung dan ekuivalen dengan jumlah unit sekitar 96 unit. Desain ini kemudian berubah menjadi hanya 2 sampai 3 lantai saja dalam satu *tower* dikarenakan evaluasi dari pembangunan sebelumnya di lantai 4 dan 5 tidak semua unit dihuni. Perubahan ini tentu berakibat pada berkurangnya jumlah unit menjadi bervariasi antara 45 hingga 71

unit. Sementara rusunawa bagi pondok pesantren desainnya dimodifikasi dengan ukuran kamarnya $8,4 \times 5,4 \text{ m}^2$ dan dapat dihuni oleh 20 orang santri dalam satu unit.

Pengurangan jumlah lantai pada desain yang baru juga berpengaruh pada biaya yang lebih kecil yang dibutuhkan dalam pembangunan rusunawa. Oleh sebab itu anggaran yang tersedia dapat dioptimalkan untuk pembangunan rusunawa.

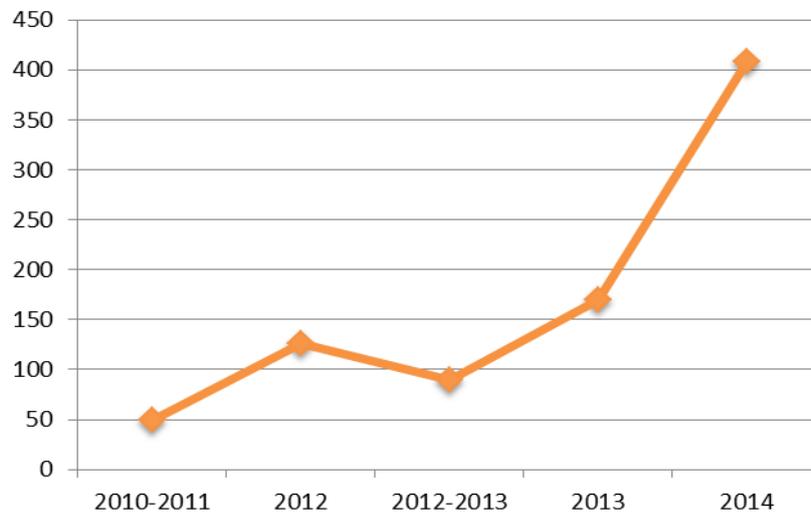
Rusunawa yang telah terbangun akan terasa manfaatnya jika sudah digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, selain membangun, pemerintah juga terus mendorong tingkat penghunian rusunawa yang telah ada, karena hal ini menjadi inti dari capaian manfaat kegiatan pembangunan rusunawa. Namun tingkat penghunian rusunawa berkaitan erat dengan sarana penunjang yang tersedia di rusunawa tersebut seperti air bersih dan listrik.

Di tahun 2014, Kementerian Perumahan Rakyat telah membangun sebanyak 408 *tower block* (TB) rusunawa dengan 3.122 unit. Jumlah tersebut setara dengan daya tampung untuk 45.896 jiwa. Jika dilihat dari tahun 2010 hingga 2014, maka rusunawa yang telah terbangun adalah sebanyak 843 *tower block* dengan 18.216 unit yang setara dengan daya tampung untuk 143.072 jiwa.

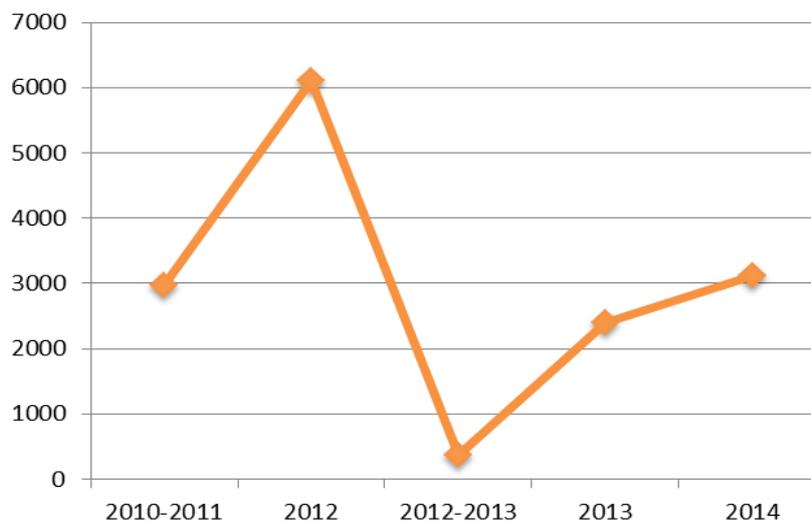
Tabel 6.1. Jumlah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Perumahan Rakyat Terbangun Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Terbangun			Status Huni	
	Tower Block (TB)	Unit	Jiwa	Terhuni (TB)	Belum Terhuni (TB)
2010-2011	49	2.972	13.648	49	0
2012	126	6.105	29.684	53	73
2012-2013	90	3.620	29.056	36	54
2013	170	2.397	24.788	77	93
2014	408	3.122	45.896		408
Jumlah	843	18.216	143.072	215	628

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Diperoleh Juni 2015



Gambar 6.1. Jumlah Tower Block Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun Tahun 2010-2014



Gambar 6.2. Jumlah Unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun Tahun 2010-2014

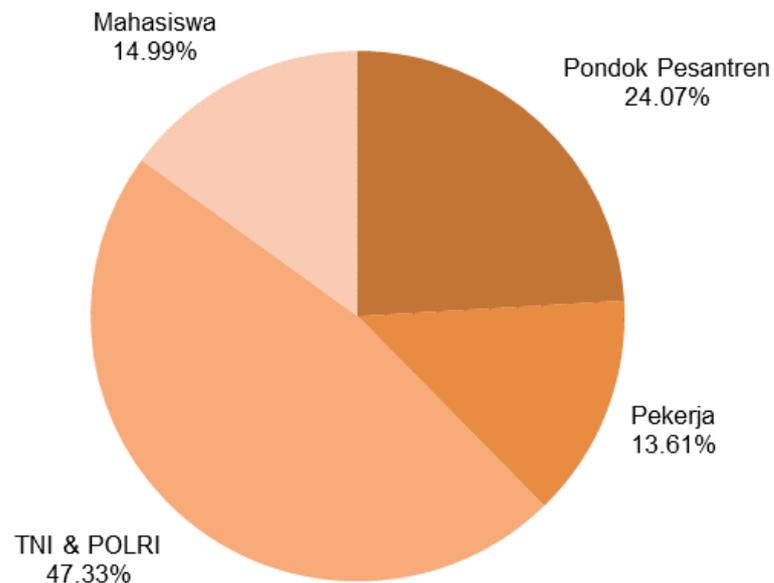
Masyarakat penerima yang menjadi sasaran pembangunan rusunawa dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu pondok pesantren, pekerja (termasuk pekerja industri), TNI dan Polri, serta mahasiswa. Bagi kelompok mahasiswa, terdiri dari

Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Jumlah rusunawa terbangun dari tahun 2010 hingga 2014 menurut kelompok penerima dapat dilihat pada Tabel 6.2. di bawah ini. Dari nilai persentasenya, pembangunan rusunawa dari tahun 2010 hingga 2014 sebanyak 47,33% untuk TNI & Polri, 24,07% adalah untuk pondok pesantren, 14,99% untuk mahasiswa, serta 13,61% untuk pekerja dan pekerja industri. Grafik persentase ini dapat dilihat pada Gambar 6.3.

Tabel 6.2. Jumlah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun menurut Kelompok Penerima Tahun 2010-2014

Kelompok Sasaran	2010-2011		2012		2012-2013		2013		2014		Jumlah	
	Tower Block	Unit										
Pondok Pesantren	5,5	110	24	329	52	911	128	950	322	2.084	532	4.384
Pekerja			10	528	12	1.058	1	24	19	364	42	1.974
Pekerja Industri	9	460	1	45							10	505
POLRI	8	560	25	1.534	3	220	17	943	11	420	64	3.677
PTAIN			1	71	3	186			8	32	12	289
PTAIS									10	40	10	40
PTN			1	45	5	328			6	36	12	409
PTS			9	509	14	858	24	480	32	146	79	1.993
TNI	26,5	1.842	55	3.044	1	59					83	4.945
Jumlah	49	2.972	126	6.105	90	3.620	170	2.397	408	3.122	843	18.216

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Diperoleh Juni 2015



Gambar 6.3. Persentase Unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun Tahun 2010-2014

Sementara pada Tabel 6.3. di bawah ini ditampilkan rincian menurut provinsi jumlah rusunawa yang terbangun dari tahun 2010 hingga 2014. Pembangunan rusunawa paling banyak berada di Jawa Barat, Jawa Timur lalu DKI Jakarta.

Tabel 6.3. Jumlah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Perumahan Rakyat Terbangun menurut Provinsi Tahun 2010-2014

Provinsi	2010-2011		2012-2013		2012		2013		2014		Jumlah	
	TB	Unit	TB	Unit	TB	Unit	TB	Unit	TB	Unit	TB	Unit
Aceh	1	70	1	14	5	241			9	50	16	375
Sumatera Utara	3,5	214	5	229	2	90	4	80	8	50	22,5	663
Sumatera Barat			7	135	3	53	2	12	14	82	26	282
Riau	2	80	1	9	2	90			4	24	9	203
Jambi					3	177	3	75	6	34	12	286
Sumatera Selatan			3	189	3	137	3	75	11	72	20	473
Bengkulu			1	71					2	10	3	81
Lampung	2	140			2	104	1	20	12	70	17	334
Kepulauan Bangka Belitung					1	71	2	118	2	18	5	207
Kepulauan Riau	5	230			4	236					9	466
DKI Jakarta	2	140	11	995	4	126	4	99	19	648	40	2.008
Jawa Barat	14	980	17	669	23	1.271	35	351	89	556	177	3.815
Jawa Tengah	4	163	12	277	14	650	25	263	50	366	105	1.719
DI Yogyakarta	2	152	2	87	1	59	5	62	12	98	22	458
Jawa Timur	5,5	335	12	332	22	1.099	48	356	94	550	181,5	2.672
Banten			3	36	4	196	5	95	19	118	32	457

Provinsi	2010-2011		2012-2013		2012		2013		2014		Jumlah	
	TB	Unit	TB	Unit	TB	Unit	TB	Unit	TB	Unit	TB	Unit
Nusa Tenggara Timur			1	71	2	76	1	6	4	28	8	181
Kalimantan Barat	2	124	1	19	2	118	1	20	4	24	10	305
Kalimantan Tengah					1	19	1	20	1	6	3	45
Kalimantan Selatan	1	10	1	19	1	19			3	16	6	64
Kalimantan Timur					2	64	2	118	1	6	5	188
Kalimantan Utara									1	6	1	6
Sulawesi Utara			2	66	2	104	4	105	1	4	9	279
Sulawesi Tengah			1	47	1	45	3	44	5	48	10	184
Sulawesi Selatan	1	70	2	38	8	404	2	63	15	100	28	675
Sulawesi Tenggara					1	59			2	14	3	73
Gorontalo			1	47			2	118	1	6	4	171
Sulawesi Barat					1	45					1	45
Maluku	2	124	2	90					3	20	7	234
Maluku Utara					7	337	2	78	1	6	10	421
Papua Barat	2	140			1	39	4	70	2	14	9	263
Papua			1	71	4	176	3	79	2	14	10	340
Indonesia	49	2.972	90	3.620	126	6.105	170	2.397	408	3.122	843	18.216

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Diperoleh Juni 2015

B. Rumah Khusus

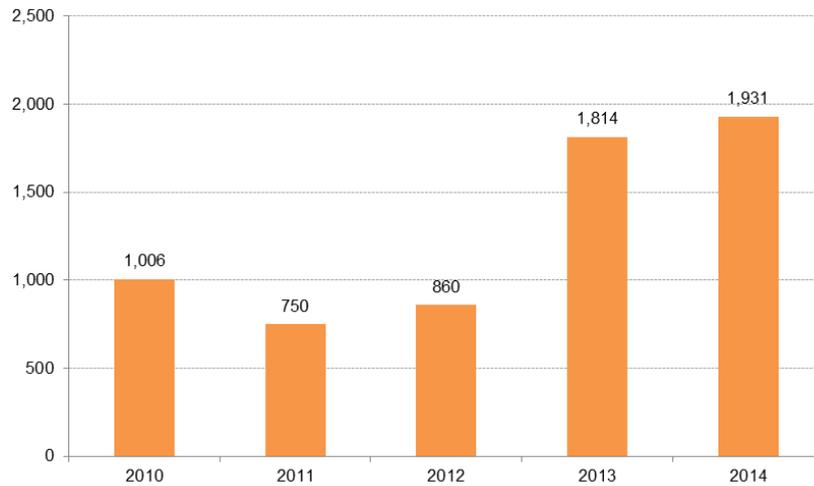
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga disebutkan bahwa rusus atau rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus di antaranya adalah rumah di daerah perbatasan atau pulau terluar bagi penjaga keamanan dan kedaulatan negara, tenaga pendidik serta tenaga medis yang bertugas, rumah di daerah terpencil, rumah bagi nelayan, pejuang kemerdekaan (veteran), cagar budaya, rumah pintar, dan juga rumah yang ditujukan bagi kepentingan sosial.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2010-2014), Kementerian Perumahan Rakyat telah membangun lebih dari 6.000 unit rumah khusus dengan berbagai peruntukan. Jumlah per tahunnya dapat dilihat pada Tabel 6.4. dan Gambar 6.4. di bawah ini.

Tabel 6.4. Jumlah Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah (unit)	Jumlah Terhuni (unit)	Jumlah Belum Terhuni (unit)
2010	1.006	867	139
2011	750	674	76
2012	860		860
2013	1.814		1.814
2014	1.931		1.931
Jumlah	6.361	1.541	4.820

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Diperoleh Juni 2015
Data Tahun 2014 : Laporan Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat 2014



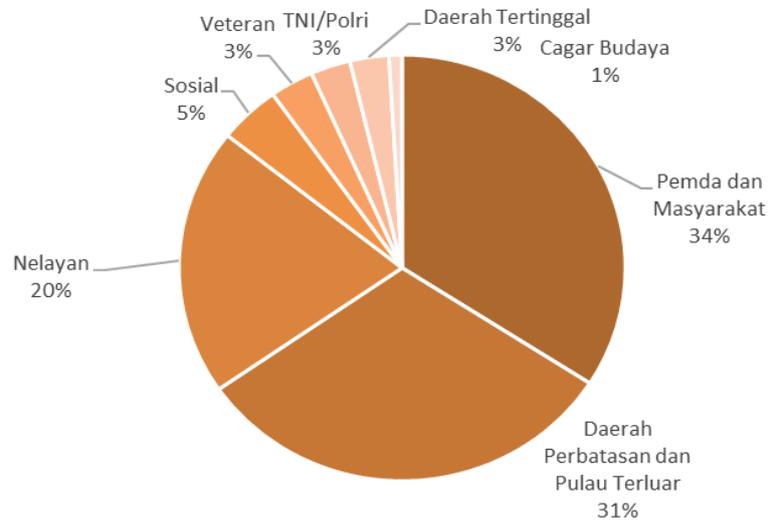
Gambar 6.4. Jumlah Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2010-2014 (unit)

Tabel 6.5. Jumlah Pembangunan Rumah Khusus menurut Peruntukannya Tahun 2010-2013 (unit)

Peruntukan Rumah Khusus	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Pemda dan Masyarakat				1.511	1.511
Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar	40	450	759	135	1.384
TNI/Polri				128	128
Veteran			101	40	141
Nelayan	601	300			901
Sosial	198				198
Cagar Budaya	42				42
Daerah Tertinggal	125				125
Jumlah	1.006	750	860	1.814	6.361

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Diperoleh Juni 2015

Pembangunan rumah khusus selama 2010 hingga 2013 paling banyak ditujukan untuk pemda dan masyarakat sebesar 34% dari total rumah khusus, daerah perbatasan dan pulau terluar sebesar 31%, nelayan sebesar 20%, Sosial sebesar 5%, Veteran, TNI/Polri, dan Daerah tertinggal masing masing 3%, dan cagar budaya 1%. Grafik persentase dapat dilihat di Gambar 6.5.



Gambar 6.5. Persentase Unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perumahan Rakyat Terbangun menurut Peruntukannya Tahun 2010-2014

Sementara di tahun 2014, rumah khusus yang terbangun ada sebanyak 1.931 unit yang terdiri dari rumah khusus reguler sebanyak 972 unit, rumah khusus Papua dan Papua Barat 955 unit dan rumah pintar di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Barat sebanyak 4 unit. menurut sebaran provinsinya, pembangunan rumah khusus di tahun 2014 dilakukan di 13 provinsi seperti dapat dilihat pada Tabel 6.7. yang merangkum jumlah unit rumah khusus yang terbangun dari tahun 2010-2014 berdasarkan provinsi. Rumah Khusus Tahun 2014 ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), anggota TNI, Polri, pengungsi/korban konflik, petani, nelayan, transmigran, dan masyarakat perbatasan.

Tabel 6.6. Jumlah Pembangunan Rumah Khusus menurut Peruntukannya Tahun 2014 (unit)

Jenis Rumah	Jumlah (unit)
Rumah Khusus Reguler	972
Rumah Khusus Papua dan Papua Barat	955
Rumah Pintar	4
Jumlah	1.931

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat 2014

Tabel 6.7. Jumlah Pembangunan Rumah Khusus menurut Provinsi
Tahun 2010-2014 (unit)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Aceh				56	200	256
Sumatera Utara	102	40				142
Sumatera Barat	31				85	116
Riau		100				100
Jambi		30				30
Bengkulu					150	150
Kepulauan Bangka Belitung				1	80	81
Kepulauan Riau	76	50				126
Jawa Barat				698		698
Jawa Tengah	160					160
Banten	80					80
Bali	30					30
Nusa Tenggara Barat	40					40
Nusa Tenggara Timur	30	150		3		183
Kalimantan Barat	25		563	40	80	708
Kalimantan Selatan					1	1
Kalimantan Timur			196			196
Kalimantan Utara				95		95
Sulawesi Utara	70	30			1	101
Sulawesi Tengah	80	30		1	100	211
Sulawesi Selatan	56	30			200	286
Gorontalo	70	70				140
Sulawesi Barat	31					31
Maluku		50		32	27	109
Maluku Utara				50	50	100
Papua Barat	60	70		340	382	852
Papua	65	100	101	498	575	1.339
Indonesia	1.006	750	860	1.814	1.931	6.361

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Juni 2015
Data Tahun 2014 : Laporan

Indeks pembangunan rumah khusus menurut provinsi pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 6.8. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa provinsi Papua memiliki

angka indeks tertinggi dan provinsi Maluku merupakan provinsi dengan angka indeks terendah. Sedangkan 16 provinsi diketahui tidak memiliki angka indeks pembangunan rumah khusus pada tahun 2014.

Tabel 6.8. Indeks Pembangunan Rumah Khusus menurut Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Nilai Indeks
Aceh	34,78
Sumatera Utara	0
Sumatera Barat	14,78
Riau	0
Jambi	0
Bengkulu	26,09
Kepulauan Bangka Belitung	13,91
Kepulauan Riau	0
Jawa Barat	0
Jawa Tengah	0
Banten	0
Bali	0
Nusa Tenggara Barat	0
Nusa Tenggara Timur	0
Kalimantan Barat	13,91
Kalimantan Selatan	0
Kalimantan Timur	0
Kalimantan Utara	0
Sulawesi Utara	0
Sulawesi Tengah	17,39
Sulawesi Selatan	34,78
Gorontalo	0
Sulawesi Barat	0
Maluku	4,70
Maluku Utara	8,70
Papua Barat	66,43
Papua	100

C. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kualitas rumah hingga dapat dikatakan sebagai tempat bermukim yang layak huni selain berkaitan dengan kondisi bangunan rumah juga dipengaruhi oleh aksesibilitas terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) seperti ketersediaan air bersih, listrik, jamban serta jalan lingkungan yang ada pada perumahan atau kawasan permukiman tersebut. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan fasilitas pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang serasi, seimbang dan selaras, khususnya perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

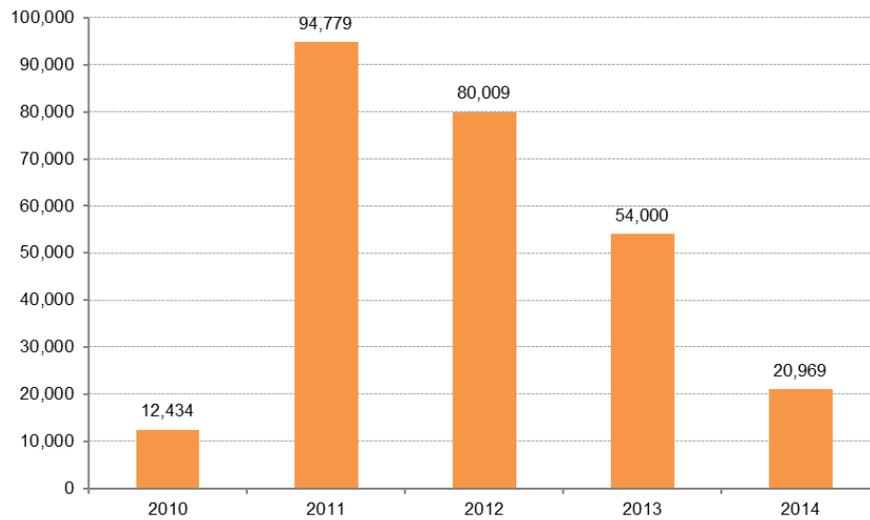
Kegiatan PSU sejak tahun 2010 telah memfasilitasi lebih dari 260 ribu unit rumah dengan berbagai fasilitas. Sementara di tahun 2014 kegiatan ini difokuskan pada pembangunan jalan lingkungan perumahan sesuai dengan kebutuhan pada lingkungan perumahan dan berhasil memfasilitasi sebanyak 20.969 unit rumah. Rincian mengenai jumlah rumah yang mendapatkan fasilitas pembangunan PSU kawasan sejak tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada Tabel 6.9. dan Gambar 6.6. di bawah ini.

Tabel 6.9. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan menurut Provinsi Tahun 2010-2014 (unit)

Provinsi	Tahun					Jumlah
	2010	2011	2012	2013	2014	
Aceh	200	241	560		150	1.151
Sumatera Utara	176	7.916	3.221	484	1.863	13.660
Sumatera Barat	213	895	150	165		1.423
Riau	248	4.171	3.013	2.081	1.003	10.516
Jambi	98	1.428	542	887	437	3.392
Sumatera Selatan	376	8.050	5.017	1.824	598	15.865
Bengkulu	190	1.250	200	173		1.813

Provinsi	Tahun					Jumlah
	2010	2011	2012	2013	2014	
Lampung	98	2.358	2.424	261	600	5.741
Kepulauan Bangka Belitung		300	400			700
Kepulauan Riau	758	5.097	2.509	1.360	1.352	11.076
Jawa Barat	2.309	14.201	16.658	16.443	2.324	51.935
Jawa Tengah	1.875	2.835	3.332	2.280	464	10.786
DI Yogyakarta	265	330		80		675
Jawa Timur	2.863	14.007	8.259	6.679	747	32.555
Banten		6.903	1.383	2.484	2.135	12.905
Bali	98	125	140			363
Nusa Tenggara Barat	198	320			125	643
Nusa Tenggara Timur		3.265	130	262		3.657
Kalimantan Barat	86	2.315	6.518	4.210	2.591	15.720
Kalimantan Tengah	98	926	842	585	600	3.051
Kalimantan Selatan	71	3.443	4.413	5.673	3.779	17.379
Kalimantan Timur	687	4.624	4.166	200	530	10.207
Sulawesi Utara	525	2.602	2.973	1.935	451	8.486
Sulawesi Tengah	184	1.150	100	200	125	1.759
Sulawesi Selatan	190	2.473	2.925	1.802	270	7.660
Sulawesi Tenggara		1.205	1.012	547		2.764
Gorontalo		711	350	2.516	480	4.057
Sulawesi Barat		320	350	710	100	1.480
Maluku			128			128
Maluku Utara		100	835			935
Papua Barat				33	58	91
Papua	628	1.218	1.755	126	187	3.914
Perumnas (29 lokasi seluruh Indonesia)			5.704			5.704
Indonesia	12.434	94.779	80.009	54.000	20.969	262.191

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Juni 2015



Gambar 6.6. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan (unit) Tahun 2010-2014

menurut indeks fasilitas pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kawasan menurut provinsi tahun 2014, provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan angka indeks tertinggi, provinsi Kalimantan Barat dengan angka indeks kedua tertinggi, dan provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka indeks ketiga tertinggi. Sedangkan terdapat 9 provinsi diketahui tidak memiliki angka indeks fasilitas pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kawasan pada tahun 2014. Indeks fasilitas pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kawasan menurut provinsi pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 6.10.

Tabel 6.10. Indeks Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan menurut Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Angka Indeks
Aceh	3,97
Sumatera Utara	49,30
Sumatera Barat	0
Riau	26,54
Jambi	11,56

Provinsi	Angka Indeks
Sumatera Selatan	15,82
Bengkulu	0
Lampung	15,88
Kepulauan Bangka Belitung	0
Kepulauan Riau	35,78
Jawa Barat	61,50
Jawa Tengah	12,28
DI Yogyakarta	0
Jawa Timur	19,77
Banten	56,50
Bali	0
Nusa Tenggara Barat	3,31
Nusa Tenggara Timur	0
Kalimantan Barat	68,56
Kalimantan Tengah	15,88
Kalimantan Selatan	100
Kalimantan Timur	14,02
Sulawesi Utara	11,93
Sulawesi Tengah	3,31
Sulawesi Selatan	7,14
Sulawesi Tenggara	0
Gorontalo	12,70
Sulawesi Barat	2,65
Maluku	0
Maluku Utara	0
Papua Barat	1,53
Papua	4,95

D. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Mewujudkan pembangunan rumah dan permukiman yang layak huni perlu melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah masyarakat dan swasta. Menyoroti pada pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, seringkali belum disertai pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun maupun memperbaiki rumah. Oleh karena itu kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat. Yang menjadi sasarannya adalah rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah milik sendiri, bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat atau terkena konsolidasi tanah, relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta terkena bencana alam, kerusakan sosial dan atau kebakaran.

Berikut ini adalah kategori rumah tidak layak huni yang menjadi target dalam kegiatan ini sehingga bisa memperoleh bantuan :

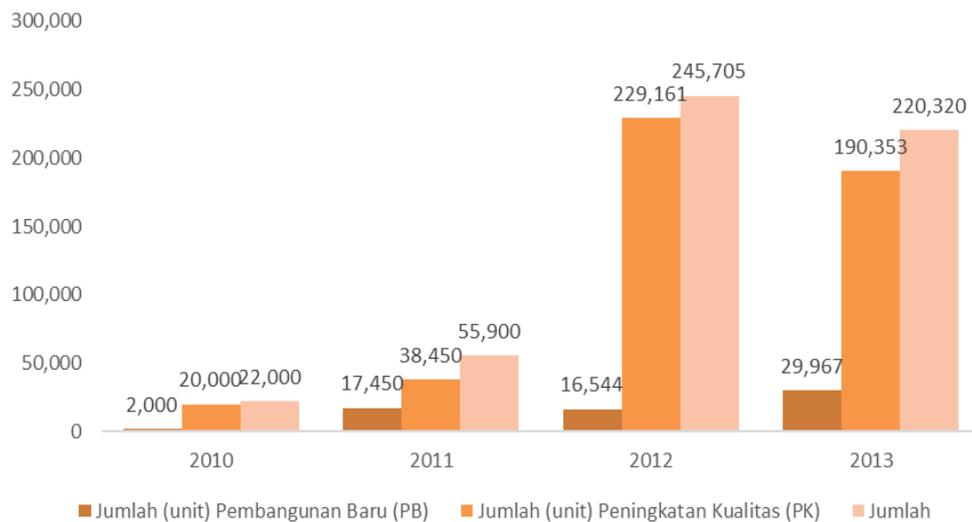
1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
2. Bahan dinding berupa bilik bamboo/kayu/rotan atau kayu kelas IV
3. Tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan,
4. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh,
5. Rusak berat, dan atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas lantai 36 m² (atau per anggota keluarga 9 m²).

Kegiatan dari BSPS terdiri dari Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK). Pelaksanaan BSPS tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah yang meningkat di dua tahun terakhir, yaitu lebih dari 200 ribu unit rumah (245.705 unit di tahun 2012 dan 220.320 unit di tahun 2013). Hal ini juga dikarenakan banyaknya usulan/permohonan bantuan peningkatan kualitas rumah dari masyarakat. Jumlah unit rumah yang mendapatkan fasilitasi BSPS setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 6.11. serta Gambar 6.7. di bawah ini.

Tabel 6.11. Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah (unit)		Jumlah
	Pembangunan Baru (PB)	Peningkatan Kualitas (PK)	
2010	2.000	20.000	22.000
2011	17.450	38.450	55.900
2012	16.544	229.161	245.705
2013	29.967	190.353	220.320

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Juni 2015



Gambar 6.7. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2010-2013 (unit)

Sementara rincian jumlah menurut provinsinya dapat dilihat pada Tabel 6.12. Jumlah unit yang mendapat fasilitasi BSPS paling banyak adalah di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 67.994 unit selama 2010 hingga 2013. Namun selain di wilayah Jawa, provinsi yang juga banyak mendapatkan fasilitasi BSPS adalah Sumatera dengan 19,62% dan Sulawesi dengan 18,21%.

Tabel 6.12. Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Provinsi Tahun 2010-2013 (unit)

Provinsi	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Jumlah		Jumlah
	PB	PK	PB	PK	PB	PK	PB	PK	PB	PK	
Aceh	50	100	250	225	2	3.096	556	4.025	858	7.446	8.304
Sumatera Utara	-	725	300	800	45	10.652	1.724	7.590	2.069	19.767	21.836
Sumatera Barat	150	600	475	1.275	1.574	3.492	2.397	12.230	4.596	17.597	22.193
Riau	-	375	50	350	446	414	343	241	839	1.380	2.219
Jambi	-	150	100	100	-	1.694	19	1.793	119	3.737	3.856
Sumatera Selatan	50	500	150	150	55	14.783	3	5.305	258	20.738	20.996
Bengkulu	-	200	125	125	-	1.372	127	1.145	252	2.842	3.094
Lampung	-	600	575	1.075	864	5.557	146	6.708	1.585	13.940	15.525
Kepulauan Bangka Belitung	-	300	100	400	-	489	-	977	100	2.166	2.266
Kepulauan Riau	-	250	600	800	26	3.134	611	1.017	1.237	5.201	6.438
DKI Jakarta	-	350	-	550	155	225	-	-	155	1.125	1.280
Jawa Barat	150	2.250	1.075	5.400	1.384	30.206	3.178	24.351	5.787	62.207	67.994
Jawa Tengah	125	2.800	1.425	5.100	1.989	32.244	2.897	19.495	6.436	59.639	66.075
DI Yogyakarta	-	475	150	550	133	7.603	100	2.569	383	11.197	11.580
Jawa Timur	50	1.650	1.225	4.375	1.307	28.252	2.241	16.819	4.823	51.096	55.919
Banten	100	750	300	1.500	-	12.595	220	4.764	620	19.609	20.229
Bali	100	500	75	575	104	2.781	1.324	3.963	1.603	7.819	9.422

Provinsi	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Jumlah		
	PB	PK	PB	PK	PB	PK	PB	PK	PB	PK	Jumlah
Nusa Tenggara Barat	100	200	400	2.150	44	9.426	679	10.472	1.223	22.248	23.471
Nusa Tenggara Timur	-	1.100	6.475	2.875	149	1.680	1.406	11.333	8.030	16.988	25.018
Kalimantan Barat	150	350	300	1.400	11	3.141	623	5.317	1.084	10.208	11.292
Kalimantan Tengah	-	300	25	75	-	2.080	112	2.237	137	4.692	4.829
Kalimantan Selatan	50	300	75	-	65	4.638	211	2.571	401	7.509	7.910
Kalimantan Timur	-	300	-	-	82	-	257	939	339	1.239	1.578
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	101	20	176	20	277	297
Sulawesi Utara	150	550	375	1.675	1.664	2.134	1.409	3.908	3.598	8.267	11.865
Sulawesi Tengah	-	500	525	975	1.531	6.032	1.151	6.330	3.207	13.837	17.044
Sulawesi Selatan	50	900	650	2.000	200	6.645	1.269	8.847	2.169	18.392	20.561
Sulawesi Tenggara	325	500	500	1.200	45	9.308	1.771	3.823	2.641	14.831	17.472
Gorontalo	100	550	325	825	20	8.673	1.631	2.709	2.076	12.757	14.833
Sulawesi Barat	100	275	100	300	456	12.034	1.214	2.807	1.870	15.416	17.286
Maluku	100	500	225	925	209	1.250	48	3.598	582	6.273	6.855
Maluku Utara	-	450	75	275	-	3.430	701	3.386	776	7.541	8.317
Papua Barat	100	300	200	200	1.283	-	-	4.915	1.583	5.415	6.998
Papua	-	350	225	225	2.701	-	1.579	3.993	4.505	4.568	9.073
Indonesia	2.000	20.000	17.450	38.450	16.544	229.161	29.967	190.353	65.961	477.964	543.925

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Juni 2015

Indeks Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut provinsi tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 6.13. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa provinsi Jawa Barat memiliki angka indeks tertinggi pada pembangunan baru (PB) maupun peningkatan kualitas (PK), sedangkan provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan angka indeks terendah pada kategori pembangunan baru dan provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan angka indeks terendah pada kategori peningkatan kualitas (PK). Sedangkan 3 provinsi diketahui tidak memiliki angka indeks kategori pembangunan baru dan 1 provinsi tidak memiliki angka indeks kategori peningkatan kualitas.

Tabel 6.13. Indeks Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Provinsi Tahun 2013

Provinsi	Angka Indeks	
	PB	PK
Aceh	17,50	16,53
Sumatera Utara	54,25	31,17
Sumatera Barat	75,42	50,22
Riau	10,79	0,99
Jambi	0,60	7,36
Sumatera Selatan	0,09	21,79
Bengkulu	4,00	4,70
Lampung	4,59	27,55
Kepulauan Bangka Belitung	0	4,01
Kepulauan Riau	19,23	4,18
DKI Jakarta	0	0
Jawa Barat	100	100
Jawa Tengah	91,16	80,06
DI Yogyakarta	3,15	10,55
Jawa Timur	70,52	69,07
Banten	6,92	19,56
Bali	41,66	16,27
Nusa Tenggara Barat	21,37	43,00
Nusa Tenggara Timur	44,24	46,54

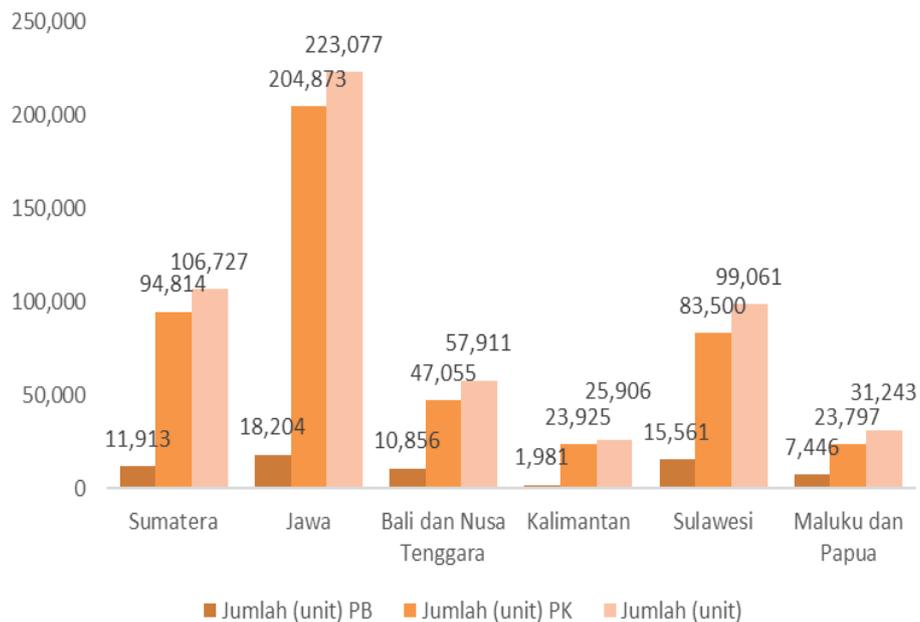
Provinsi	Angka Indeks	
	PB	PK
Kalimantan Barat	19,60	21,83
Kalimantan Tengah	3,52	9,19
Kalimantan Selatan	6,64	10,56
Kalimantan Timur	8,09	3,86
Kalimantan Utara	0,63	0,72
Sulawesi Utara	44,34	16,05
Sulawesi Tengah	36,22	25,99
Sulawesi Selatan	39,93	36,33
Sulawesi Tenggara	55,73	15,70
Gorontalo	51,32	11,12
Sulawesi Barat	38,20	11,53
Maluku	1,51	14,78
Maluku Utara	22,06	13,90
Papua Barat	0	20,18
Papua	49,69	16,40

Rincian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya jumlah menurut pulau besar dapat dilihat pada Tabel 6.14. Jumlah unit yang mendapat fasilitas BSPS paling banyak adalah di Pulau Jawa dengan jumlah 23.077 unit (41,01%), 204.873 unit merupakan peningkatan kualitas dan 18.204 unit merupakan pembangunan baru selama 2010 hingga 2013. Sedangkan pulau besar yang mendapat fasilitas BSPS paling sedikit adalah di Pulau Kalimantan dengan jumlah 25.906 unit (47,6%), 23.925 unit merupakan peningkatan kualitas dan 1.981 unit merupakan pembangunan baru, seperti terlihat pada Gambar 6.8. dan Gambar 6.9 di bawah ini.

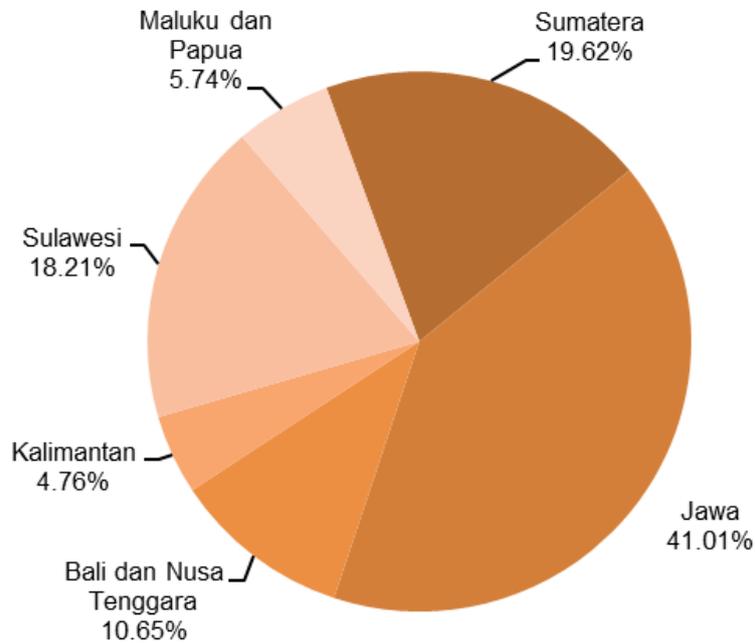
Tabel 6.14. Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
menurut Pulau Besar Tahun 2010-2013

Provinsi	Jumlah (unit)		Jumlah (unit)	Persentase
	PB	PK		
Sumatera	11.913	94.814	106.727	19,62
Jawa	18.204	204.873	223.077	41,01
Bali dan Nusa Tenggara	10.856	47.055	57.911	10,65
Kalimantan	1.981	23.925	25.906	4,76
Sulawesi	15.561	83.500	99.061	18,21
Maluku dan Papua	7.446	23.797	31.243	5,74
Indonesia	65.961	477.964	543.925	100

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Juni 2015



Gambar 6.8. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Pulau Besar
Tahun 2010-2013



Gambar 6.9. Persentase Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Pulau Besar Tahun 2010-2013

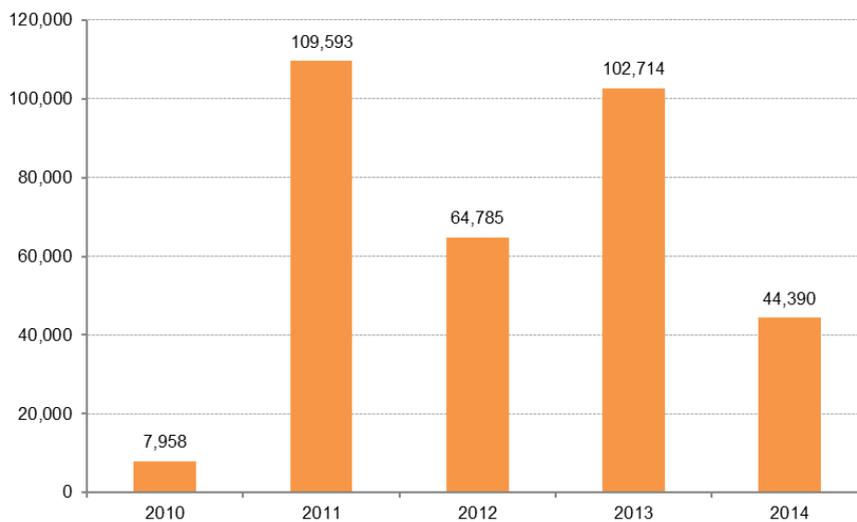
E. Fasilitasi Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP)

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu masyarakat agar dapat memperoleh/menjangkau rumah layak huni, selain melalui pembangunan fisik dilakukan pula melalui bantuan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kegiatan yang disebut sebagai Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini berusaha untuk memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam hal pembiayaan pemilikan rumah. FLPP dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga perbankan, yang disebut sebagai Bank Pelaksana.

Sejak tahun 2010 FLPP dilakukan dengan menyalurkan KPR dengan suku bunga yang relatif rendah dan besarnya tetap selama masa angsuran KPR. Agar dapat terjangkau

oleh MBM dan MBR, FLPP mempertahankan tingkat bunga pembiayaan pemilikan rumah sejahtera pada 7,25%. Nilai tersebut diperoleh dengan rumusan proporsi dana FLPP terhadap pokok kredit/pembiayaan kredit pemilikan rumah sejahtera yang mengacu pada Peraturan Pemimpin Satuan Kerja Badan Layanan Umum Kementerian Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2012 tentang Proporsi Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Terhadap Pokok Kredit/Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera.

Penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2014 sudah mencapai 329.440 unit rumah. Yang paling tinggi adalah di tahun 2011 dengan 109.593 unit, lalu kemudian di tahun 2013 dengan 102.714 unit rumah. Penyaluran FLPP paling banyak berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, lalu kemudian Provinsi Banten. Jumlah penyaluran FLPP berdasarkan tahun dapat dilihat pada Gambar 6.8. dan jumlahnya berdasarkan provinsi seperti dalam Tabel 6.15.



Gambar 6.10. Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) (unit) Tahun 2010-2014

Tabel 6.15. Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) menurut Provinsi (unit) Tahun 2010-2014

Provinsi	Tahun					Jumlah
	2010	2011	2012	2013	2014	
Aceh	2	25	69	107	80	283
Sumatera Utara	411	3.650	3.739	3.903	1.838	13.541
Sumatera Barat	62	1.194	586	680	315	2.837
Riau	208	4.226	2.589	4.075	2.245	13.343
Jambi	122	2.256	1.316	1.523	707	5.924
Sumatera Selatan	457	3.048	2.421	4.432	2.823	13.181
Bengkulu	39	846	428	670	337	2.320
Lampung	65	969	707	771	295	2.807
Kepulauan Bangka Belitung		137	157	249	117	660
Kepulauan Riau	121	2.976	1.678	2.730	936	8.441
DKI Jakarta		112	4	54	9	179
Jawa Barat	2.526	43.823	24.741	41.979	15.578	128.647
Jawa Tengah	508	7.324	3.268	5.639	2.333	19.072
DI Yogyakarta	25	365	192	347	144	1.073
Jawa Timur	1.039	9.694	4.615	6.988	2.697	25.033
Banten	673	12.072	6.752	11.034	5.391	35.922
Bali	54	424	187	144	67	876
Nusa Tenggara Barat	44	737	16	24	26	847
Nusa Tenggara Timur		497	196	270	69	1.032
Kalimantan Barat	198	2.136	1.685	3.365	2.087	9.471
Kalimantan Tengah	122	924	851	1.187	662	3.746
Kalimantan Selatan	605	5.018	4.701	6.755	2.973	20.052
Kalimantan Timur	47	321	128	341	176	1.013
Kalimantan Utara		6		154	37	197
Sulawesi Utara	126	1.355	1.018	1.282	513	4.294
Sulawesi Tengah	69	648	423	692	277	2.109
Sulawesi Selatan	231	2.502	1.372	1.736	749	6.590
Sulawesi Tenggara	139	1.023	140	306	213	1.821
Gorontalo	39	494	335	459	138	1.465
Sulawesi Barat	9	335	242	253	175	1.014

Provinsi	Tahun					Jumlah
	2010	2011	2012	2013	2014	
Maluku	2	11	31	11		55
Maluku Utara	3	32	43	52	43	173
Papua Barat				42	81	123
Papua	12	413	155	460	259	1.299
Indonesia	7.958	109.593	64.785	102.714	44.390	329.440

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Juni 2015

Catatan : Data Tahun 2014 status 30 November 2014

Indeks Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) menurut Provinsi Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 6.16. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka indeks tertinggi sedangkan provinsi Papua Barat memiliki angka indeks terendah. Diketahui bahwa 1 provinsi tidak memiliki angka indeks.

Tabel 6.16. Indeks Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) menurut Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Angka Indeks
Aceh	0,51
Sumatera Utara	11,80
Sumatera Barat	2,02
Riau	14,41
Jambi	4,54
Sumatera Selatan	18,12
Bengkulu	2,16
Lampung	1,89
Kepulauan Bangka Belitung	0,75
Kepulauan Riau	6,01
DKI Jakarta	0,06
Jawa Barat	100
Jawa Tengah	14,98
DI Yogyakarta	0,92
Jawa Timur	17,31

Provinsi	Angka Indeks
Banten	34,61
Bali	0,43
Nusa Tenggara Barat	0,17
Nusa Tenggara Timur	0,44
Kalimantan Barat	13,40
Kalimantan Tengah	4,25
Kalimantan Selatan	19,08
Kalimantan Timur	1,13
Kalimantan Utara	0,24
Sulawesi Utara	3,29
Sulawesi Tengah	1,78
Sulawesi Selatan	4,81
Sulawesi Tenggara	1,37
Gorontalo	0,89
Sulawesi Barat	1,12
Maluku	0,00
Maluku Utara	0,28
Papua Barat	0,52
Papua	1,66

Pada Tabel 6.17. di bawah ini ditampilkan jumlah Rumah Tangga (RT) dan persentase rumah tangga menurut status kepemilikan rumah yang diperoleh dari BPS RI. Diketahui bahwa 82% rumah tangga memiliki rumah sendiri, 8% rumah tangga kontrak/sewa rumah, dan 10% kepemilikan rumah lainnya, dapat dilihat pada Gambar 6.11. Jika persentase RT menurut status kepemilikan rumah dikalikan dengan jumlah RT, maka diperoleh jumlah RT menurut status kepemilikan rumah dan menurut provinsi seperti terdapat pada Tabel 6.18. Dari data jumlah RT menurut status kepemilikan rumah dan menurut provinsi tersebut kemudian dibuat dalam satuan pulau besar sehingga diperoleh dapat dilihat persentase RT menurut kepemilikan rumah berdasarkan pulau besar seperti dapat dilihat pada Tabel 6.20.

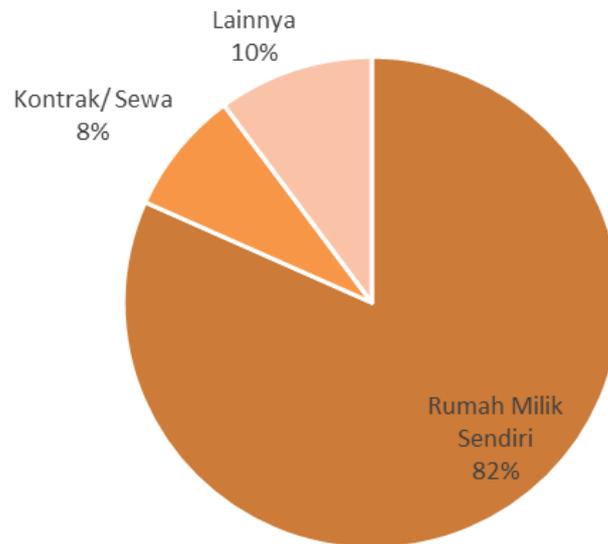
menurut indeks rumah tangga menurut status kepemilikan rumah dan menurut provinsi tahun 2014, pada kategori kepemilikan milik sendiri, provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka indeks tertinggi sedangkan Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan angka indeks terendah. Pada kategori kepemilikan kontrak, angka indeks tertinggi dimiliki oleh provinsi Jawa Barat dan provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang memiliki angka indeks terendah. Sedangkan pada kategori kepemilikan lainnya, provinsi Jawa Barat mempunyai angka indeks tertinggi dan provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan angka indeks terendah. Indeks rumah tangga menurut status kepemilikan rumah dan menurut provinsi tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 6.19.

Tabel 6.17. Jumlah Rumah Tangga dan Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan menurut Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga (ribu RT)	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah (%)			
		Rumah Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Lainnya	Jumlah
Aceh	1.164,20	80,33	5,78	13,89	100
Sumatera Utara	3.218,10	68,50	11,48	20,02	100
Sumatera Barat	1.219,30	69,27	9,64	21,09	100
Riau	1.485,10	68,09	14,72	17,19	100
Jambi	832,90	80,38	5,96	13,66	100
Sumatera Selatan	1.932,30	80,43	6,31	13,26	100
Bengkulu	465,30	80,64	7,86	11,50	100
Lampung	2.038,10	88,30	3,06	8,64	100
Kepulauan Bangka Belitung	342,10	84,31	6,52	9,17	100
Kepulauan Riau	506,00	67,91	24,18	7,91	100
DKI Jakarta	2.632,30	47,76	33,71	18,53	100
Jawa Barat	12.244,20	78,54	8,44	13,02	100
Jawa Tengah	9.001,20	88,06	2,96	8,98	100
DI Yogyakarta	1.092,80	74,97	15,48	9,55	100

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga (ribu RT)	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah (%)			
		Rumah Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Lainnya	Jumlah
Jawa Timur	10.677,60	87,14	4,91	7,95	100
Banten	2.866,80	77,96	13,52	8,52	100
Bali	1.086,60	69,80	19,66	10,54	100
Nusa Tenggara Barat	1.327,20	85,29	2,76	11,95	100
Nusa Tenggara Timur	1.090,40	86,33	4,29	9,38	100
Kalimantan Barat	1.097,20	87,53	2,93	9,54	100
Kalimantan Tengah	632,40	73,51	8,17	18,32	100
Kalimantan Selatan	1.054,50	74,39	10,95	14,66	100
Kalimantan Timur	833,40	68,91	16,32	14,77	100
Sulawesi Utara	139,10	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	611,00	74,60	5,47	19,93	100
Sulawesi Selatan	666,70	84,66	4,73	10,61	100
Sulawesi Tenggara	1.937,00	83,82	5,24	10,94	100
Gorontalo	550,90	86,32	4,87	8,81	100
Sulawesi Barat	261,80	79,24	2,29	18,47	100
Maluku	280,90	89,00	2,49	8,51	100
Maluku Utara	343,10	79,84	5,76	14,40	100
Papua Barat	235,20	86,13	4,25	9,62	100
Papua	187,70	70,88	12,38	16,74	100
Indonesia	718,50	81,70	8,15	10,15	100

Sumber : BPS RI



Gambar 6.11. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Tahun 2014

Tabel 6.18. Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan menurut Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah		
	Rumah Milik Sendiri (ribu RT)	Kontrak/Sewa (ribu RT)	Lainnya (ribu RT)
Aceh	935,20	67,29	161,71
Sumatera Utara	2.204,40	369,44	644,26
Sumatera Barat	844,61	117,54	257,15
Riau	1.011,20	218,61	255,29
Jambi	669,49	49,64	113,77
Sumatera Selatan	1.554,15	121,93	256,22
Bengkulu	375,22	36,57	53,51
Lampung	1.799,64	62,37	176,09
Kepulauan Bangka Belitung	288,42	22,30	31,37
Kepulauan Riau	343,62	122,35	40,02
DKI Jakarta	1.257,19	887,35	487,77

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah		
	Rumah Milik Sendiri (ribu RT)	Kontrak/Sewa (ribu RT)	Lainnya (ribu RT)
Jawa Barat	9.616,59	1.033,41	1.594,19
Jawa Tengah	7.926,46	266,44	808,31
DI Yogyakarta	819,27	169,17	104,36
Jawa Timur	9.304,46	524,27	848,87
Banten	2.234,96	387,59	244,25
Bali	758,45	213,63	114,53
Nusa Tenggara Barat	1.131,97	36,63	158,60
Nusa Tenggara Timur	941,34	46,78	102,28
Kalimantan Barat	960,38	32,15	104,67
Kalimantan Tengah	464,88	51,67	115,86
Kalimantan Selatan	784,44	115,47	154,59
Kalimantan Timur	574,30	136,01	123,09
Sulawesi Utara	-	-	-
Sulawesi Tengah	497,36	36,47	132,87
Sulawesi Selatan	1.639,86	91,62	205,52
Sulawesi Tenggara	461,76	28,87	60,27
Gorontalo	225,99	12,75	23,06
Sulawesi Barat	222,59	6,43	51,88
Maluku	305,36	8,54	29,20
Maluku Utara	187,78	13,55	33,87
Papua Barat	161,67	7,98	18,06
Papua	509,27	88,95	120,28
Indonesia	52.918,40	5.278,89	6.574,32

Sumber : Diolah Oleh Pusdatin

Tabel 6.19. Indeks Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan menurut Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah		
	Rumah Milik Sendiri (ribu RT)	Kontrak/Sewa (ribu RT)	Lainnya (ribu RT)
Aceh	9,72	6,51	10,14
Sumatera Utara	22,92	35,75	40,41
Sumatera Barat	8,78	11,37	16,13
Riau	10,52	21,15	16,01
Jambi	6,96	4,80	7,14
Sumatera Selatan	16,16	11,80	16,07
Bengkulu	3,90	3,54	3,36
Lampung	18,71	6,04	11,05
Kepulauan Bangka Belitung	3,00	2,16	1,97
Kepulauan Riau	3,57	11,84	2,51
DKI Jakarta	13,07	85,87	30,60
Jawa Barat	100,00	100,00	100,00
Jawa Tengah	82,42	25,78	50,70
DI Yogyakarta	8,52	16,37	6,55
Jawa Timur	96,75	50,73	53,25
Banten	23,24	37,51	15,32
Bali	7,89	20,67	7,18
Nusa Tenggara Barat	11,77	3,54	9,95
Nusa Tenggara Timur	9,79	4,53	6,42
Kalimantan Barat	9,99	3,11	6,57
Kalimantan Tengah	4,83	5,00	7,27
Kalimantan Selatan	8,16	11,17	9,70
Kalimantan Timur	5,97	13,16	7,72
Sulawesi Utara	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	5,17	3,53	8,33
Sulawesi Selatan	17,05	8,87	12,89
Sulawesi Tenggara	4,80	2,79	3,78
Gorontalo	2,35	1,23	1,45

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah		
	Rumah Milik Sendiri (ribu RT)	Kontrak/Sewa (ribu RT)	Lainnya (ribu RT)
Sulawesi Barat	2,31	0,62	3,25
Maluku	3,18	0,83	1,83
Maluku Utara	1,95	1,31	2,12
Papua Barat	1,68	0,77	1,13
Papua	5,30	8,61	7,54

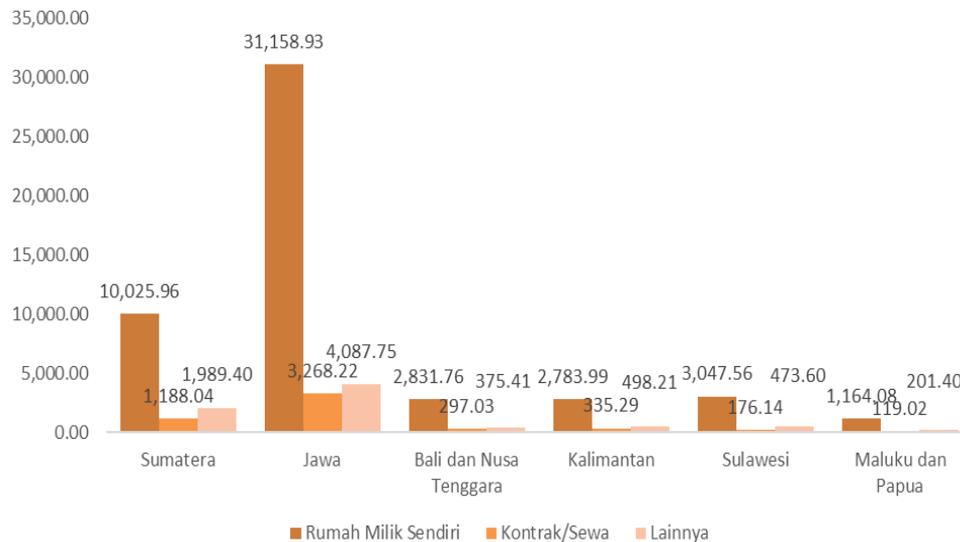
Sumber : Diolah Oleh Pusdatin

Tabel 6.19 ditampilkan jumlah rumah tangga menurut status kepemilikan rumah menurut pulau besar tahun 2014. Terlihat pulau Jawa merupakan pulau besar yang mempunyai jumlah rumah tangga paling banyak, yaitu 38.514,90 ribu rumah tangga dengan 31.158,93 rumah tangga memiliki rumah milik sendiri, 3.268,22 ribu rumah tangga menyewa rumah, dan 4.087,75 dengan kepemilikan lainnya. Sedangkan kepulauan Maluku dan pulau Papua merupakan pulau besar yang mempunyai jumlah rumah tangga paling sedikit, yaitu 1.484,50 ribu rumah tangga dengan 1.164,08 rumah tangga memiliki rumah milik sendiri, 119,02 ribu rumah tangga menyewa rumah, dan 201,40 dengan kepemilikan lainnya. Dapat dilihat pada Gambar 6.12.

Tabel 6.20. Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah menurut Pulau Besar Tahun 2014

Pulau Besar	Jumlah Rumah Tangga (ribu RT)	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah (ribu RT)		
		Rumah Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Lainnya
Sumatera	13.203,40	10.025,96	1.188,04	1.989,40
Jawa	38.514,90	31.158,93	3.268,22	4.087,75
Bali dan Nusa Tenggara	3.504,20	2.831,76	297,03	375,41
Kalimantan	3.617,50	2.783,99	335,29	498,21
Sulawesi	3.697,30	3.047,56	176,14	473,60
Maluku dan Papua	1.484,50	1.164,08	119,02	201,40
Indonesia	64.771,60	36.678,51	1.271,08	3.588,93

Sumber : Diolah Oleh Pusdatin



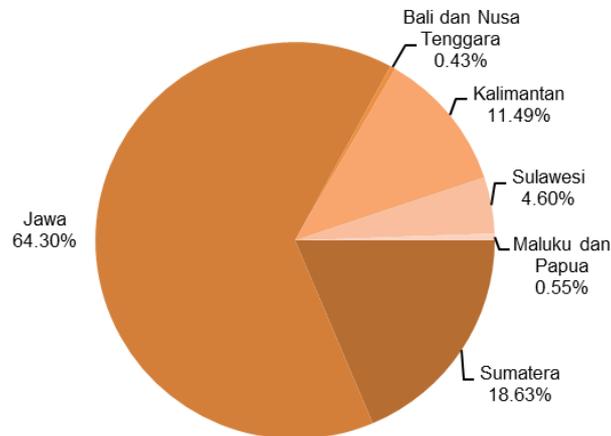
Gambar 6.12. Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah menurut Pulau Besar Tahun 2014

Jika dilihat berdasarkan pulau besar, penyaluran FLPP di tahun 2013 sebesar 64,30% berada di Pulau Jawa, lalu kemudian Pulau Sumatera dengan 18,63% hal ini sejalan dengan persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah kontrak/sewa yang sebagian besar terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera seperti dalam Gambar 6.13.

Tabel 6.21. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan Penyaluran FLPP menurut Pulau Besar Tahun 2013

Pulau Besar	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah (%)			FLPP 2013	
	Rumah Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Lainnya	Jumlah	Persentase
Sumatera	19,22	22,21	26,01	19.140	18,63
Jawa	60,44	59,88	53,76	66.041	64,30
Bali dan Nusa Tenggara	5,58	4,89	4,53	438	0,43
Kalimantan	5,56	6,64	6,40	11.802	11,49
Sulawesi	6,90	3,81	6,84	4.728	4,60
Maluku dan Papua	2,30	2,00	2,28	565	0,55
Indonesia	100	100	100	102.714	100

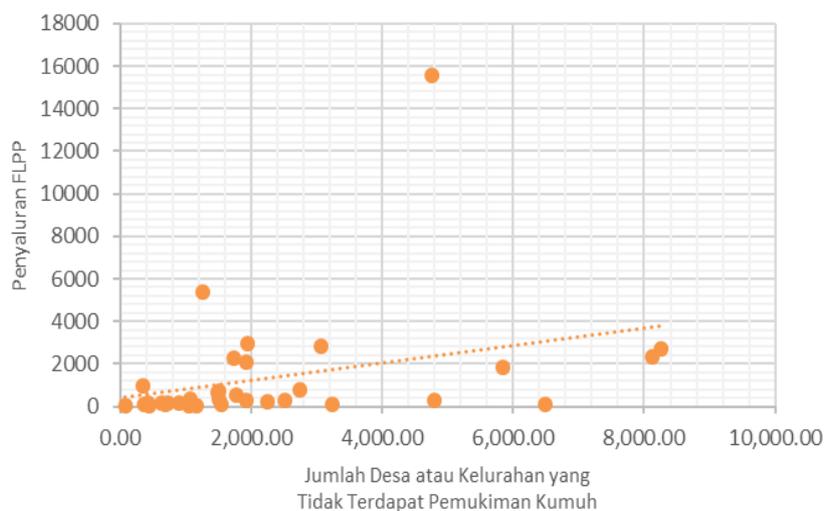
Sumber : Diolah Oleh Pusdatin



Gambar 6.13. Persentase Penyaluran FLPP menurut Pulau Besar Tahun 2013

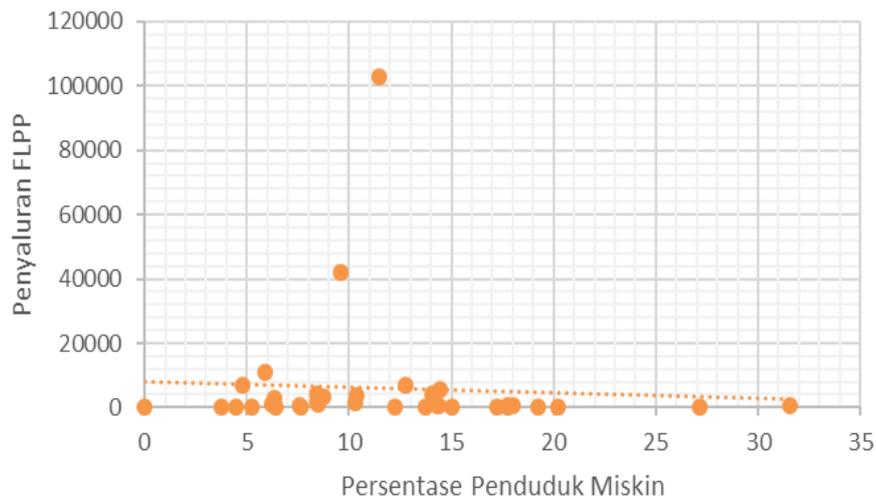
F. Korelasi

Tujuan dari FLPP yaitu memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam hal pembiayaan pemilikan rumah. Terdapat hubungan korelasi positif antara penyaluran FLPP dengan jumlah desa atau kelurahan yang tidak terdapat pemukiman kumuh tahun 2014 sebesar 0,32. Dari gambar 6.14. diketahui bahwa semakin banyak FLPP yang disalurkan, semakin tinggi pula jumlah desa atau kelurahan yang tidak terdapat pemukiman kumuh.



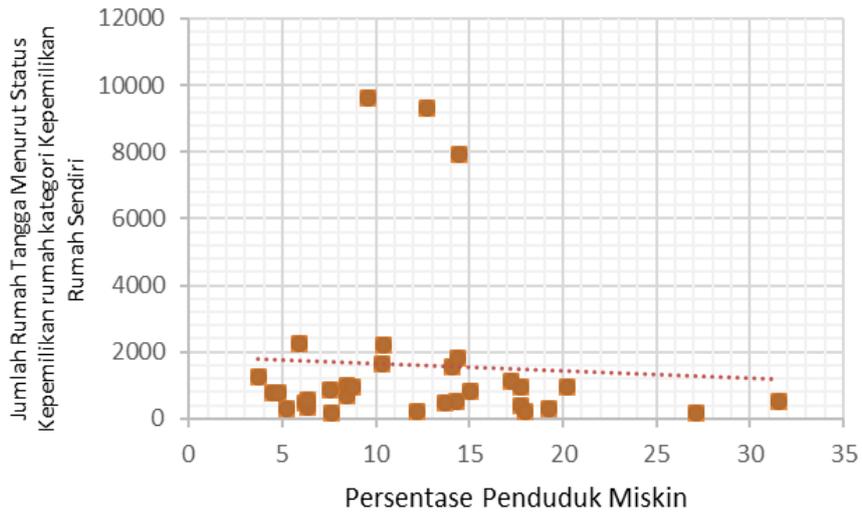
Gambar 6.14. Hubungan Penyaluran FLPP (unit) dan Jumlah Desa atau Kelurahan yang Tidak Terdapat Pemukiman Kumuh (Desa/Kelurahan) Tahun 2014

Sedangkan, antara penyaluran FLPP dan persentase penduduk miskin tahun 2013, terdapat hubungan korelasi negatif sebesar $-0,14$. Terdapat tren negatif antara penyaluran FLPP dan persentase penduduk miskin seperti pada Gambar 6.15.

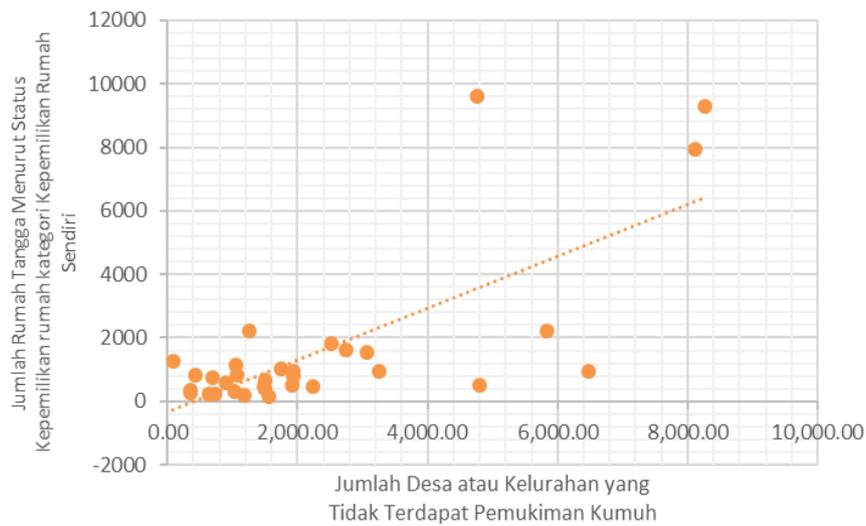


Gambar 6.15. Hubungan Penyaluran FLPP (unit) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2013

Terdapat hubungan negatif antara jumlah rumah tangga menurut status kepemilikan rumah kategori kepemilikan rumah sendiri dan persentase penduduk miskin tahun 2013 sebesar $-0,06$, terdapat pola tren negatif antara kepemilikan rumah sendiri dan persentase penduduk miskin tahun 2013 seperti pada Gambar 6.16. Sedangkan antara jumlah rumah tangga menurut status kepemilikan rumah kategori kepemilikan rumah sendiri dan jumlah desa atau kelurahan yang tidak terdapat pemukiman kumuh tahun 2014 terdapat hubungan korelasi positif sebesar $0,72$. Dapat diketahui dari Gambar 6.17. terdapat tren positif antara kepemilikan rumah sendiri dan jumlah desa atau kelurahan yang tidak terdapat pemukiman kumuh tahun 2014.

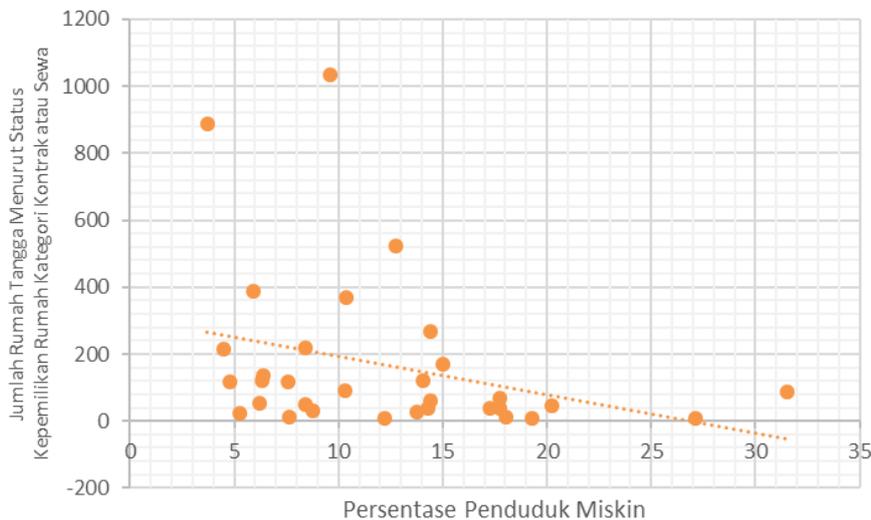


Gambar 6.16. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Rumah Sendiri (Ribu RT) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2013

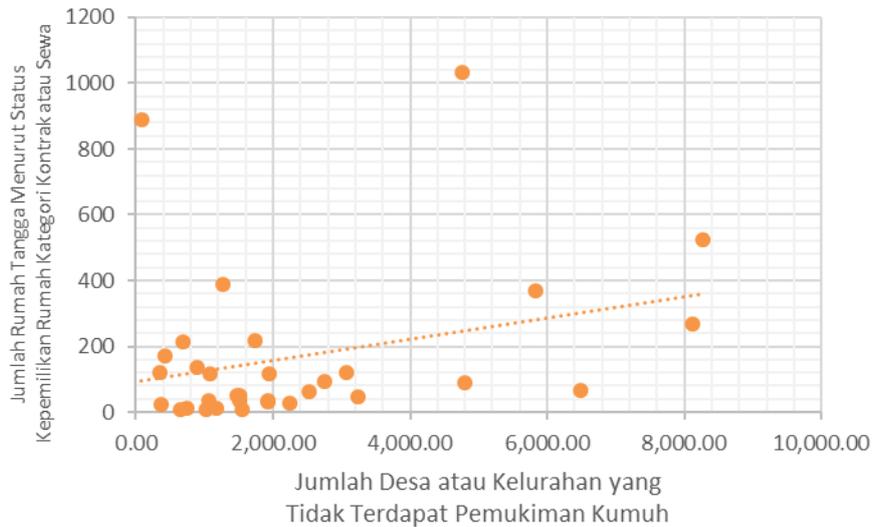


Gambar 6.17. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Rumah Sendiri (Ribu RT) dan Jumlah Desa atau Kelurahan yang Tidak Terdapat Pemukiman Kumuh (Desa/Kelurahan) Tahun 2014

Sedangkan pada jumlah rumah tangga menurut status kepemilikan rumah kategori kontrak atau sewa, terdapat hubungan korelasi negatif dengan persentase penduduk miskin sebesar $-0,31$ dan hubungan positif dengan jumlah desa atau kelurahan yang tidak terdapat pemukiman kumuh sebesar $0,29$. Terdapat tren negatif pada hubungan antara jumlah rumah tangga menurut status kepemilikan rumah kategori kontrak atau sewa dengan persentase penduduk miskin seperti pada Gambar 6.18. Sedangkan antara jumlah rumah tangga menurut status kepemilikan rumah kategori kontrak atau sewa dan jumlah desa atau kelurahan yang tidak terdapat pemukiman kumuh memiliki tren positif seperti pada Gambar 6.19.

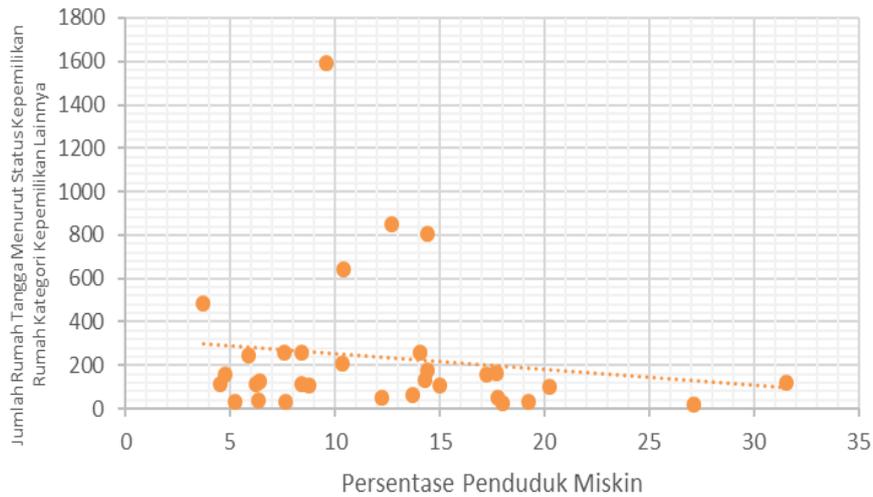


Gambar 6.18. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Kontrak atau Sewa (Ribuan RT) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2013

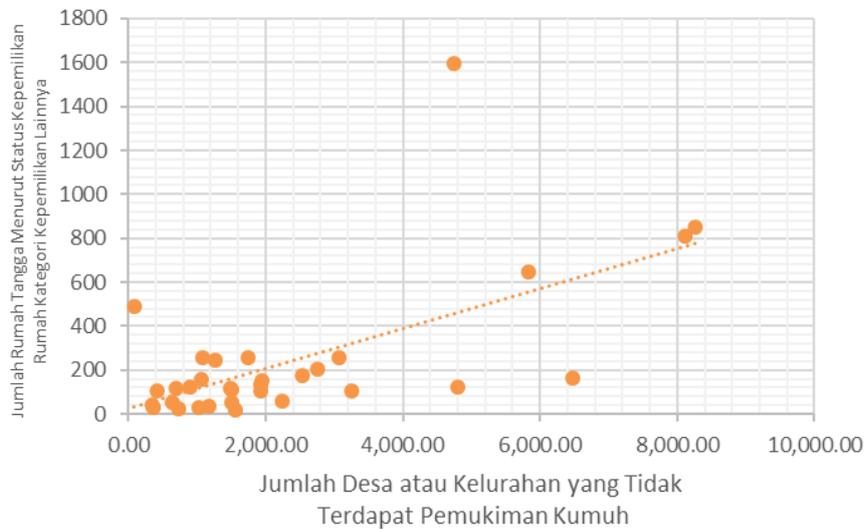


Gambar 6.19. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Kontrak atau Sewa (Ribuan RT) dan Jumlah Desa atau Kelurahan yang Tidak Terdapat Pemukiman Kumuh (Desa/Kelurahan) Tahun 2014

Pada jumlah rumah tangga menurut status kepemilikan rumah kategori kepemilikan lainnya, terdapat hubungan korelasi negatif sebesar $-0,15$ dengan persentase penduduk miskin, sedangkan dengan jumlah desa atau kelurahan yang tidak terdapat pemukiman kumuh terdapat hubungan korelasi positif sebesar $0,62$. Terdapat pula tren negatif antara jumlah rumah tangga menurut status kepemilikan rumah kategori kepemilikan lainnya dengan persentase penduduk miskin seperti pada Gambar 6.20. dan tren positif antara jumlah rumah tangga menurut status kepemilikan rumah kategori kepemilikan lainnya dengan jumlah desa atau kelurahan yang tidak terdapat pemukiman kumuh seperti pada Gambar 6.21.



Gambar 6.20. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Lainnya (Ribuan RT) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2013



Gambar 6.21. Hubungan Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kategori Kepemilikan Lainnya (Ribuan RT) dan Jumlah Desa atau Kelurahan yang Tidak Terdapat Pemukiman Kumuh (Desa/Kelurahan) Tahun 2014

BAB VII

STATISTIK SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PUPR DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PUPR

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, SDM menjadi salah satu faktor penentu karena berperan sebagai perencana, penyusun, pelaksana, hingga pemantau serta pengawas, yang dalam pelaksanaan tentunya juga melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan SDM di Kementerian PUPR perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan.

Dari sisi jumlah, pegawai di Kementerian PU (dalam hal ini adalah PNS dan CPNS) mengalami peningkatan di tahun 2010 ke 2011. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penerimaan pegawai secara *online* yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai baru. Namun pada tahun 2012 penerimaan pegawai baru dihentikan sementara waktu. Oleh karena, itu jumlah pegawai di tahun 2012 dan 2013 tidak terjadi peningkatan. Penerimaan pegawai secara langsung dimulai kembali pada tahun 2013. Kemudian di tahun 2015, terjadi perubahan pada struktur organisasi di Kementerian PU yang digabungkan dengan Kementerian Perumahan Rakyat, namun satu dari Ditjen di PU bergabung dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

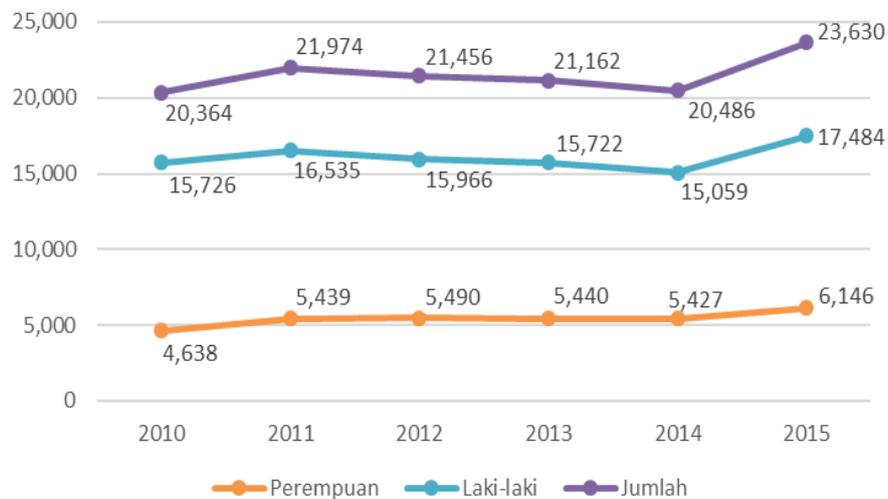
Sehingga di akhir tahun 2015, tercatat pegawai di Kementerian PUPR berjumlah 23.630 orang, baik yang bertugas di kantor pusat maupun balai serta satuan kerja di daerah. Jumlah tersebut terdiri dari 17.484 atau 73,99% laki-laki dan 6.146 atau 26,01% perempuan seperti terlihat pada Tabel 7.1. dan Gambar 7.1. di bawah ini.

Tabel 7.1. Perkembangan Jumlah dan Persentase SDM Kementerian PUPR
Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Pegawai			Persentase (%)	
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
2010	15.726	4.638	20.364	77,22	22,78
2011	16.535	5.439	21.974	75,25	24,75
2012	15.966	5.490	21.456	74,41	25,59
2013	15.722	5.440	21.162	74,29	25,71
2014	15.059	5.427	20.486	73,51	26,49
2015	17.484	6.146	23.630	73,99	26,01

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PUPR

Catatan : Data Tahun 2011 Status: 21 Juni 2011
Data Tahun 2012 Status: 14 Agustus 2012
Data Tahun 2013 Status: 01 April 2013
Data Tahun 2014 Status: 05 Sept 2014
Data Tahun 2015 Diperoleh Desember 2015



Gambar 7.1. Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PUPR Tahun 2010-2015

Penempatan pegawai Kementerian PUPR berbanding dengan kebutuhan beban kerja serta prioritas pada bidang tugas pelayanan teknis. Jumlah pegawai paling banyak berada di unit organisasi yang menjadi fokus kegiatan pembangunan Kementerian PUPR, yaitu Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya serta dua unit organisasi

hasil penggabungan dengan Kementerian Perumahan Rakyat, yaitu Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Perumahan.

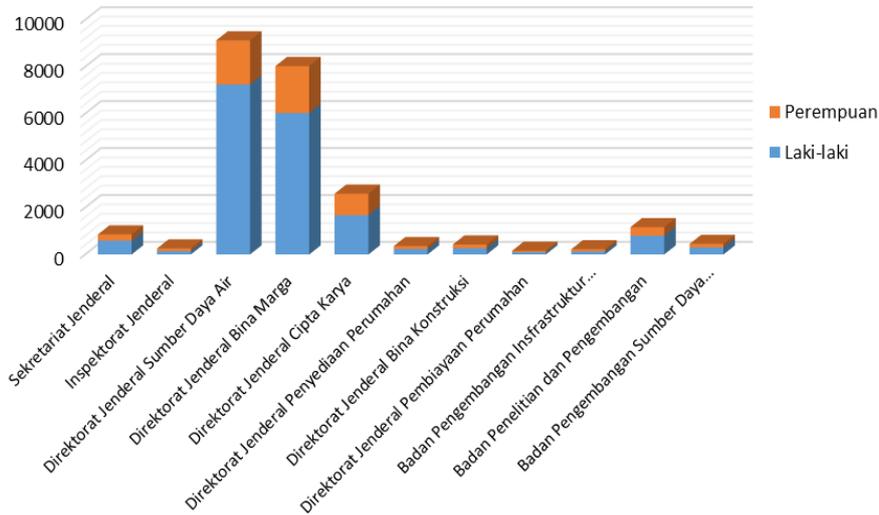
Jumlah pegawai pada masing-masing unit organisasi seperti terlihat pada Tabel 7.2. dari yang paling besar adalah Sumber Daya Air dengan 9.123 orang atau 38,61%, Bina Marga dengan 8.027 orang atau 33,97%, Cipta Karya dengan 2.590 orang atau 10,96% serta distribusi pegawai pada unit organisasi lainnya dapat dilihat pada Tabel 7.2.-7.3 dan Gambar 7.2.-7.3. di bawah ini.

Tabel 7.2. Jumlah SDM Kementerian PUPR Tahun 2015

Unit Organisasi	Jumlah Pegawai		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekretariat Jenderal	588	267	855
Inspektorat Jenderal	140	118	258
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	7.243	1.880	9.123
Direktorat Jenderal Bina Marga	6.026	2.001	8.027
Direktorat Jenderal Cipta Karya	1.673	917	2.590
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	232	125	357
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	266	160	426
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan	97	59	156
Badan Pengembangan Insfrastruktur Wilayah	125	98	223
Badan Penelitian dan Pengembangan	799	364	1.163
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	295	157	452
Kementerian PUPR	17.484	6.146	23.630

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PUPR

Catatan : Data Diperoleh Desember 2015



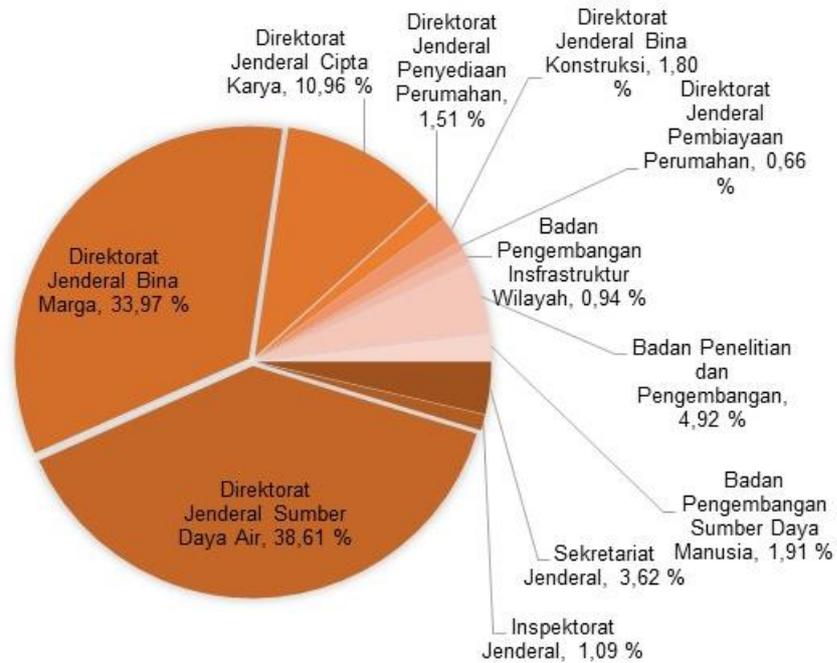
Gambar 7.2. Jumlah SDM Unit Organisasi Kementerian PUPR Tahun 2015

Tabel 7.3. Persentase SDM Kementerian PUPR Tahun 2015

Unit Organisasi	Persentase Pegawai		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekretariat Jenderal	2,49	1,13	3,62
Inspektorat Jenderal	0,59	0,50	1,09
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	30,65	7,96	38,61
Direktorat Jenderal Bina Marga	25,50	8,47	33,97
Direktorat Jenderal Cipta Karya	7,08	3,88	10,96
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	0,98	0,53	1,51
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1,13	0,68	1,80
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan	0,41	0,25	0,66
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	0,53	0,41	0,94
Badan Penelitian dan Pengembangan	3,38	1,54	4,92
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,25	0,66	1,91
Kementerian PUPR	73,99	26,01	100,00

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PUPR

Catatan : Data Diperoleh Desember 2015



Gambar 7.3. Persentase SDM Kementerian PUPR Tahun 2015

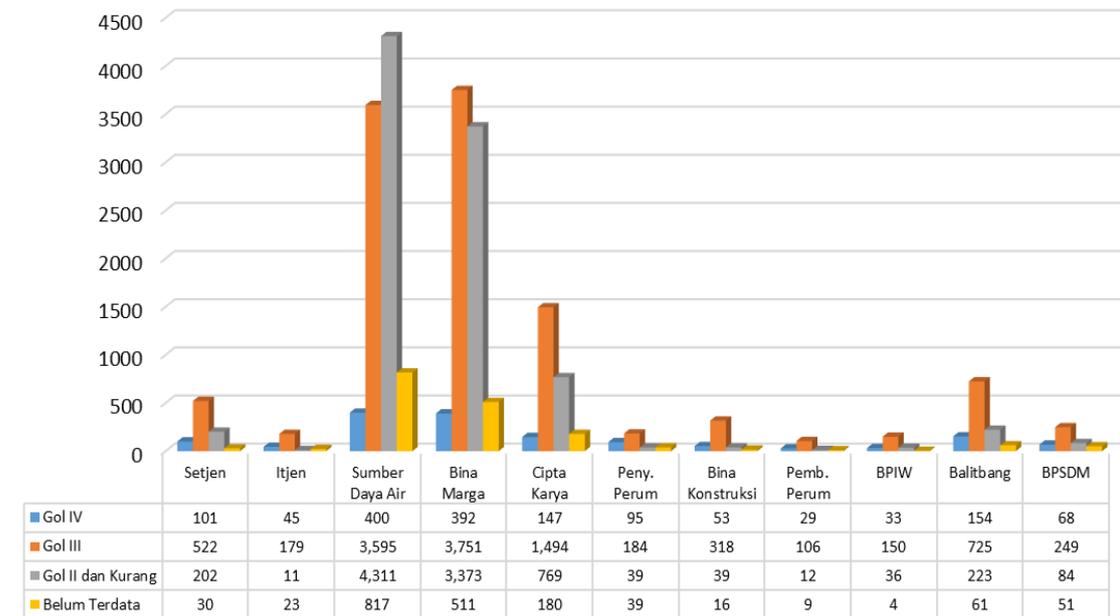
Dilihat dari golongan kepangkatan, jumlah pegawai Kementerian PUPR pada tahun 2015 yang sudah menjadi Golongan IV berjumlah 1.517 orang atau 6,42% dari seluruh jumlah pegawai. Kemudian yang termasuk dalam Golongan III ada sebanyak 11.273 orang atau 47,71%, serta Golongan II atau kurang sebanyak 9.099 orang atau 38,51%. Sisanya yaitu yang belum terdata sebanyak 1.741 atau 7,37%. Jumlah serta persentase pegawai Kementerian PUPR berdasarkan golongan kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 7.4.-7.5. serta Gambar 7.4. di bawah ini.

Tabel 7.4. Jumlah SDM Kementerian PUPR menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015

Unit Organisasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II dan Kurang		Belum Terdata		Jumlah						
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					
Sekretariat Jenderal	65	36	101	333	189	522	169	33	202	21	9	30	588	267	855
Inspektorat Jenderal	30	15	45	87	92	179	9	2	11	14	9	23	140	118	258
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	347	53	400	2.497	1.098	3.595	3.703	608	4.311	696	121	817	7.243	1.880	9.123
Direktorat Jenderal Bina Marga	355	37	392	2.615	1.136	3.751	2.688	685	3.373	368	143	511	6.026	2.001	8.027
Direktorat Jenderal Cipta Karya	114	33	147	846	648	1.494	584	185	769	129	51	180	1.673	917	2.590
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	69	26	95	110	74	184	33	6	39	20	19	39	232	125	357
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	42	11	53	184	134	318	26	13	39	14	2	16	266	160	426
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan	19	10	29	60	46	106	12	0	12	6	3	9	97	59	156
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	25	8	33	72	78	150	27	9	36	1	3	4	125	98	223
Badan Penelitian dan Pengembangan	109	45	154	457	268	725	181	42	223	52	9	61	799	364	1.163
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52	16	68	131	118	249	68	16	84	44	7	51	295	157	452
Kementerian PUPR	1.227	290	1.517	7.392	3.881	11.273	7.500	1.599	9.099	1.365	376	1.741	17.484	6.146	23.630

Sumber : Biro Kepegawaian dan Orjala, Kementerian PUPR

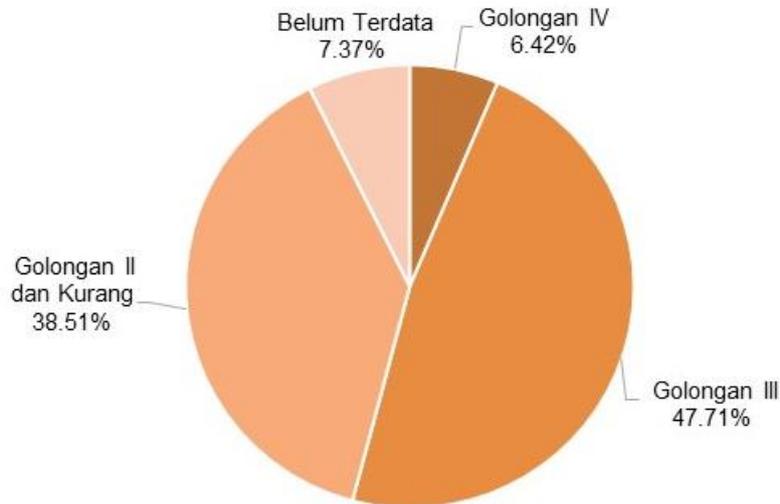
Catatan : Data Diperoleh Desember 2015



Gambar 7.4. Jumlah SDM Kementerian PUPR menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015

Tabel 7.5. Persentase SDM Kementerian PUPR menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015

Unit Organisasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II dan Kurang		Belum Terdata		Jumlah					
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
Sekretariat Jenderal	0,28	0,15	0,43	0,80	0,72	0,14	0,85	0,09	0,04	0,13	2,49	1,13	3,62	
Inspektorat Jenderal	0,13	0,06	0,19	0,37	0,39	0,76	0,04	0,01	0,05	0,06	0,10	0,59	1,09	
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1,47	0,22	1,69	10,57	4,65	15,21	15,67	2,57	18,24	2,95	0,51	3,46	30,65	7,96
Direktorat Jenderal Bina Marga	1,50	0,16	1,66	11,07	4,81	15,87	11,38	2,90	14,27	1,56	0,61	2,16	25,50	8,47
Direktorat Jenderal Cipta Karya	0,48	0,14	0,62	3,58	2,74	6,32	2,47	0,78	3,25	0,55	0,22	0,76	7,08	3,88
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	0,29	0,11	0,40	0,47	0,31	0,78	0,14	0,03	0,17	0,08	0,08	0,17	0,98	0,53
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	0,18	0,05	0,22	0,78	0,57	1,35	0,11	0,06	0,17	0,06	0,01	0,07	1,13	0,68
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan	0,08	0,04	0,12	0,25	0,19	0,45	0,05	0,00	0,05	0,03	0,01	0,04	0,41	0,25
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	0,11	0,03	0,14	0,30	0,33	0,63	0,11	0,04	0,15	0,00	0,01	0,02	0,53	0,41
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,46	0,19	0,65	1,93	1,13	3,07	0,77	0,18	0,94	0,22	0,04	0,26	3,38	1,54
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,22	0,07	0,29	0,55	0,50	1,05	0,29	0,07	0,36	0,19	0,03	0,22	1,25	0,66
Kementerian PUPR	5,19	1,23	6,42	31,28	16,42	47,71	31,74	6,77	38,51	5,78	1,59	7,37	73,99	26,01
Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PUPR														
Catatan : Data Diperoleh Desember 2015														



Gambar 7.5. Persentase SDM Kementerian PUPR menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015

Sehingga dari Gambar 7.5. dapat dilihat bahwa pegawai Kementerian PUPR pada tahun 2015 lebih banyak yang termasuk ke dalam Golongan III dengan persentase sebanyak 47,71 %, kemudian disusul oleh Golongan II atau kurang sebesar 38,51%.

B. Pengarusutamaan Gender

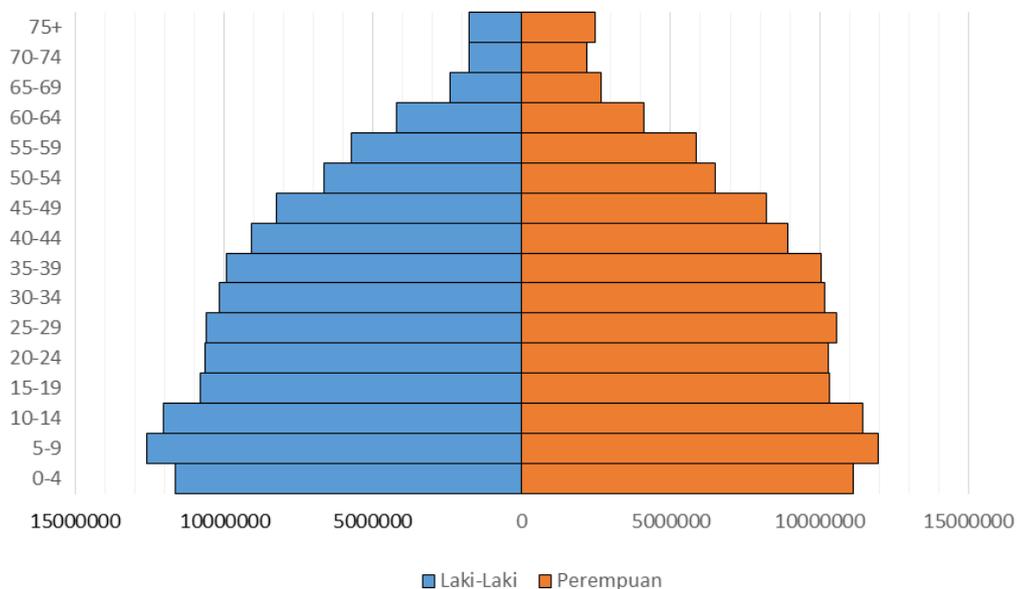
Demografi penduduk Indonesia dicirikan dengan piramida penduduk yang menyerupai limas. Hal ini menandakan bahwa penduduk Indonesia banyak berada di usia muda, termasuk usia produktif serta anak-anak dan sedikit penduduk berusia tua. Sementara dari segi persentase berdasarkan jenis kelamin, di tahun 2015 penduduk Indonesia terdiri dari 50,25% laki-laki dan 49,75% perempuan seperti yang tertera pada Gambar 7.6.

Tabel 7.6. Jumlah Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	11.642.753	11136.258	22.779.011

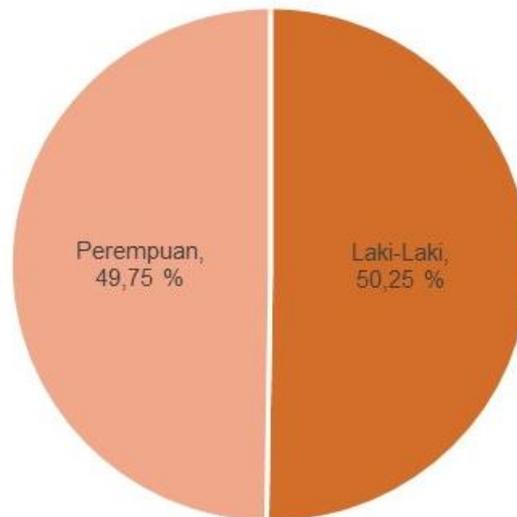
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
5-9	12.588.393	11.975.705	24.564.098
10-14	12.029.572	11.467.235	23.496.807
15-19	10.788.401	10.322.320	21.110.721
20-24	10.634.769	10.315.706	20.950.475
25-29	10.585.769	10.586.738	21.172.507
30-34	10.150.408	10.185.593	20.336.001
35-39	9.936.043	10.051.398	19.987.441
40-44	9.063.867	8.945.205	18.009.072
45-49	8.247.350	8.226.977	16.474.327
50-54	6.638.517	6.480.714	13.119.231
55-59	5.729.185	5.843.551	11.572.736
60-64	4.206.906	4.090.695	8.297.601
65-69	2.427.508	2.673.564	5.101.072
70-74	1.772.393	2.182.242	3.954.635
75+	1.790.055	2.466.354	4.256.409
Jumlah	128.231.889	126.950.255	255.182.144

Sumber : Data SUPAS 2015. BPS RI



Gambar 7.6. Jumlah Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan piramida penduduk Indonesia pada Gambar 7.6. di atas, dapat dilihat bahwa penduduk Indonesia lebih banyak berada pada kelompok usia muda yakni pada kelompok usia 5-9 tahun, dan disusul oleh kelompok usia 10-14 tahun. Kemudian penduduk yang berusia tua jumlahnya sangat sedikit terutama pada kelompok usia 65-69 tahun hingga lebih dari 75 tahun.



Gambar 7.7. Persentase Penduduk Indonesia menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

Pembangunan nasional pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, mereka yang memiliki kebutuhan khusus, lanjut usia, remaja putra dan putri, maupun anak usia dini. Apabila hasil pembangunan belum termanfaatkan secara setara dan adil oleh semua lapisan, maka hal tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan yang mengindikasikan masih besarnya perbedaan manfaat yang diterima.

Gender merupakan perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Sementara Kesetaraan gender adalah kesamaan

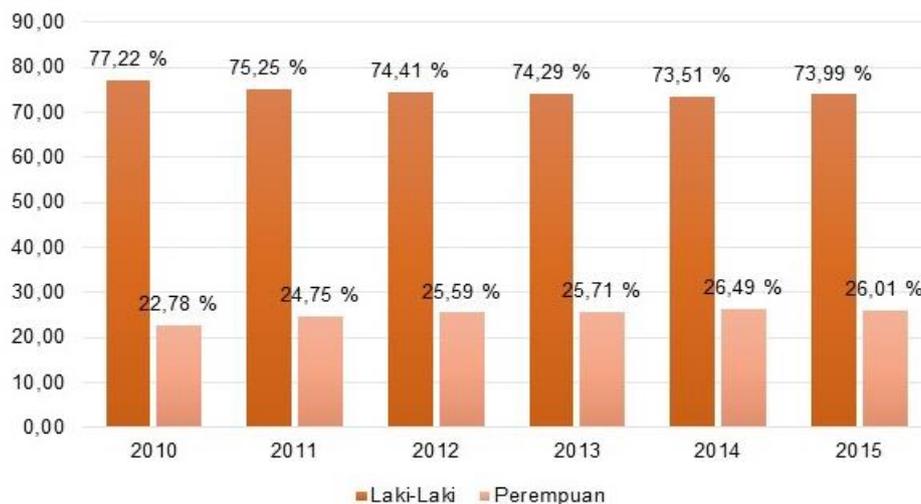
kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender menjadi satu dimensi dari khusus diperlakukan secara adil dan setara dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat (AKPM) yang sama atas pembangunan. Pengarusutamaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Secara umum tujuan PUG adalah memastikan perempuan, laki-laki, maupun yang berkebutuhan gender bukanlah suatu konsep untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan saja, namun mengakomodasi kebutuhan semua gender (baik laki-laki maupun perempuan) dan orang-orang dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak-anak maupun difabel.

Perlu dibentuk suatu mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, yaitu program yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan yang didukung dengan ketersediaan data terpilah. Hal ini dimaksudkan agar intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Sesuai dengan salah satu strategi dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR, pengarusutamaan gender telah menjadi komitmen Kementerian PUPR yang akan diterapkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan. Konsep setara dan adil harus menjadi pegangan setiap tahapan kegiatan dimana setara berarti seimbang antara laki-laki dan perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak, orang-orang dengan kebiasaan berbeda atau bkebutuhan khusus, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi). Adil dapat diartikan sebagai tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak, orang-orang dengan kebiasaan berbeda atau berkebutuhan khusus, orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi).

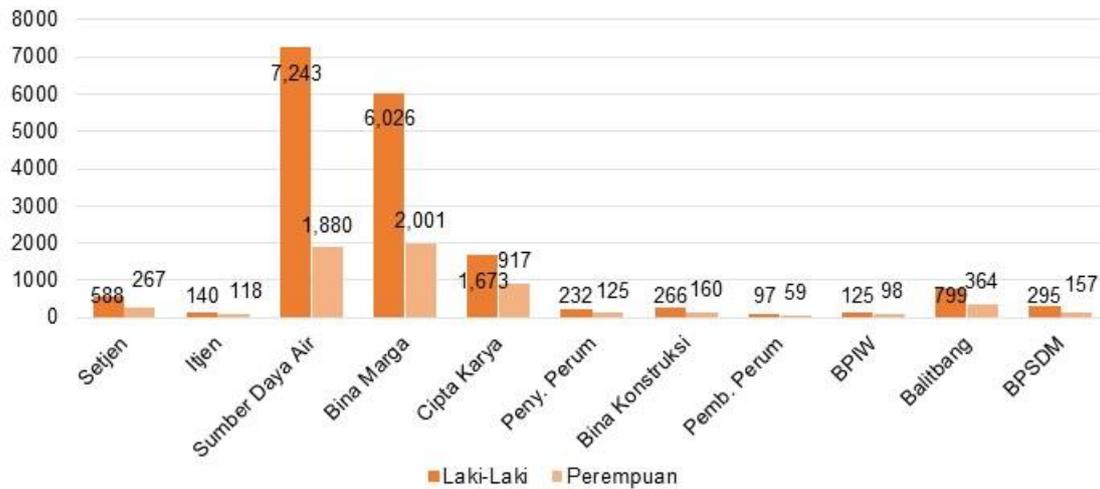
Keterlibatan perempuan dalam kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat salah satunya terlihat dari jumlah pegawai di Kementerian PUPR. Meskipun secara persentase jumlah pegawai perempuan di Kementerian PUPR hanya berkisar seperempat dari jumlah pegawai keseluruhan, namun hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat berkiprah dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Secara keseluruhan, persentase pegawai perempuan di Kementerian PUPR tahun 2015 tercatat 26,01%, sementara pegawai laki-laki 73,99% seperti yang terlihat pada Gambar 7.8. di bawah ini.



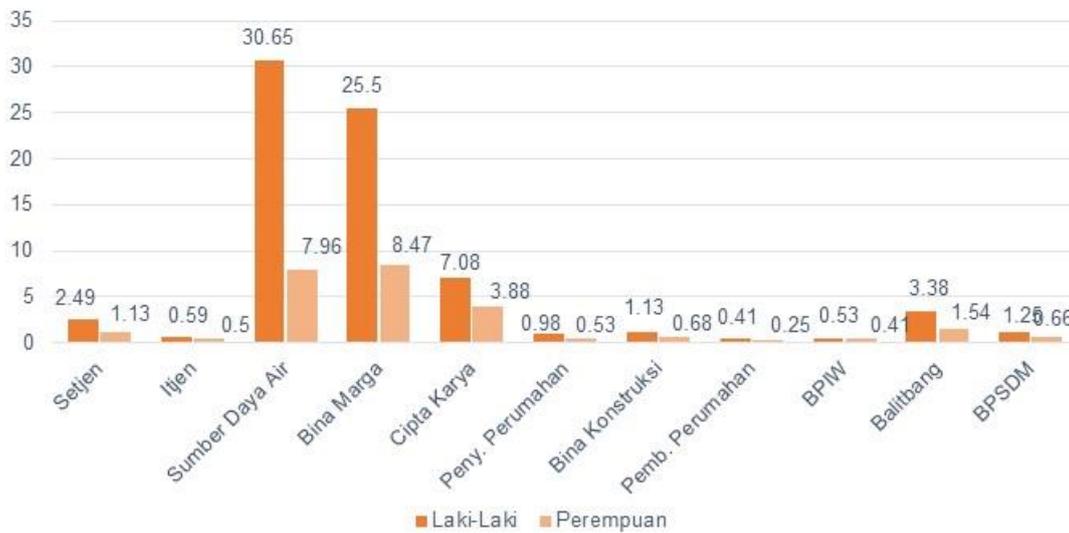
Gambar 7.8. Persentase SDM Kementerian PUPR Tahun 2010-2015

Jumlah pegawai perempuan pada unit organisasi mengikuti distribusi pegawai secara keseluruhan. Namun, pegawai perempuan paling banyak berada di Direktorat Jenderal Bina Marga dengan 8,47% atau sebanyak 2.001 orang, kemudian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan 7,96% atau 1.880 orang, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya 3,88% atau 917 orang. Sementara pegawai laki-laki paling banyak berturut-turut berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan 30,65% atau 7.243 orang, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan 25,50% atau 6.026 orang, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan 7,08% atau 1.673 orang. Jumlah dan persentase pegawai Kementrian

PUPR berdasarkan jenis kelamin dan unit organisasi pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 7.9. dan 7.10. di bawah ini.

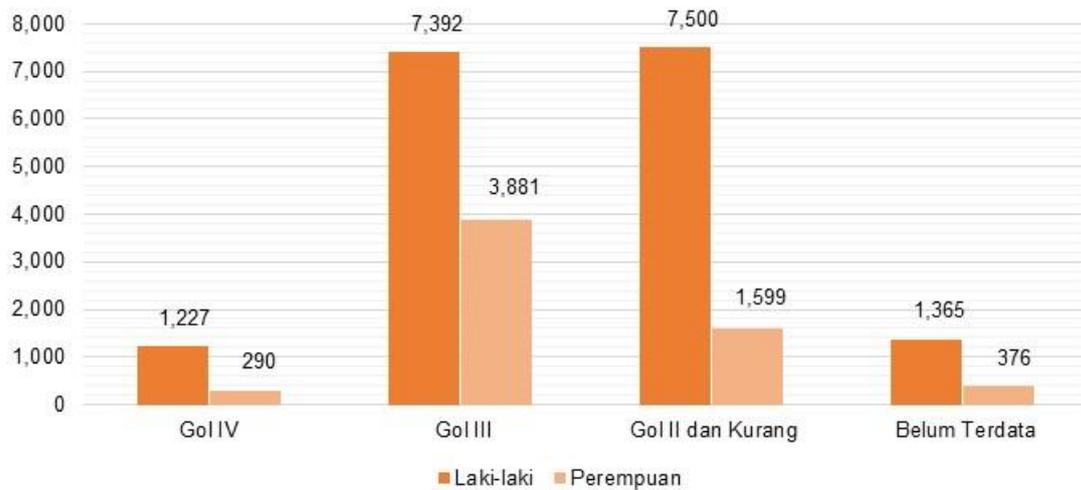


Gambar 7.9. Jumlah SDM Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2015

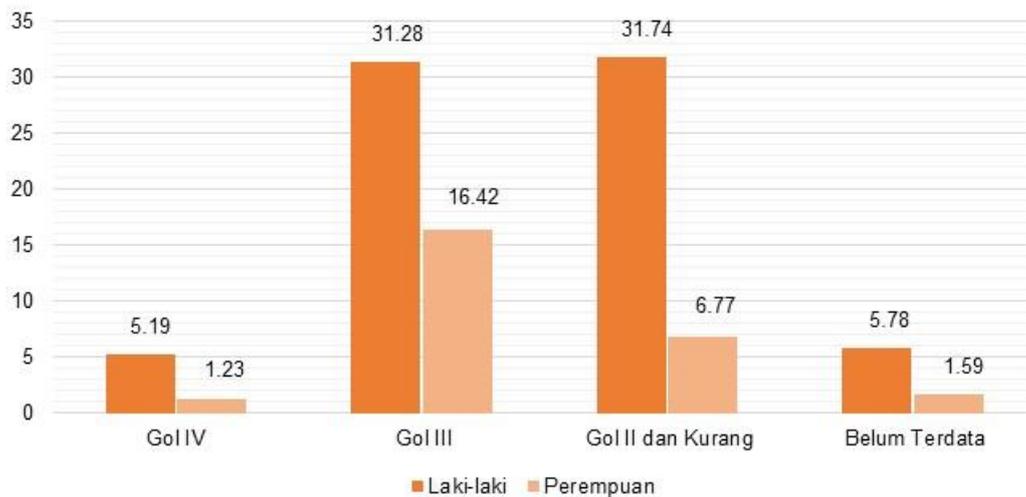


Gambar 7.10. Persentase SDM Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2015

Apabila dilihat dari tingkat golongan kepangkatan, pegawai perempuan di Kementerian PUPR pada Tahun 2015 yang sudah masuk Golongan IV ada sebanyak 290 orang atau 1,23%; Golongan III sebanyak 3.881 orang atau 16,42%; serta Golongan II atau kurang sebanyak 1.599 orang atau 6,77%.



Gambar 7.11. Jumlah SDM Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Golongan Kepangkatan Tahun 2015



Gambar 7.12. Persentase SDM Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Golongan Kepangkatan Tahun 2015

BAB VIII PENUTUP

Dalam rangka menyebarluaskan data dan informasi hasil pembangunan bidang PUPR, Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR) dapat digunakan sebagai salah satu dukungan data dan informasi dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun berbagai kebijakan program pembangunan. BIS-PUPR diharapkan juga dapat melengkapi serta memberikan data dan informasi bidang PUPR tingkat nasional dalam sajian yang lebih mudah untuk digunakan oleh *stakeholder* dan masyarakat umum.

Rintisan BIS-PUPR dimulai pada tahun 2003 dengan nama Buku Penyediaan Informasi Statistik Prasarana Kimpraswil. Pada tahun 2006 BIS-PU berganti nama menjadi Buku Induk Kestatistikan dan pada tahun 2007 menjadi Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum. Di tahun 2012, digunakan nama Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU) yang dibuat dengan format yang berbeda dalam hal penekanan pada informasi mengenai objek hasil pembangunan infrastruktur ke-PU-an beserta beberapa dokumentasinya. Kemudian di tahun 2013 dan 2014 BIS-PU dibuat dengan format data agregat menurut provinsi dan diupayakan urut beberapa tahun. Pada tahun 2015, dikarenakan terjadi perubahan struktur organisasi pada tubuh Kementerian PU, maka BIS-PU juga menyesuaikan dengan organisasi baru dalam hal nama dan cakupan informasi di dalamnya sehingga menjadi Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR). Selain dalam format buku, informasi dalam BIS-PUPR juga dapat dilihat dalam format digital *e-book* melalui media *website* PU-net.

Pusdatin telah berupaya maksimal dalam menyediakan data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pengembangan sistem informasi guna mendukung manajemen Kementerian PUPR untuk tingkat nasional secara lengkap.

Namun demikian, upaya tersebut masih dirasakan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang senantiasa dinamis keragaman jenisnya dan meningkat jumlah pengguna informasinya.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan data dan informasi mengenai infrastruktur PUPR di tingkat nasional dapat tersedia dengan lebih terstruktur, lengkap dan akurat sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, baik instansi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, mahasiswa, maupun masyarakat umum untuk keperluan dukungan dan referensi data dan informasi.

Lebih jauh, dengan diterbitkannya BIS-PUPR ini diharapkan dapat terjadi peningkatan kerjasama antar unit kerja di dalam dan di luar lingkungan Kementerian PUPR, sehingga jaringan kerjasama dalam pertukaran data dan informasi berjalan secara mutual dan dapat saling melengkapi untuk dapat digunakan sebagai masukan kegiatan dan dapat menghasilkan *outcome* yang bermanfaat dalam rangkaian dukungan informasi bagi pembangunan nasional.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (PUSDATIN)**

